



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 564 /ORG TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa sesuai ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, bahwa pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 53);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

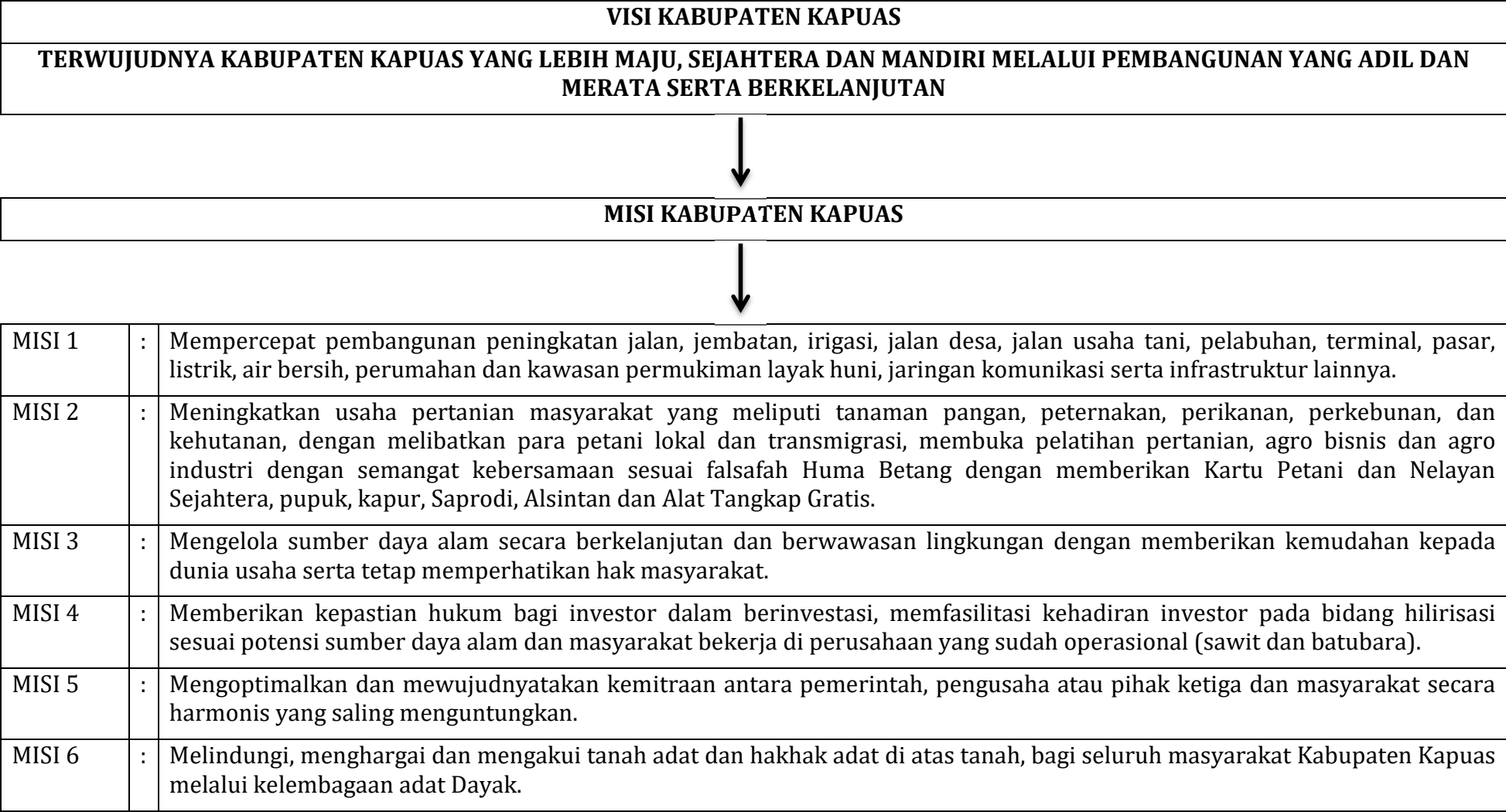
Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Visi misi yang telah ditetapkan agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
 - b. merupakan gambaran seluruh aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- KETIGA** : Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan rincian sebagai berikut:
- a. program sasaran dan tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Pemerintah Kabupaten Kapuas mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten periode Tahun 2018-2023;
 - b. tahapan penyusunan dengan mendata Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Kapuas 2018-2023;
 - c. melaksanakan Identifikasi Peta Proses untuk mengelompokkan Sasaran, jenis proses utama/pendukung/lainnya; dan
 - d. tabel identifikasi peta proses, identifikasi peta sub proses dan Identifikasi peta lintas fungsi serta peta relasi.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Desember 2022


BUPATI KAPUAS,
EEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 564 /ORG TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

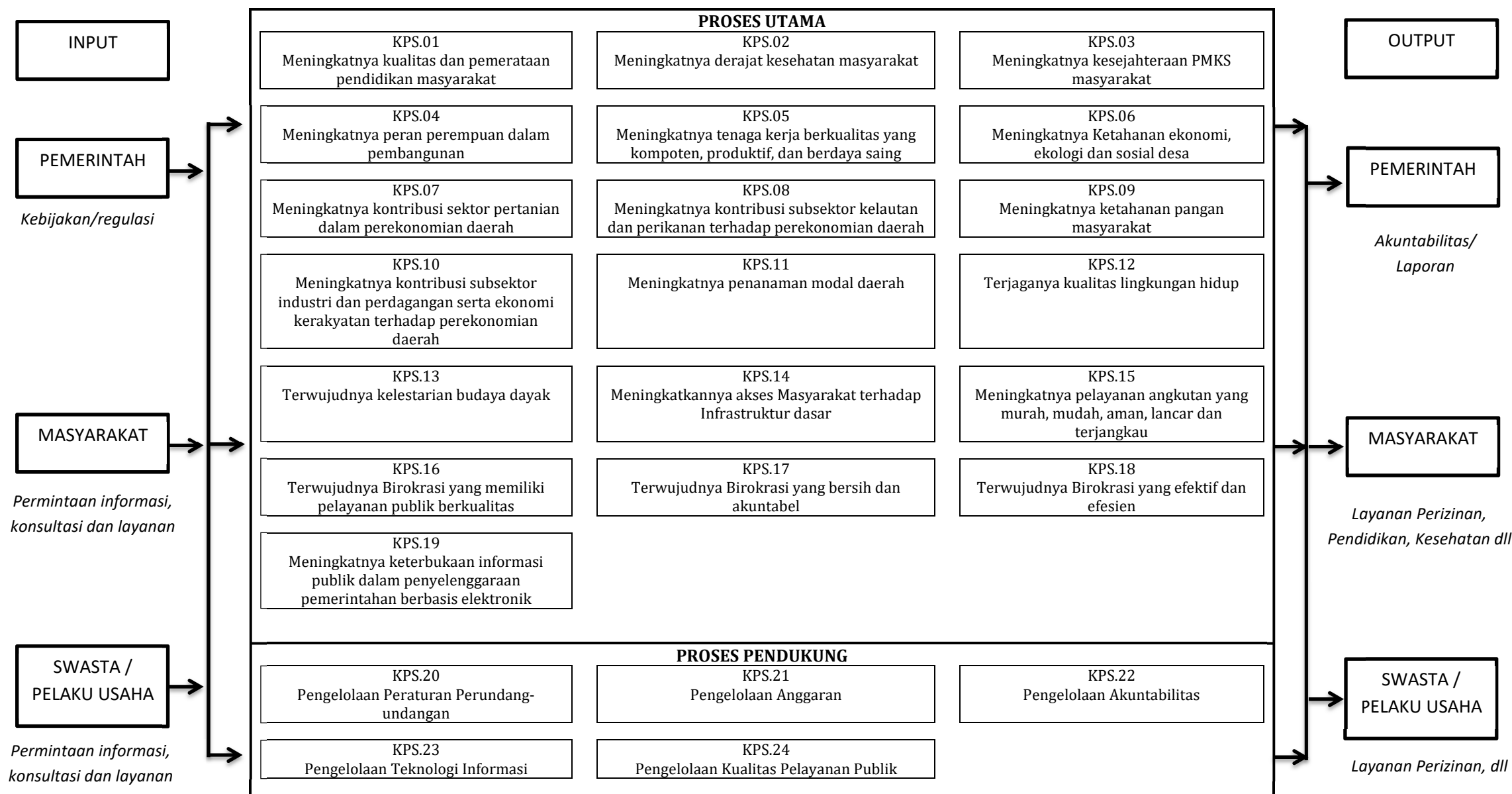


MISI 7	:	Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
MISI 8	:	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas.
MISI 9	:	Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
MISI 10	:	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS.
MISI 11	:	Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
MISI 12	:	Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
MISI 13	:	Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
MISI 14	:	Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru-guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

IDENTIFIKASI KODE PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

No	Nama Peta Proses	Jenis Proses Utama/Penduk ung	Kode Peta Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Utama	KPS.01
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Utama	KPS.02
3	Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat	Utama	KPS.03
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Utama	KPS.04
5	Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing	Utama	KPS.05
6	Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Utama	KPS.06
7	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Utama	KPS.07
8	Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Utama	KPS.08
9	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Utama	KPS.09
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan serta ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah	Utama	KPS.10
11	Meningkatnya penanaman modal daerah	Utama	KPS.11
12	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Utama	KPS.12
13	Terwujudnya kelestarian budaya dayak	Utama	KPS.13
14	Meningkatkannya akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dasar	Utama	KPS.14
15	Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman, lancar dan terjangkau	Utama	KPS.15
16	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Utama	KPS.16
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Utama	KPS.17
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efesien	Utama	KPS.18
19	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Utama	KPS.19
20	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	Pendukung	KPS.20
21	Pengelolaan Anggaran	Pendukung	KPS.21
22	Pengelolaan Akuntabilitas	Pendukung	KPS.22
23	Pengelolaan Teknologi Informasi	Pendukung	KPS.23
24	Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pendukung	KPS.24

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS



IDENTIFIKASI KODE PETA SUB PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KPS.01 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat						
1	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	KPS.01.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	KPS.01.01.CFM.01	Dinas Pendidikan
				Pengadaan pakaian seragam sekolah	KPS.01.01.CFM.02	Dinas Pendidikan
				Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	KPS.01.01.CFM.03	Dinas Pendidikan
				Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	KPS.01.01.CFM.04	Dinas Pendidikan
				Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	KPS.01.01.CFM.05	Dinas Pendidikan
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KPS.01.01.CFM.06	Dinas Pendidikan
				Ujian dan try out tingkat SD/MI dan SMP/MTs	KPS.01.01.CFM.07	Dinas Pendidikan
				Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan mutu sekolah (DAK SD/SMP)	KPS.01.01.CFM.08	Dinas Pendidikan
				Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD (BOS-NAS)	KPS.01.01.CFM.09	Dinas Pendidikan
				Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP/MTS dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP (BOS-NAS)	KPS.01.01.CFM.10	Dinas Pendidikan
2	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	KPS.01.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	KPS.01.02.CFM.01	Dinas Pendidikan
				Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	KPS.01.02.CFM.02	Dinas Pendidikan
				Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	KPS.01.02.CFM.03	Dinas Pendidikan
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KPS.01.02.CFM.04	Dinas Pendidikan
3	Manajemen Pelayanan Pendidikan	KPS.01.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas,	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	KPS.01.03.CFM.01	Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	KPS.01.03.CFM.02	Dinas Pendidikan

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan Dewan Pendidikan	KPS.01.03.CFM.03	Dinas Pendidikan
				Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	KPS.01.03.CFM.04	Dinas Pendidikan
4	Pendidikan Anak Usia Dini	KPS.01.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	KPS.01.04.CFM.01	Dinas Pendidikan
				Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	KPS.01.04.CFM.02	Dinas Pendidikan
				Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	KPS.01.04.CFM.03	Dinas Pendidikan
5	Pendidikan Non Formal	KPS.01.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan pendidikan keaksaraan	KPS.01.05.CFM.01	Dinas Pendidikan
				Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	KPS.01.05.CFM.02	Dinas Pendidikan
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KPS.01.05.CFM.03	Dinas Pendidikan
KPS.02 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
1	Pengadaan, peningkatan dan Pemeliharaansarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	KPS.02.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan rumah sakit	KPS.02.01.CFM.01	Dinas Kesehatan
2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	KPS.02.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	KPS.02.05.CFM.05	Dinas Kesehatan
				Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	KPS.02.05.CFM.06	Dinas Kesehatan
3	Perbaikan Gizi Masyarakat	KPS.02.06	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan,	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	KPS.02.06.CFM.01	Dinas Kesehatan
				Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian	KPS.02.06.CFM.02	Dinas Kesehatan

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	keluarga sadar gizi		
KPS.03 Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat						
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	KPS.03.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	KPS.03.01.CFM.01	Dinas Sosial
				Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	KPS.03.01.CFM.02	Dinas Sosial
				Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	KPS.03.01.CFM.03	Dinas Sosial
				Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	KPS.03.01.CFM.04	Dinas Sosial
				Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lansia.	KPS.03.01.CFM.05	Dinas Sosial
2	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	KPS.03.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan operasi katarak	KPS.03.02.CFM.01	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
				Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	KPS.03.02.CFM.02	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	KPS.03.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	KPS.03.03.CFM.01	Dinas Sosial
				Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	KPS.03.03.CFM.02	Dinas Sosial
KPS.04 Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan						

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	KPS.04.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	KPS.04.01.CFM.01	Dinas P3AP2KB
2	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	KPS.04.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	KPS.04.02.CFM.01	Dinas P3AP2KB
3	Keluarga Berencana	KPS.04.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan KIE	KPS.04.03.CFM.01	Dinas P3AP2KB
				Pembinaan Keluarga Berencana	KPS.04.03.CFM.02	Dinas P3AP2KB
				Peningkatan Kinerja Balai Penyuluh KB	KPS.04.03.CFM.03	Dinas P3AP2KB
4	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KPS.04.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	KPS.04.04.CFM.01	Dinas P3AP2KB
				Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	KPS.04.04.CFM.02	Dinas P3AP2KB
				Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	KPS.04.04.CFM.03	Dinas P3AP2KB
KPS.05 Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing						
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	KPS.05.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	KPS.05.01.CFM.01	Dinas Tenaga Kerja

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kualitas Pelayanan Publik			
2	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	KPS.05.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	KPS.05.02.CFM.02	Dinas Tenaga Kerja
				Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja	KPS.05.02.CFM.03	Dinas Tenaga Kerja
				Penyebarluasan informasi, pemasaran dan sosialisasi BLK	KPS.05.02.CFM.04	Dinas Tenaga Kerja
				Pembinaan LPK/LPKS	KPS.05.02.CFM.07	Dinas Tenaga Kerja
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	KPS.05.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	KPS.05.03.CFM.01	Dinas Tenaga Kerja
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	KPS.05.03.CFM.02	Dinas Tenaga Kerja
				Penyusunan dan penetapan upah minimum sektoral kabupaten	KPS.05.03.CFM.03	Dinas Tenaga Kerja
KPS.06 Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa						
1	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	KPS.06.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	KPS.06.01.CFM.01	Dinas PMD
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KPS.06.01.CFM.02	Dinas PMD
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	KPS.06.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	KPS.06.02.CFM.01	Dinas PMD
				Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	KPS.06.02.CFM.02	Dinas PMD
				Pelayanan sosial dasar dan pembangunan partisipatif	KPS.06.02.CFM.03	Dinas PMD
				Pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna	KPS.06.02.CFM.04	Dinas PMD
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	KPS.06.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	KPS.06.03.CFM.01	Dinas PMD
				Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	KPS.06.03.CFM.02	Dinas PMD
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KPS.06.03.CFM.03	Dinas PMD

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik			
4	Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	KPS.06.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan peraturan-peraturan tentang pemerintah desa	KPS.06.04.CFM.01	Dinas PMD
				Penataan dan perkembangan desa	KPS.06.04.CFM.02	Dinas PMD
5	Peningkatan Pemberdayaan Desa	KPS.06.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan kapasitas pelestarian lingkungan	KPS.06.05.CFM.01	Dinas PMD
				Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Kawasan Perdesaan	KPS.06.05.CFM.02	Dinas PMD
6	Penanaman pohon pada lahan diluar kawasan (DBH-DR)	KPS.06.06	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan penanaman (Sisa DBH SDA DR)	KPS.06.06.CFM.01	Dinas Lingkungan Hidup
KPS.07 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah						
1	Agribisnis Pertanian	KPS.07.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	KPS.07.01.CFM.01	Dinas Pertanian
				Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	KPS.07.01.CFM.02	Dinas Pertanian
				Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	KPS.07.01.CFM.03	Dinas Pertanian
				Pengembangan pengolahan hasil peternakan	KPS.07.01.CFM.04	Dinas Pertanian
				Pembiayaan dan investasi pertanian	KPS.07.01.CFM.05	Dinas Pertanian
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	KPS.07.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran,	Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	KPS.07.02.CFM.01	Dinas Pertanian
				Pemanfaatan Lahan Pekarangan	KPS.07.02.CFM.02	Dinas Pertanian

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Perlindungan Tanaman Hortikultura	KPS.07.02.CFM.03	Dinas Pertanian
				Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	KPS.07.02.CFM.04	Dinas Pertanian
3	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	KPS.07.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	KPS.07.03.CFM.01	Dinas Pertanian
				Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	KPS.07.03.CFM.02	Dinas Pertanian
				Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	KPS.07.03.CFM.03	Dinas Pertanian
				Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (DAK)	KPS.07.03.CFM.04	Dinas Pertanian
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	KPS.07.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	KPS.07.04.CFM.01	Dinas Pertanian
				Mekanisasi Pertanian	KPS.07.04.CFM.02	Dinas Pertanian
				Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air	KPS.07.04.CFM.03	Dinas Pertanian
				Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air (DAK)	KPS.07.04.CFM.04	Dinas Pertanian
KPS.08 Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah						
1	Pengembangan Perikanan Tangkap	KPS.08.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	KPS.08.01.CFM.01	Dinas Perikanan
				Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	KPS.08.01.CFM.02	Dinas Perikanan
				Pengendalian sumber daya ikan dan perlindungan nelayan	KPS.08.01.CFM.03	Dinas Perikanan
2	Pengelolaan Usaha Perikanan	KPS.08.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan pengolahan hasil perikanan	KPS.08.02.CFM.01	Dinas Perikanan
				Promosi dan ekspose hasil perikanan	KPS.08.02.CFM.02	Dinas Perikanan
				Pembinaan usaha perikanan	KPS.08.02.CFM.03	Dinas Perikanan
				Pengelolaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan	KPS.08.02.CFM.04	Dinas Perikanan

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KPS.09 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat						
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	KPS.09.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan Indeks Pertanaman Tanaman Pangan	KPS.09.01.CFM.01	Dinas Pertanian
				Pengembangan Tanaman Pangan Pada Lahan Kering	KPS.09.01.CFM.02	Dinas Pertanian
				Perlindungan tanaman pangan	KPS.09.01.CFM.03	Dinas Pertanian
				Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan	KPS.09.01.CFM.04	Dinas Pertanian
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	KPS.09.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	KPS.09.02.CFM.01	Dinas Pertanian
				Perlindungan Tanaman Perkebunan	KPS.09.02.CFM.02	Dinas Pertanian
				Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan	KPS.09.02.CFM.03	Dinas Pertanian
3	Peningkatan kemampuan teknologi industri	KPS.09.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu Hingga Hilir	KPS.09.04.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
KPS.10 Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan serta ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah						
1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	KPS.10.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	KPS.10.01.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Kebijakan pembangunan perdagangan	KPS.10.01.CFM.02	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Pengembangan Promosi Ekspor	KPS.10.01.CFM.03	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	KPS.10.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran,	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	KPS.10.02.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	KPS.10.02.CFM.02	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	KPS.10.02.CFM.03	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	KPS.10.02.CFM.04	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)	KPS.10.02.CFM.05	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
3	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	KPS.10.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	KPS.10.03.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	KPS.10.03.CFM.02	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	KPS.10.03.CFM.03	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
4	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	KPS.10.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan sarana promosi hasil produksi	KPS.10.04.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi	KPS.10.04.CFM.02	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
5	Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	KPS.10.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	KPS.10.05.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
				Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	KPS.10.05.CFM.02	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	KPS.10.06	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	KPS.10.06.CFM.01	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
KPS.11 Meningkatnya penanaman modal daerah						
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	KPS.11.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pameran investasi	KPS.11.01.CFM.01	Dinas PMPTSP
KPS.12 Terjaganya kualitas lingkungan hidup						
1	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	KPS.12.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengendalian Kebersihan Kota	KPS.12.01.CFM.01	Dinas PUPRPKPP
2	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	KPS.12.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penilaian Kota Sehat/Adipura	KPS.12.02.CFM.01	Dinas Lingkungan Hidup
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	KPS.12.02.CFM.02	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	KPS.12.02.CFM.03	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	KPS.12.02.CFM.04	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengkajian dampak lingkungan	KPS.12.02.CFM.05	Dinas Lingkungan Hidup
3	Perlindungan dan	KPS.12.03	Pengelolaan Peraturan	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	KPS.12.03.CFM.01	Dinas Lingkungan

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	konservasi sumber daya alam		Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik			Hidup
4	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (DBH-DR)	KPS.12.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembentukan dan pembinaan <i>brigade</i> pengendalian kebakaran hutan (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.01	Dinas Lingkungan Hidup
				Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.02	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.03	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.04	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembuatan, Penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta dan sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.05	Dinas Lingkungan Hidup
				Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.06	Dinas Lingkungan Hidup
				Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.07	Dinas Lingkungan Hidup
				Pelatihan/pembekalan/ <i>inhousetraining</i> /penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KPS.12.04.CFM.08	Dinas Lingkungan Hidup
5	Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan DTA, sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah (DBH DR)	KPS.12.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan	Penanaman bambu di kanan kiri sungai (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.05.CFM.01	Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kualitas Pelayanan Publik			
KPS.13 Terwujudnya kelestarian budaya dayak						
1	Pengembangan Nilai Budaya	KPS.13.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	KPS.13.01.CFM.01	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	KPS.13.01.CFM.02	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Pengelolaan Keragaman Budaya	KPS.13.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	KPS.13.02.CFM.01	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Pengelolaan Kekayaan Budaya	KPS.13.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	KPS.13.03.CFM.01	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Pengelolaan dan pelestarian warisan budaya	KPS.13.03.CFM.02	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Seminar/sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah	KPS.13.03.CFM.03	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
KPS.14 Meningkatkan akses Masyarakat terhadap Infrastruktur dasar						
1	Pengembangan Perumahan	KPS.14.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	KPS.14.01.CFM.01	Dinas PUPRPKPP
				Perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	KPS.14.01.CFM.02	Dinas PUPRPKPP
				Perencanaan pembangunan perumahan	KPS.14.01.CFM.03	Dinas PUPRPKPP
				Monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan perumahan	KPS.14.01.CFM.04	Dinas PUPRPKPP
2	Peningkatan Kerjasama	KPS.14.03	Pengelolaan Peraturan	Kerjasama antar daerah dalam penyediaan	KPS.14.03.CFM.01	Sekretariat Daerah

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Antar Pemerintah Daerah		Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	pelayanan publik		(pemerintahan)
3	Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan Energi dan sumber daya mineral	KPS.14.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	KPS.14.04.CFM.01	Sekretariat Daerah (Perekonomian dan SDA)
				Pemanfaatan gas tambang dan minyak	KPS.14.04.CFM.02	Sekretariat Daerah (Perekonomian dan SDA)
KPS.15 Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman, lancar dan terjangkau						
1	Peningkatan/Pembangunan Jalan	KPS.15.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan/pembangunan jalan	KPS.15.01.CFM.01	Dinas PUPRPKPP
2	Peningkatan/Pembangunan Jembatan	KPS.15.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan/pembangunan jembatan	KPS.15.02.CFM.01	Dinas PUPRPKPP
3	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	KPS.15.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan jalan dan jembatan	KPS.15.03.CFM.01	Dinas PUPRPKPP

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	KPS.15.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	KPS.15.04.CFM.01	Dinas Perhubungan
				Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	KPS.15.04.CFM.02	Dinas Perhubungan
				Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	KPS.15.04.CFM.03	Dinas Perhubungan
				Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	KPS.15.04.CFM.04	Dinas Perhubungan
				Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	KPS.15.04.CFM.05	Dinas Perhubungan
5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	KPS.15.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	KPS.15.05.CFM.01	Dinas Perhubungan
				Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	KPS.15.05.CFM.02	Dinas Perhubungan
				Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	KPS.15.05.CFM.03	Dinas Perhubungan
				Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	KPS.15.05.CFM.04	Dinas Perhubungan
				Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	KPS.15.05.CFM.05	Dinas Perhubungan
				Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	KPS.15.05.CFM.06	Dinas Perhubungan
				Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	KPS.15.05.CFM.07	Dinas Perhubungan
6	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	KPS.15.06	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	KPS.15.06.CFM.01	Dinas Perhubungan
7	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	KPS.15.07	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas,	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	KPS.15.07.CFM.01	Dinas Perhubungan
				Pengadaan marka jalan	KPS.15.07.CFM.02	Dinas Perhubungan

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik			
KPS.16 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas						
1	Pengembangan Administrasi Pelayanan	KPS.16.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelatihan budaya pelayanan prima	KPS.16.01.CFM.01	Dinas PMPTSP
				Melakukan pengembangan standar pelayanan perijinan	KPS.16.01.CFM.02	Dinas PMPTSP
2	Administrasi pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	KPS.16.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan dan keterpautan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan P3APKB	KPS.16.02.CFM.01	Sekretariat Daerah (Kesra)
				Penguatan manajemen tim pembina UKS/M	KPS.16.02.CFM.02	Sekretariat Daerah (Kesra)
				Penyelenggaraan forum silaturahmi pemerintah daerah dan himpunan mahasiswa pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah	KPS.16.02.CFM.03	Sekretariat Daerah (Kesra)
				Penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	KPS.16.02.CFM.04	Sekretariat Daerah (Kesra)
				Pelaksanaan sistem informasi, evaluasi pada bidang sosial dan kesehatan	KPS.16.02.CFM.05	Sekretariat Daerah (Kesra)
3	Penataan administrasi kependudukan	KPS.16.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	KPS.16.03.CFM.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	KPS.16.03.CFM.02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	KPS.16.03.CFM.03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Sosialisasi kebijakan kependudukan	KPS.16.03.CFM.04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	KPS.16.03.CFM.05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

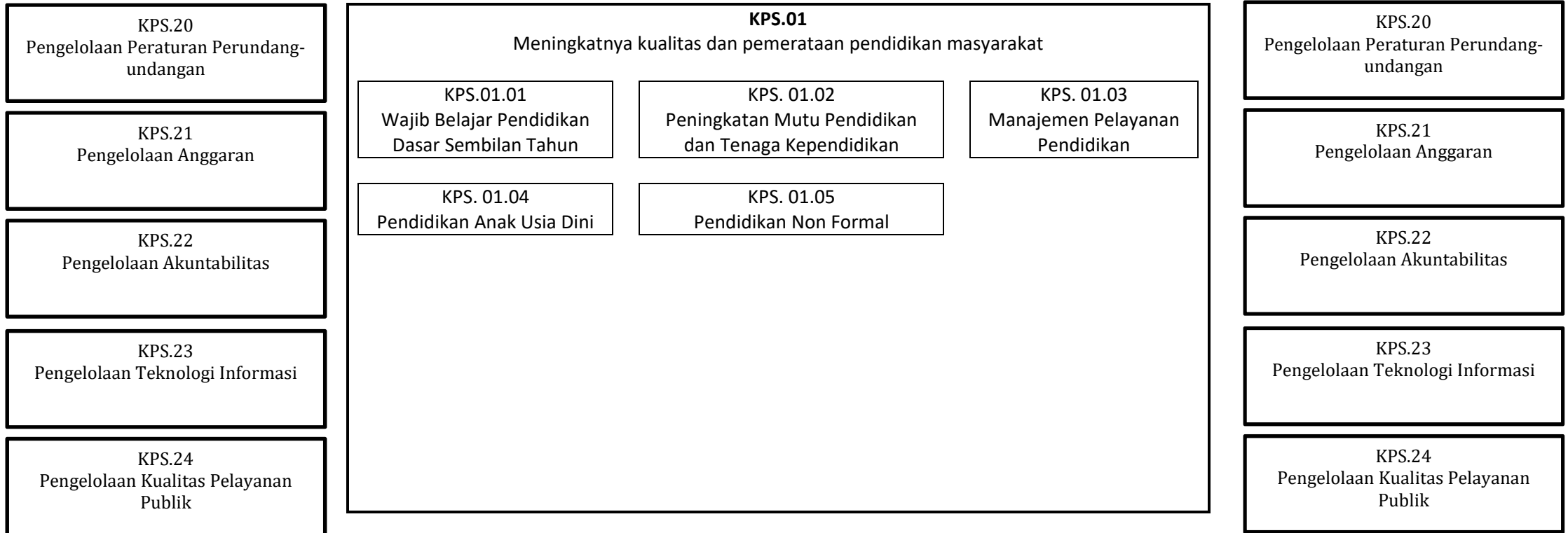
No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	KPS.16.04	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	KPS.16.04.CFM.01	Bappeda
				Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	KPS.16.04.CFM.02	Bappeda
5	Peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH	KPS.16.05	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	KPS.16.05.CFM.01	Sekretariat Daerah (pemerintahan)
				Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	KPS.16.05.CFM.02	Sekretariat Daerah (hukum)
				Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	KPS.16.05.CFM.03	Sekretariat Daerah (Perencanaan dan keuangan)
				Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada	KPS.16.05.CFM.04	Sekretariat Daerah (pemerintahan)
				Pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara	KPS.16.05.CFM.05	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) / Inspektorat (saat ini)
6	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	KPS.16.06	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pemberian Bantuan dan Beasiswa Bibit Unggul Daerah	KPS.16.06.CFM.01	Inspektorat
				Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	KPS.16.06.CFM.02	Inspektorat
7	Penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah	KPS.16.07	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	KPS.16.07.CFM.01	BPKAD
				Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Perubahannya	KPS.16.07.CFM.02	BPKAD
				Pemeliharaan jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	KPS.16.07.CFM.03	BPKAD
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	KPS.16.07.CFM.04	BPKAD
				Penyusunan rancangan peraturan KDH	KPS.16.07.CFM.05	BPKAD

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				tentang penjabaran APBD		
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	KPS.16.07.CFM.06	BPKAD
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	KPS.16.07.CFM.07	BPKAD
				Pemutahiran analisis standar belanja	KPS.16.07.CFM.08	BPKAD
				Monitoring dan evaluasi penerimaan dana hibah dan bansos	KPS.16.07.CFM.09	BPKAD
8	Pembinaan dan Pengembangan aparatur	KPS.16.08	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyelesaian Usul Status Pegawai	KPS.16.08.CFM.01	Sekretariat Daerah (umum)
KPS.17 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel						
1	Peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	KPS.17.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	KPS.17.01.CFM.01	BPKAD
				Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah	KPS.17.01.CFM.02	BPKAD
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)	KPS.17.01.CFM.03	BPKAD
				Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kapuas	KPS.17.01.CFM.04	BPKAD
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	KPS.17.01.CFM.05	BPKAD
				Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	KPS.17.01.CFM.06	BPKAD
				Pengelolaan laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	KPS.17.01.CFM.07	BPKAD
2	Pembangunan Data/Informasi	KPS.17.02	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan,	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan	KPS.17.02.CFM.01	Bappeda

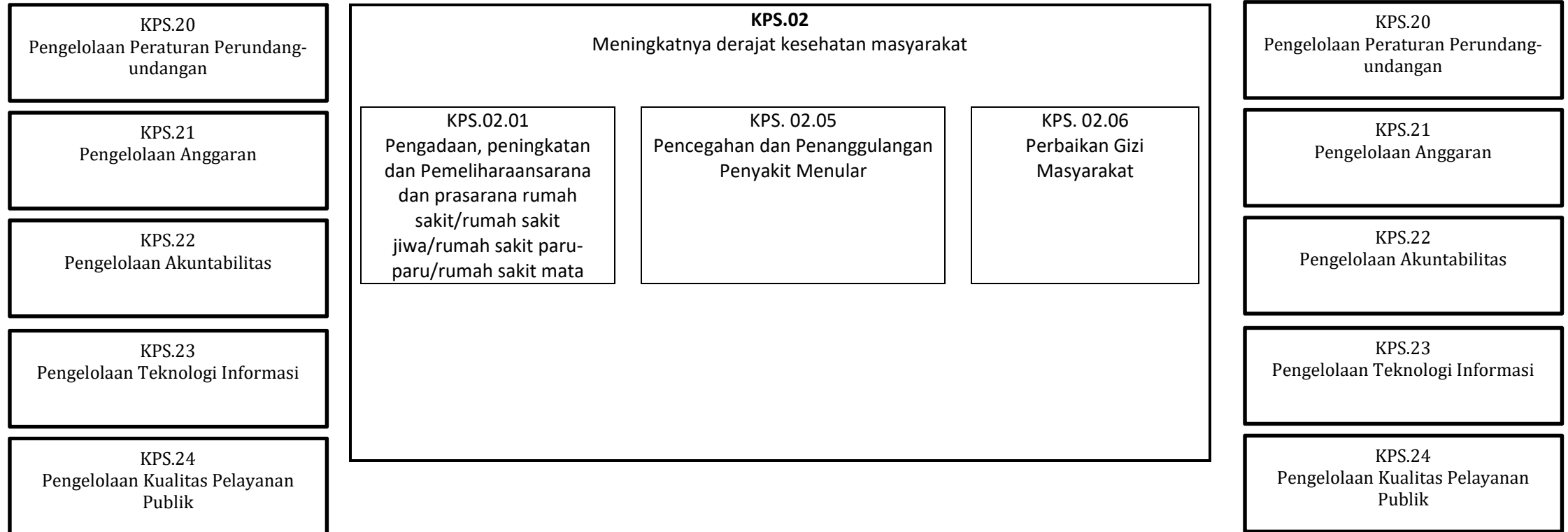
No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	dokumen perencanaan		
3	Pengelolaan aset pemerintah daerah	KPS.17.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan standar barang	KPS.17.03.CFM.01	BPKAD
				Peningkatan manajemen aset/barang daerah	KPS.17.03.CFM.02	BPKAD
				Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	KPS.17.03.CFM.03	BPKAD
				Penyusunan sistem informasi barang daerah	KPS.17.03.CFM.04	BPKAD
				Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	KPS.17.03.CFM.05	BPKAD
				Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	KPS.17.03.CFM.06	BPKAD
				Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	KPS.17.03.CFM.07	BPKAD
				Monitoring dan evaluasi laporan barang milik daerah perangkat daerah	KPS.17.03.CFM.08	BPKAD
				Inventarisasi/sensus barang milik daerah	KPS.17.03.CFM.09	BPKAD
KPS.18 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efesien						
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	KPS.18.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pendidikan dan pelatihan formal	KPS.18.01.CFM.01	BKPSDM
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	KPS.18.01.CFM.02	BKPSDM
				Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	KPS.18.01.CFM.03	BKPSDM
				Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	KPS.18.01.CFM.04	BKPSDM
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS daerah	KPS.18.01.CFM.05	BKPSDM
KPS.19 Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik						
1	Pengelolaan Aplikasi Informatika	KPS.19.01	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah	KPS.19.01.CFM.01	Dinas Kominfo
2	Penyelenggaraan	KPS.19.02	Pengelolaan Peraturan	Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan	KPS.19.02.CFM.01	Dinas Kominfo

No	Nama Peta Sub Proses	Kode Sub Proses	Proses Pendukung	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengamaman Informasi Daerah		Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	informasi		
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	KPS.19.03	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Akuntabilitas, Pengelolaan Teknologi Informasi, Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik	Pengolahan data statistik sektoral	KPS.19.03.CFM.01	Dinas Kominfo

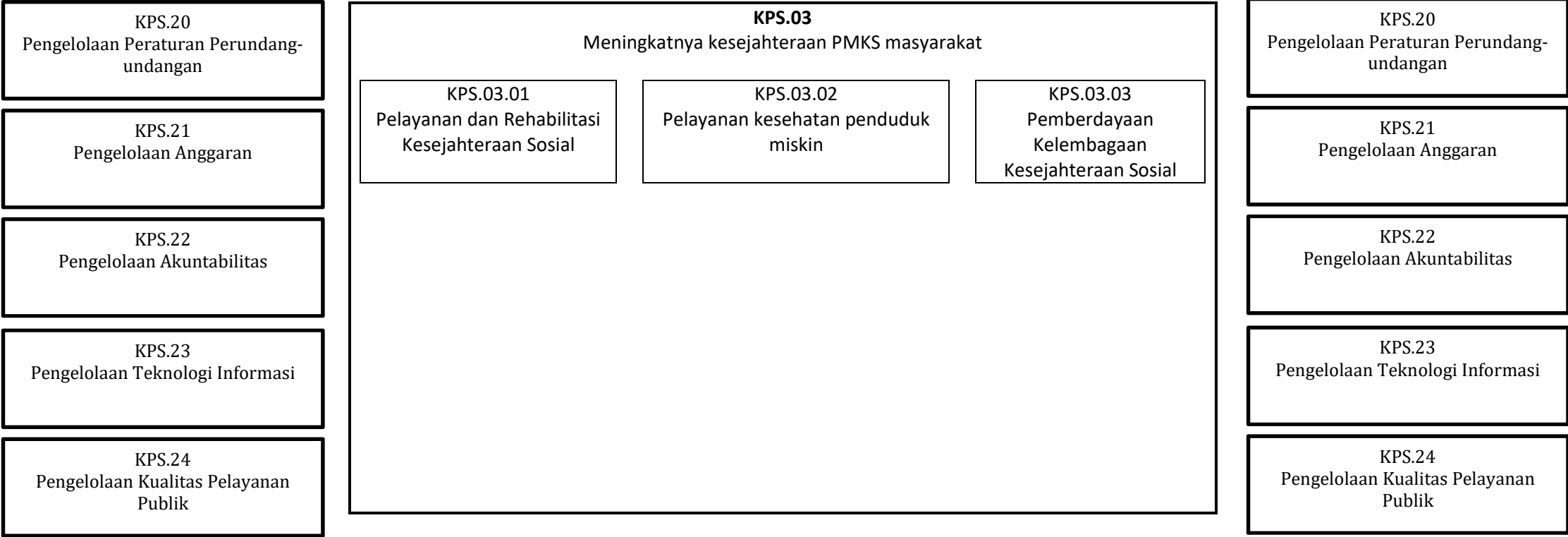
PETA SUB PROSES



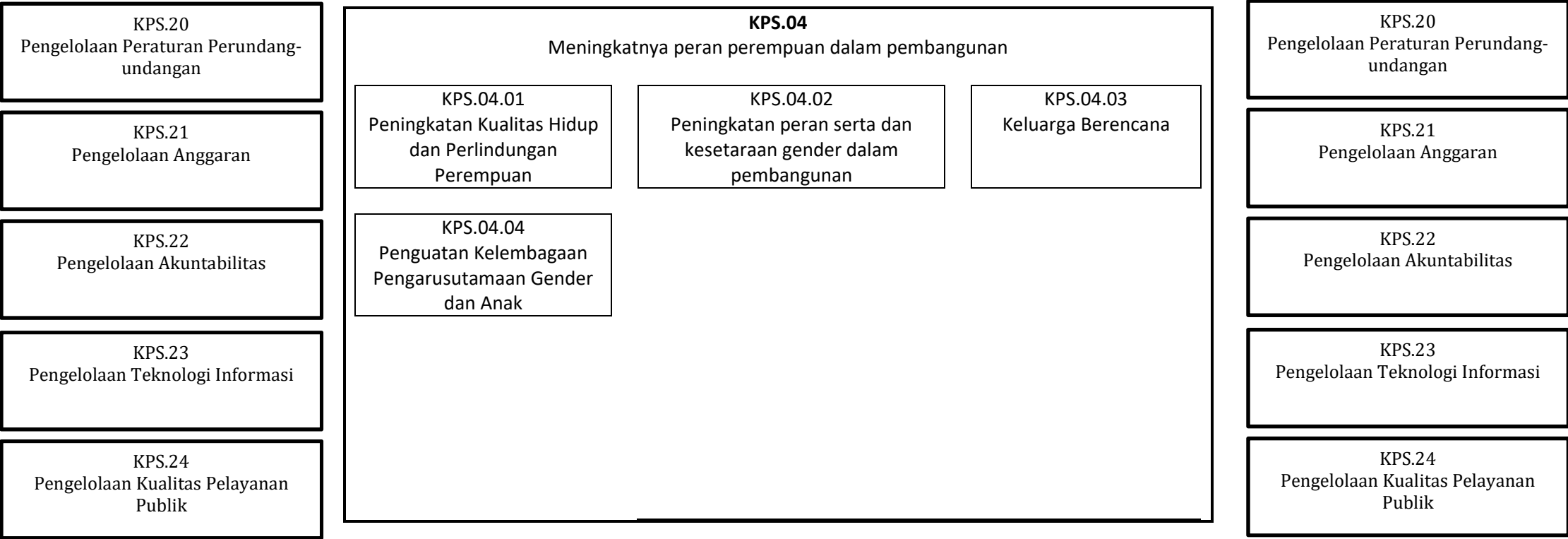
PETA SUB PROSES



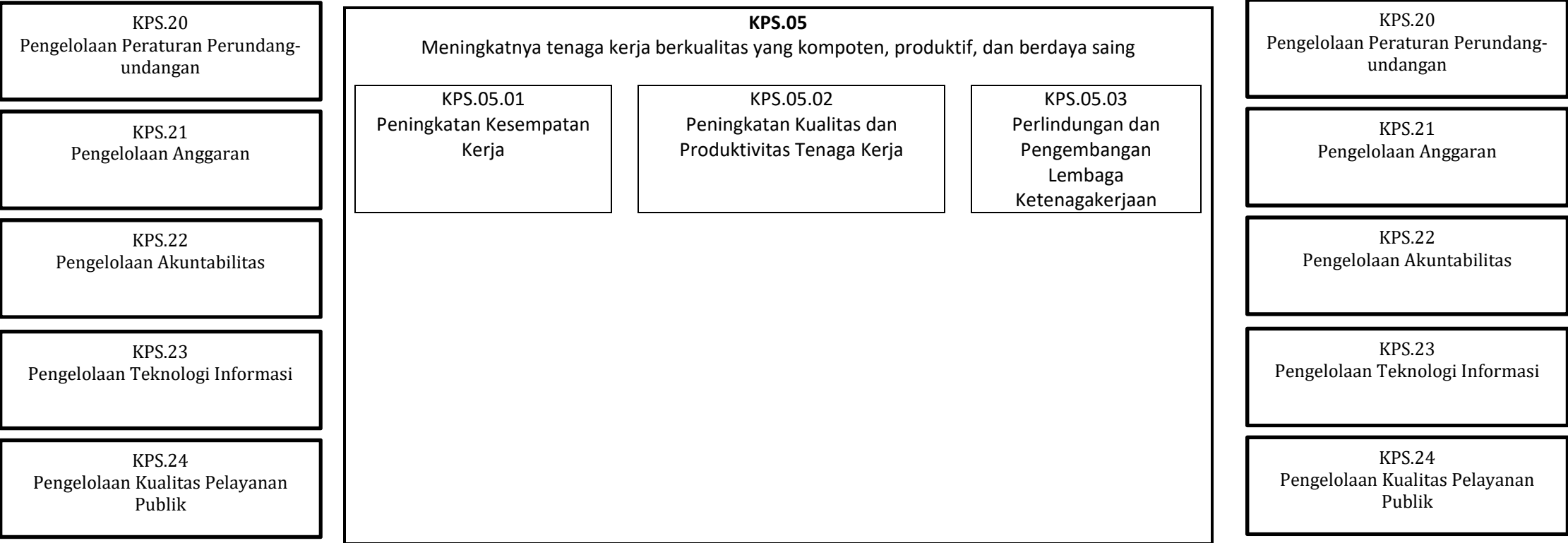
PETA SUB PROSES



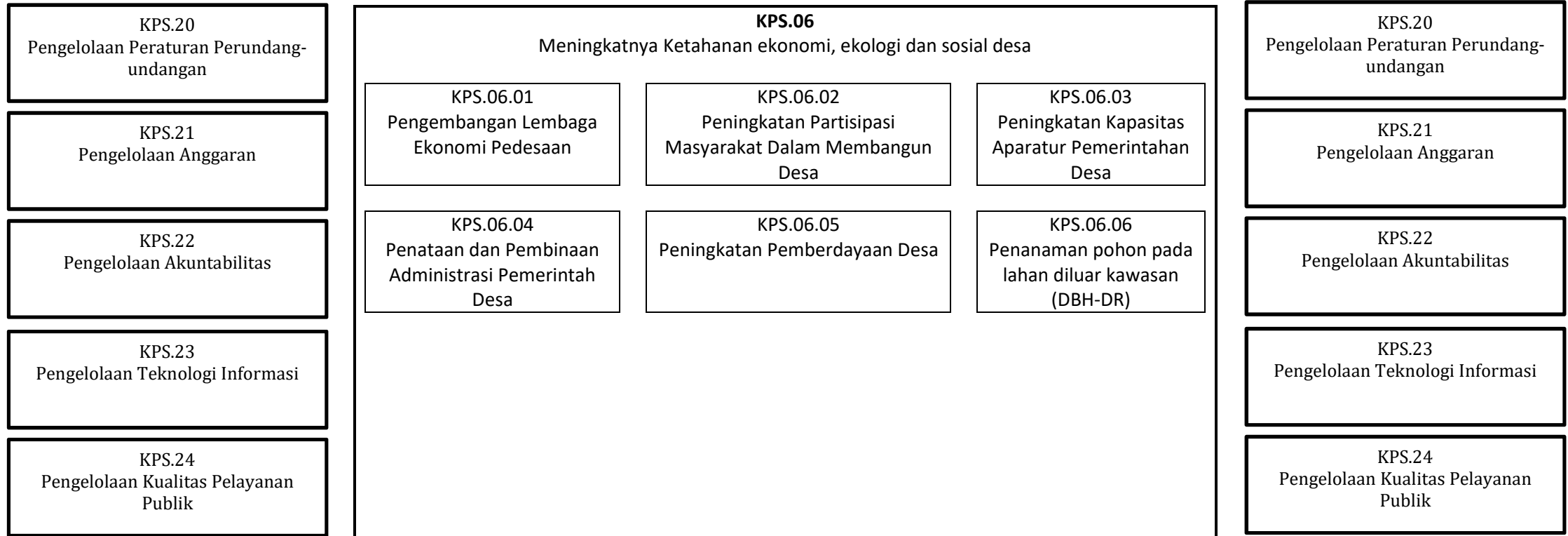
PETA SUB PROSES



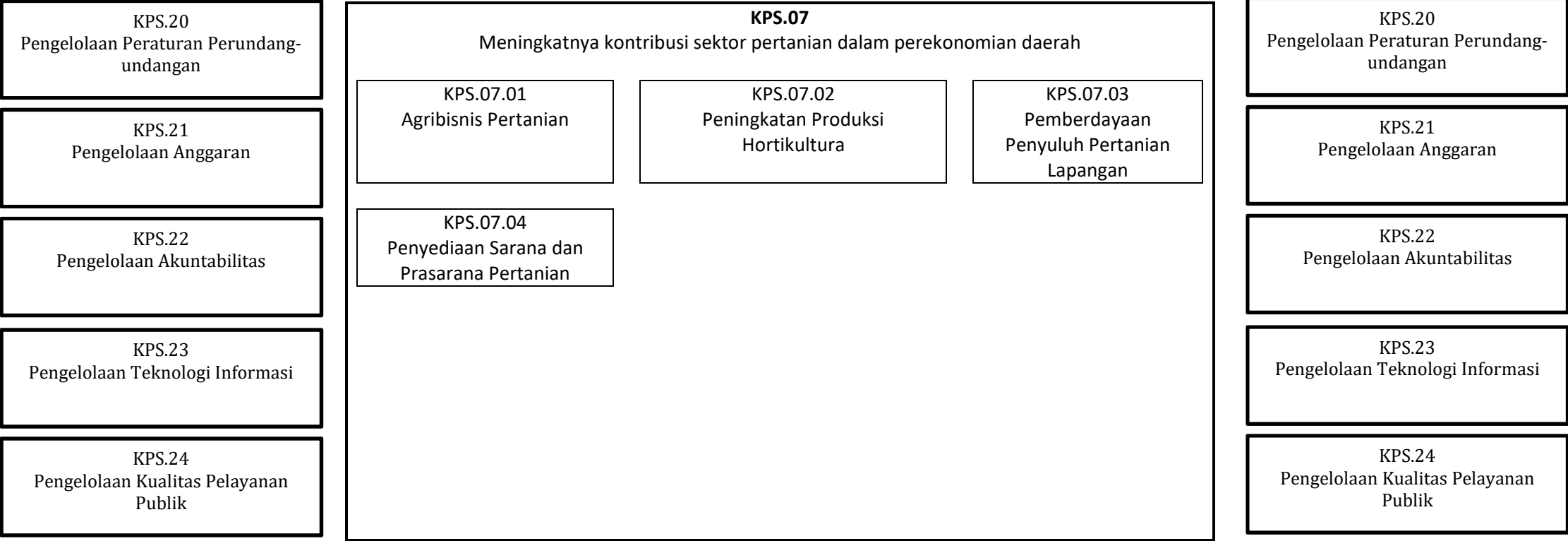
PETA SUB PROSES



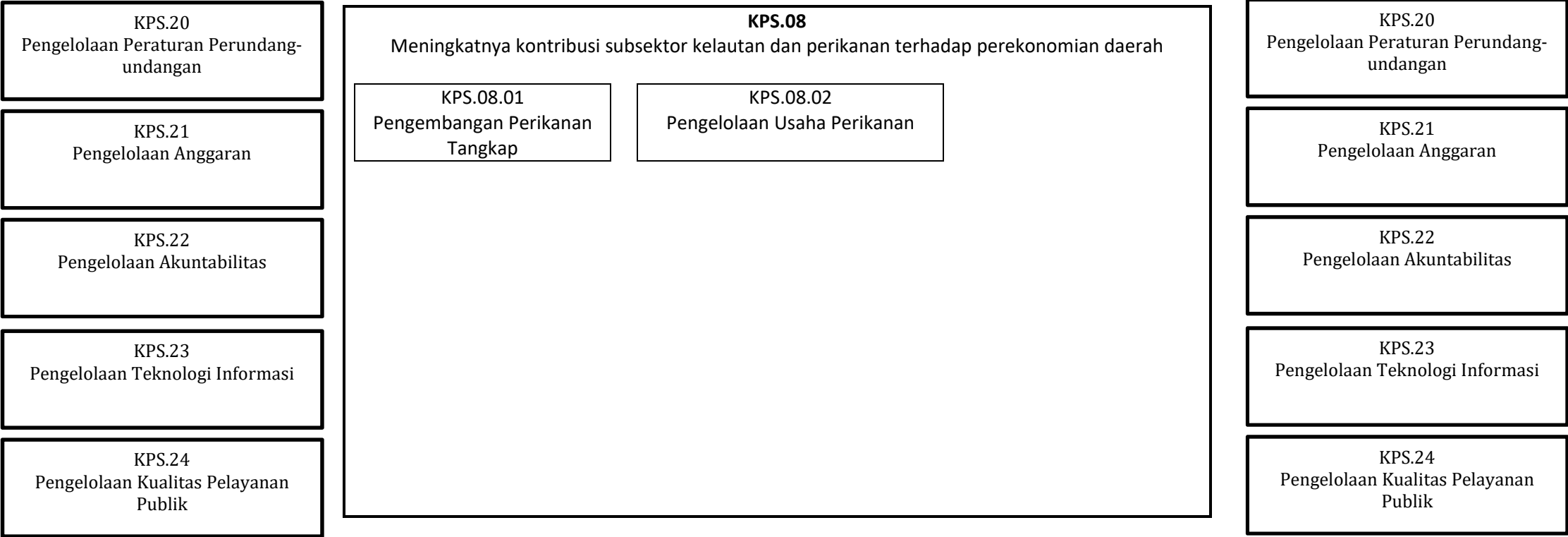
PETA SUB PROSES



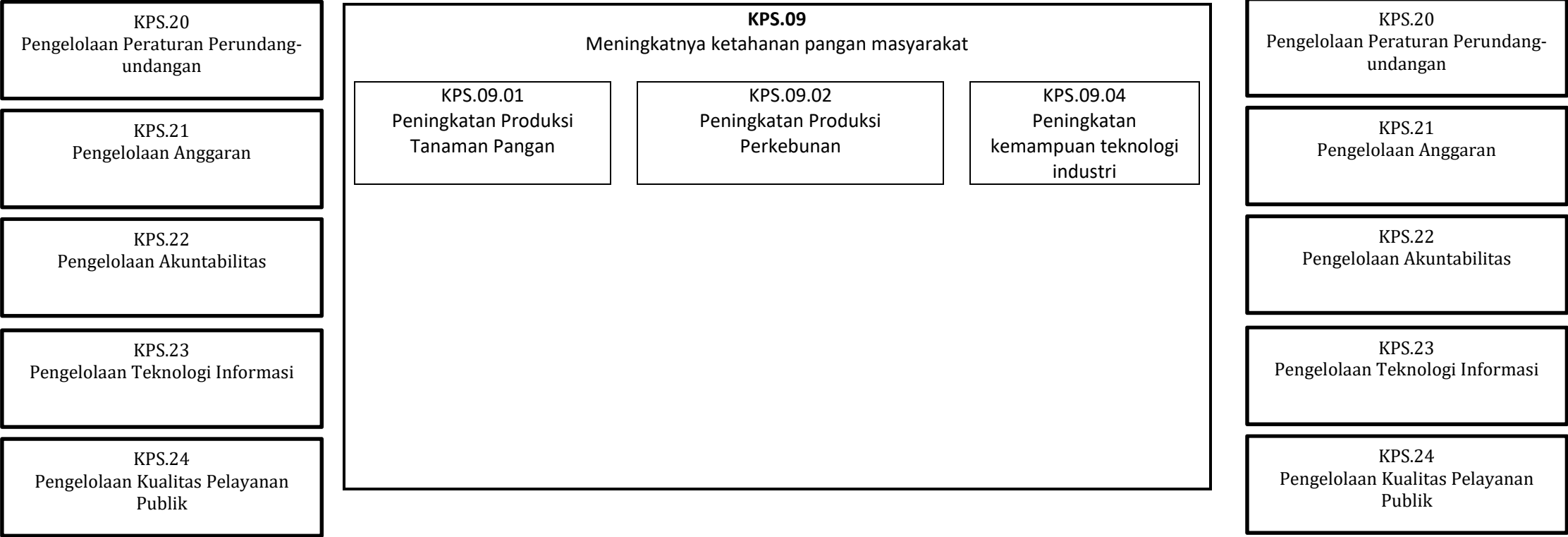
PETA SUB PROSES



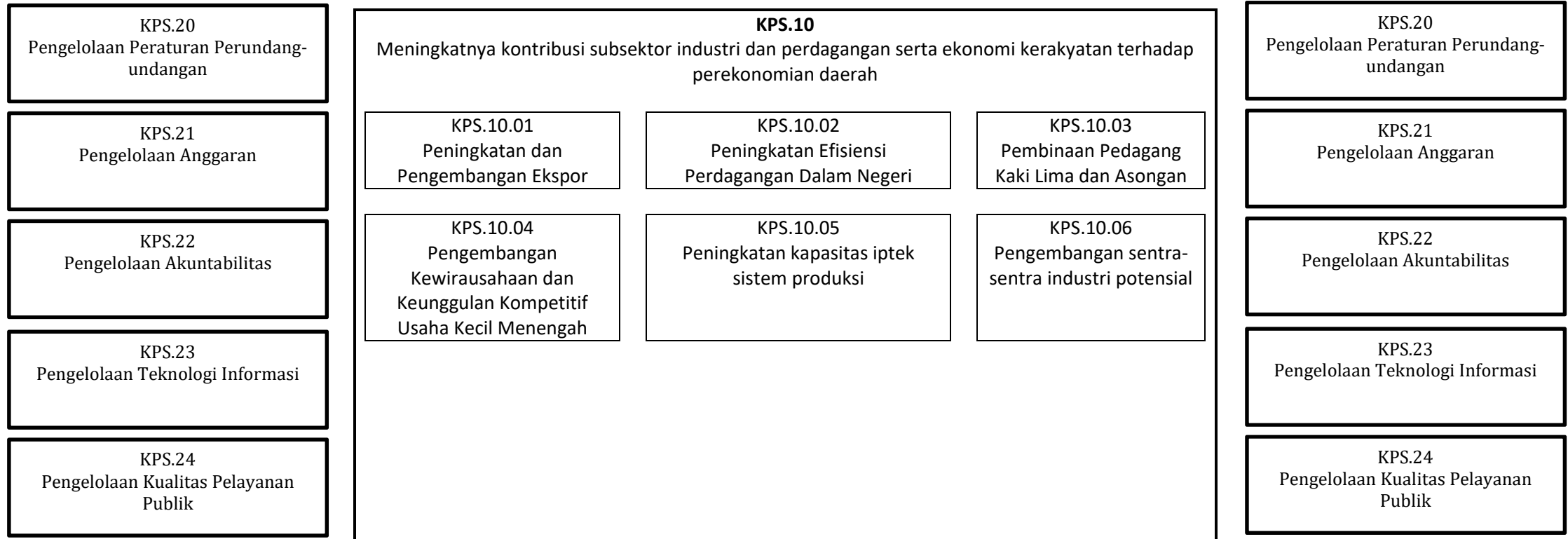
PETA SUB PROSES



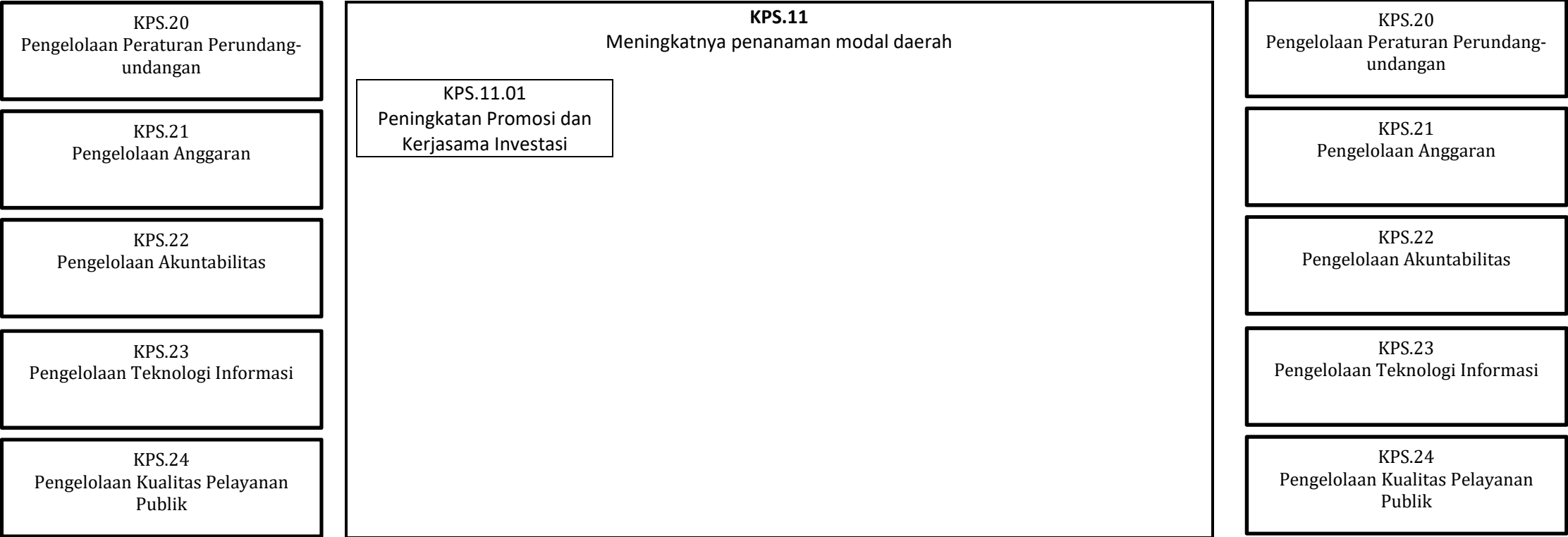
PETA SUB PROSES



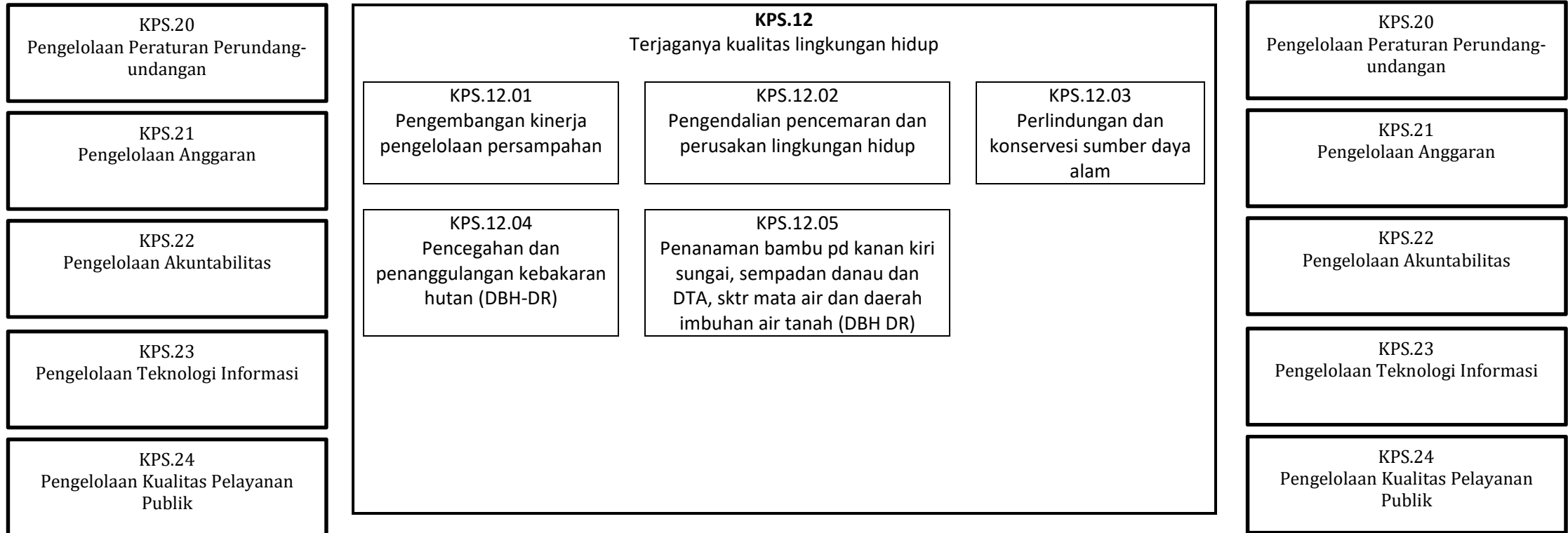
PETA SUB PROSES



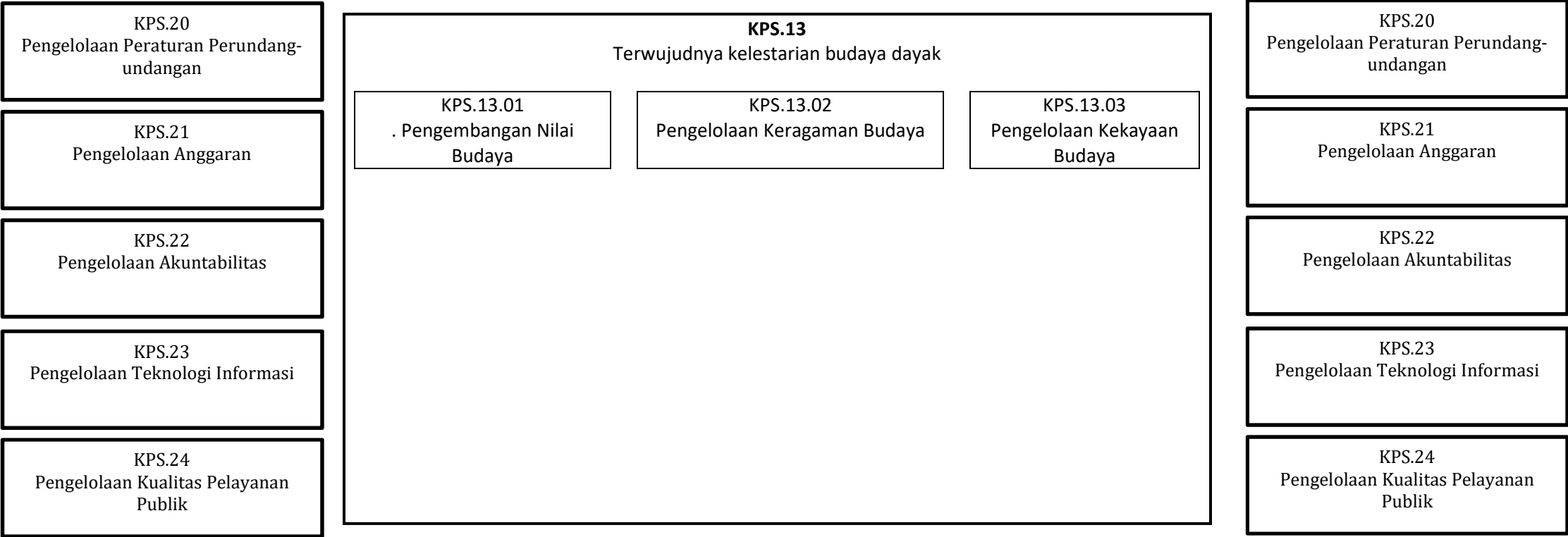
PETA SUB PROSES



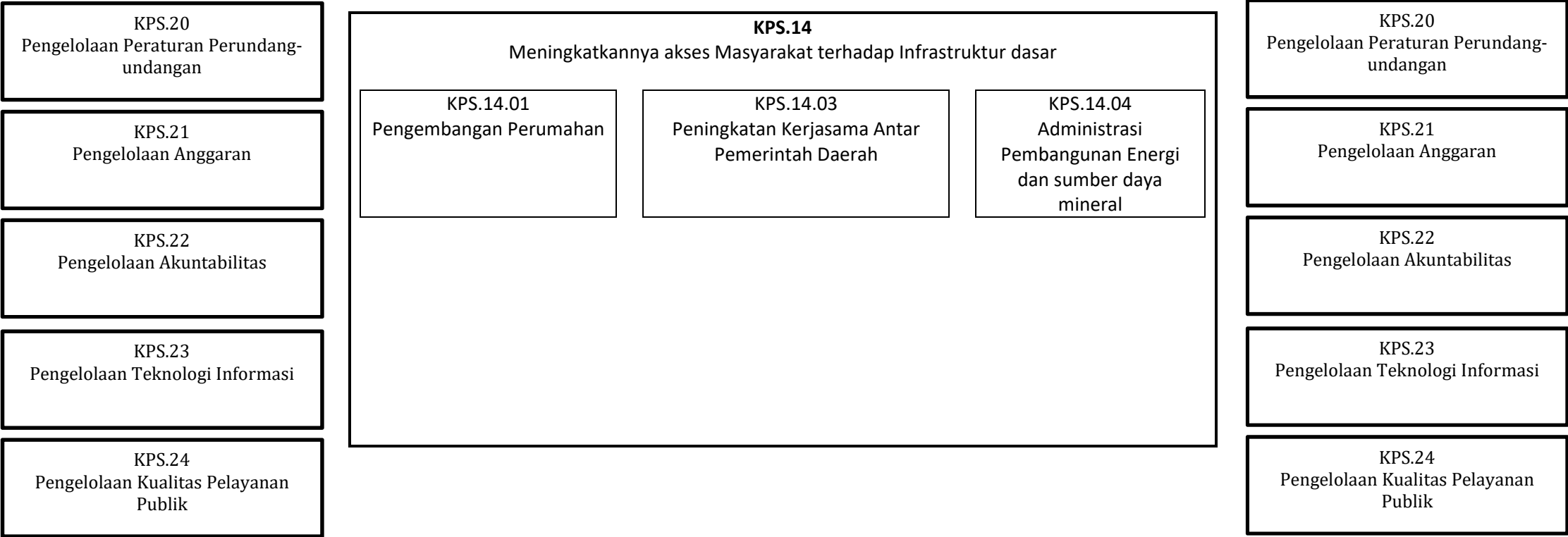
PETA SUB PROSES



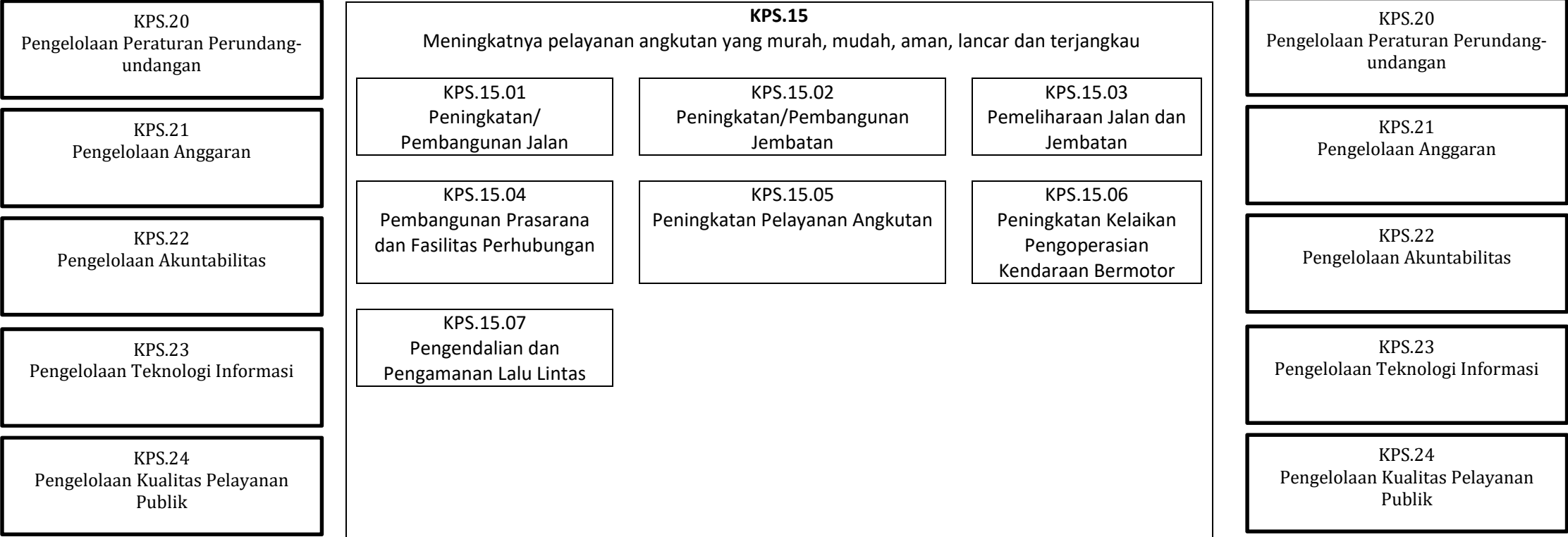
PETA SUB PROSES



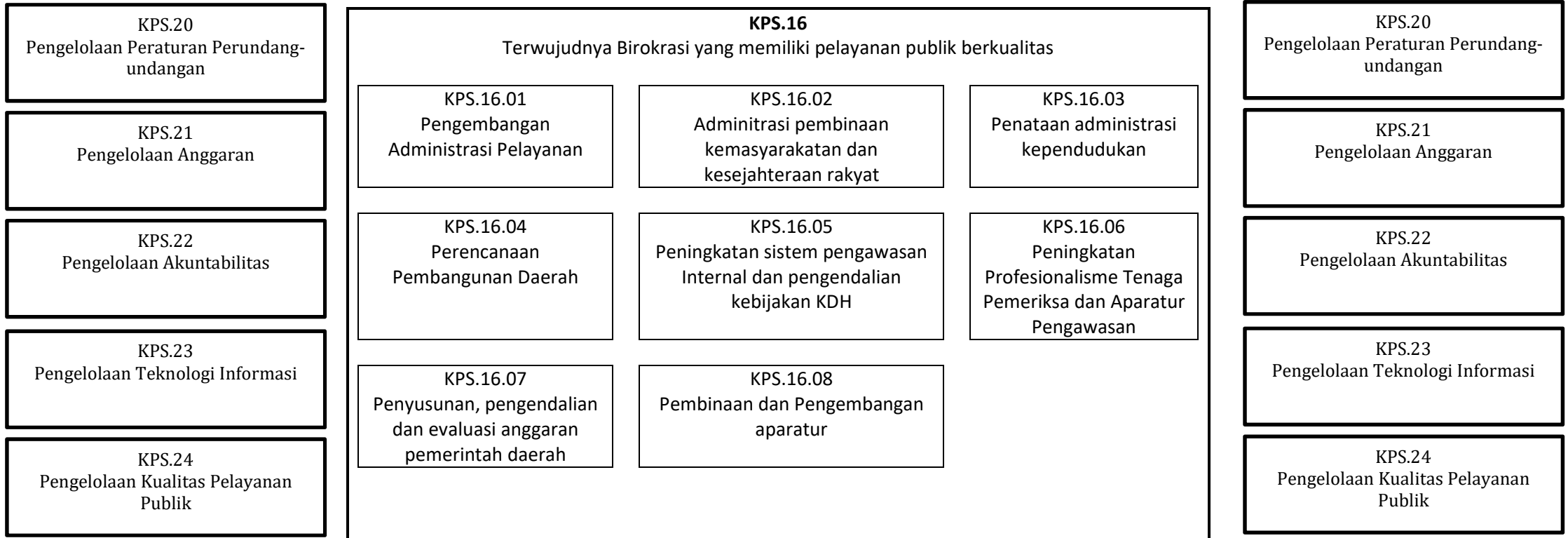
PETA SUB PROSES



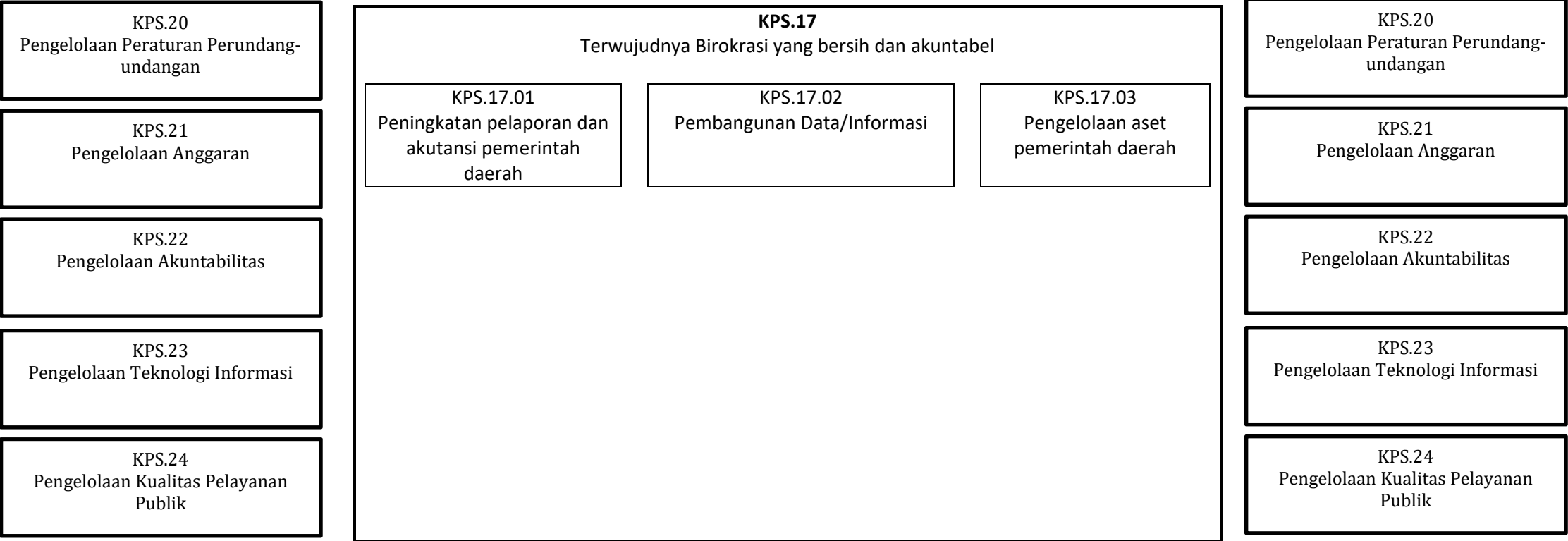
PETA SUB PROSES



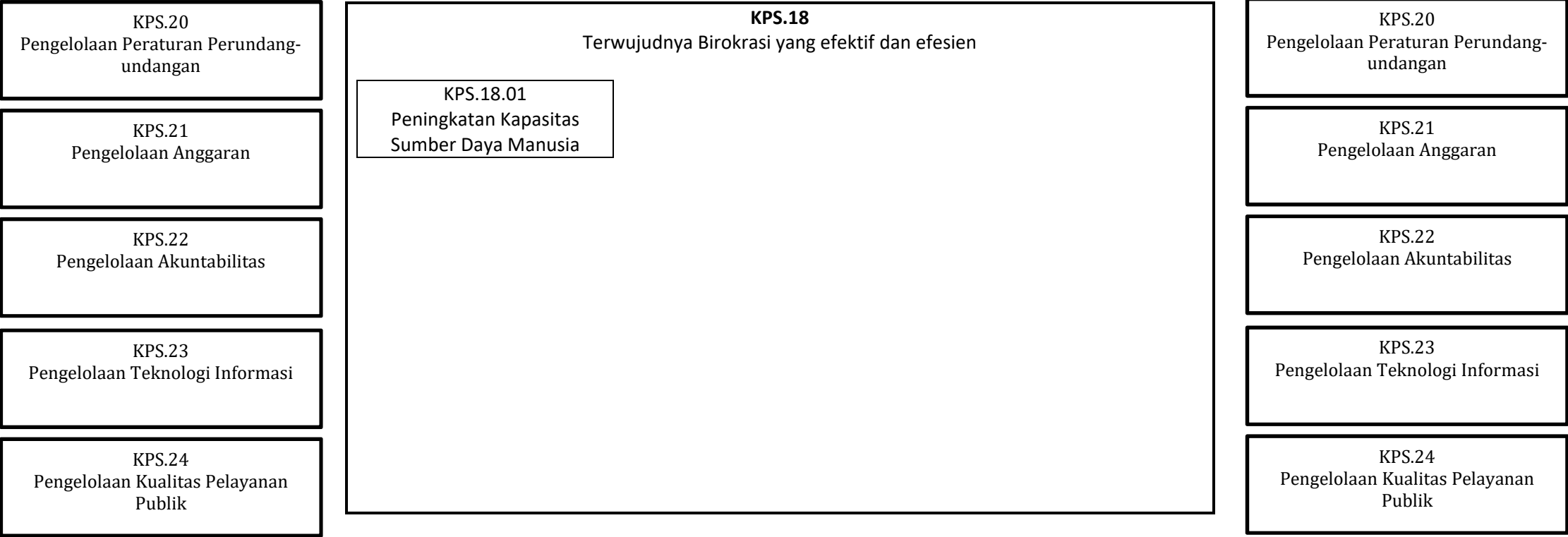
PETA SUB PROSES



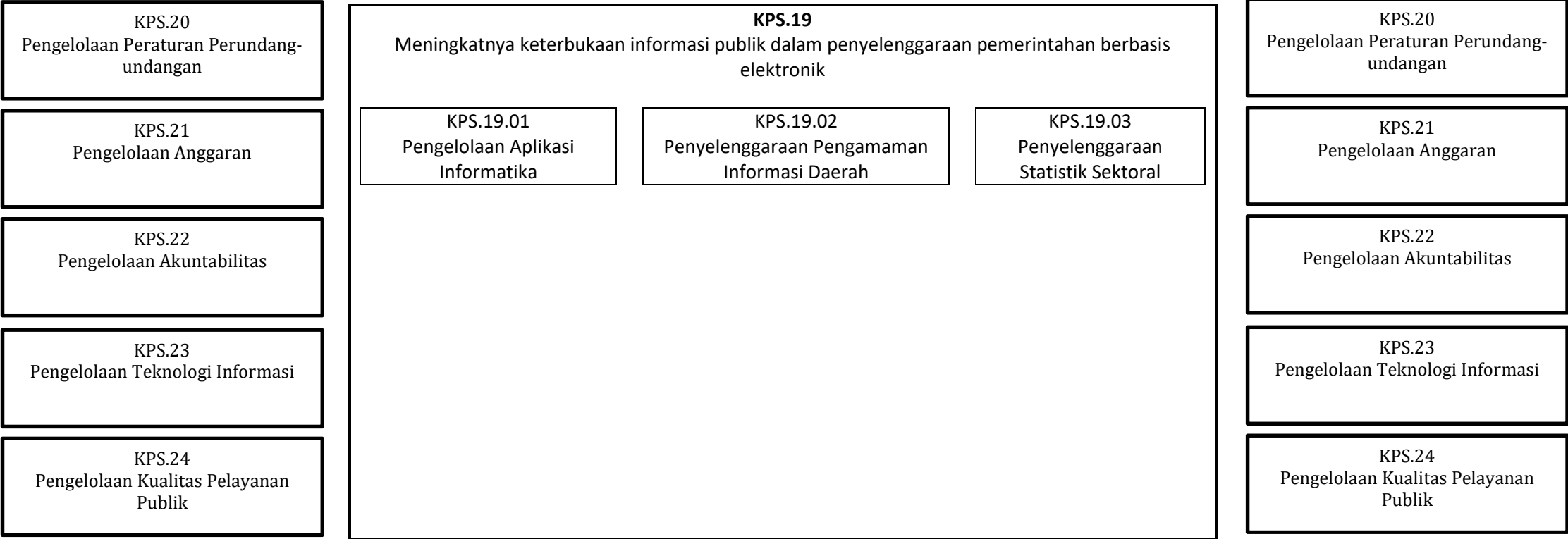
PETA SUB PROSES



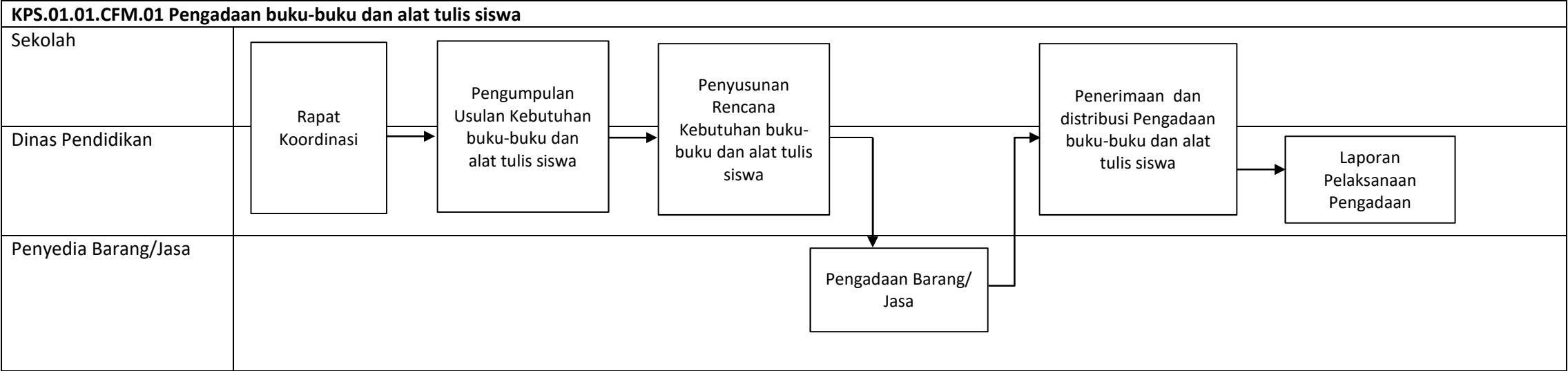
PETA SUB PROSES



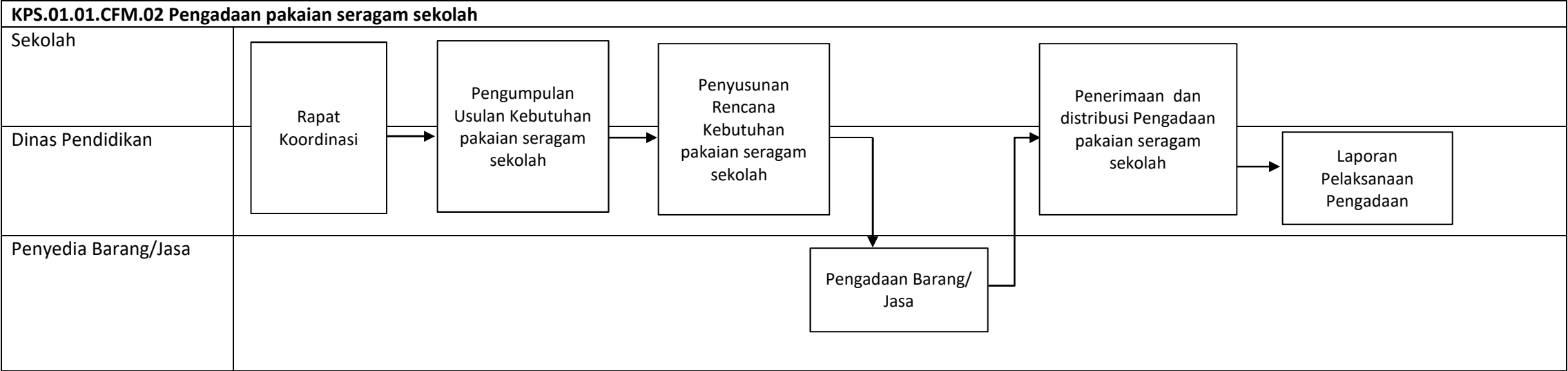
PETA SUB PROSES



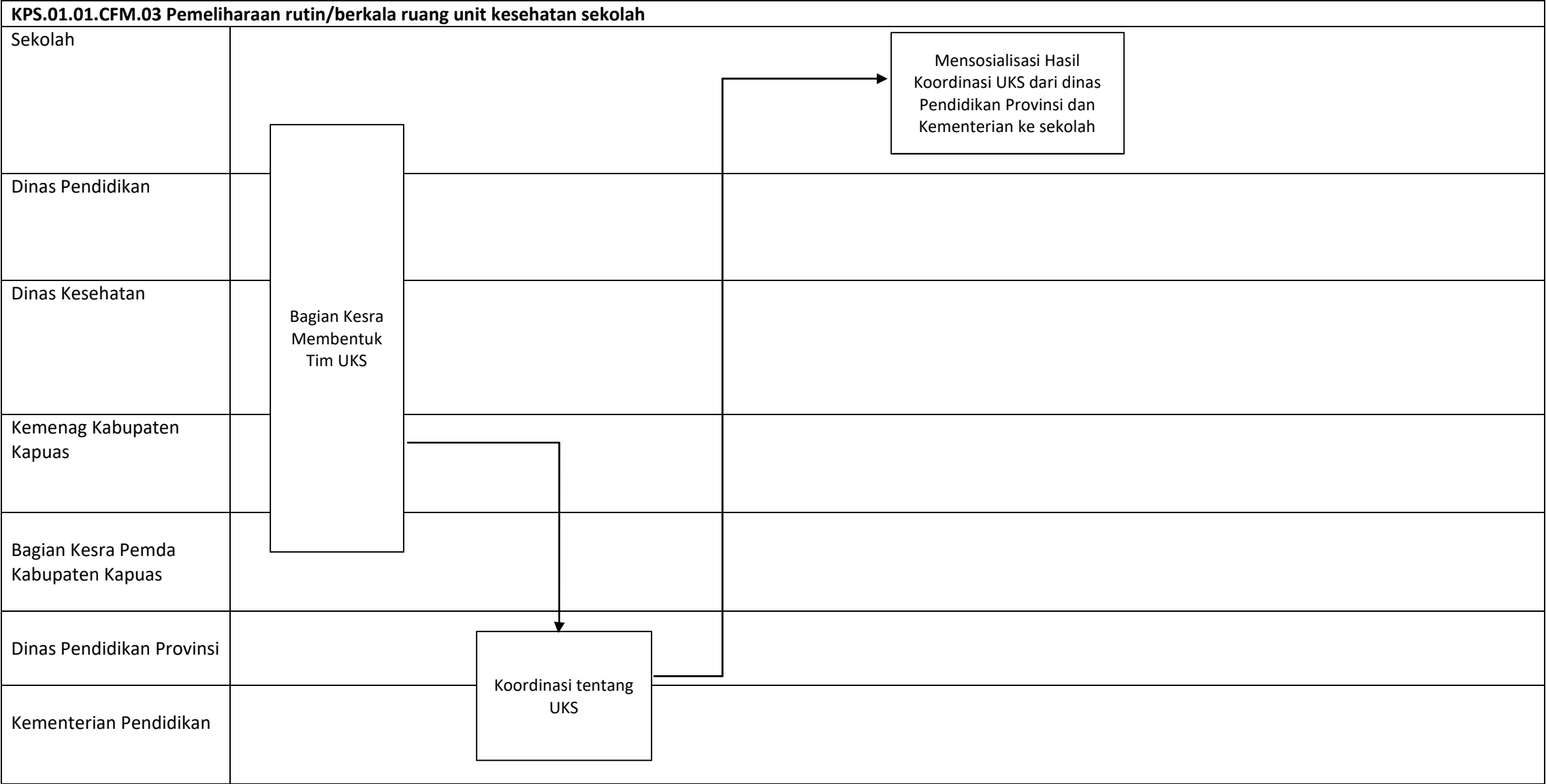
PETA LINTAS FUNGSI



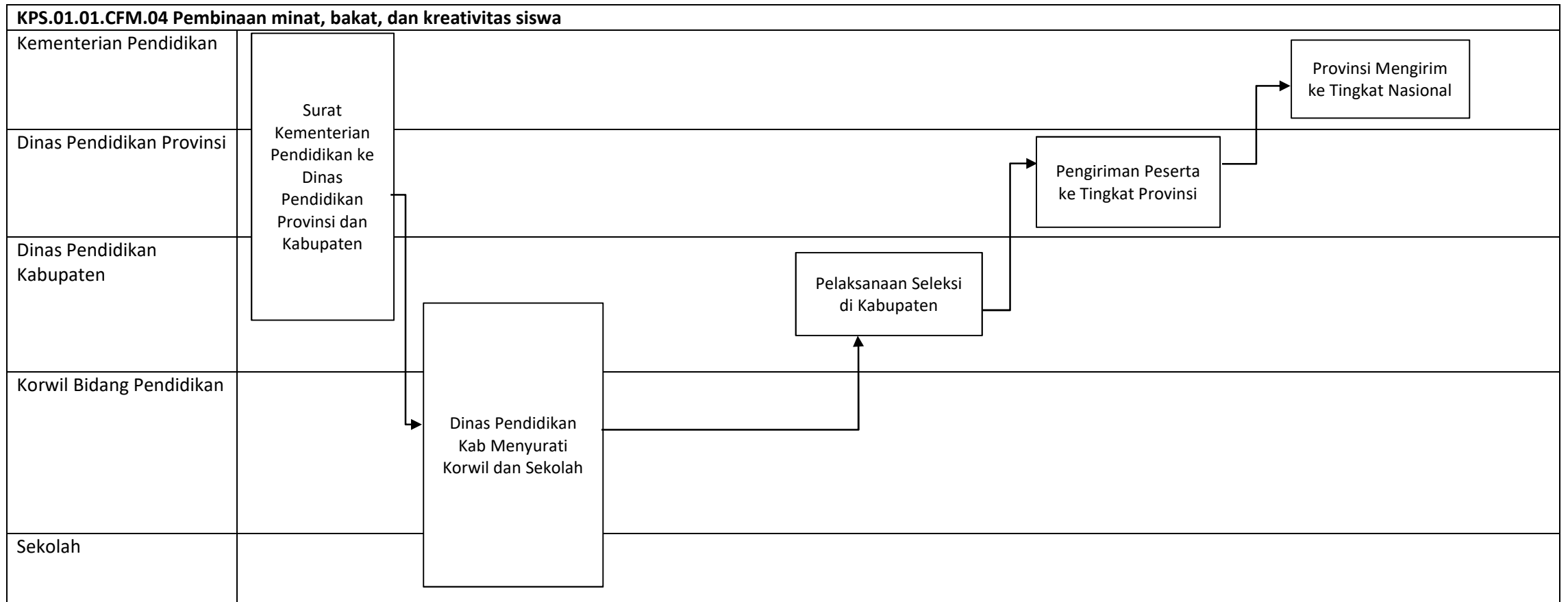
PETA LINTAS FUNGSI



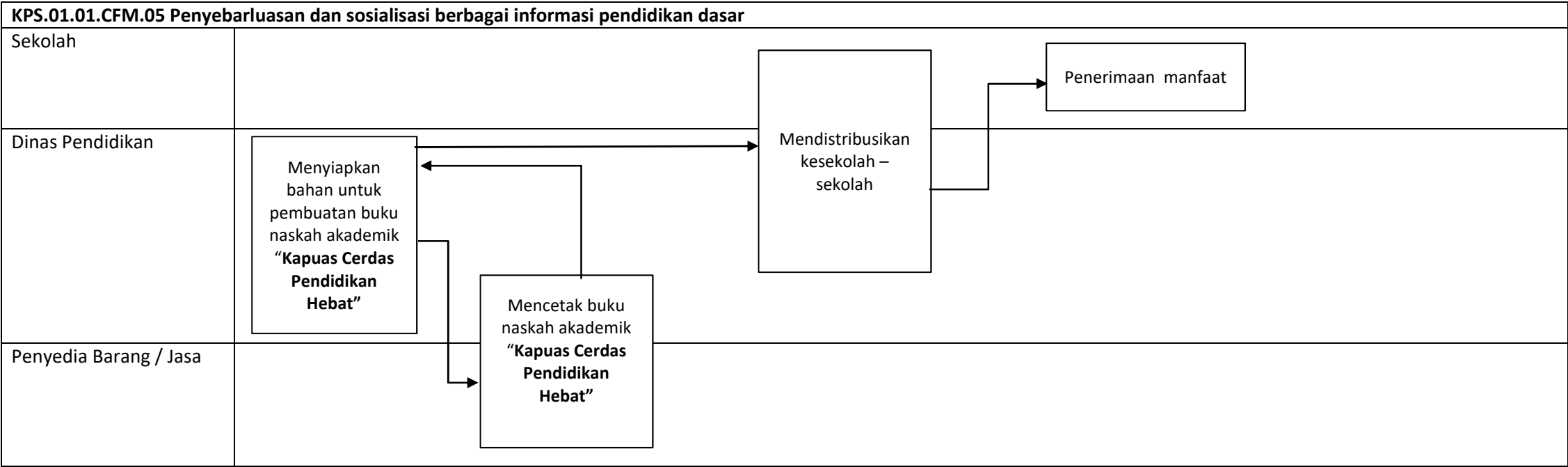
PETA LINTAS FUNGSI



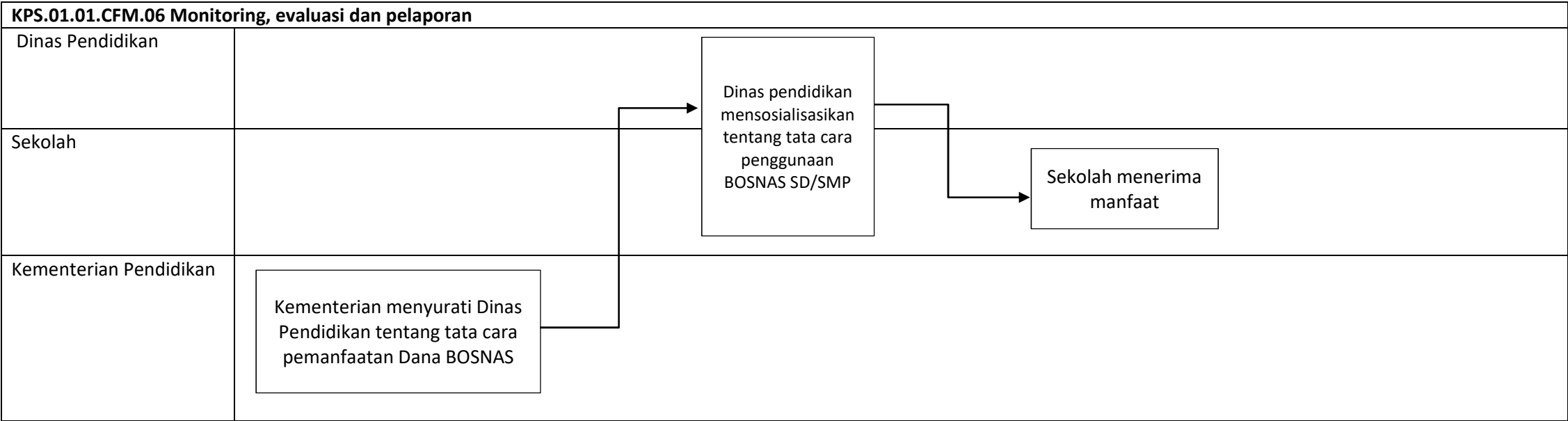
PETA LINTAS FUNGSI



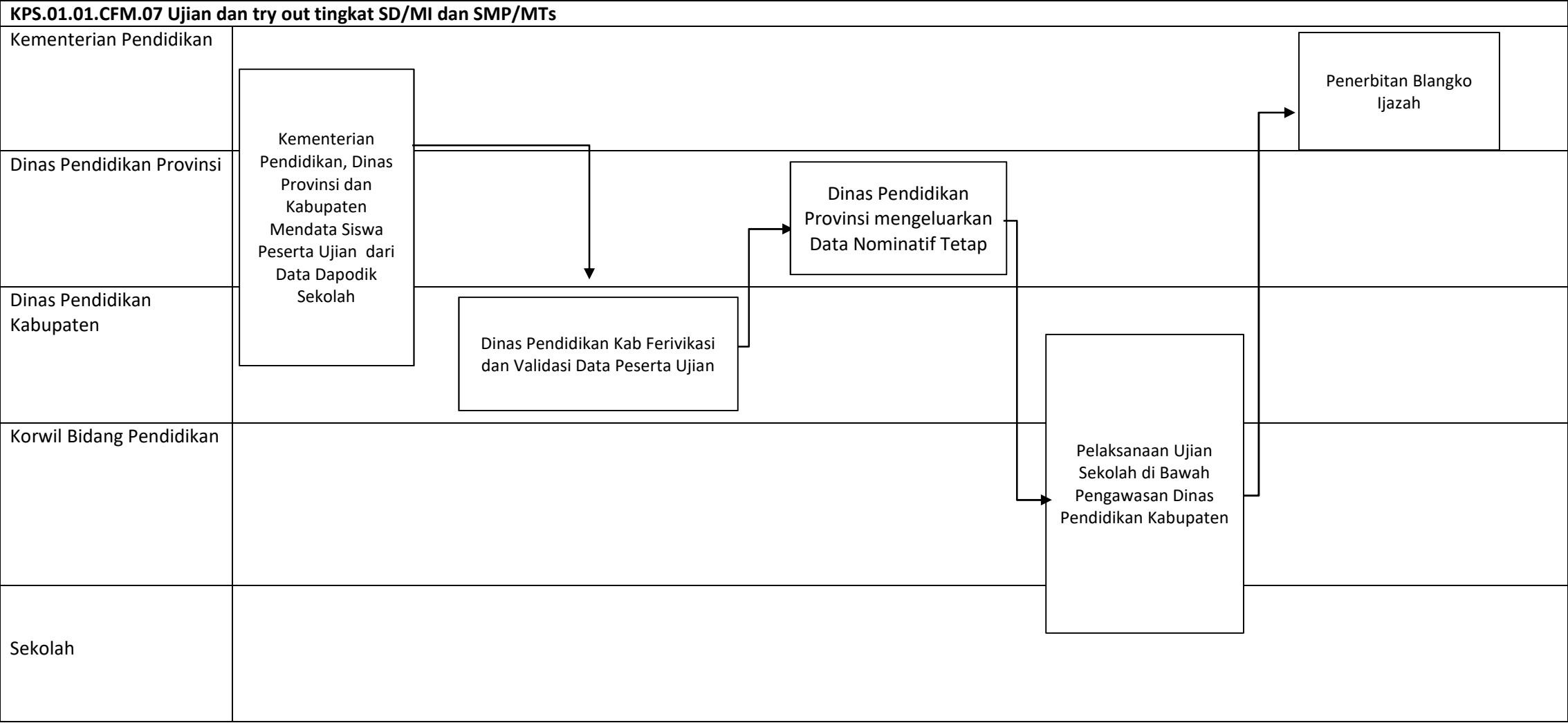
PETA LINTAS FUNGSI



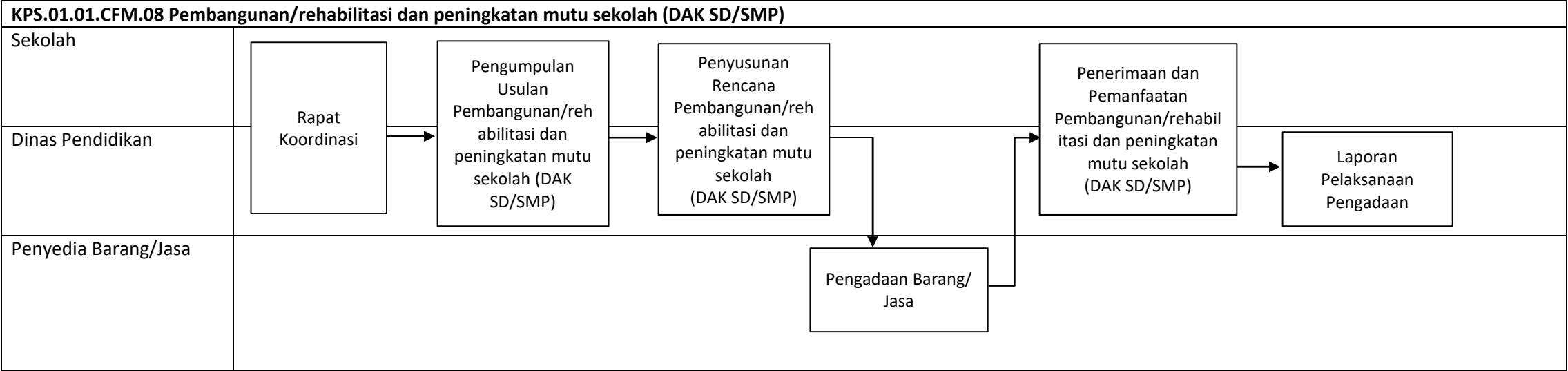
PETA LINTAS FUNGSI



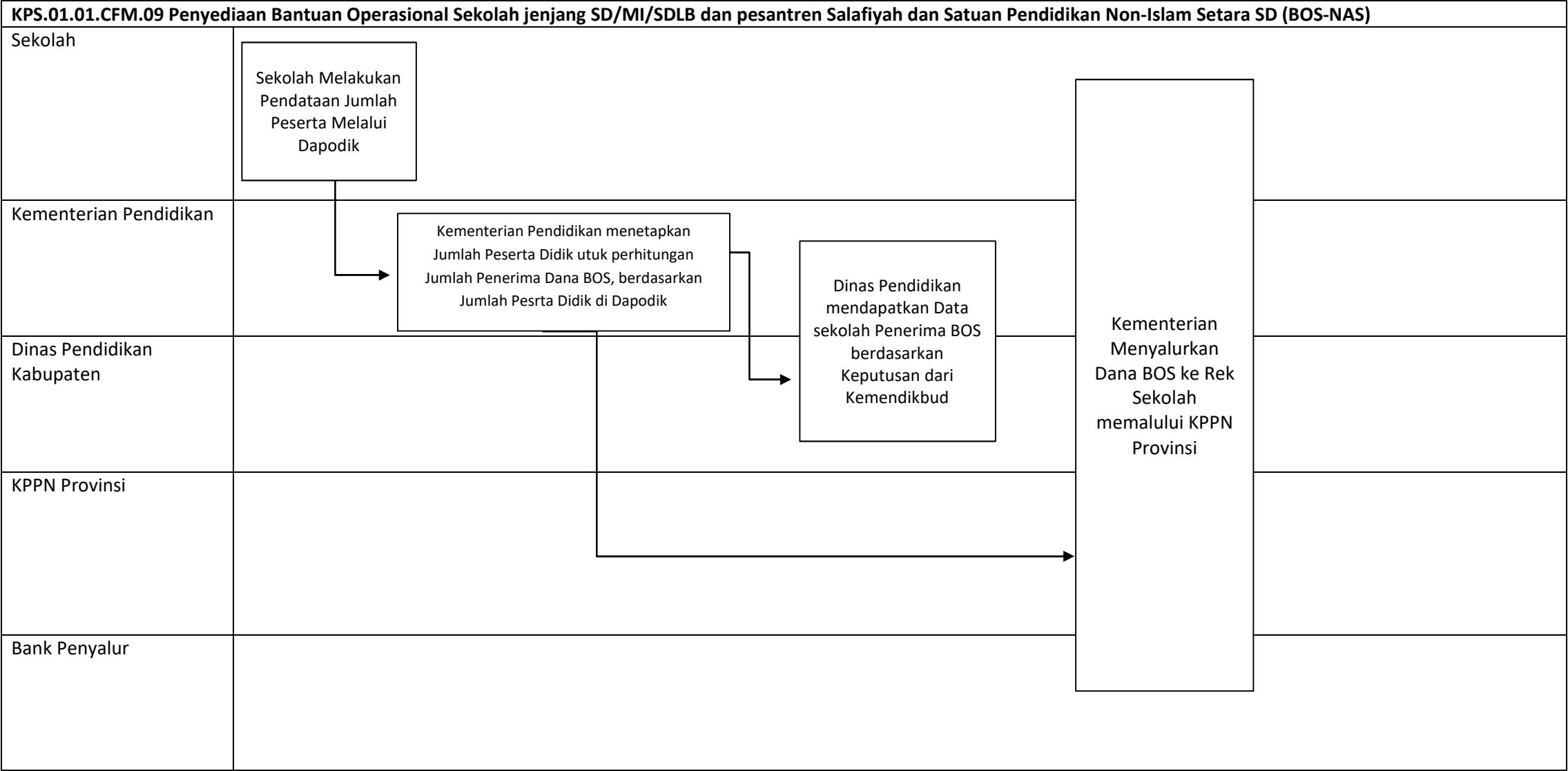
PETA LINTAS FUNGSI



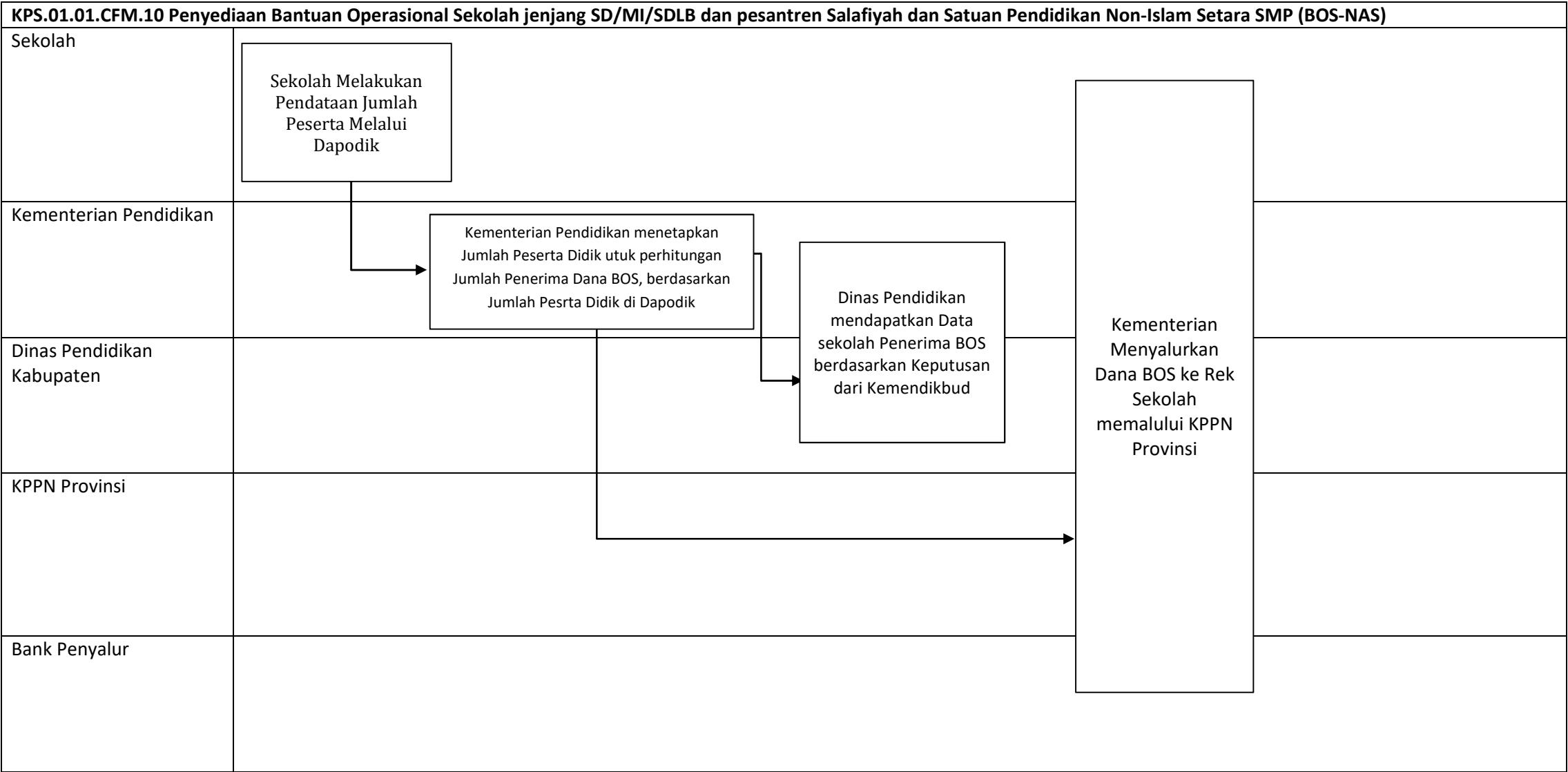
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



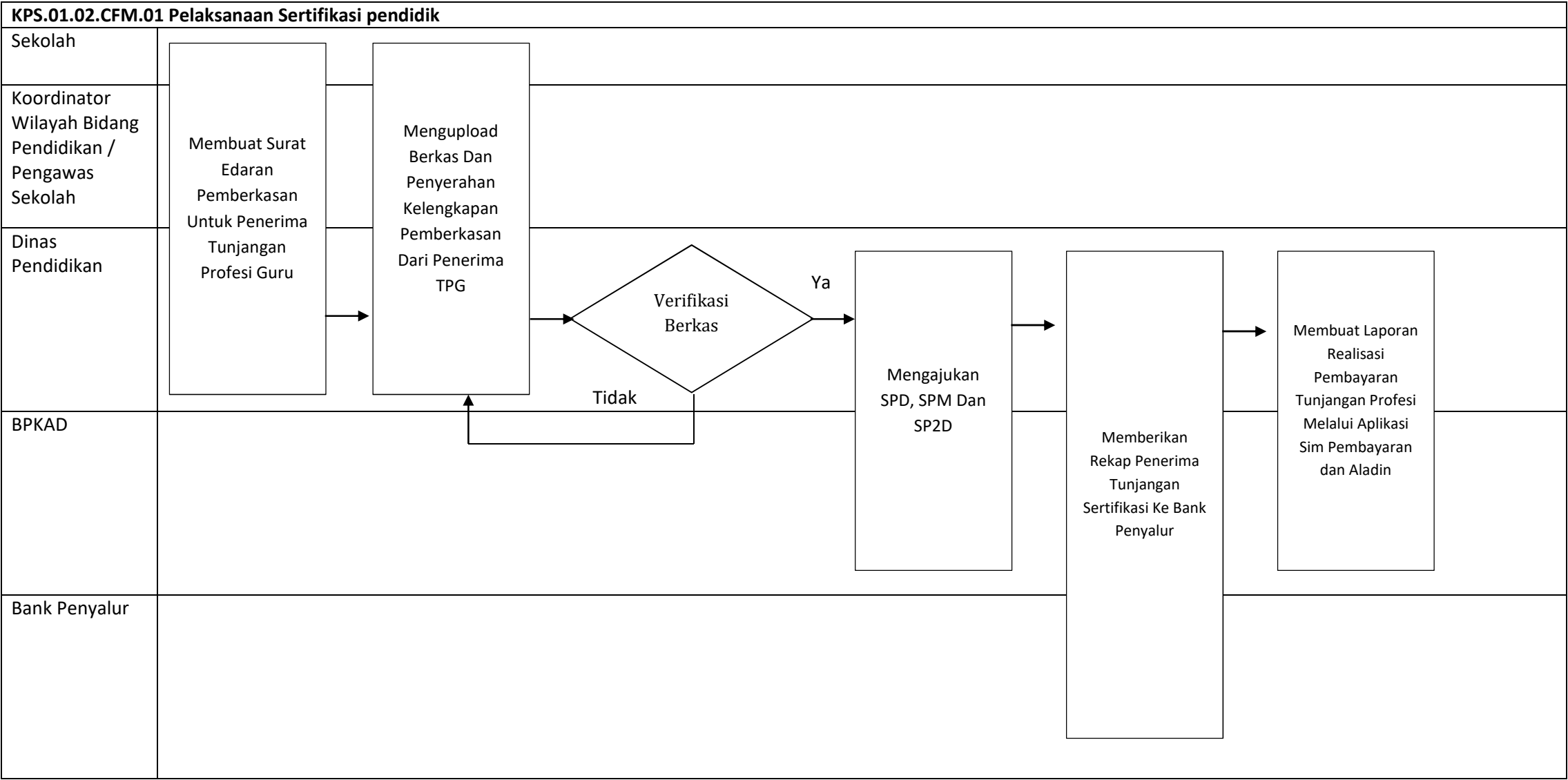
PETA RELASI

KPS.01.01

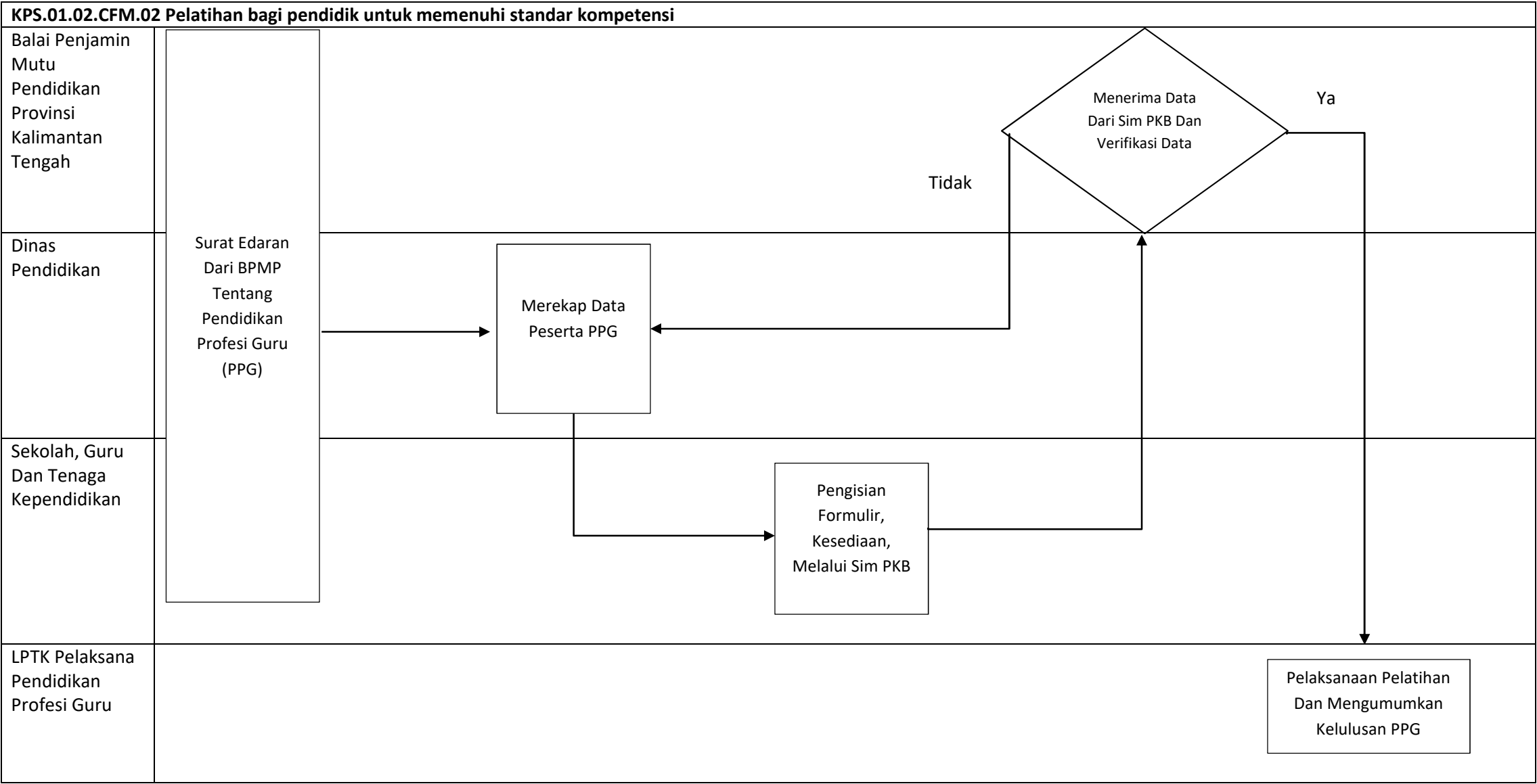
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

KPS.01.01.CFM.01 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	KPS.01.01.CFM.02 Pengadaan pakaian seragam sekolah	KPS.01.01.CFM.03 Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	KPS.01.01.CFM.04 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	KPS.01.01.CFM.05 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang/Jasa	1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang/Jasa	1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan 4. Kemenag Kabupaten Kapuas 5. Bagian Kesra Pemda Kabupaten Kapuas 6. Dinas Pendidikan Provinsi 7. Kementerian Pendidikan	1. Kementerian Pendidikan 2. Dinas Pendidikan Provinsi 3. Dinas Pendidikan Kabupaten 4. Korwil Bidang Pendidikan 5. Sekolah	1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang / Jasa
KPS.01.01.CFM.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KPS.01.01.CFM.07 Ujian dan try out tingkat SD/MI dan SMP/MTs	KPS.01.01.CFM.08 Pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan mutu sekolah (DAK SD/SMP)	KPS.01.01.CFM.09 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD (BOS-NAS)	KPS.01.01.CFM.10 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP/MTS dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP (BOS-NAS)
1. Dinas Pendidikan 2. Sekolah 3. Kementerian Pendidikan	1. Kementerian Pendidikan 2. Dinas Pendidikan Provinsi 3. Dinas Pendidikan Kabupaten 4. Korwil Bidang Pendidikan 5. Sekolah	1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang/Jasa	1. Sekolah 2. Kementerian Pendidikan 3. Dinas Pendidikan Kabupaten 4. KPPN Provinsi 5. Bank Penyalur	1. Sekolah 2. Kementerian Pendidikan 3. Dinas Pendidikan Kabupaten 4. KPPN Provinsi 5. Bank Penyalur

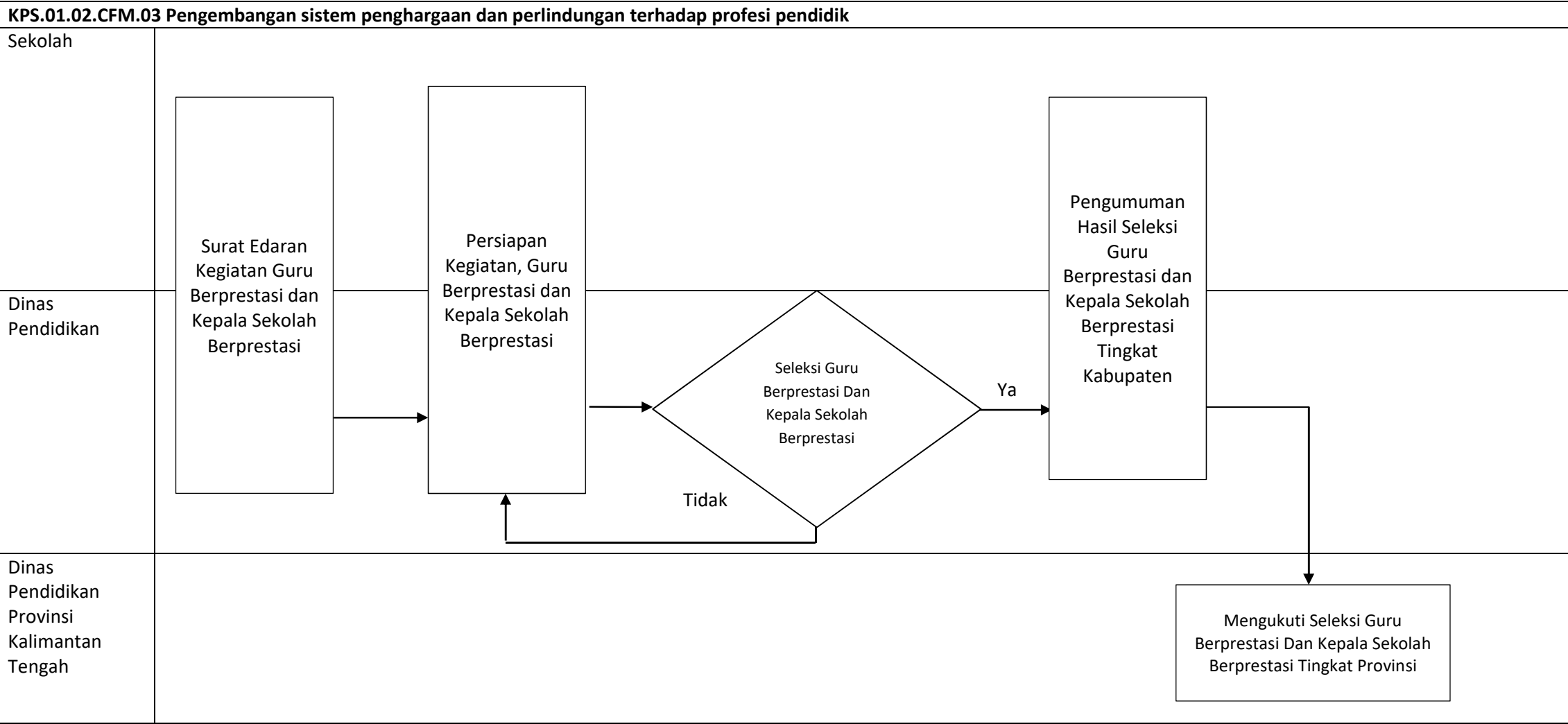
PETA LINTAS FUNGSI



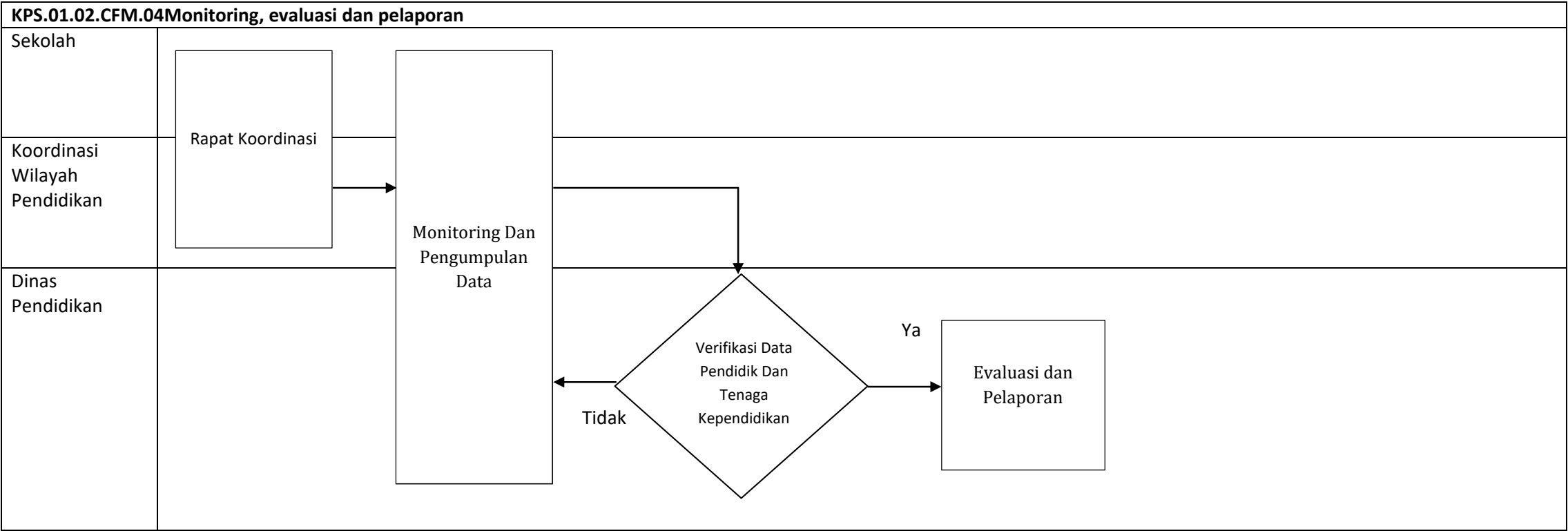
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



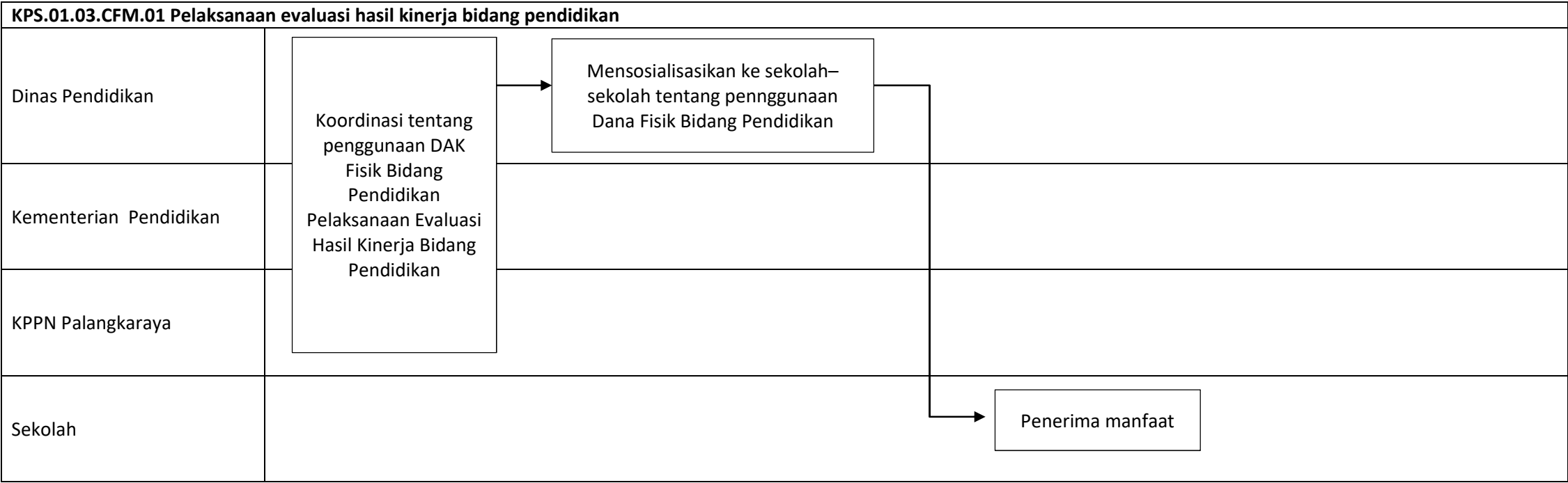
PETA RELASI

KPS.01.02

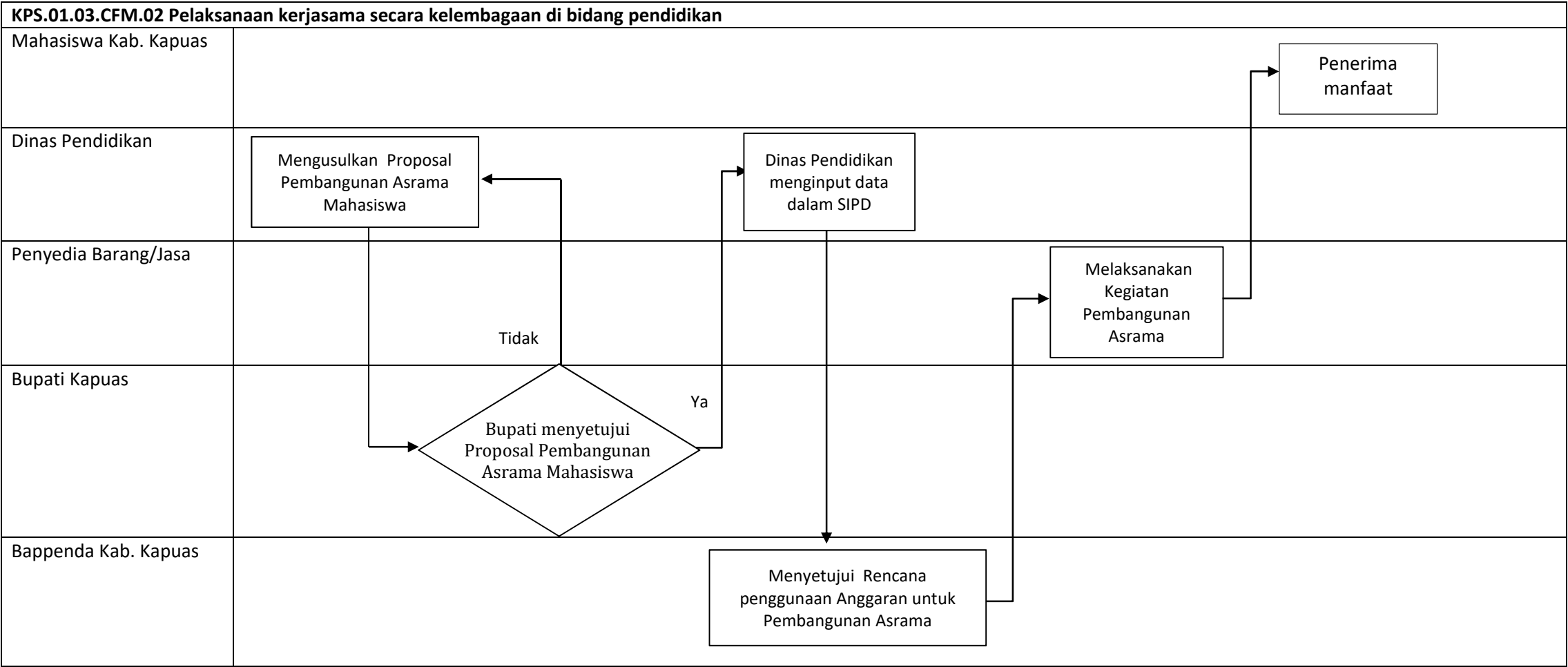
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

KPS.01.02.CFM.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	KPS.01.02.CFM.02 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	KPS.01.02.CFM.03 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	KPS.01.02.CFM.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Sekolah 2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan / Pengawas Sekolah 3. Dinas Pendidikan 4. BPKAD 5. Bank Penyalur	1. Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2. Dinas Pendidikan 3. Sekolah, Guru Dan Tenaga Kependidikan 4. LPTK Pelaksana Pendidikan Profesi Guru	1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	1. Sekolah 2. Koordinasi Wilayah Pendidikan 3. Dinas Pendidikan

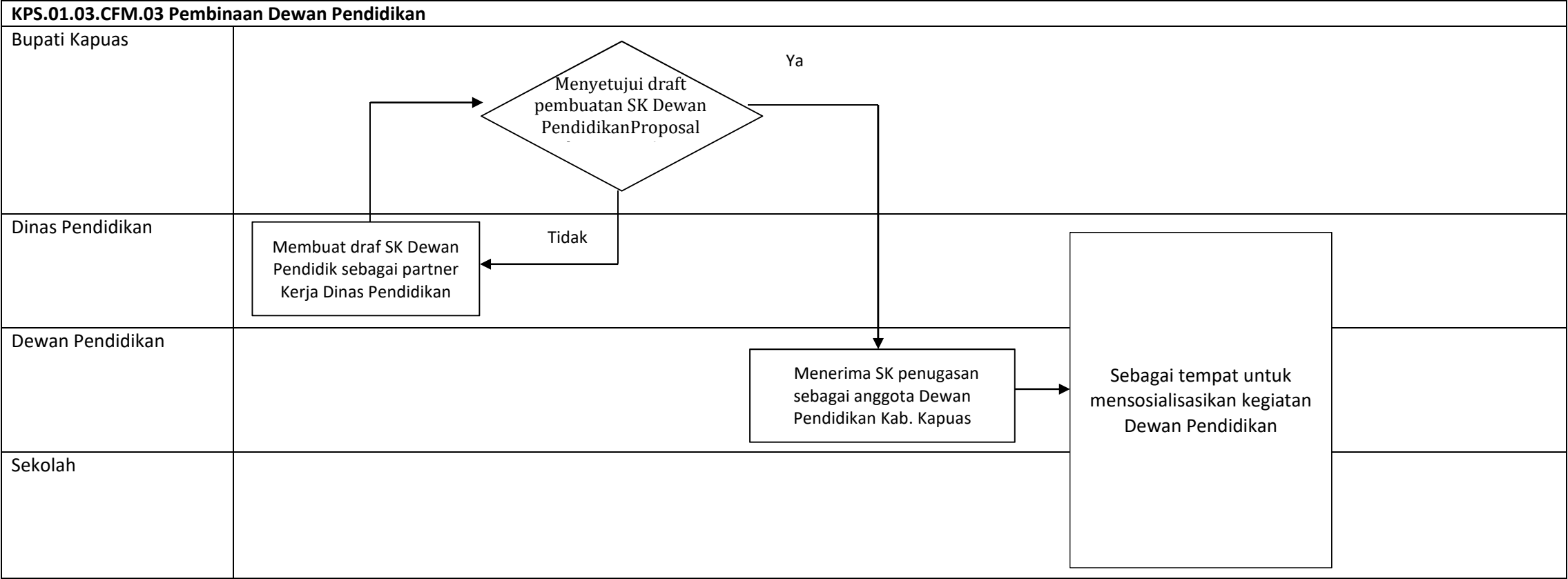
PETA LINTAS FUNGSI



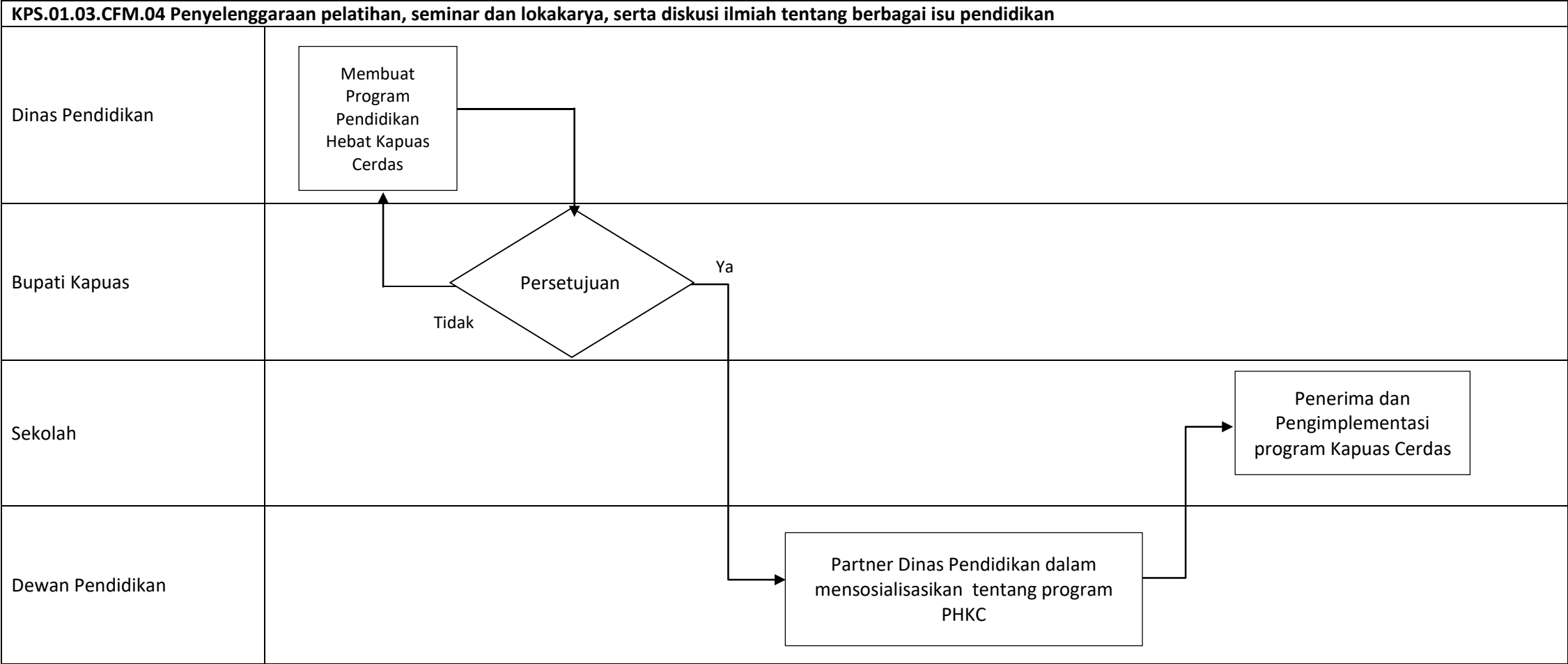
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



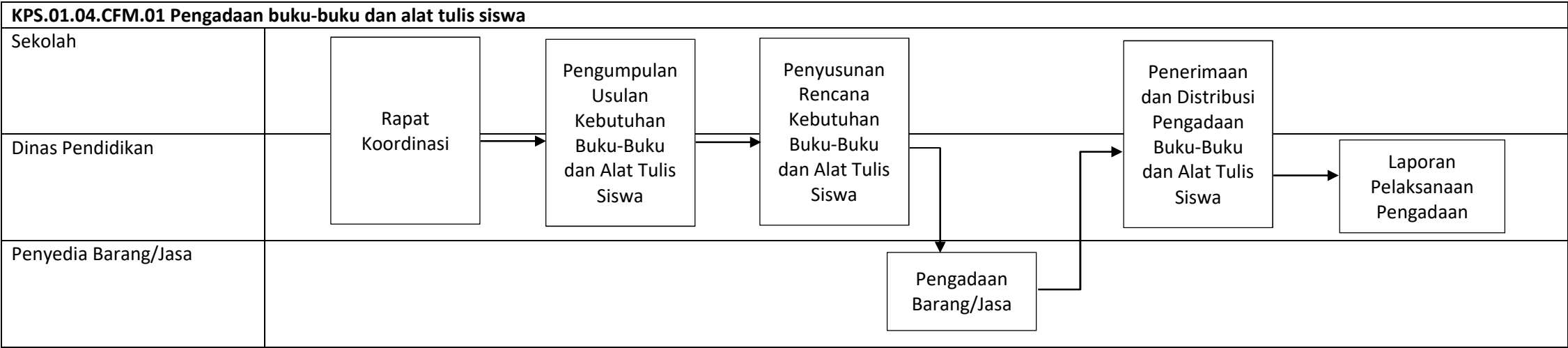
PETA RELASI

KPS.01.03

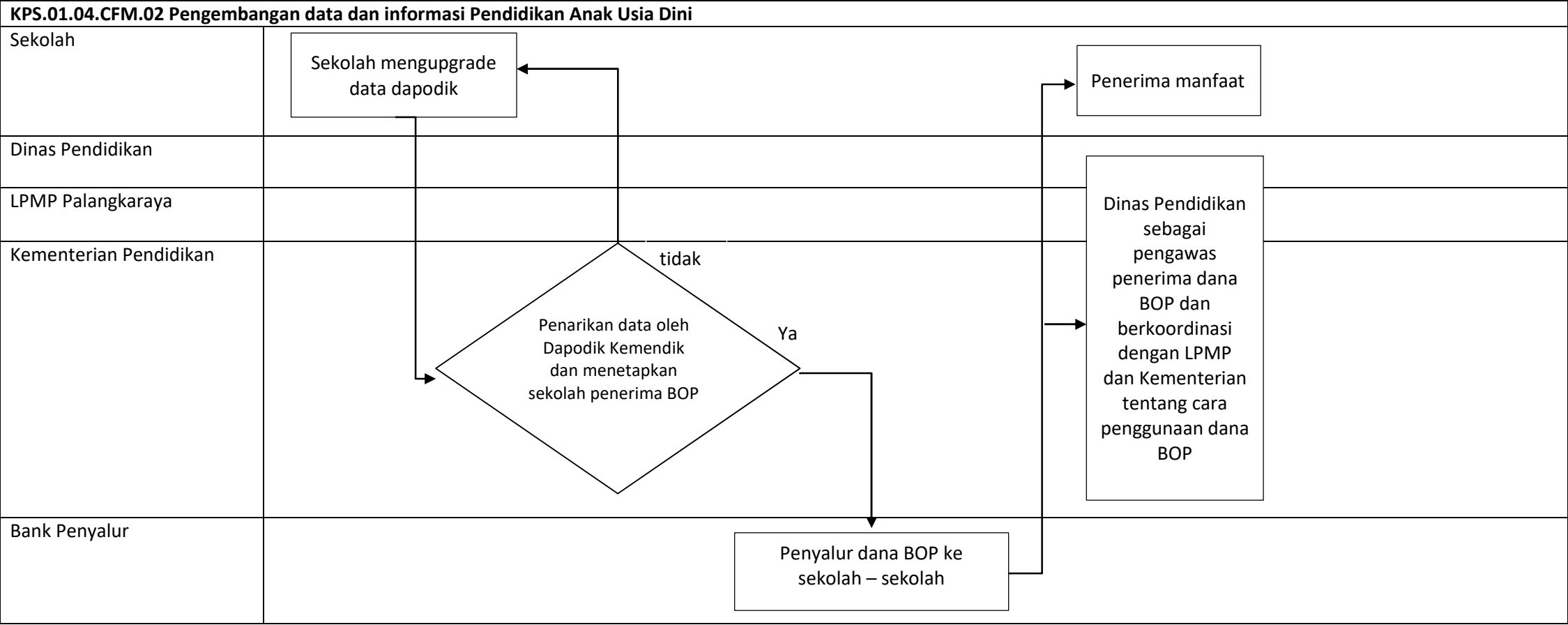
Manajemen Pelayanan Pendidikan

KPS.01.03.CFM.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	KPS.01.03.CFM.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	KPS.01.03.CFM.03 Pembinaan Dewan Pendidikan	KPS.01.03.CFM.04 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1. Dinas Pendidikan 2. Kementerian Pendidikan 3. KPPN Palangkaraya 4. Sekolah	1. Mahasiswa Kab. Kapuas 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang/Jasa 4. Bupati Kapuas 5. Bappenda Kab. Kapuas	1. Bupati Kapuas 2. Dinas Pendidikan 3. Dewan Pendidikan 4. Sekolah	1. Dinas Pendidikan 2. Bupati Kapuas 3. Sekolah 4. Dewan Pendidikan

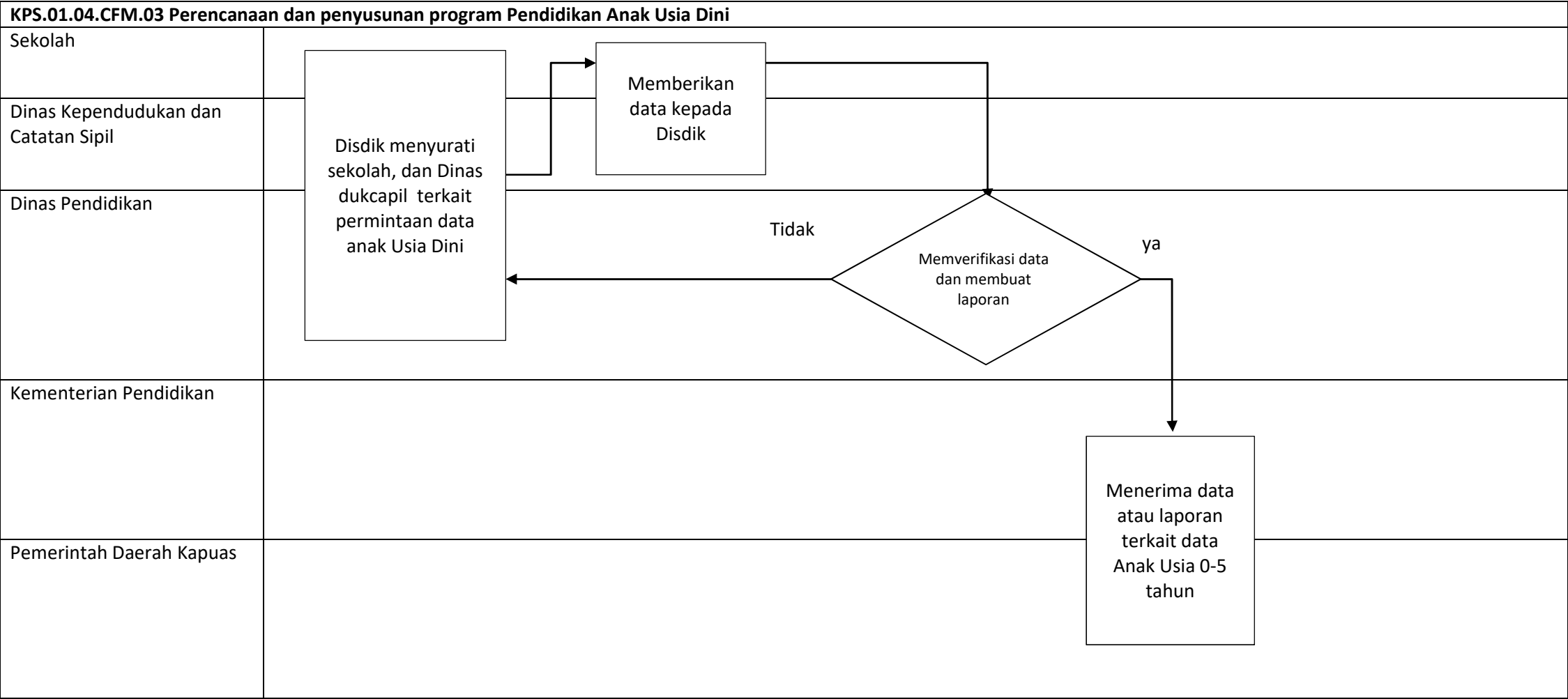
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



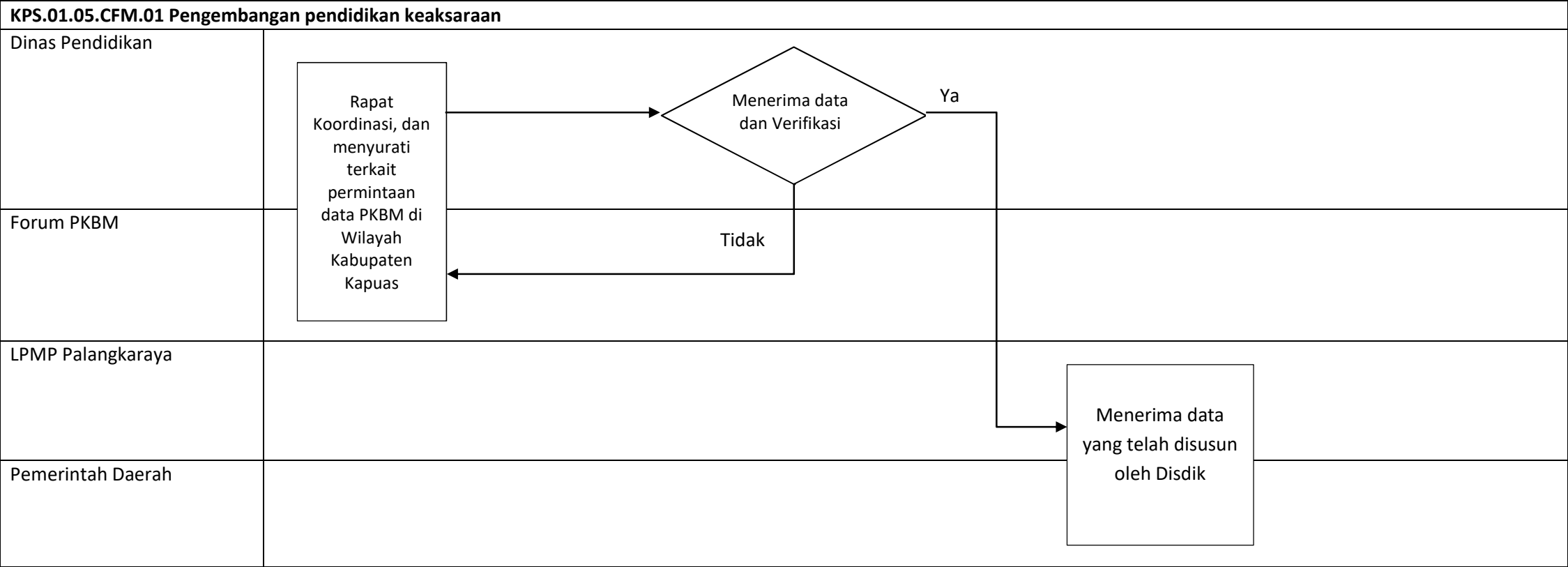
PETA RELASI

KPS.01.04

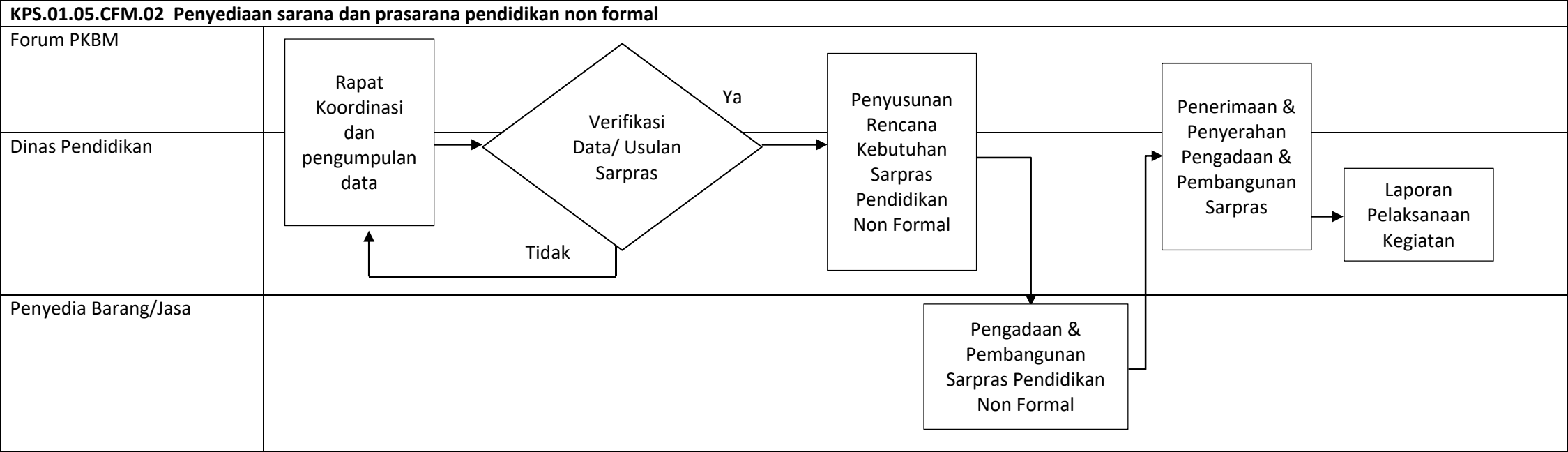
Pendidikan Anak Usia Dini

KPS.01.04.CFM.01 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	KPS.01.04.CFM.02 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	KPS.01.04.CFM.03 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang/Jasa	1. Sekolah 2. Dinas Pendidikan 3. LPMP Palangkaraya 4. Kementerian Pendidikan 5. Bank Penyalur	1. Sekolah 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Dinas Pendidikan 4. Kementerian Pendidikan 5. Pemerintah Daerah Kapuas

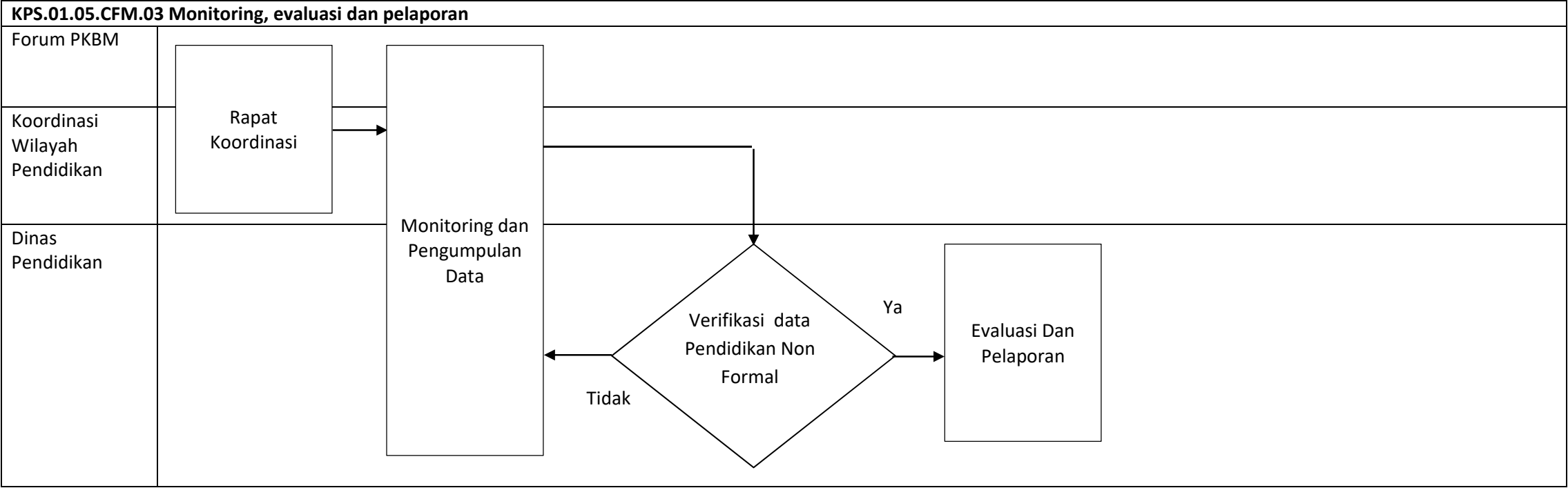
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



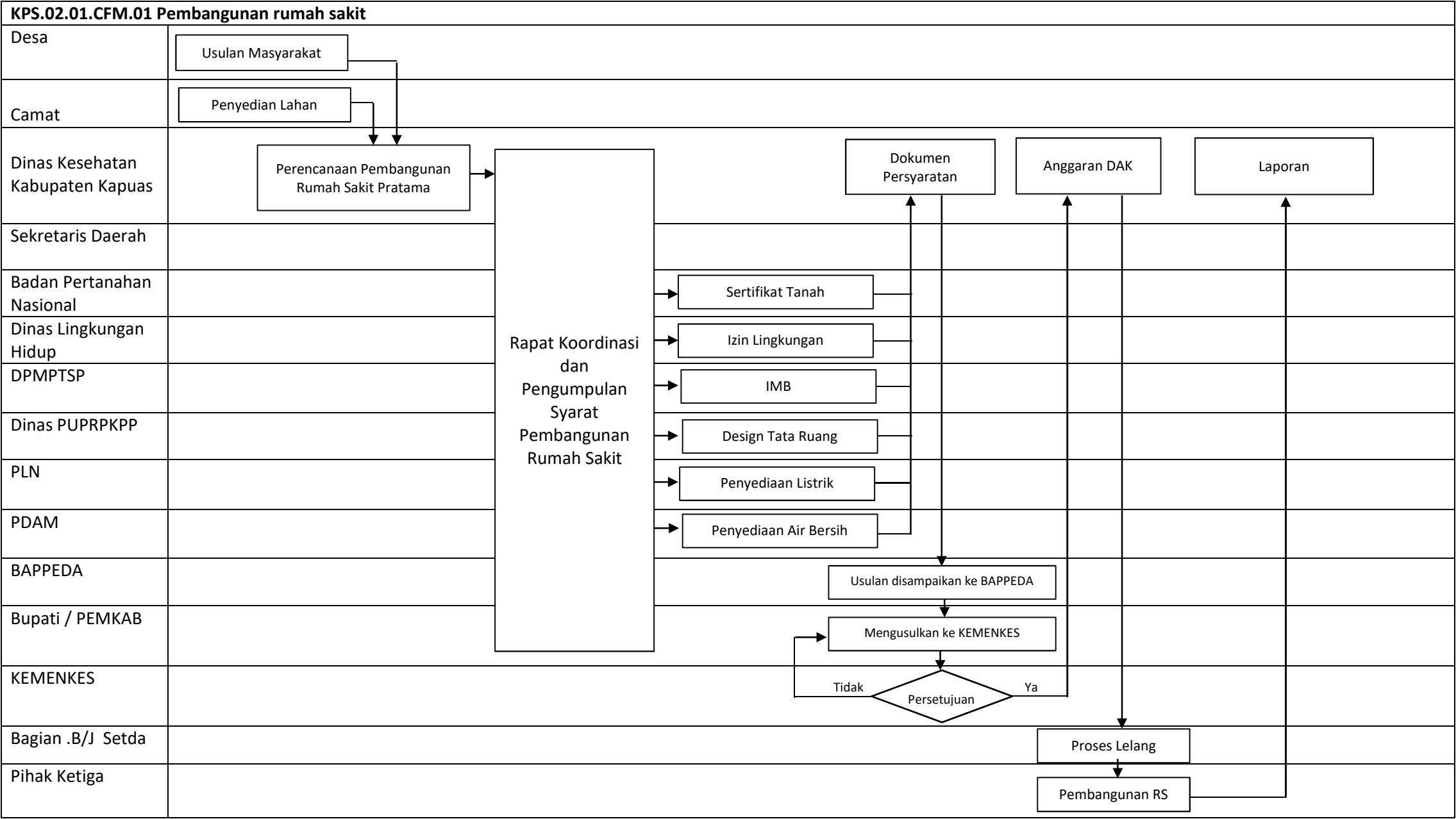
PETA RELASI

KPS.01.05

Pendidikan Non Formal

KPS.01.05.CFM.01 Pengembangan pendidikan keaksaraan	KPS.01.05.CFM.02 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	KPS.01.05.CFM.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Dinas Pendidikan 2. Forum PKBM 3. LPMP Palangkaraya 4. Pemerintah Daerah	1. Forum PKBM 2. Dinas Pendidikan 3. Penyedia Barang/Jasa	1. Forum PKBM 2. Koordinasi Wilayah Pendidikan 3. Dinas Pendidikan

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

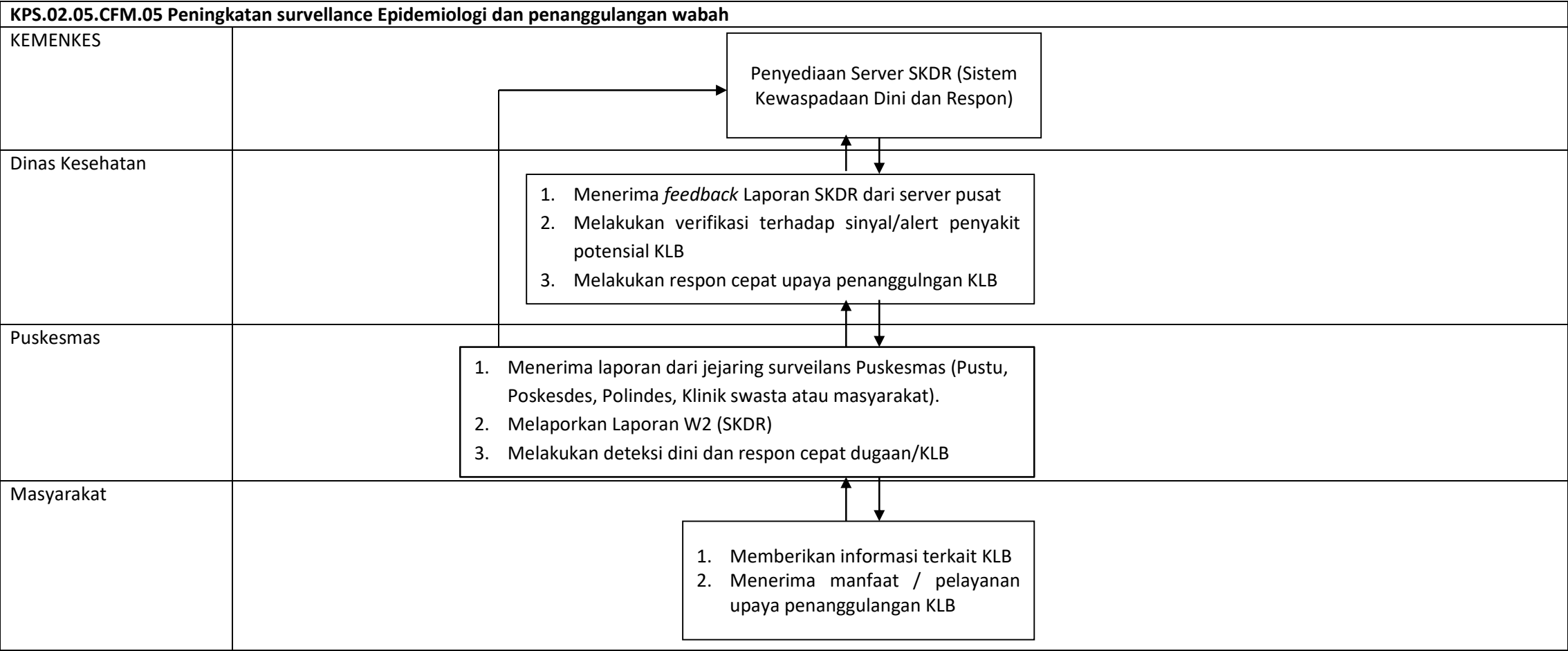
KPS.02.01

Pengadaan, peningkatan dan Pemeliharaansarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

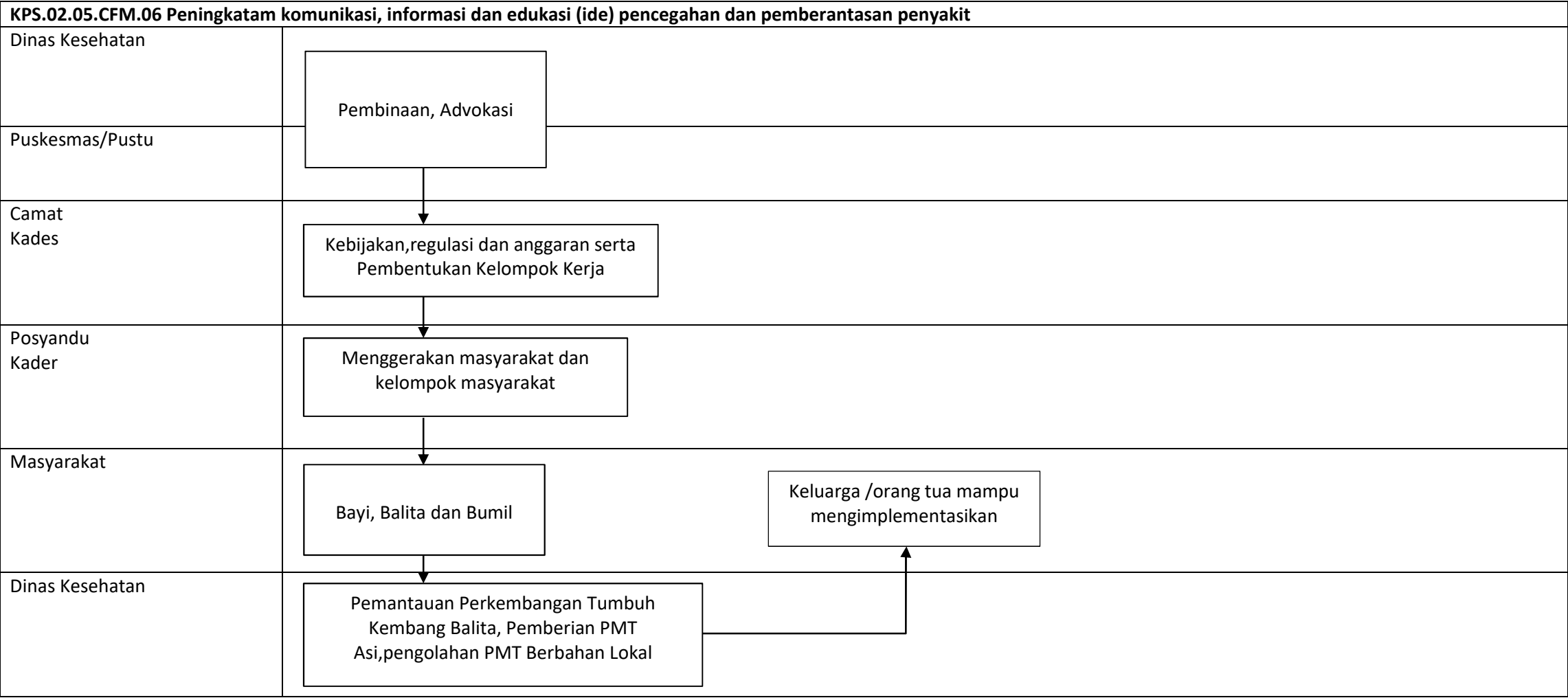
KPS.02.01.CFM.01 Pembangunan rumah sakit

- | |
|--|
| 1. Desa |
| 2. Camat |
| 3. Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas |
| 4. Sekretaris Daerah |
| 5. Badan Pertanahan
Nasional |
| 6. Dinas Lingkungan Hidup |
| 7. DPMPTSP |
| 8. Dinas PUPRPKPP |
| 9. PLN |
| 10. PDAM |
| 11. BAPPEDA |
| 12. Bupati / PEMKAB |
| 13. KEMENKES |
| 14. Bagian .B/J Setda |
| 15. Pihak Ketiga |

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



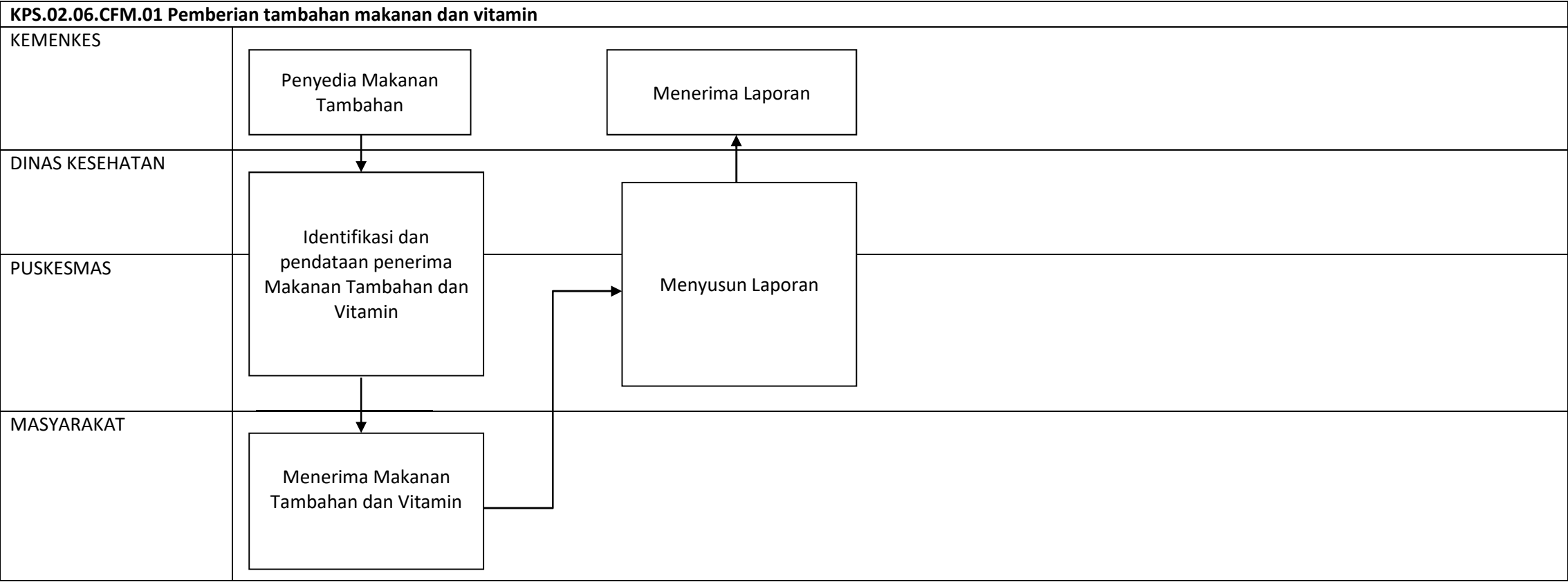
PETA RELASI

KPS.02.05

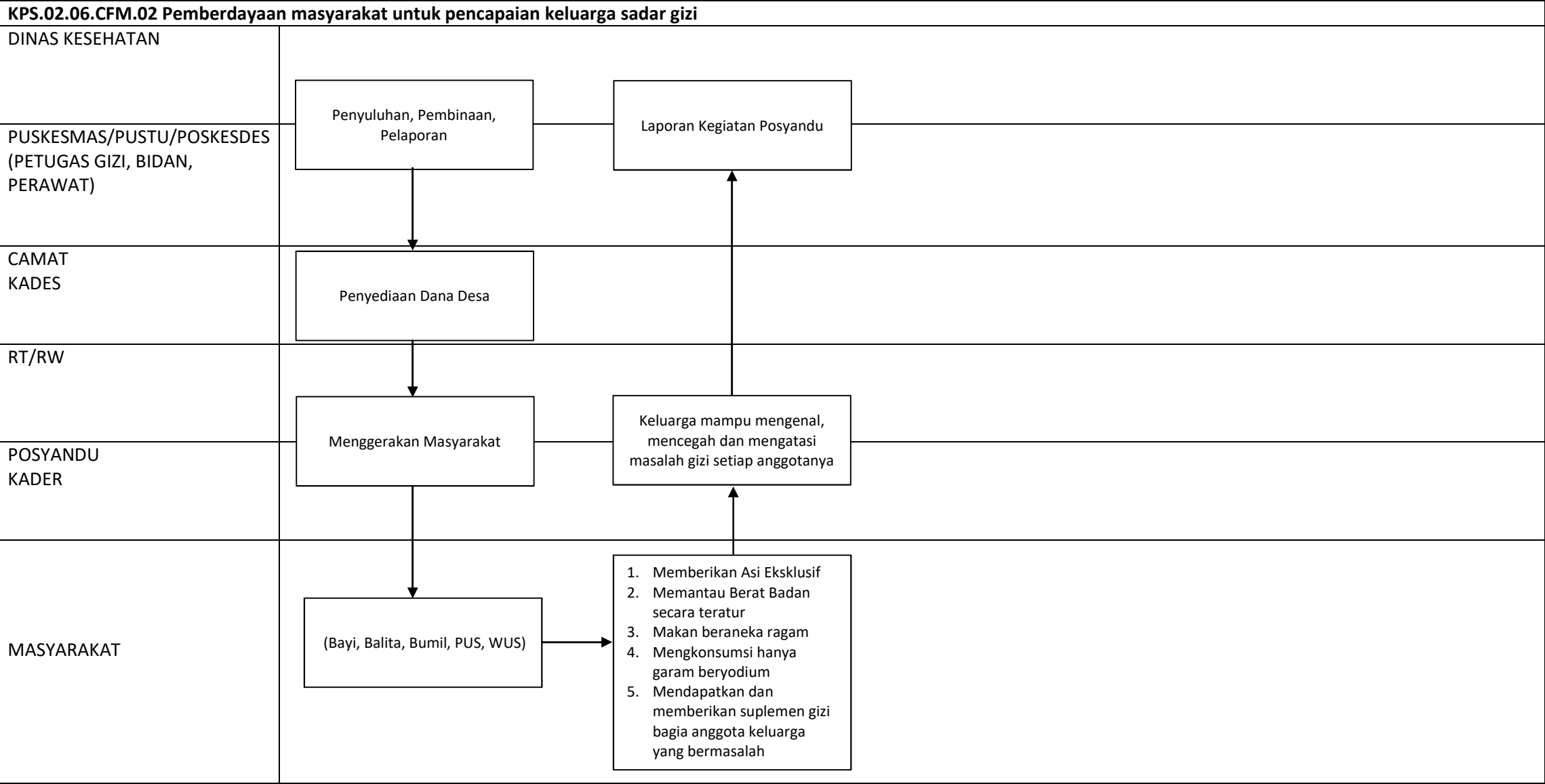
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KPS.02.05.CFM.05 Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	KPS.02.05.CFM.06 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1. Kementerian Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Puskesmas 4. Masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas/Pustu 3. Camat 4. Kades 5. Posyandu 6. Kader 7. Masyarakat

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

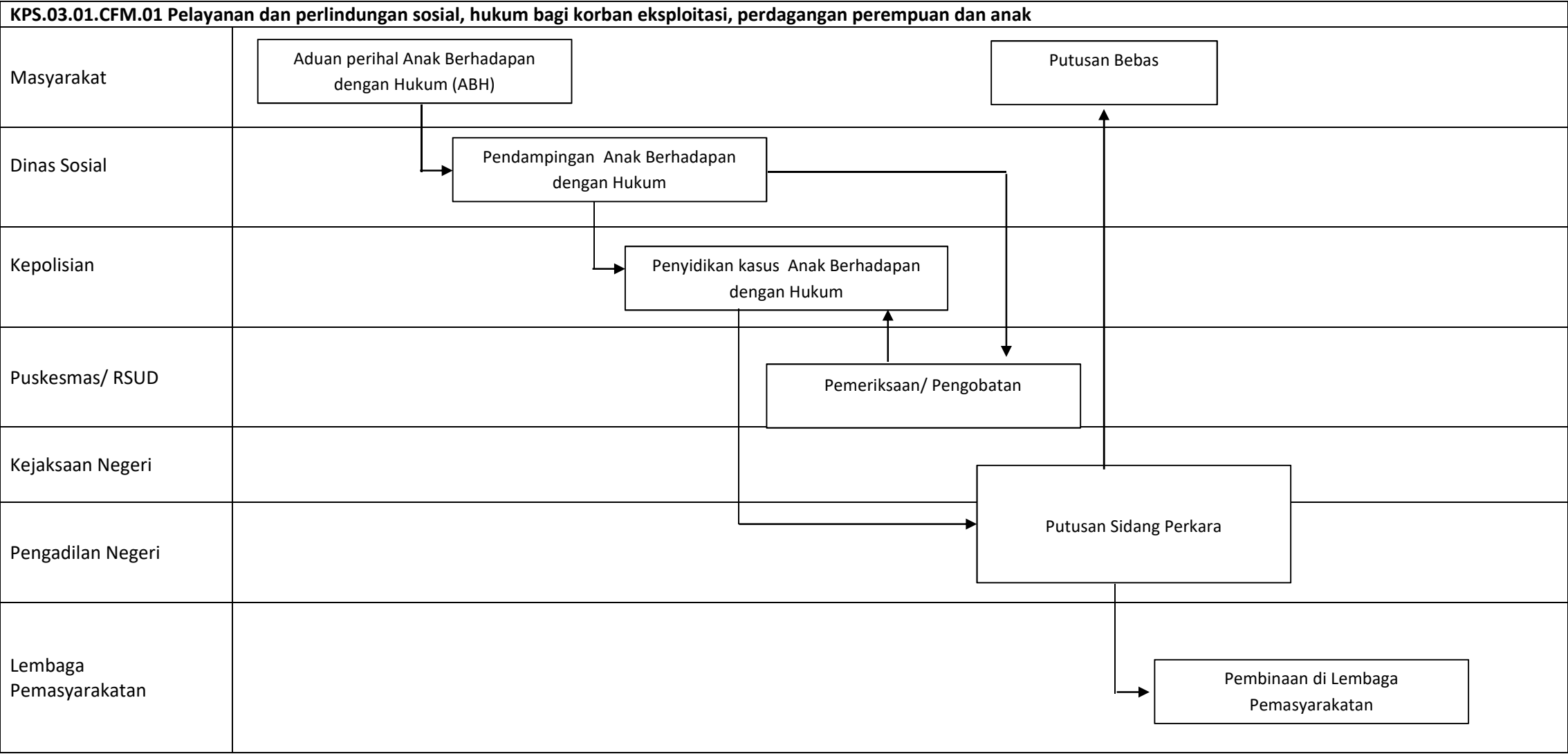
KPS.02.06

Perbaikan Gizi Masyarakat

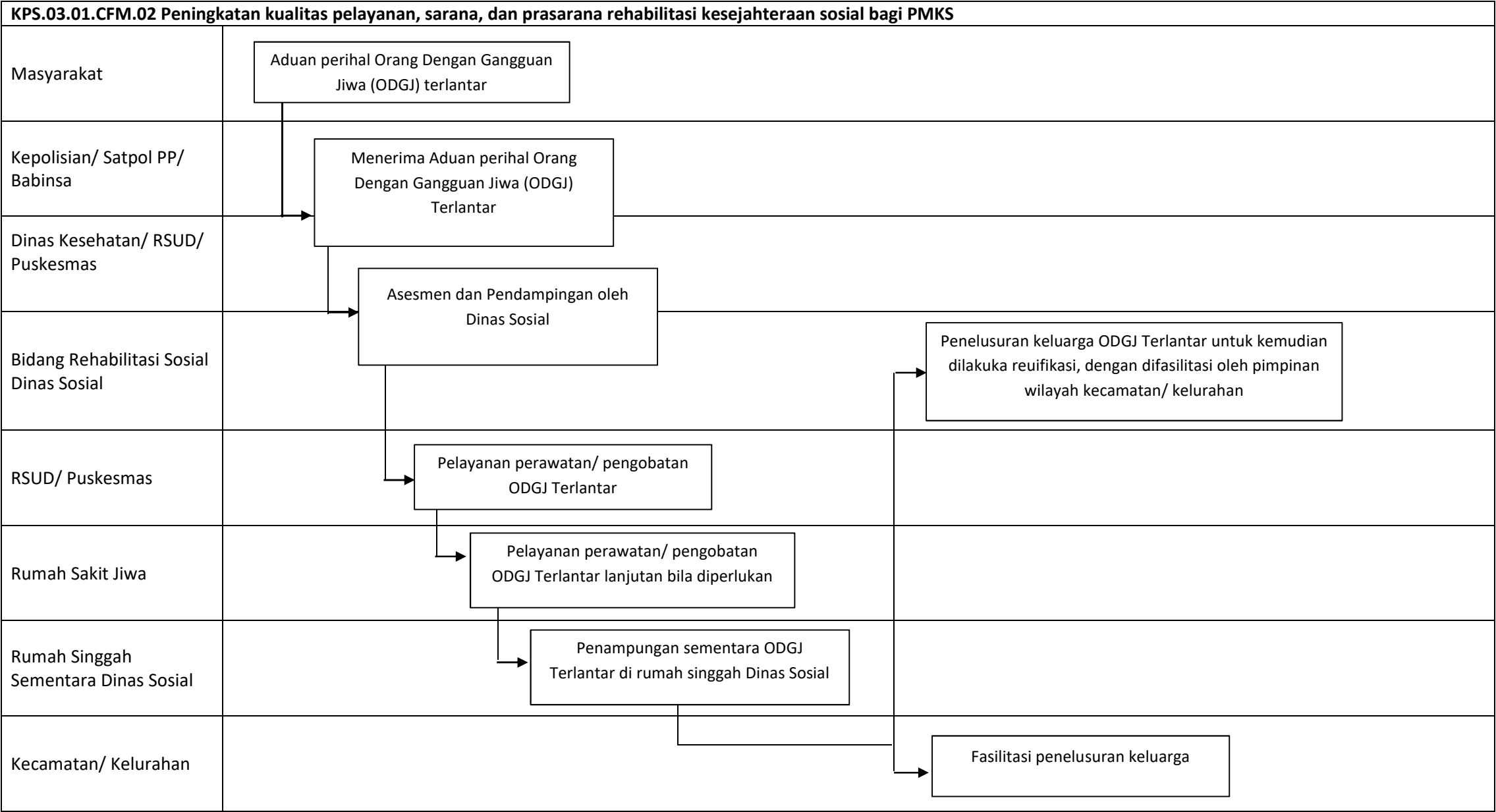
KPS.02.06.CFM.01 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1. Kemenetrian Kesehatan 2. Dinas Kesehatan 3. Puskesmas 4. Masyarakat

KPS.02.06.CFM.02 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas/Pustu/ 5. Poskesdes (Petugas Gizi, Bidan, Perawat) 3. Camat/Kades 4. RT/RW 5. Posyandu/Kader 6. Masyarakat

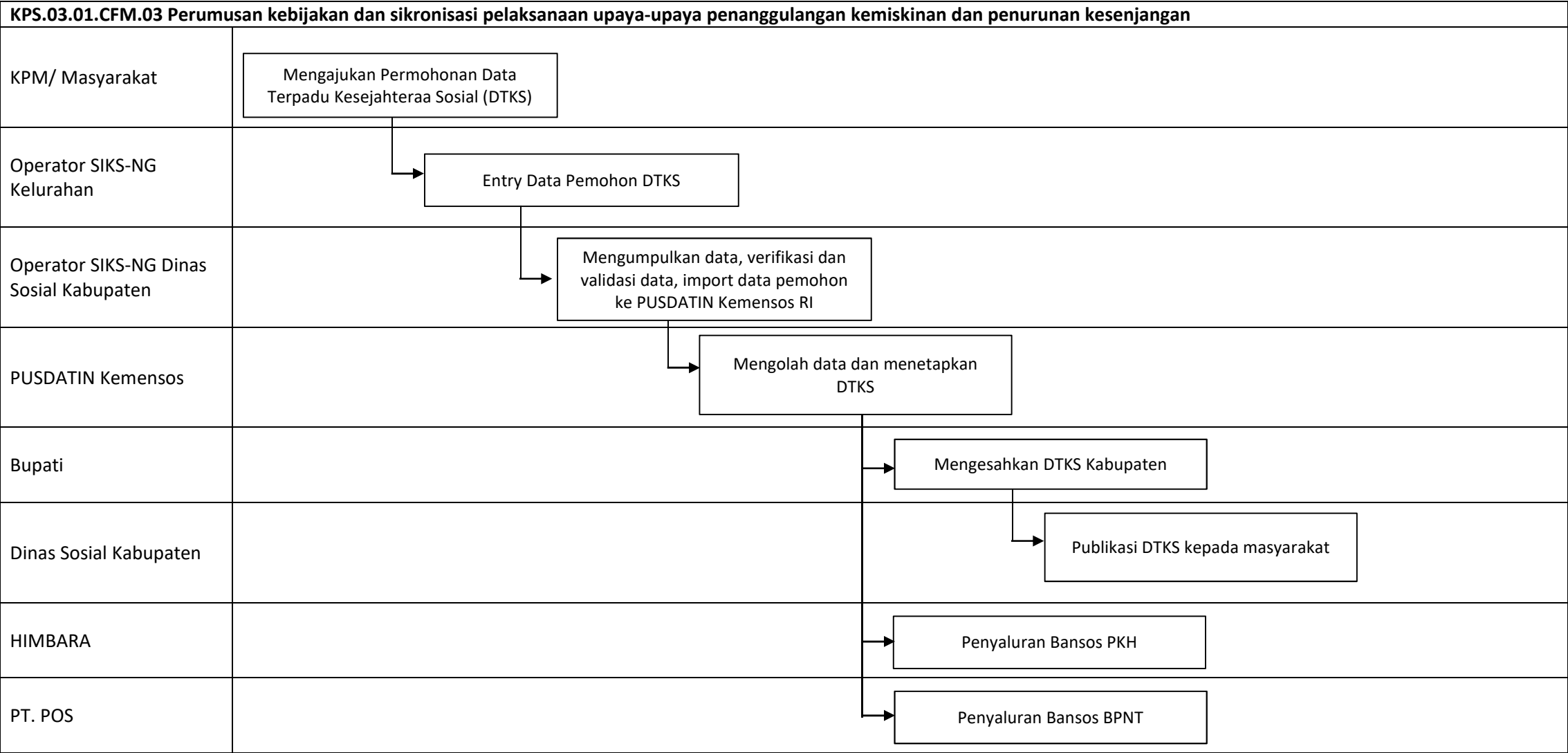
PETA LINTAS FUNGSI



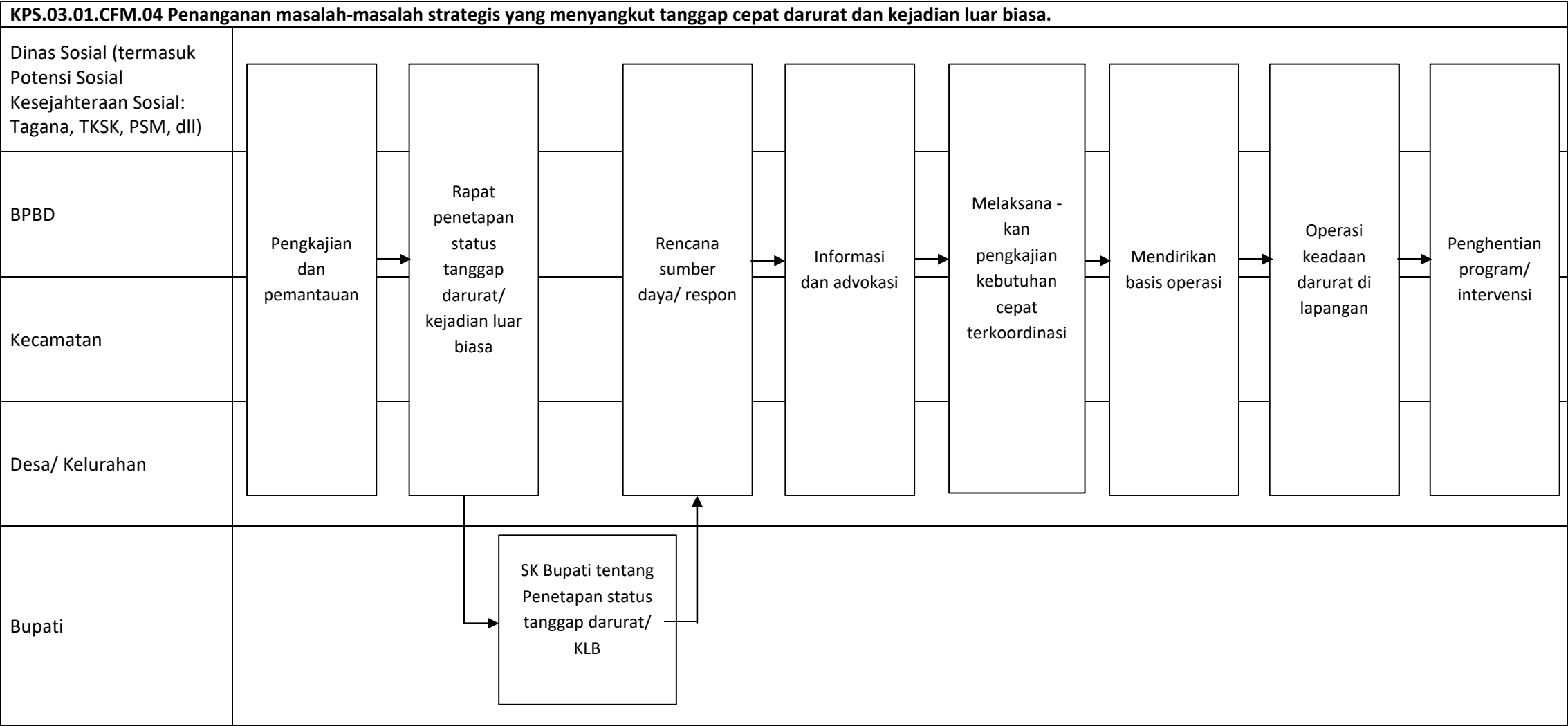
PETA LINTAS FUNGSI



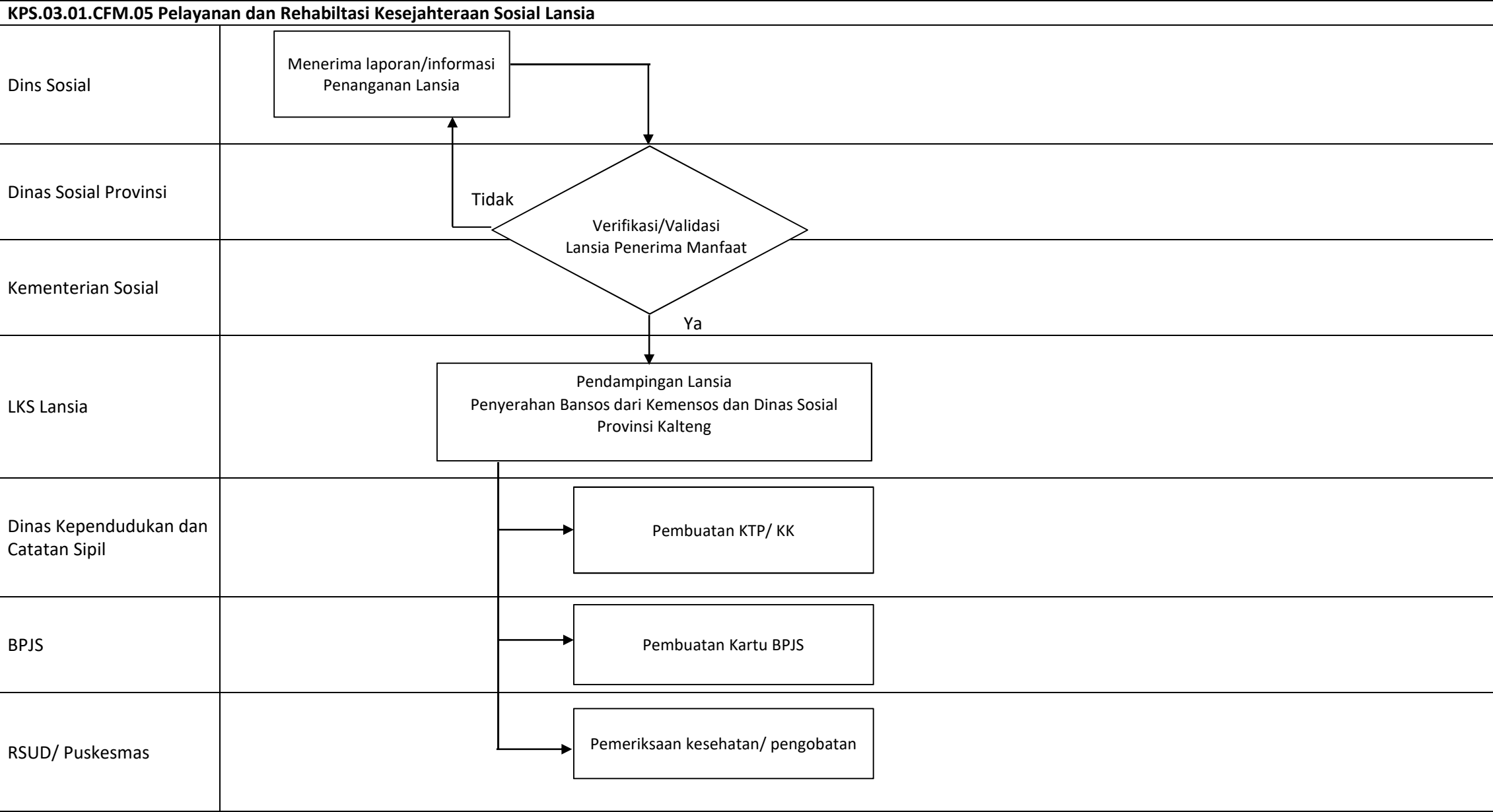
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



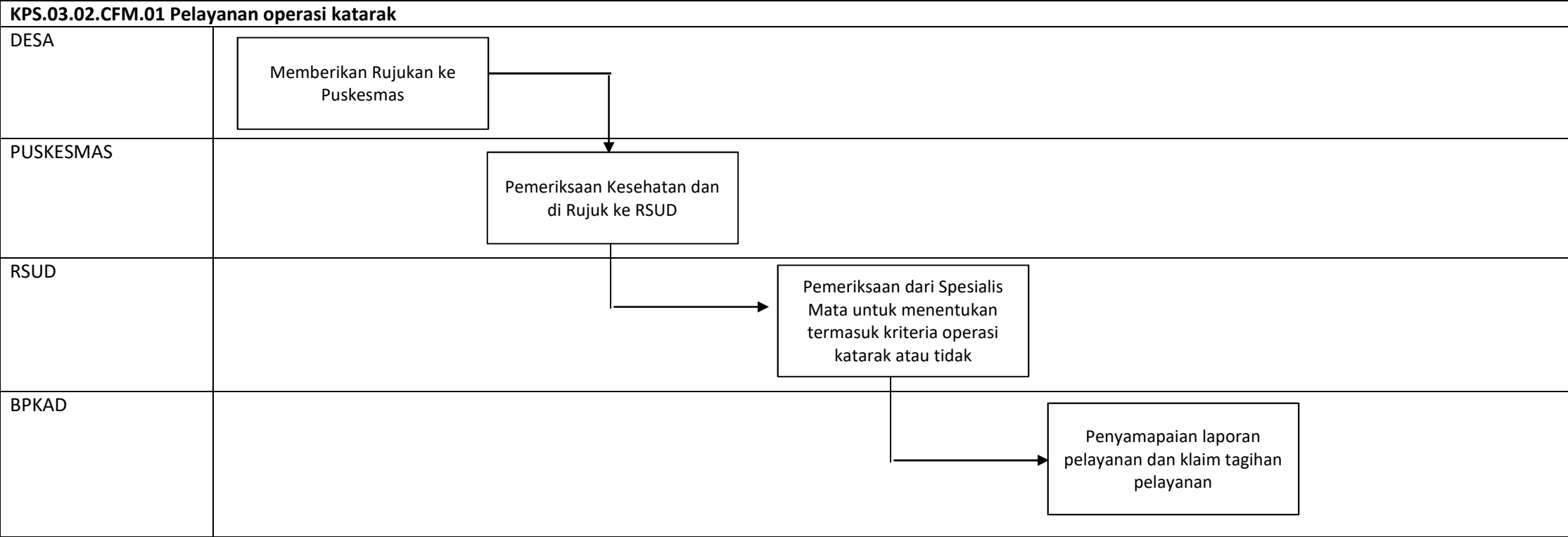
PETA LINTAS FUNGSI



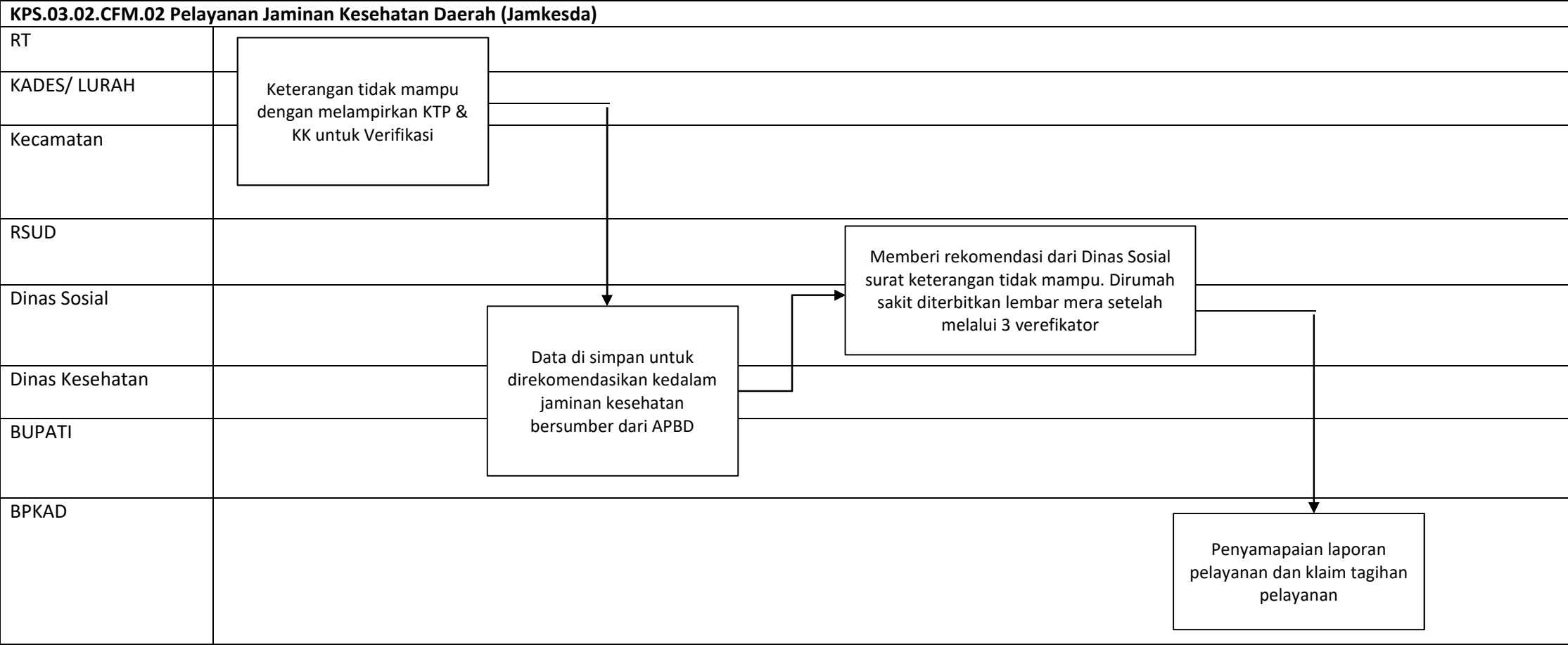
PETA RELASI

KPS.03.01 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
KPS.03.01.CFM.01 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	KPS.03.01.CFM.02 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	KPS.03.01.CFM.03 Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	KPS.03.01.CFM.04 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	KPS.03.01.CFM.05 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lansia.
1. Masyarakat 2. Dinas Sosial 3. Kepolisian 4. Puskesmas 5. RSUD 6. Kejaksaan Negeri 7. Pengadilan Negeri 8. Lembaga Pemasyarakatan	1. Masyarakat 2. Kepolisian 3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 4. Bintara Pembina Desa (Babinsa) 5. Dinas Kesehatan 6. RSUD 7. Puskesmas 8. RSJ 9. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 10. Kecamatan 11. Kelurahan	1. KPM/ Masyarakat 2. Operator SIKS-NG Kelurahan 3. Operator SIKS-NG Dinas Sosial Kabupaten 4. Pusat Data dan Informasi Kemensos 5. Bupati 6. Dinas Sosial Kabupaten 7. HIMBARA 8. PT. POS	1. Dinas Sosial (termasuk Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial: Tagana, TKSK, PSM, dll) 2. PSKS 3. BPBD 4. Kecamatan 5. Desa/ Kelurahan 6. Bupati	1. Dins Sosial 2. Dinas Sosial Provinsi 3. Kementerian Sosial 4. LKS Lansia 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. BPJS 7. RSUD 8. Puskesmas

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



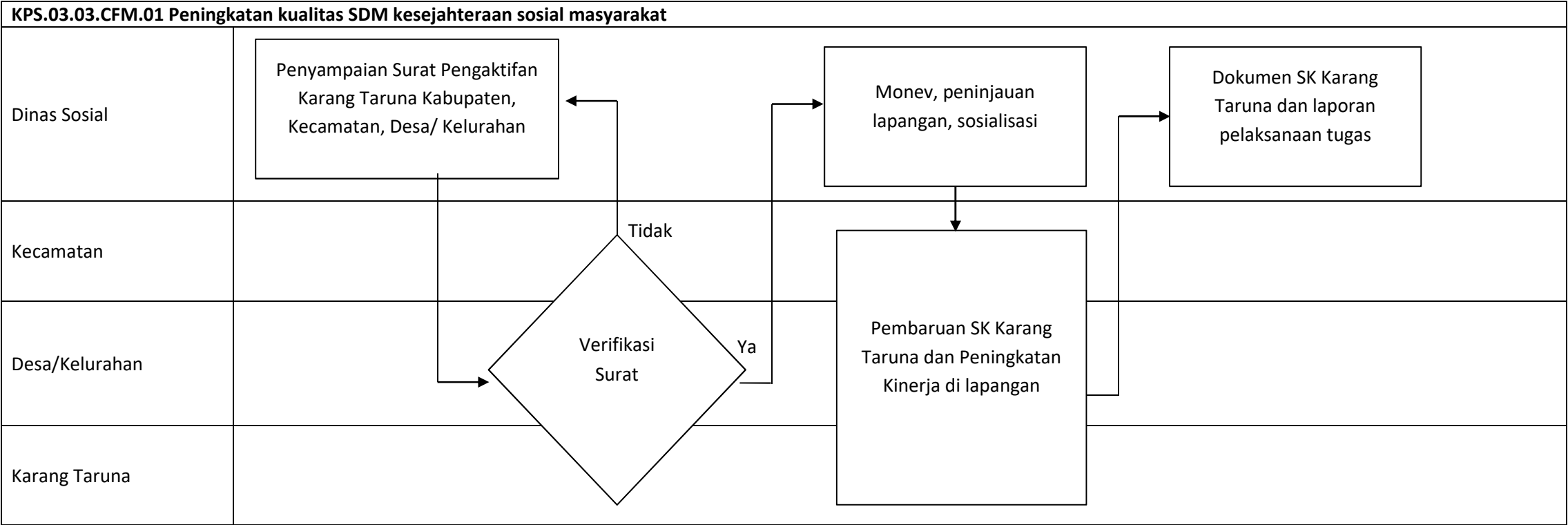
PETA RELASI

KPS.03.02

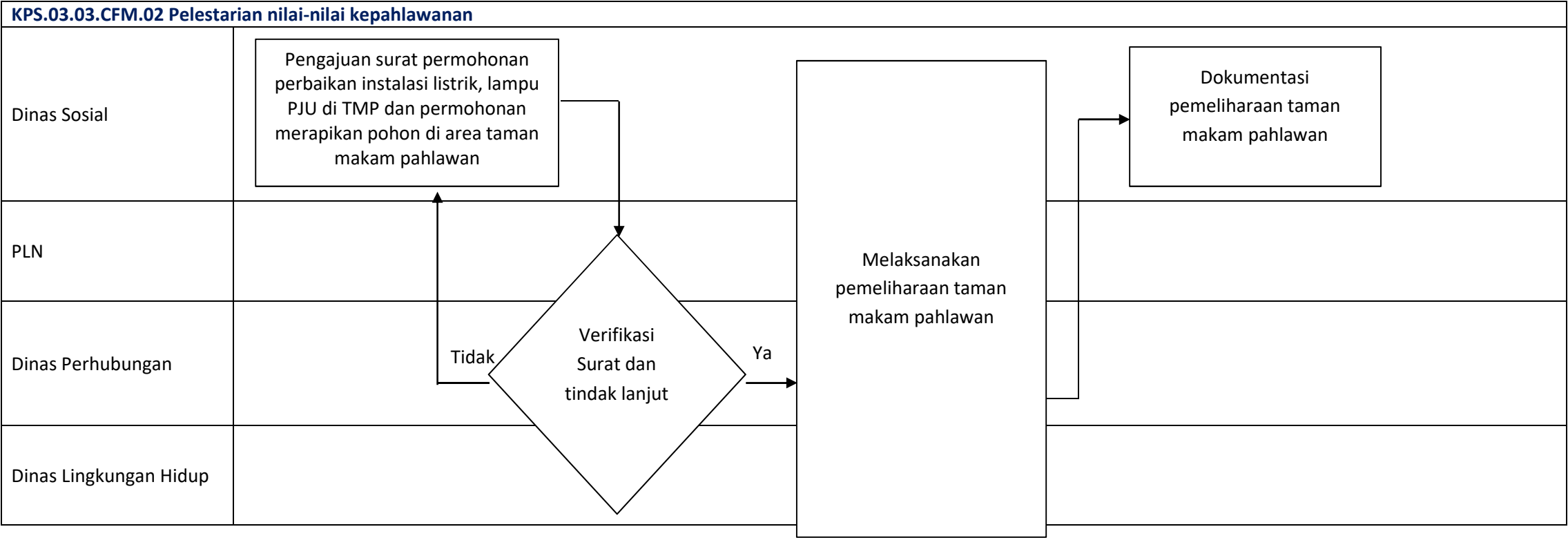
Pelayanan kesehatan penduduk miskin

KPS.03.02.CFM.01 Pelayanan operasi katarak	KPS.03.02.CFM.02 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
1. DESA 2. PUSKESMAS 3. RSUD 4. BPKAD	1. RT 2. KADES/ LURAH 3. Kecamatan 4. RSUD 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kesehatan 7. BUPATI 8. BPKAD

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



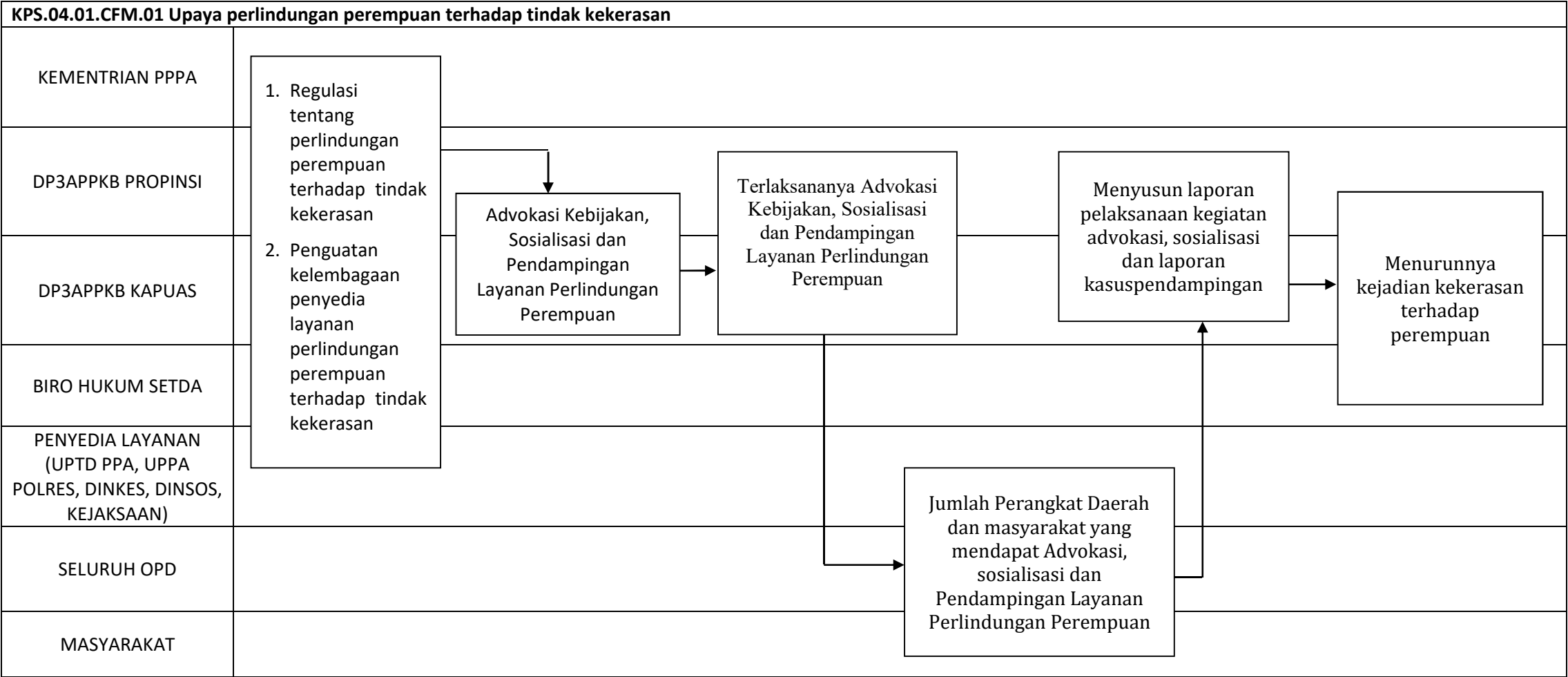
PETA RELASI

KPS.03.03

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

KPS.03.03.CFM.01 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	KPS.03.03.CFM.02 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
5. Dinas Sosial 6. Kecamatan 7. Desa/Kelurahan 8. Karang Taruna	1. Dinas Sosial 2. PLN 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Lingkungan Hidup

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

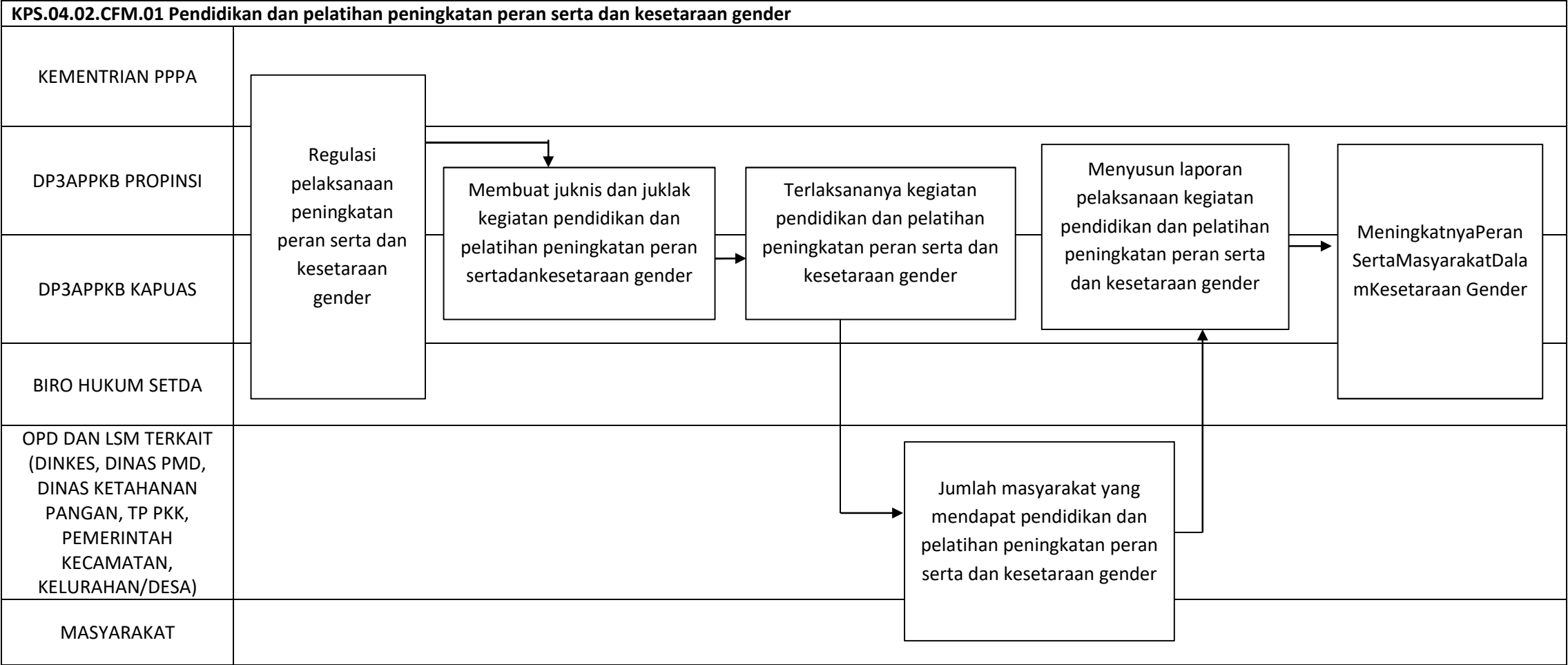
KPS.04.01

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

KPS.04.01.CFM.01 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kementrian Pppa2. DP3APPKB Propinsi3. DP3APPKB Kapuas4. Biro Hukum Setda5. Penyedia Layanan (UPTD
PPA, UPPA Polres,
Dinkes, Dinsos,
Kejaksaan)6. Seluruh OPD7. Masyarakat |
|--|

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

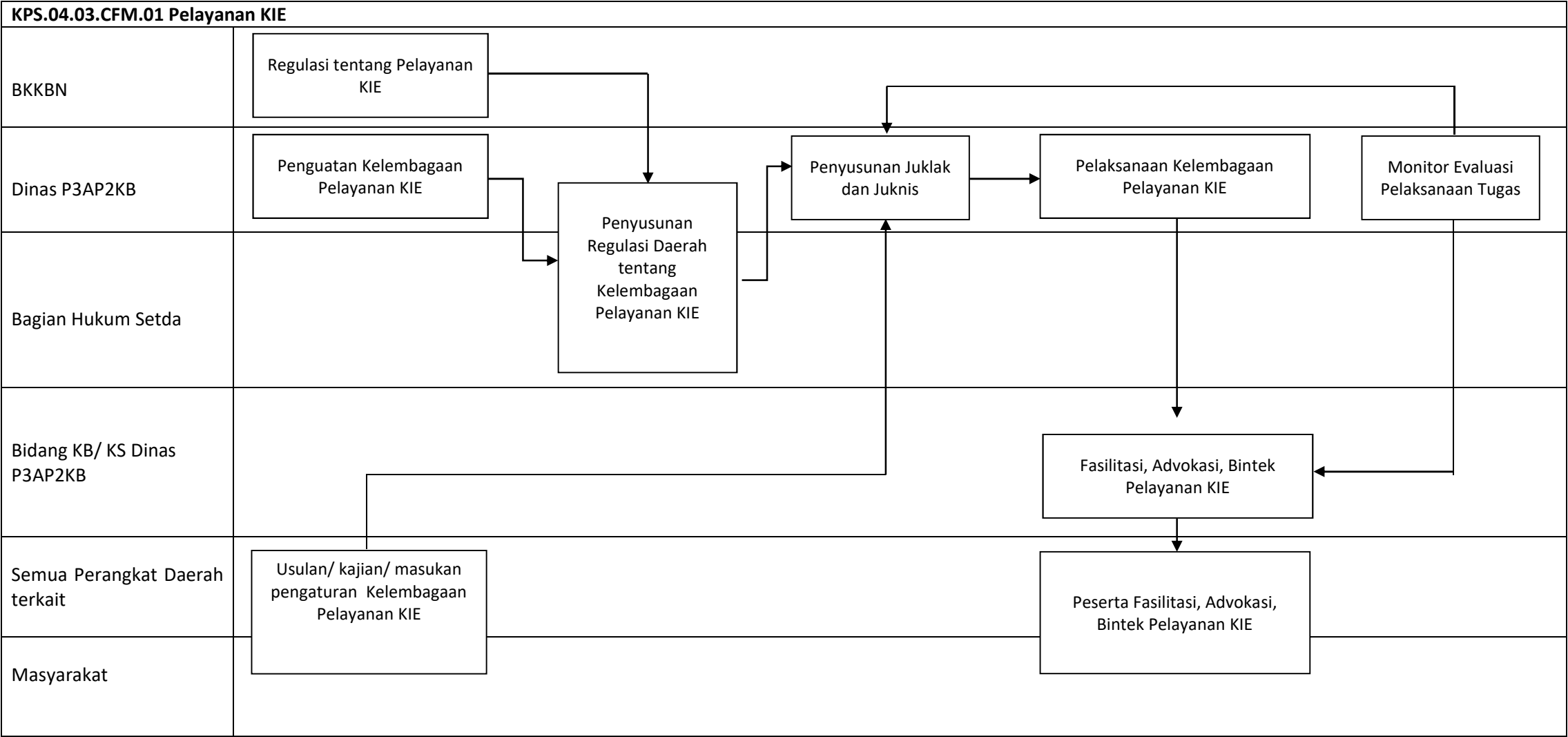
KPS.04.02

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

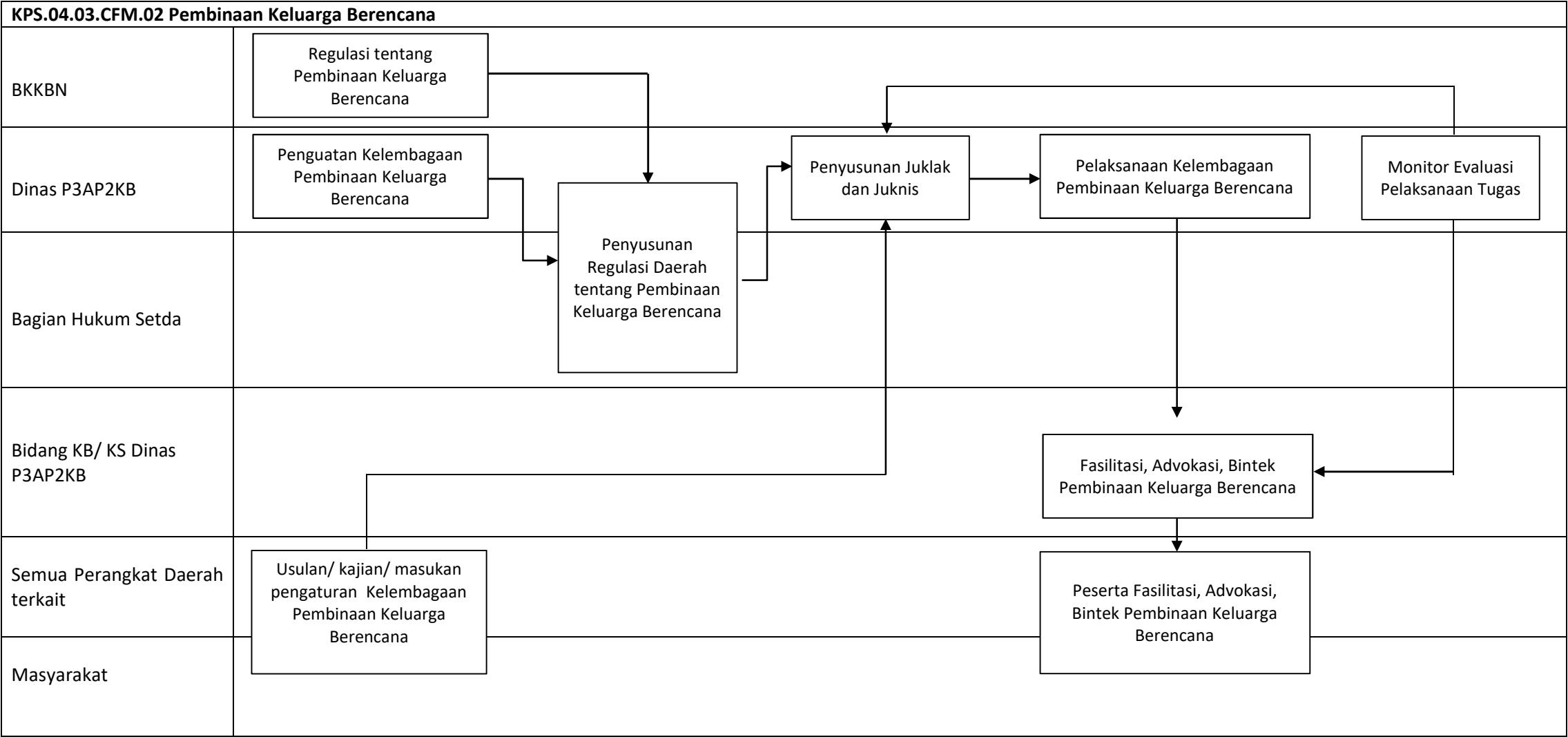
KPS.04.02.CFM.01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kementrian PPPA2. DP3APPKB Propinsi3. DP3APPKB Kapuas4. Biro Hukum Setda5. OPD dan LSM Terkait
(Dinkes, Dinas PMD,
Dinas Ketahanan Pangan,
Tp PKK, Pemerintah
Kecamatan,
Kelurahan/Desa)6. Masyarakat |
|---|

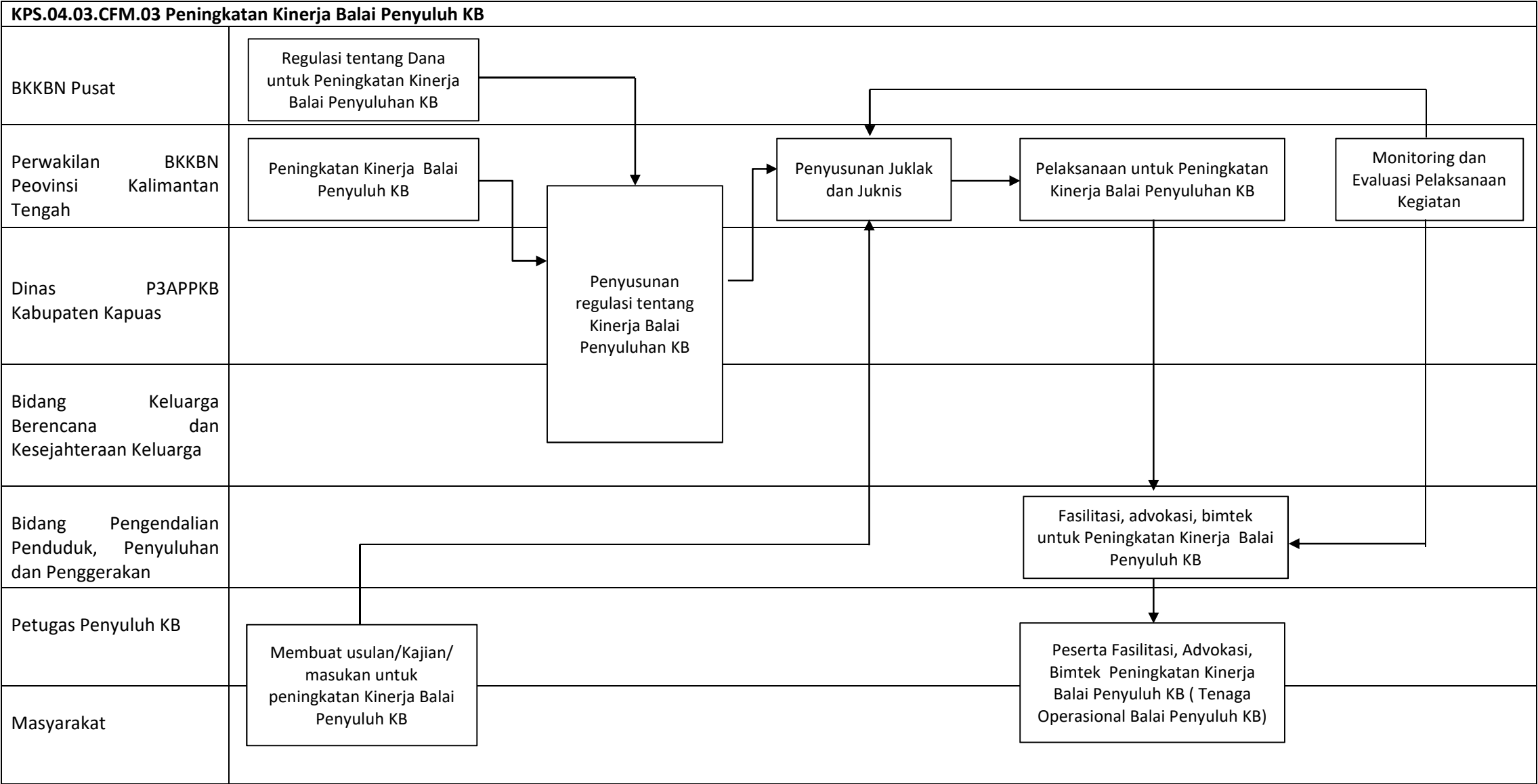
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.04.03

Keluarga Berencana

KPS.04.03.CFM.01 Pelayanan KIE

1. BKKBN
2. Dinas P3AP2KB
3. Bagian Hukum Setda
4. Bidang KB/ KS Dinas P3AP2KB
5. Semua Perangkat Daerah terkait
6. Masyarakat

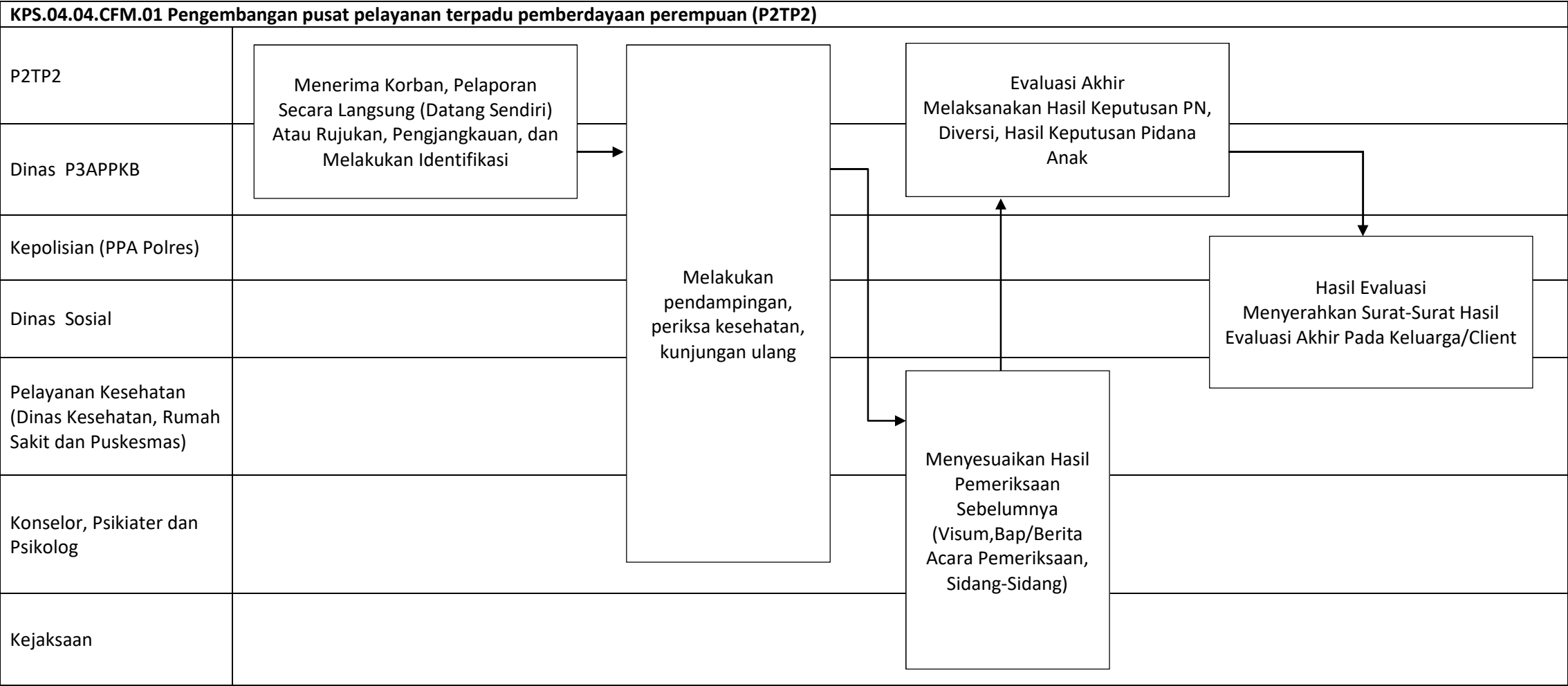
KPS.04.03.CFM.02 Pembinaan Keluarga Berencana

1. BKKBN
2. Dinas P3AP2KB
3. Bagian Hukum Setda
4. Bidang KB/ KS Dinas P3AP2KB
5. Semua Perangkat Daerah terkait
6. Masyarakat

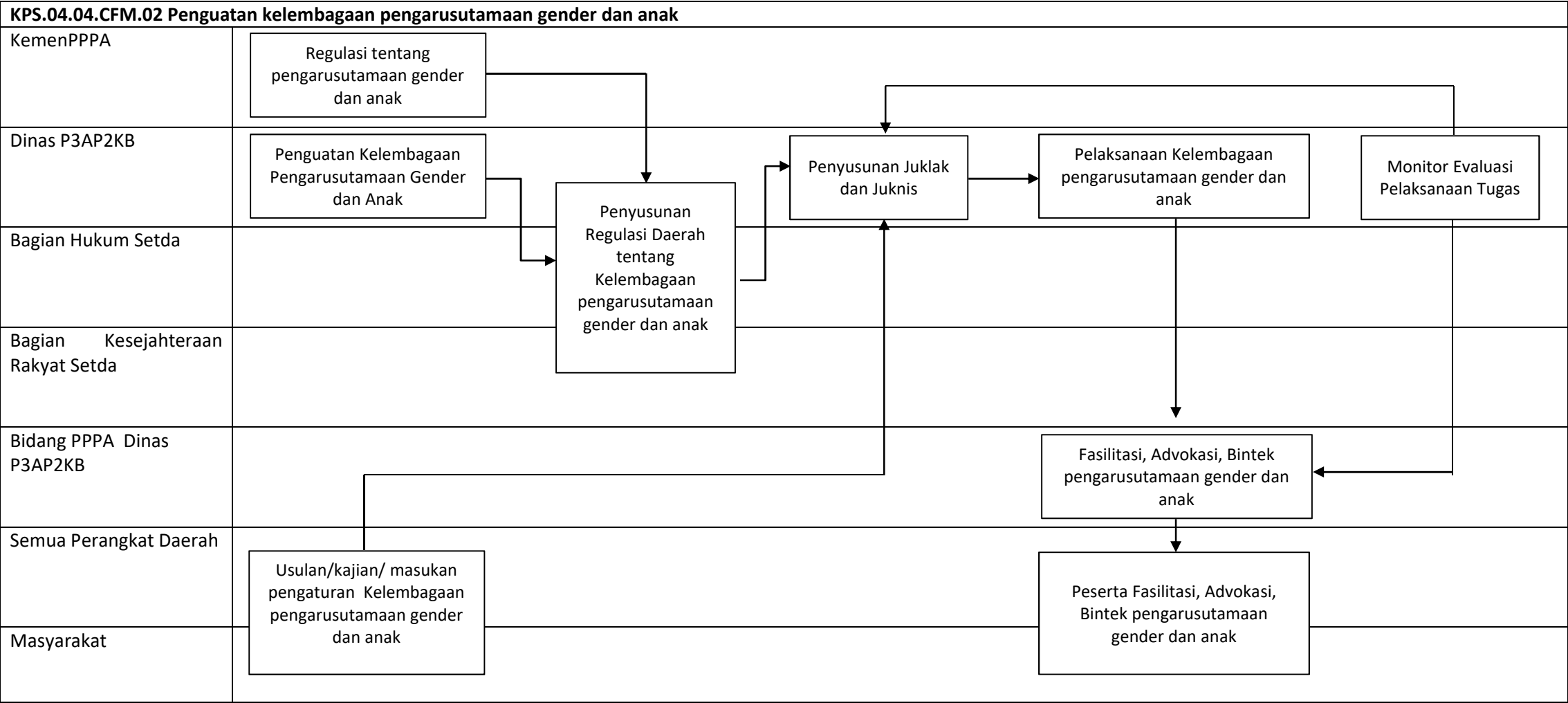
KPS.04.03.CFM.03 Peningkatan Kinerja Balai Penyuluh KB

1. BKKBN Pusat
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas
4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
6. Petugas Penyuluh KB
7. Masyarakat

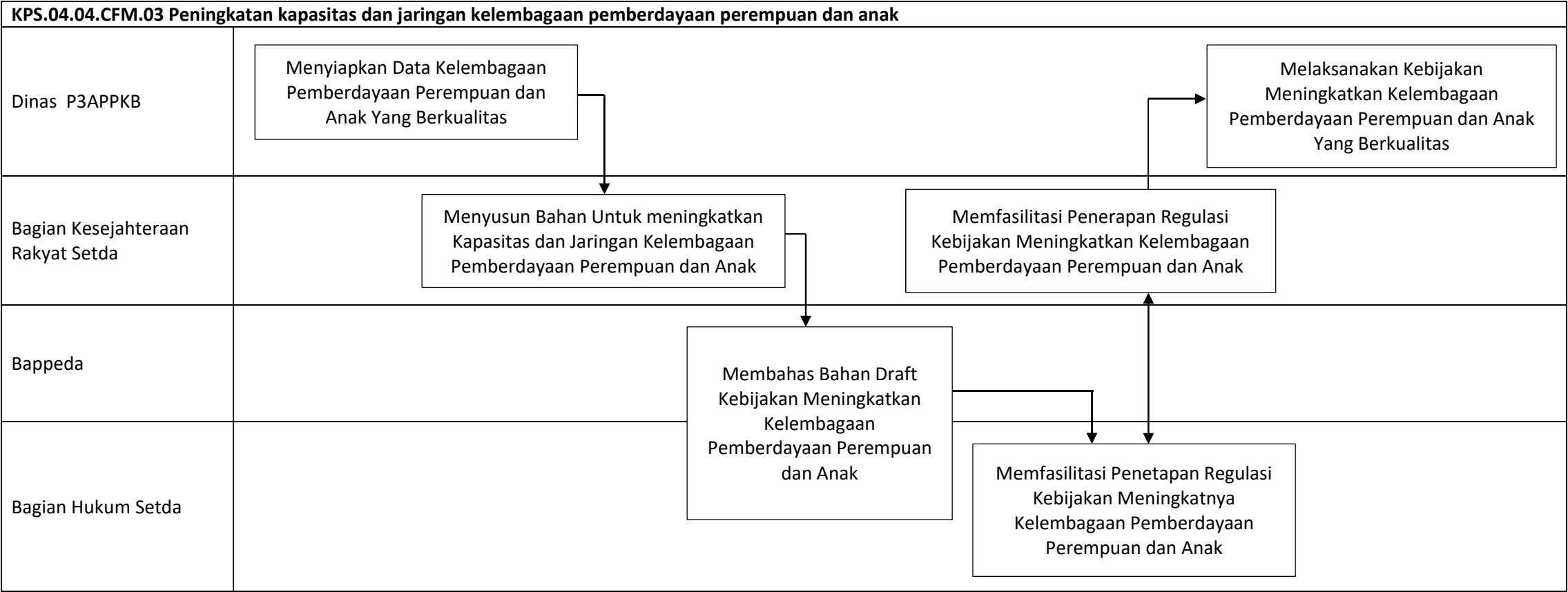
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



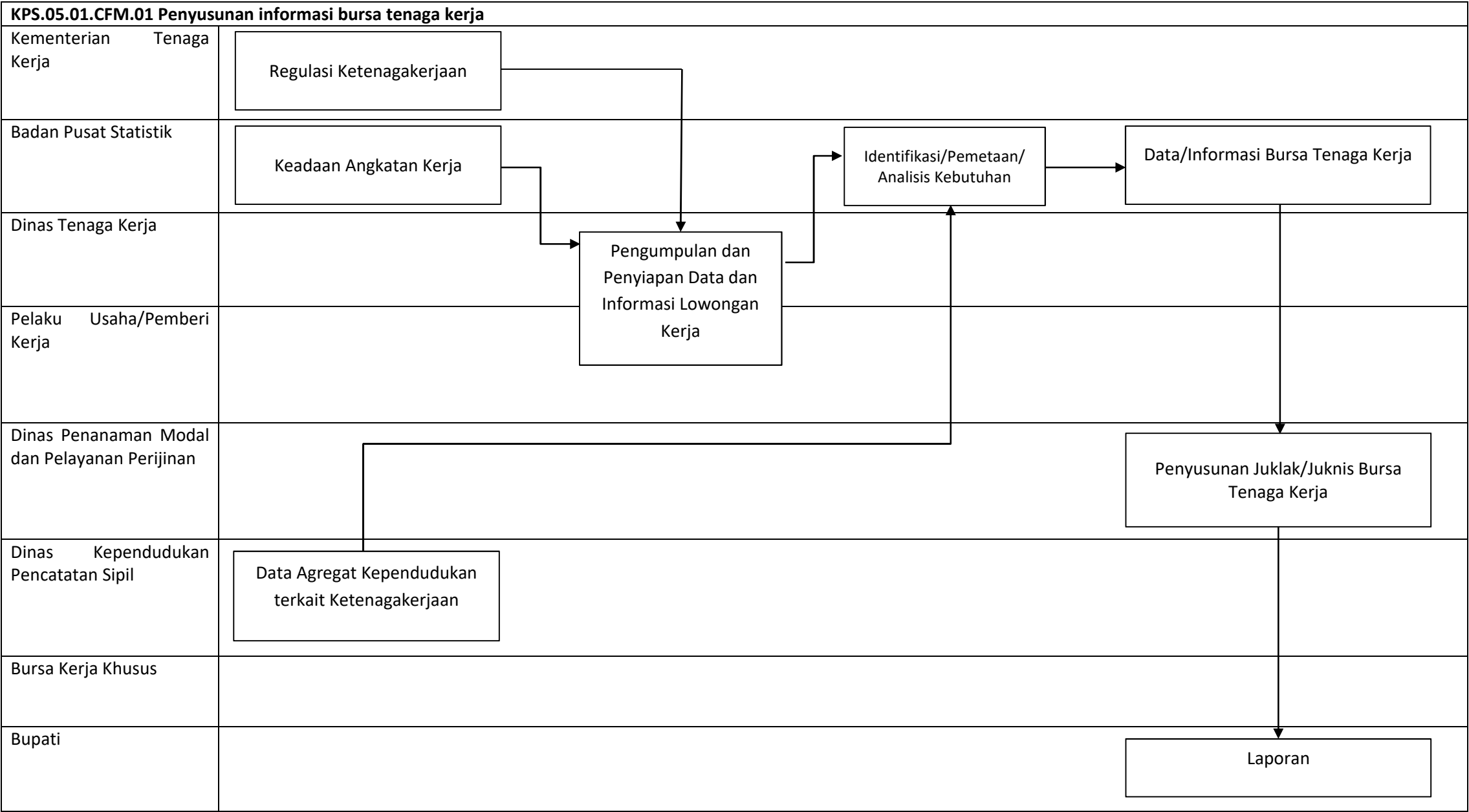
PETA RELASI

KPS.04.04

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

KPS.04.04.CFM.01 Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	KPS.04.04.CFM.02 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	KPS.04.04.CFM.03 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1. P2TP2 2. Dinas P3APPKB 3. Kepolisian (PPA Polres) 4. Dinas Sosial 5. Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas) 6. Konselor, Psikiater dan Psikolog 7. Kejaksaan 8. Pengadilan	1. KemenPPPA 2. Dinas P3AP2KB 3. Bagian Hukum Setda 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 5. Bidang PPPA Dinas P3AP2KB 6. Semua Perangkat Daerah 7. Masyarakat	1. Dinas P3APPKB 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 3. Bappeda 4. Bagian Hukum Setda

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.05.01

Peningkatan Kesempatan Kerja

KPS.05.01.CFM.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

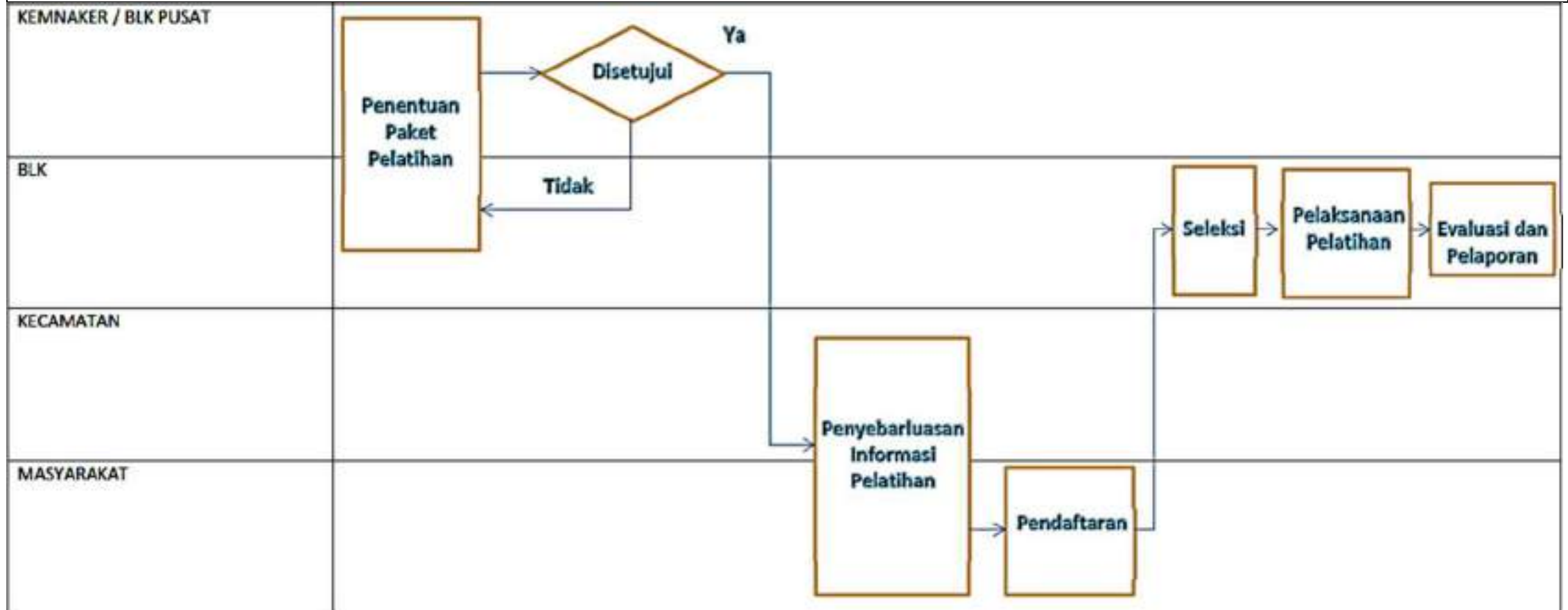
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Tenaga Kerja2. Badan Pusat Statistik3. Dinas Tenaga Kerja4. Pelaku Usaha/Pemberi Kerja5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan6. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil7. Bursa Kerja Khusus Bupati |
|---|

PETA LINTAS FUNGSI

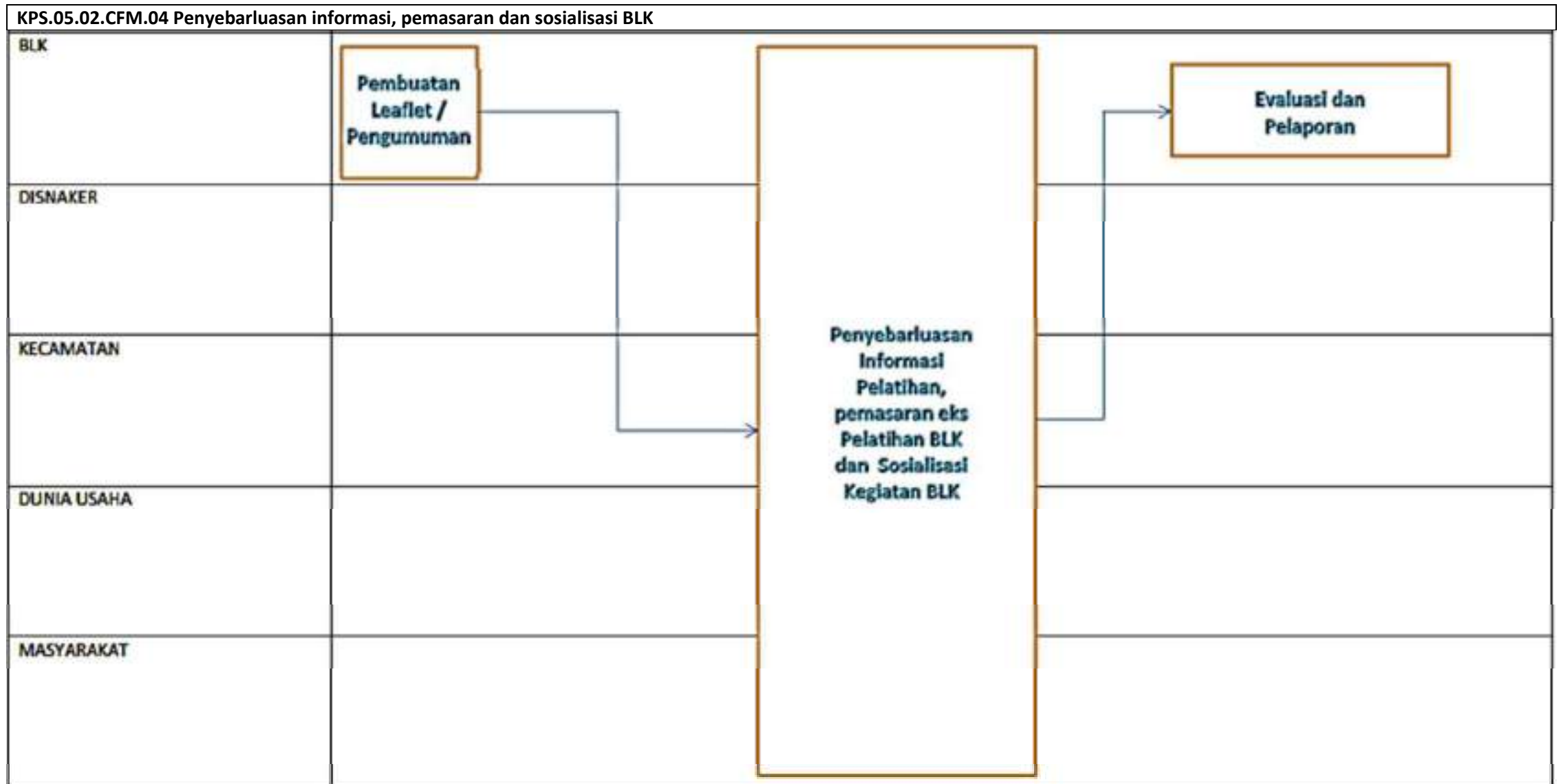


PETA LINTAS FUNGSI

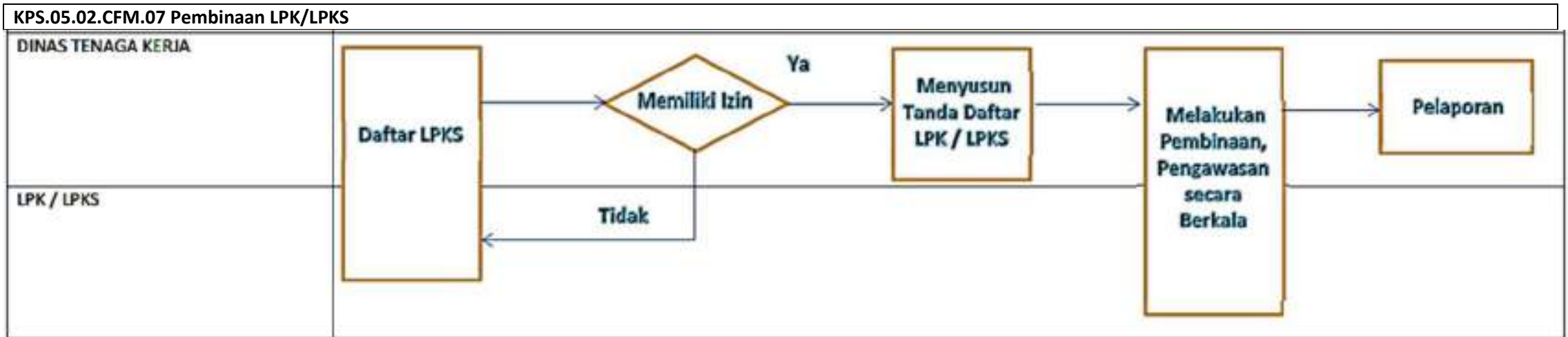
KPS.05.02.CFM.03 Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



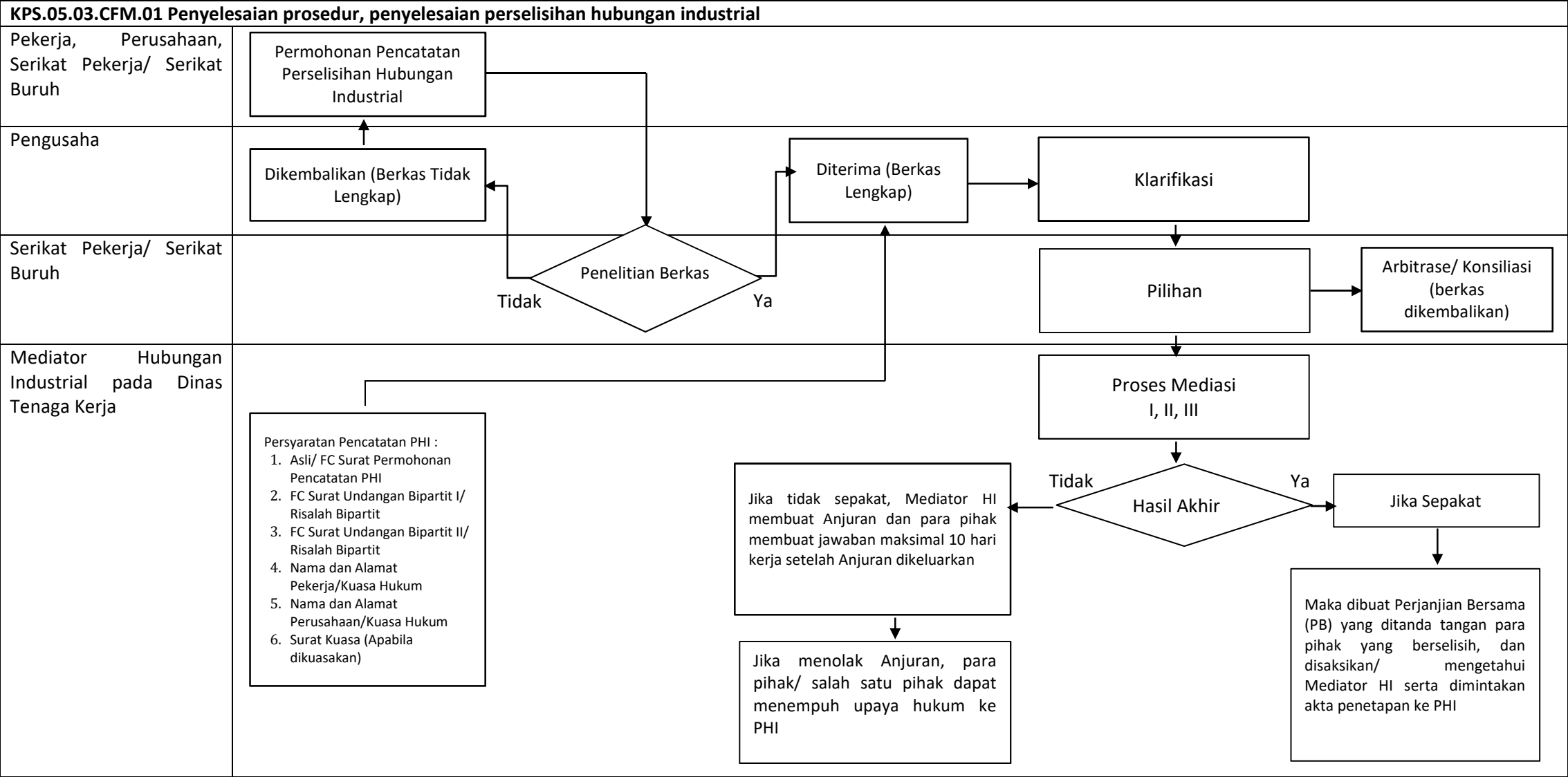
PETA RELASI

KPS.05.02

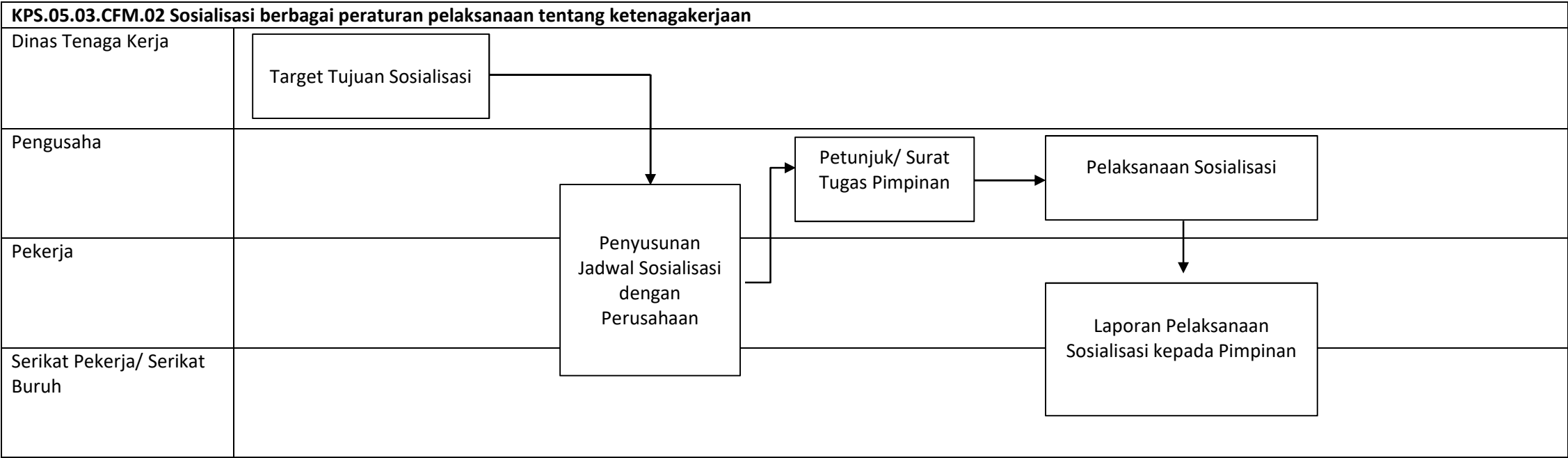
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

KPS.05.02.CFM.02 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	KPS.05.02.CFM.03 Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pencari kerja	KPS.05.02.CFM.04 Penyebarluasan informasi, pemasaran dan sosialisasi BLK	KPS.05.02.CFM.07 Pembinaan LPK/LPKS
1. Dinas Tenaga Kerja 2. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Masyarakat	1. Kemnaker/ BLK Pusat 2. BLK 3. Kecamatan 4. Masyarakat	1. BLK 2. Dinas Tenaga Kerja 3. Kecamatan 4. Dunia Usaha 5. Masyarakat	1. Dinas Tenaga Kerja 2. LPK / LPKS

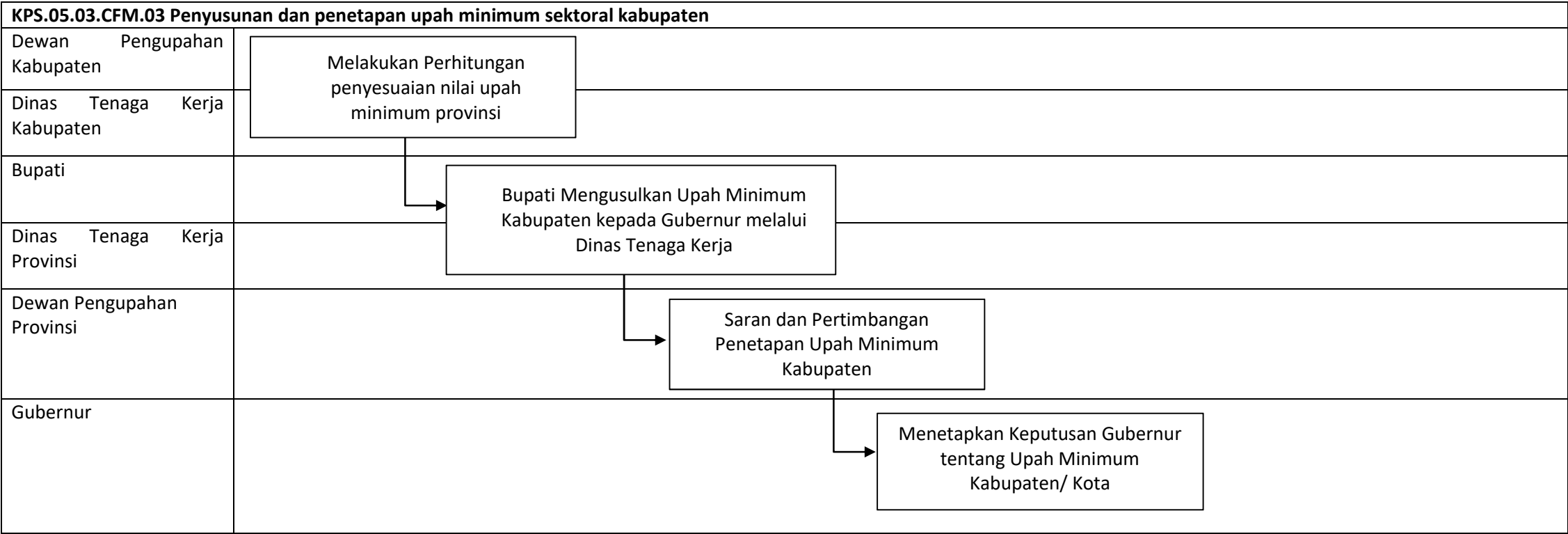
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



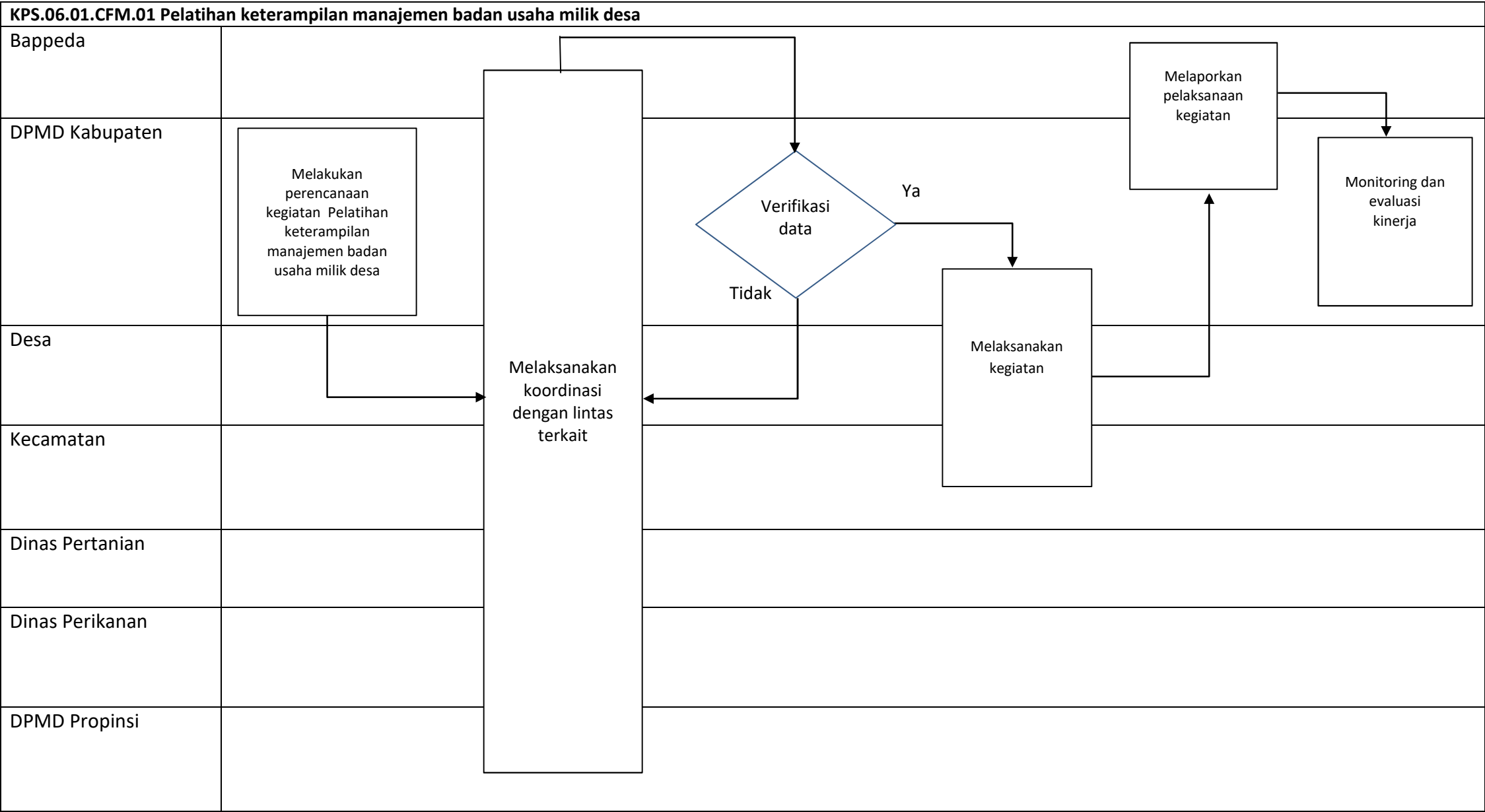
PETA RELASI

KPS.05.03

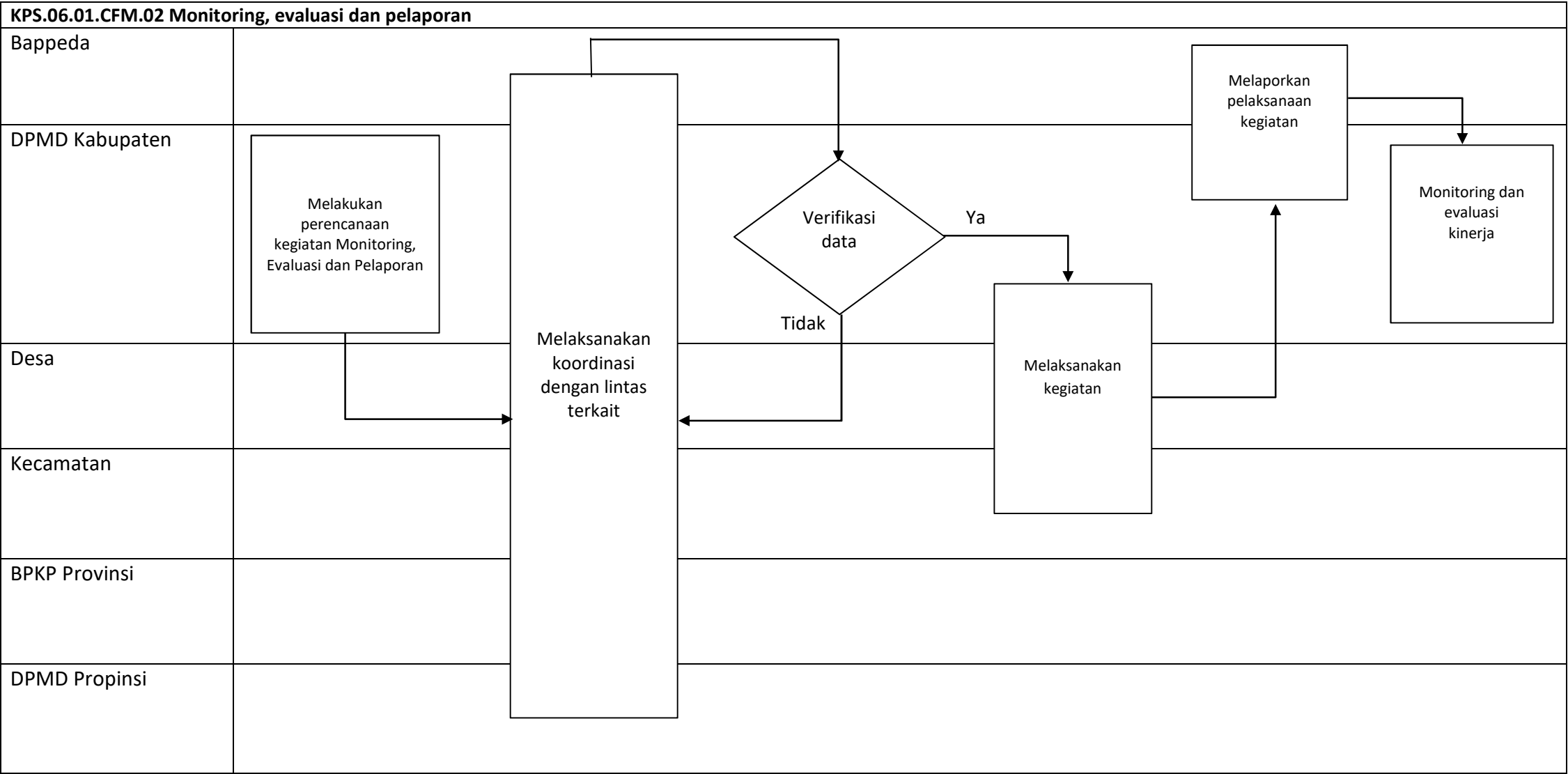
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

KPS.05.03.CFM.01 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	KPS.05.03.CFM.02 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	KPS.05.03.CFM.03 Penyusunan dan penetapan upah minimum sektoral kabupaten
1. Pekerja, Perusahaan, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 2. Pengusaha 3. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh 4. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Pengusaha 3. Pekerja 4. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	1. Dewan Pengupahan Kabupaten 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 3. Bupati 4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi 5. Dewan Pengupahan Provinsi 6. Gubernur

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



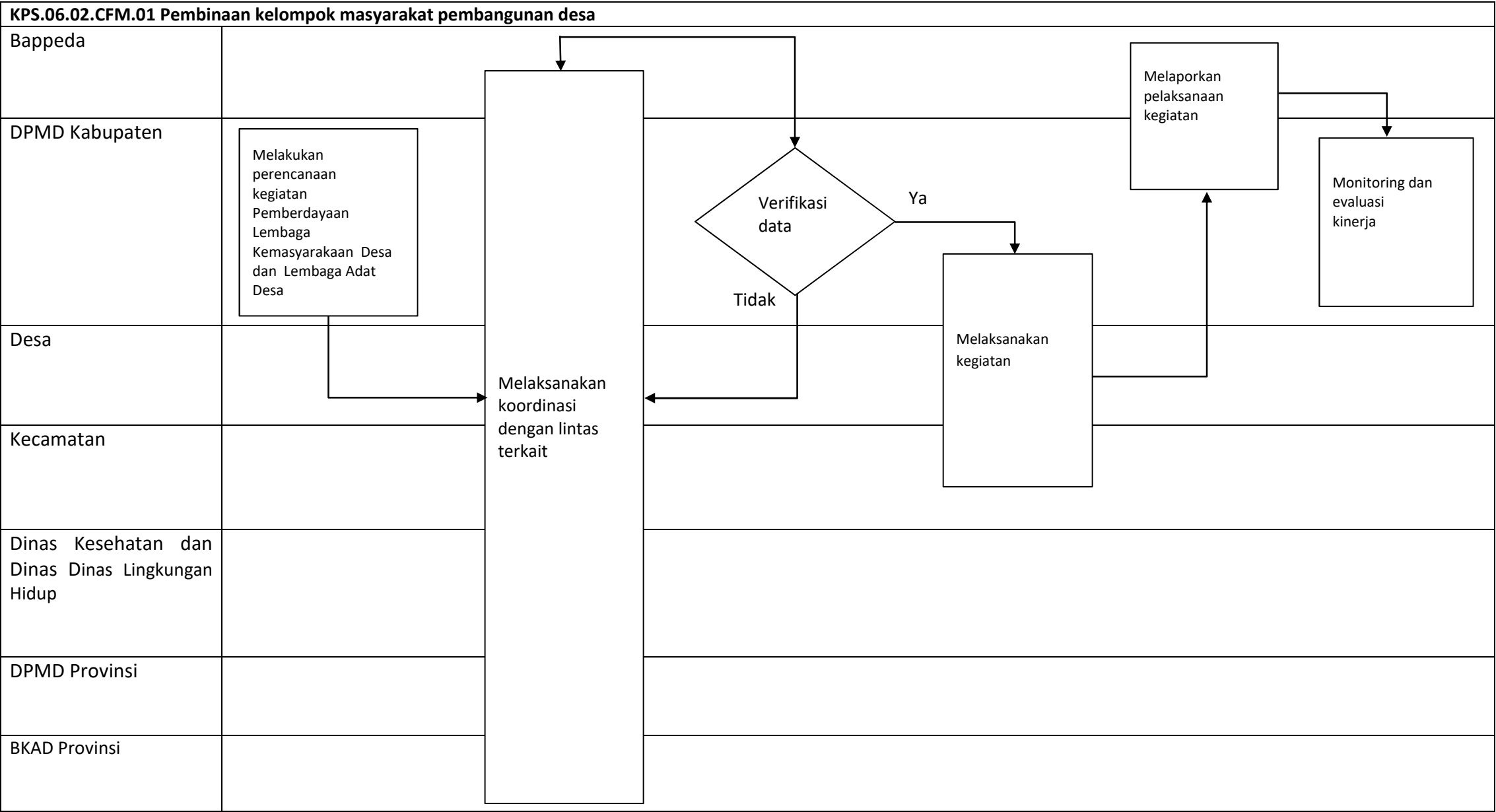
PETA RELASI

KPS.06.01

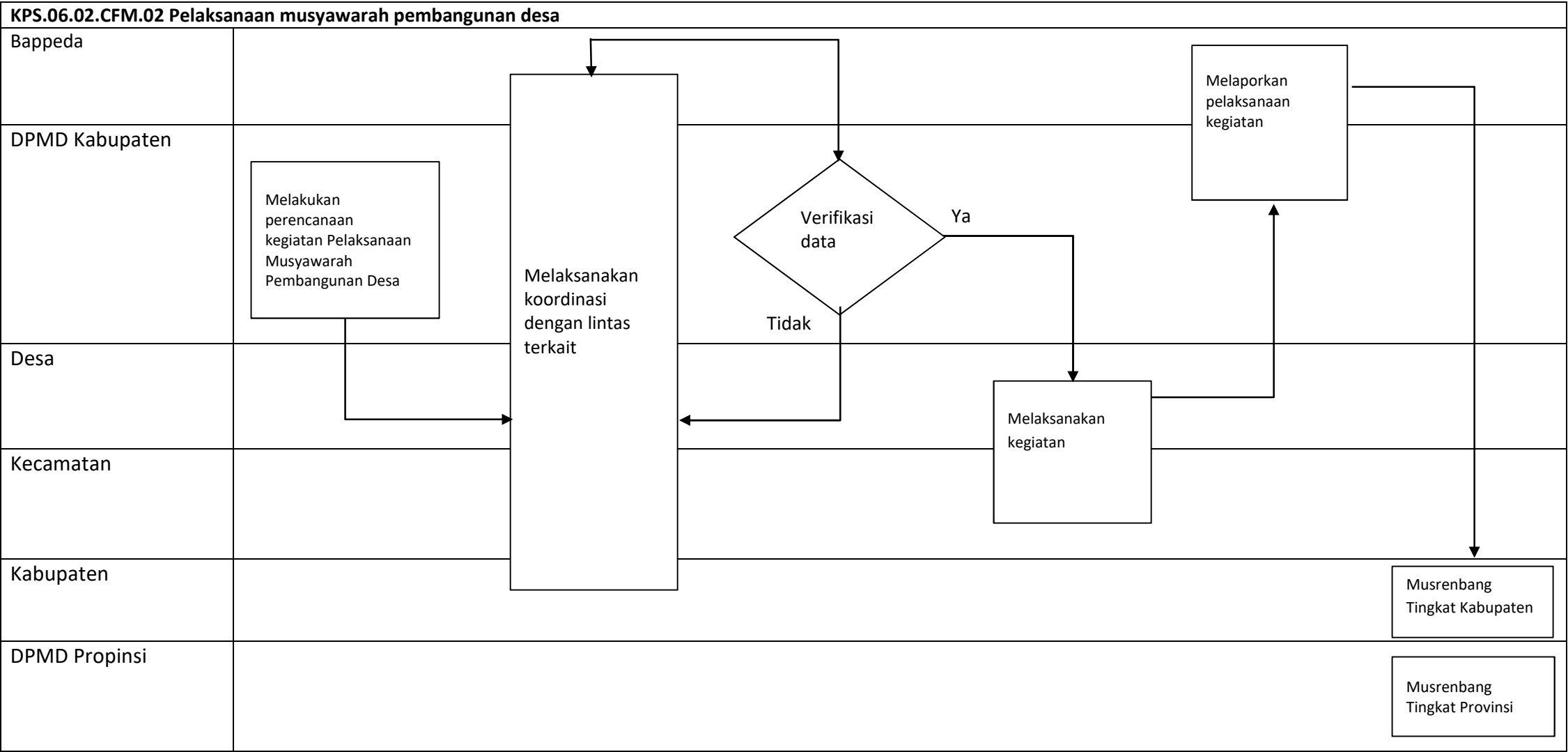
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

KPS.06.01.CFM.01 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	KPS.06.01.CFM.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Perikanan 7. DPMD Propinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. BPKP Provinsi 6. DPMD Propinsi

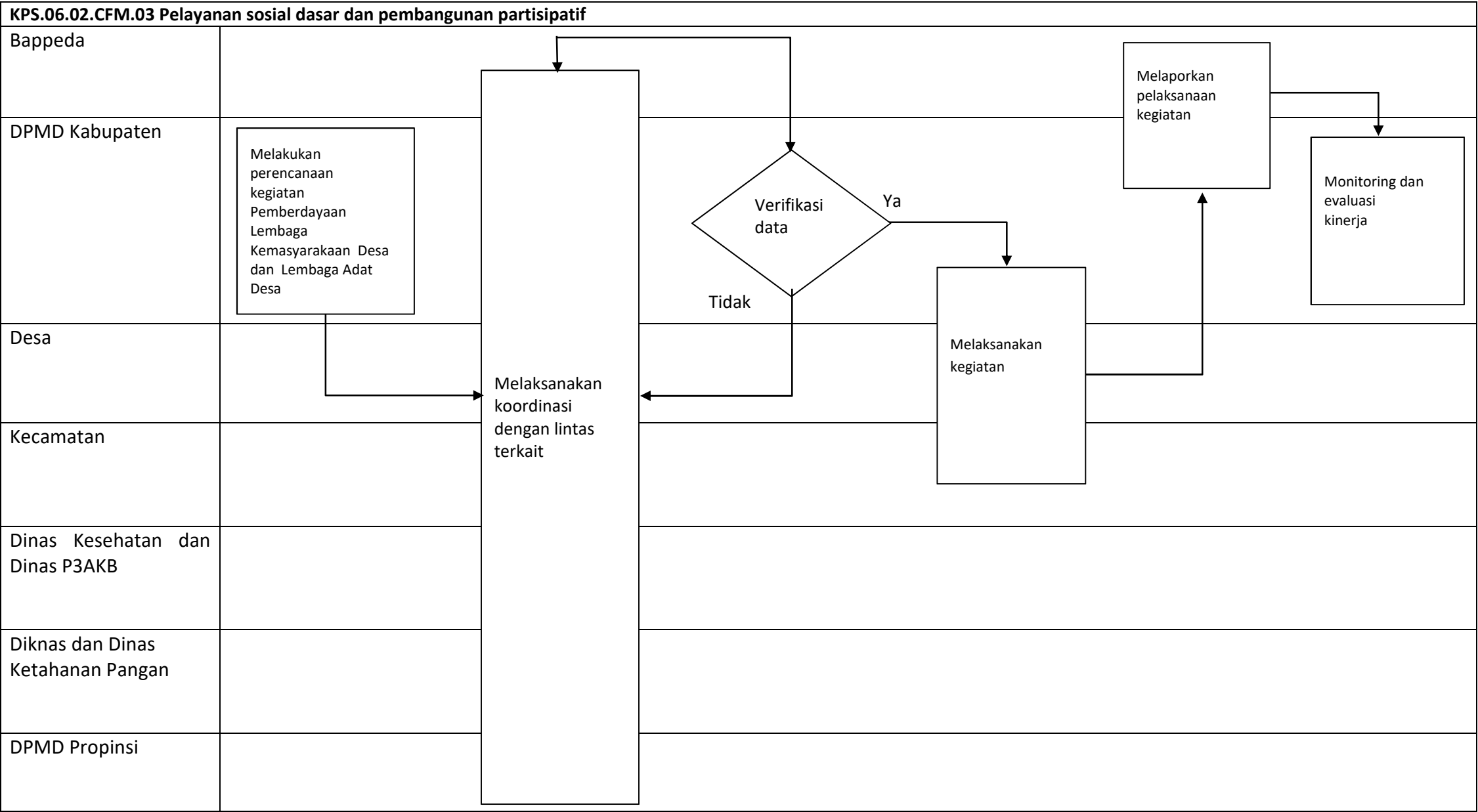
PETA LINTAS FUNGSI



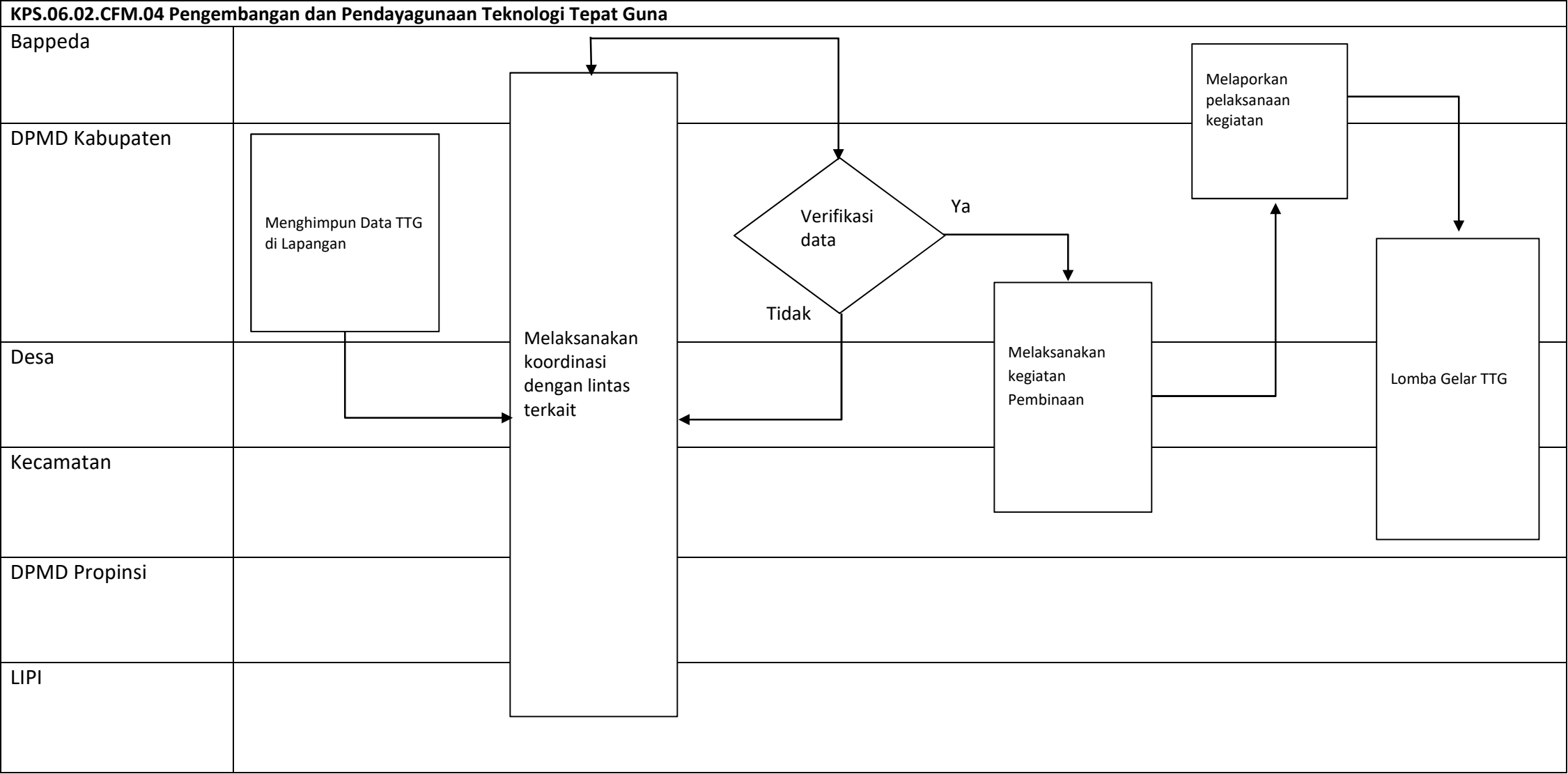
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



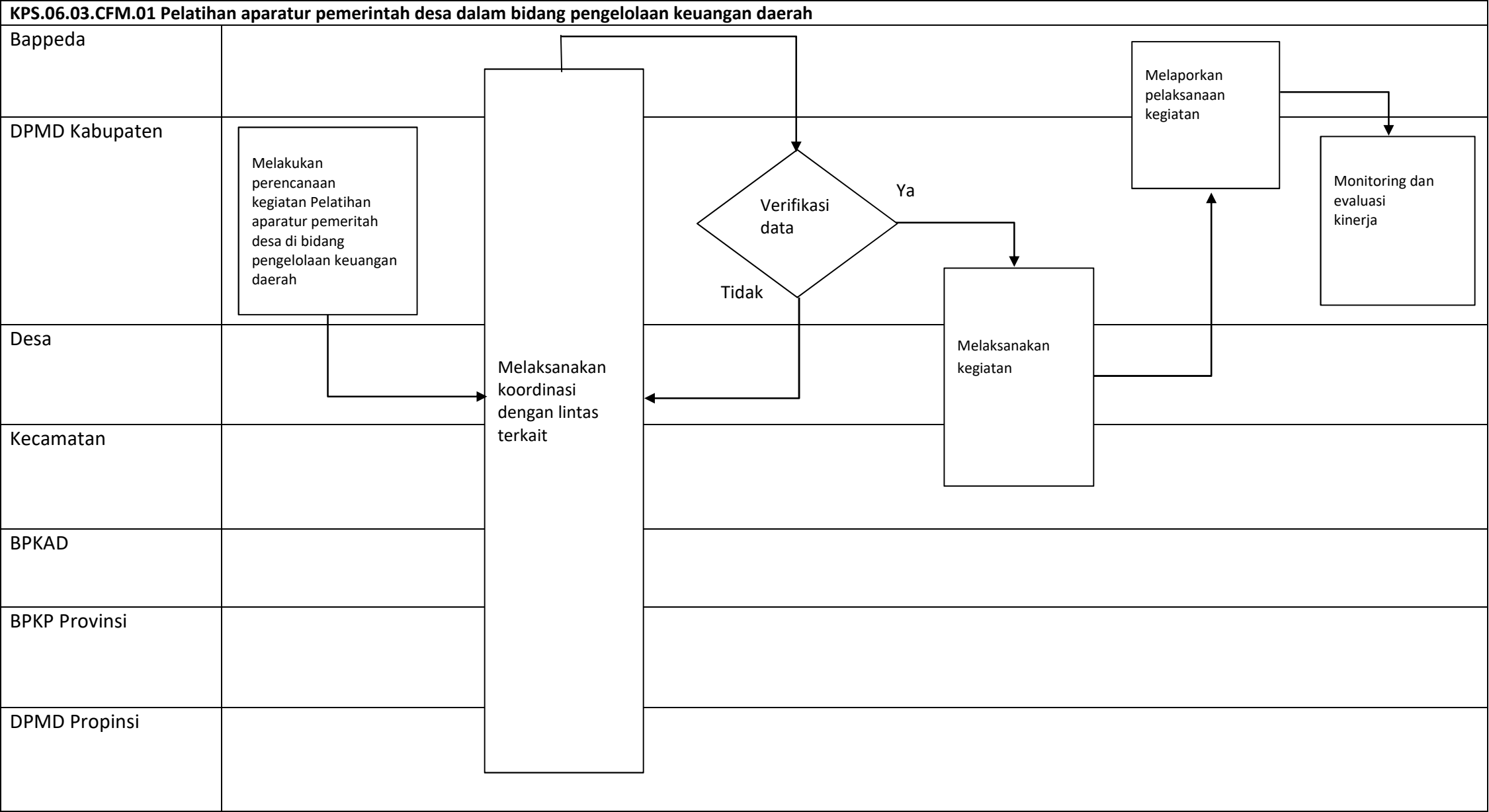
PETA RELASI

KPS.06.02

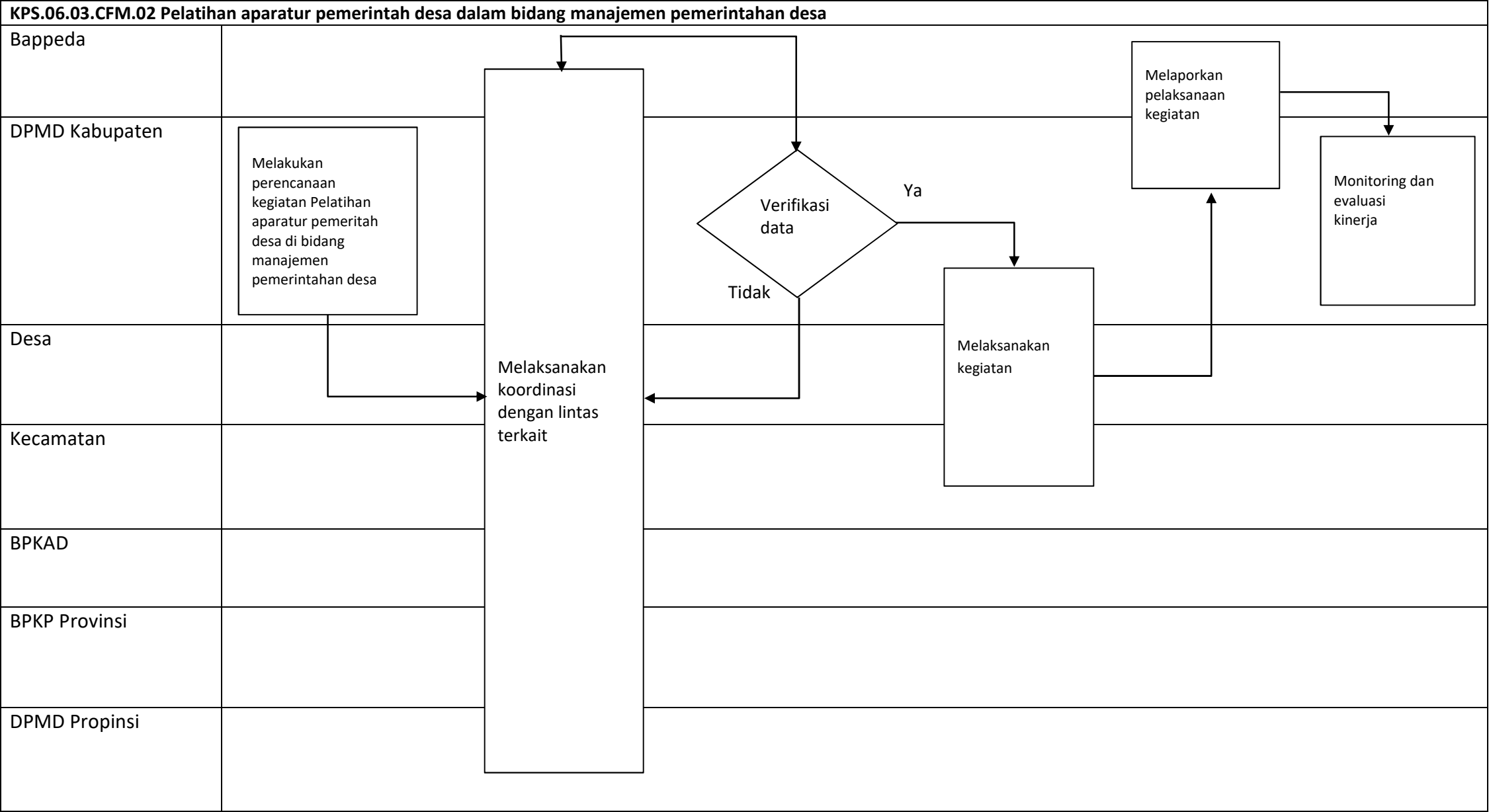
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

KPS.06.02.CFM.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	KPS.06.02.CFM.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	KPS.06.02.CFM.03 Pelayanan sosial dasar dan pembangunan partisipatif	KPS.06.02.CFM.04 Pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna
1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. Dinas Kesehatan dan Dinas Dinas Lingkungan Hidup 6. DPMD Provinsi 7. BKAD Provinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. Kabupaten 6. DPMD Propinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. Dinas Kesehatan dan Dinas P3AKB 6. Diknas dan Dinas Ketahanan Pangan 7. DPMD Propinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. DPMD Propinsi 6. LIPI

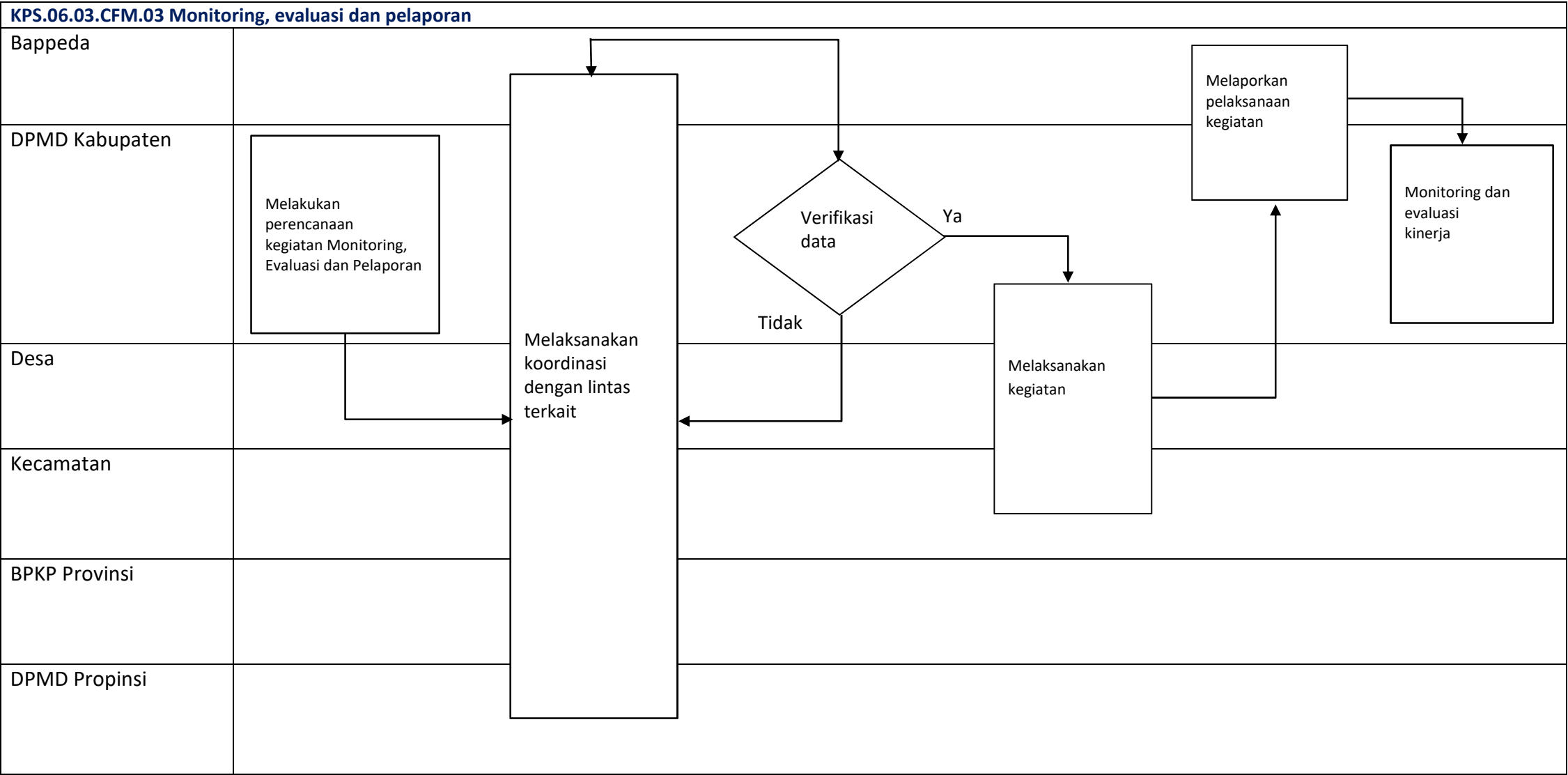
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



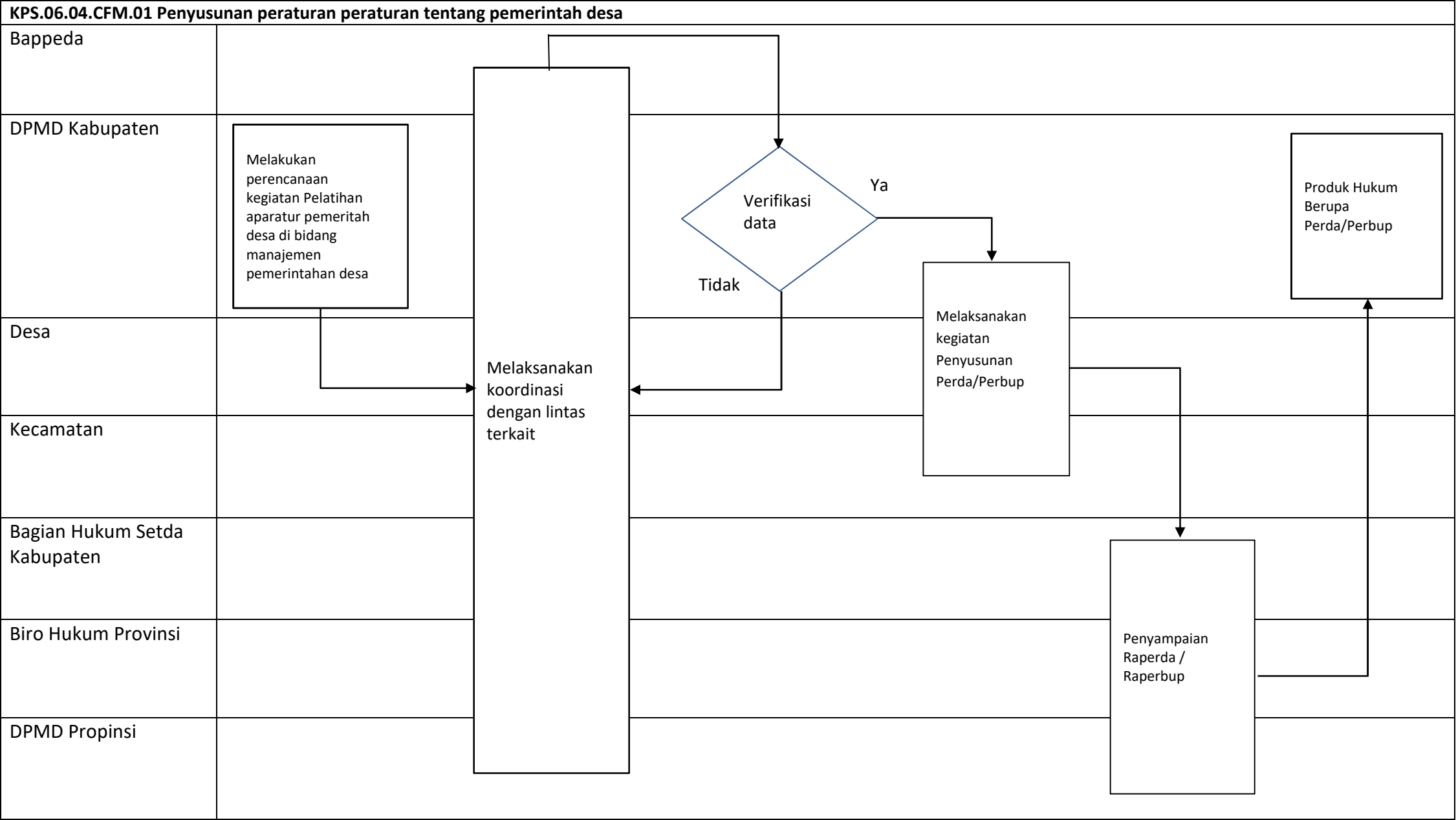
PETA RELASI

KPS.06.03

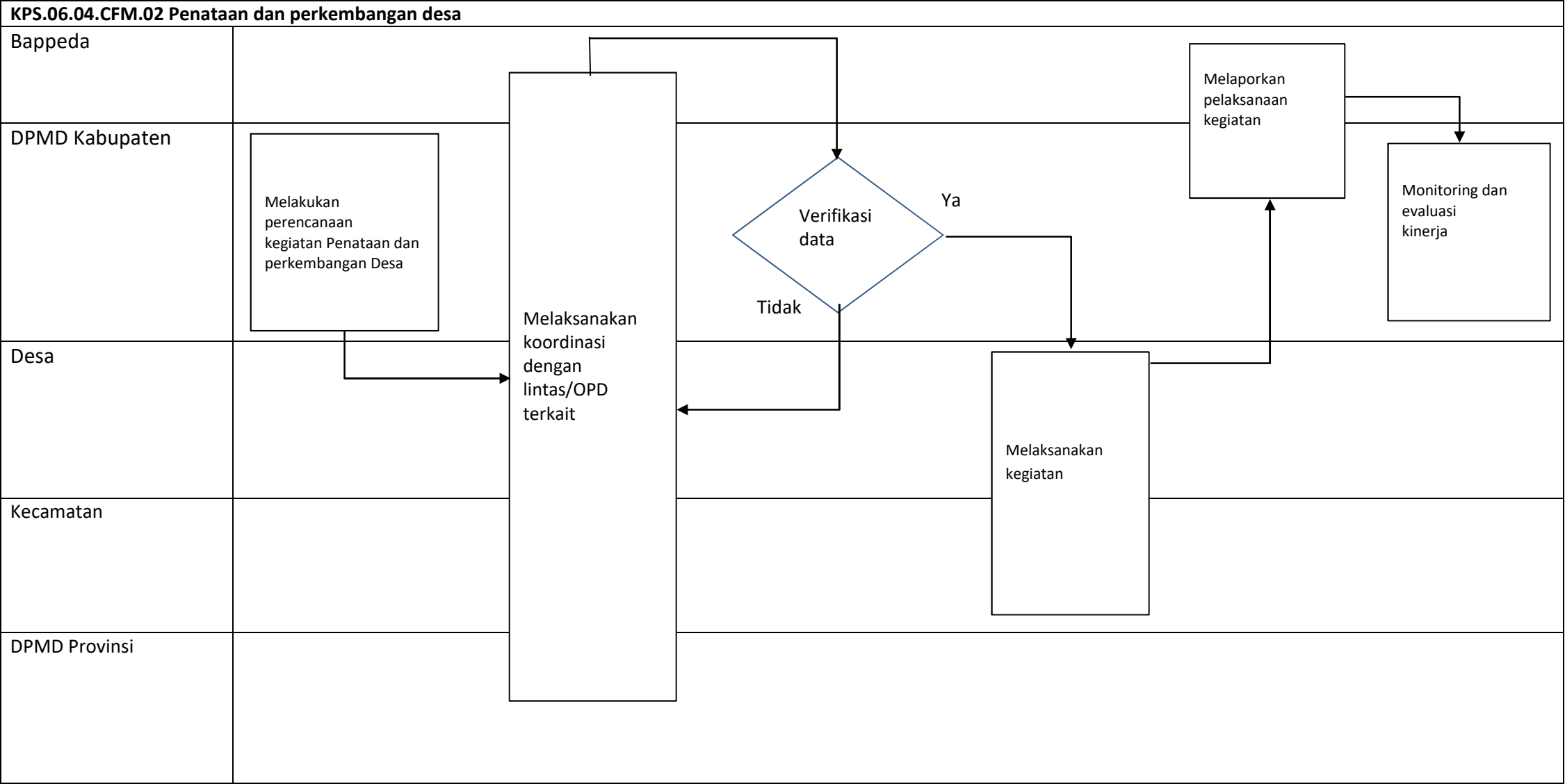
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

KPS.06.03.CFM.01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	KPS.06.03.CFM.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	KPS.06.03.CFM.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. BPKAD 6. BPKP Provinsi 7. DPMD Propinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. BPKAD 6. BPKP Provinsi 7. DPMD Propinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. BPKP Provinsi 6. DPMD Propinsi

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



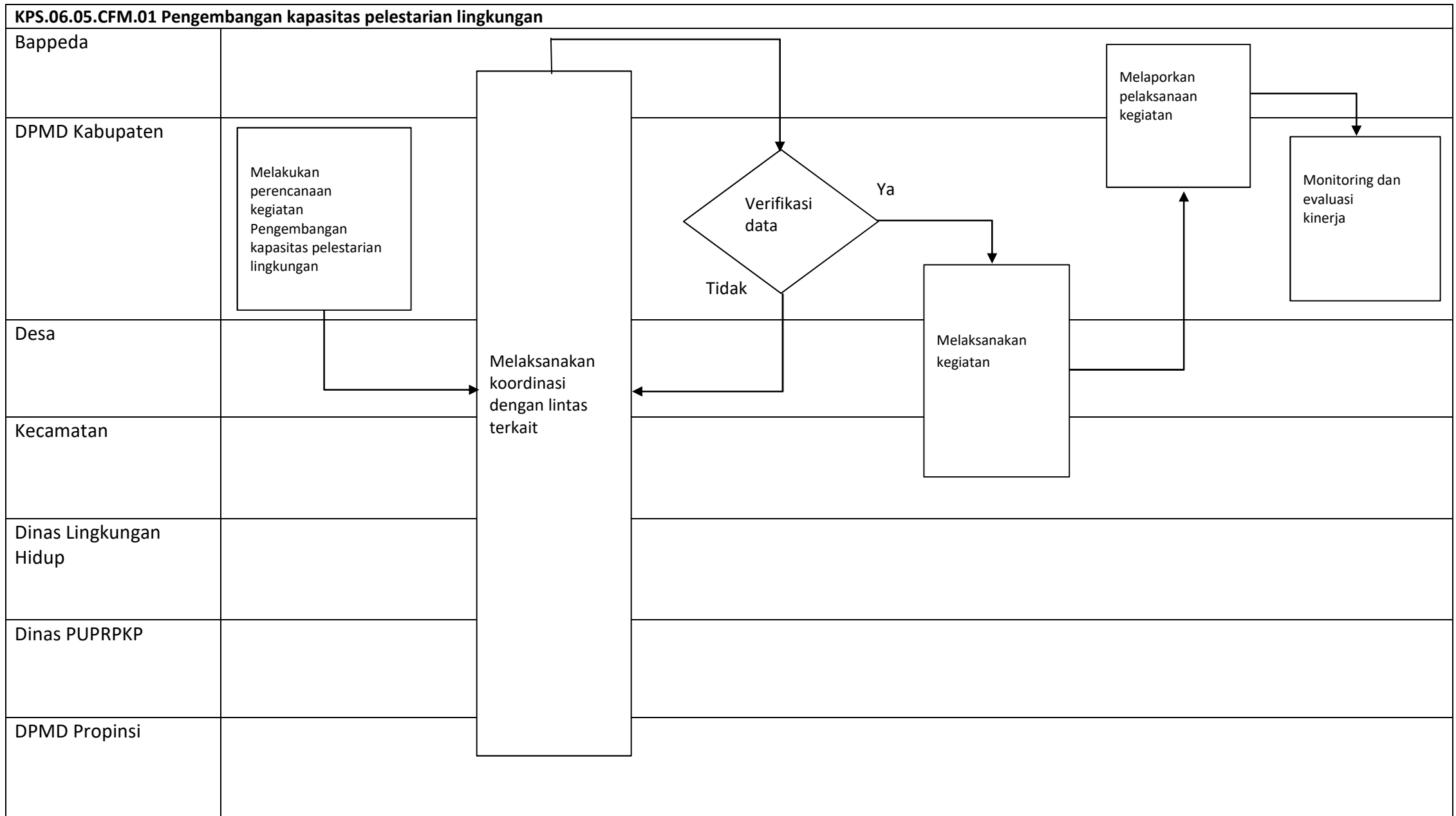
PETA RELASI

KPS.06.04

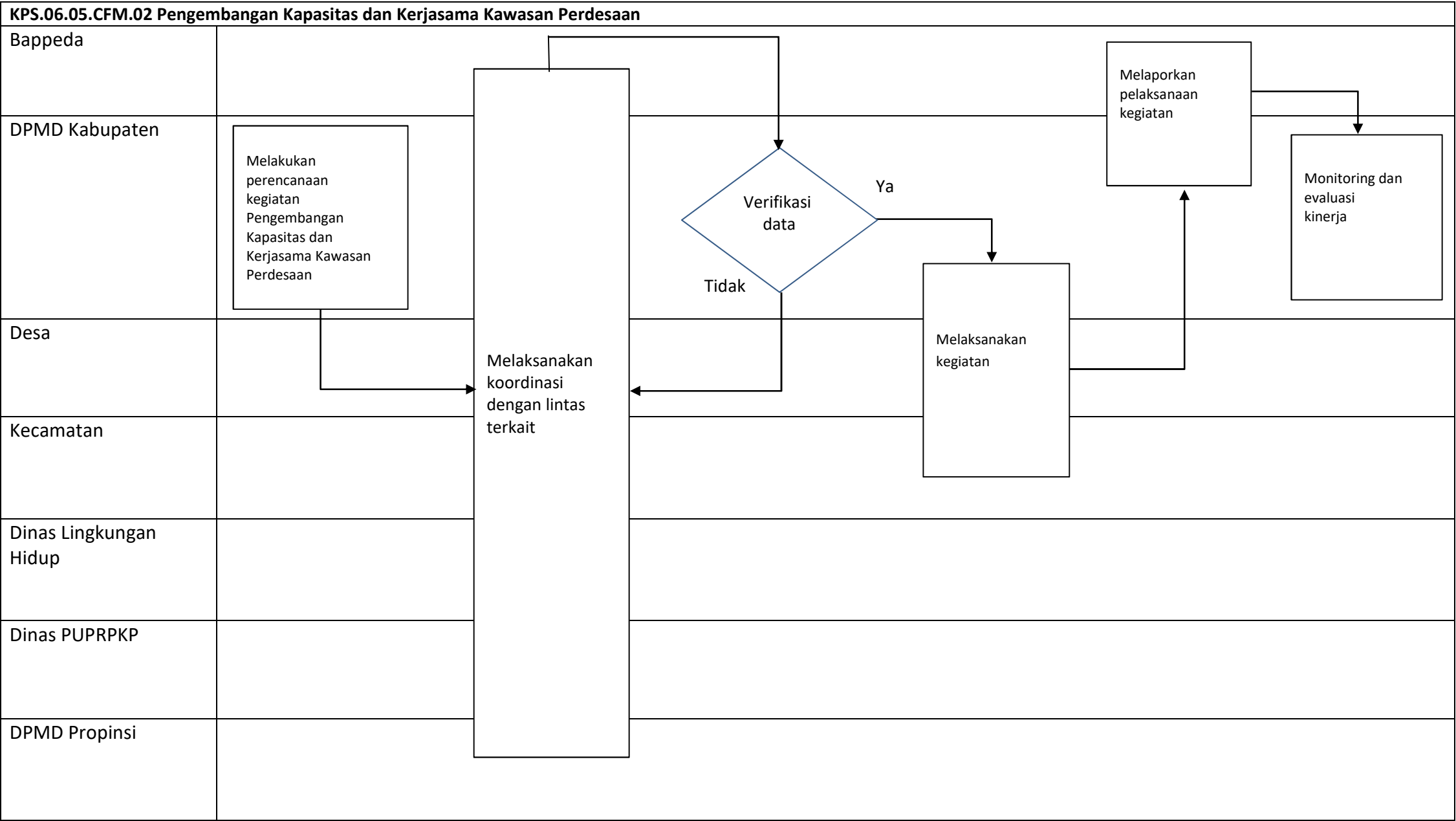
Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa

KPS.06.04.CFM.01 Penyusunan peraturan- peraturan tentang pemerintah desa	KPS.06.04.CFM.02 Penataan dan perkembangan desa
1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. Bagian Hukum Setda Kabupaten 6. Biro Hukum Provinsi 7. DPMD Propinsi	1. Bappeda 2. DPMD Kabupaten 3. Desa 4. Kecamatan 5. DPMD Provinsi

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.06.05

Peningkatan Pemberdayaan Desa

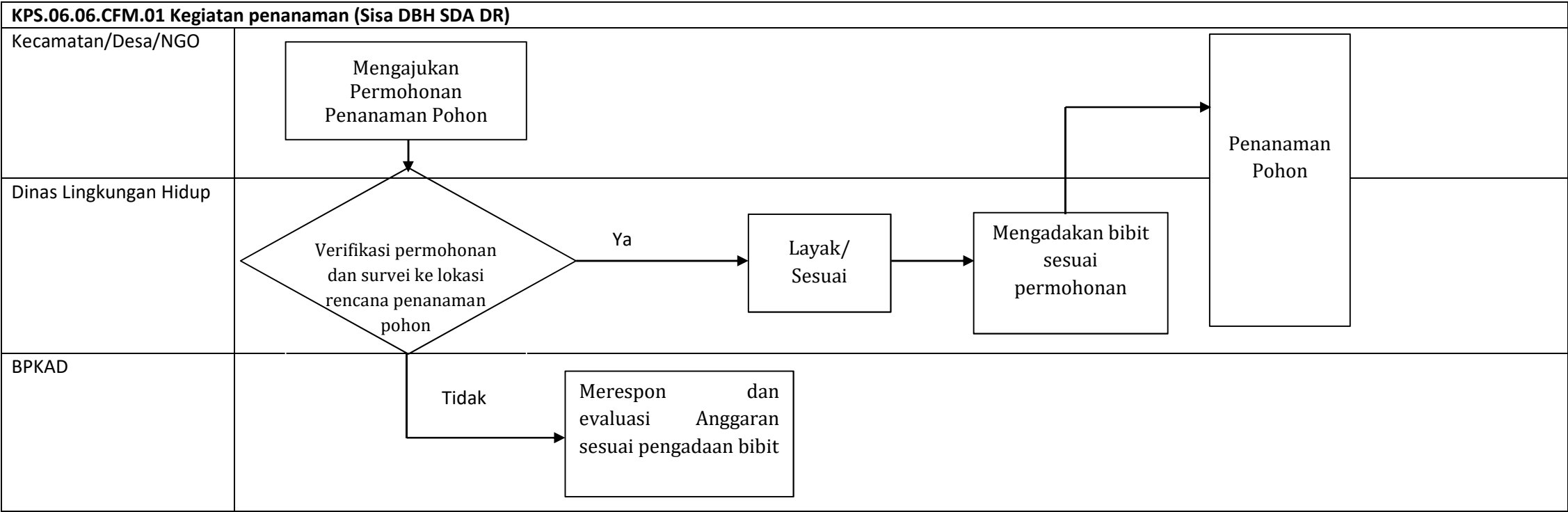
KPS.06.05.CFM.01 Pengembangan kapasitas pelestarian lingkungan

- | |
|---------------------------|
| 1. Bappeda |
| 2. DPMD Kabupaten |
| 3. Desa |
| 4. Kecamatan |
| 5. Dinas Lingkungan Hidup |
| 6. Dinas PUPRPKP |
| 7. DPMD Propinsi |

KPS.06.05.CFM.02 Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Kawasan Perdesaan
--

- | |
|---------------------------|
| 1. Bappeda |
| 2. DPMD Kabupaten |
| 3. Desa |
| 4. Kecamatan |
| 5. Dinas Lingkungan Hidup |
| 6. Dinas PUPRPKP |
| 7. DPMD Propinsi |

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.06.06

Penanaman pohon pada lahan diluar kawasan (DBH-DR)

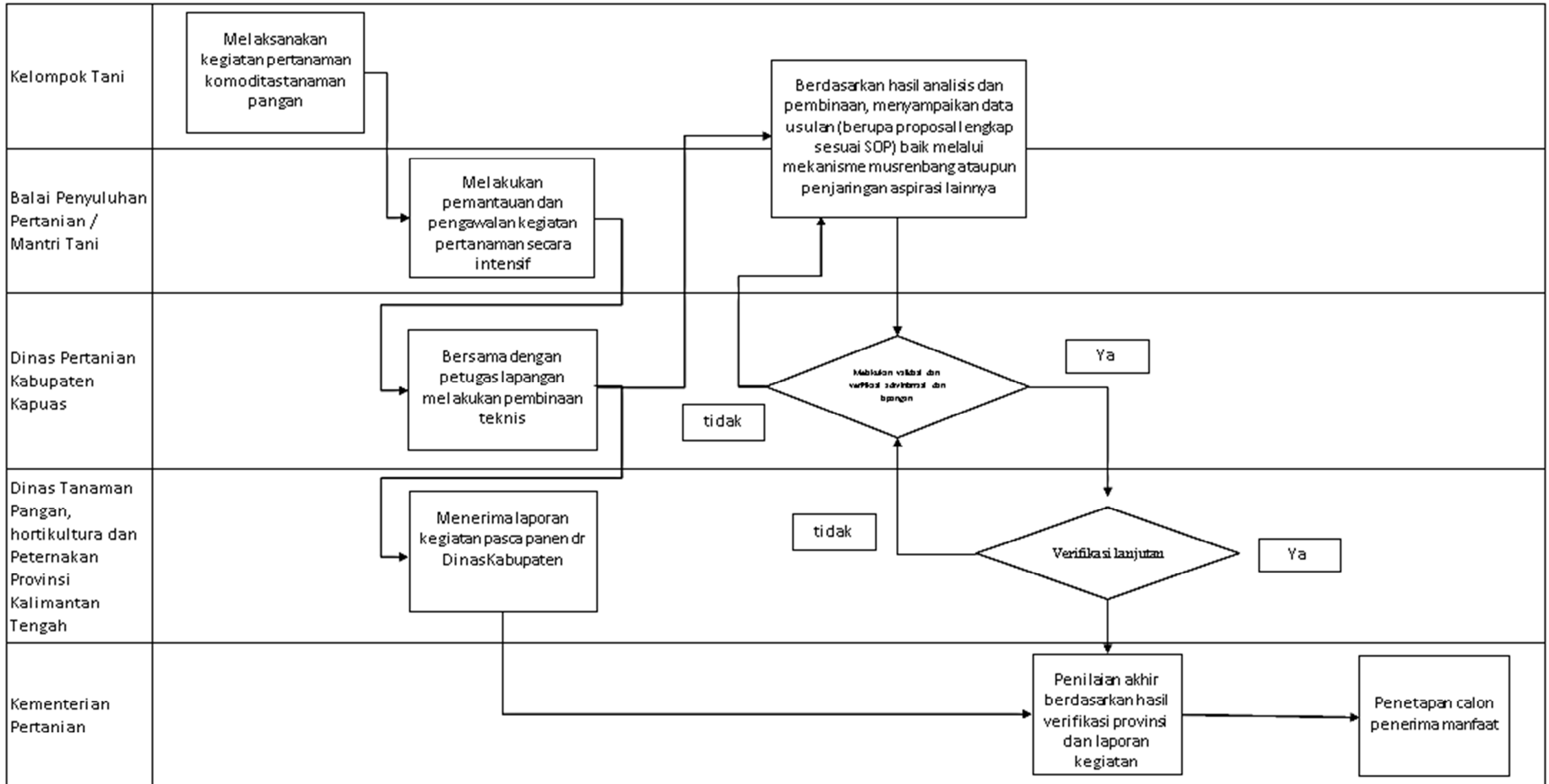
KPS.06.06.CFM.01

**Kegiatan penanaman (Sisa
DBH SDA DR)**

1. Kecamatan/Desa/NGO
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. BPKAD

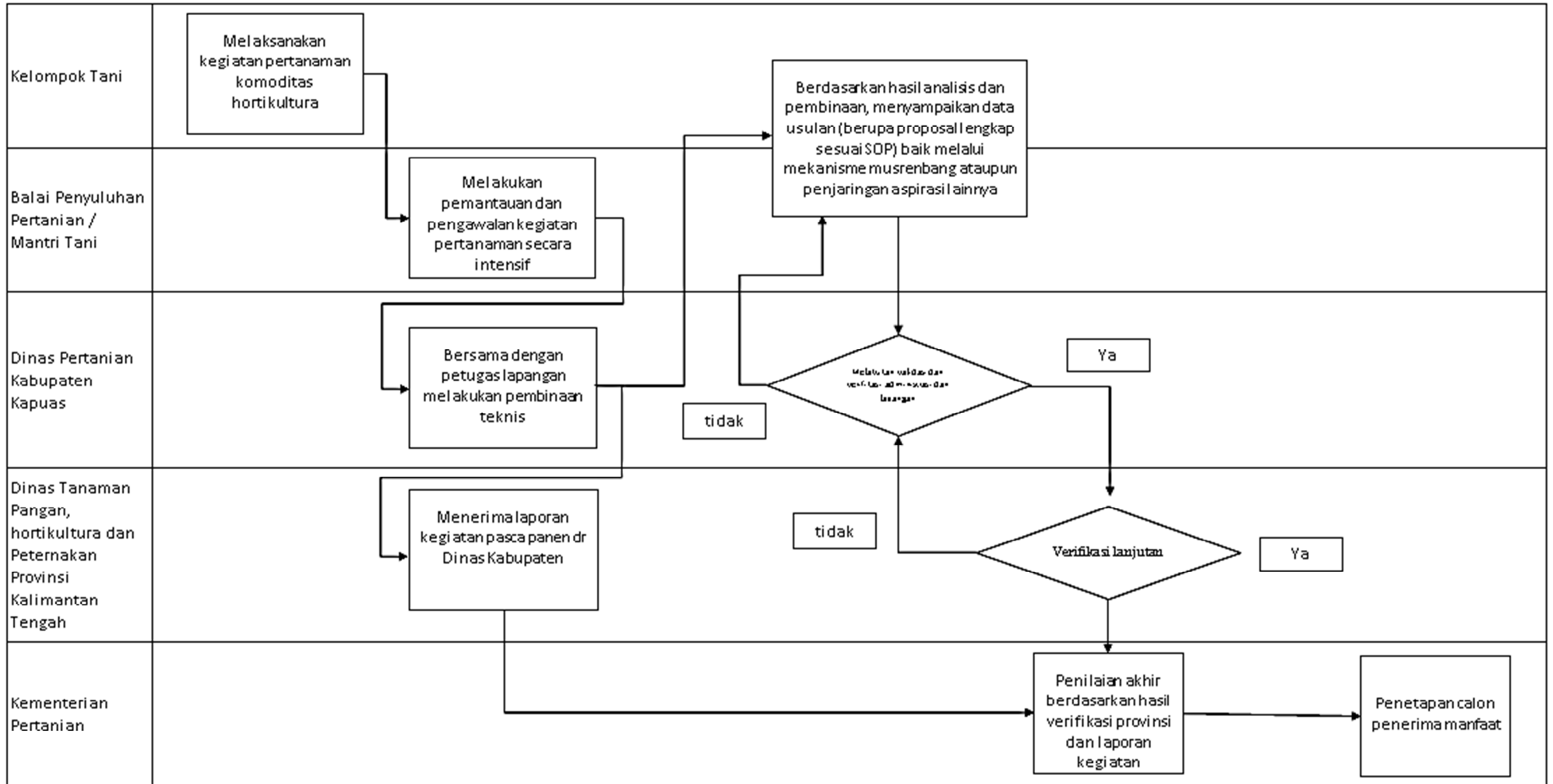
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.01 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan



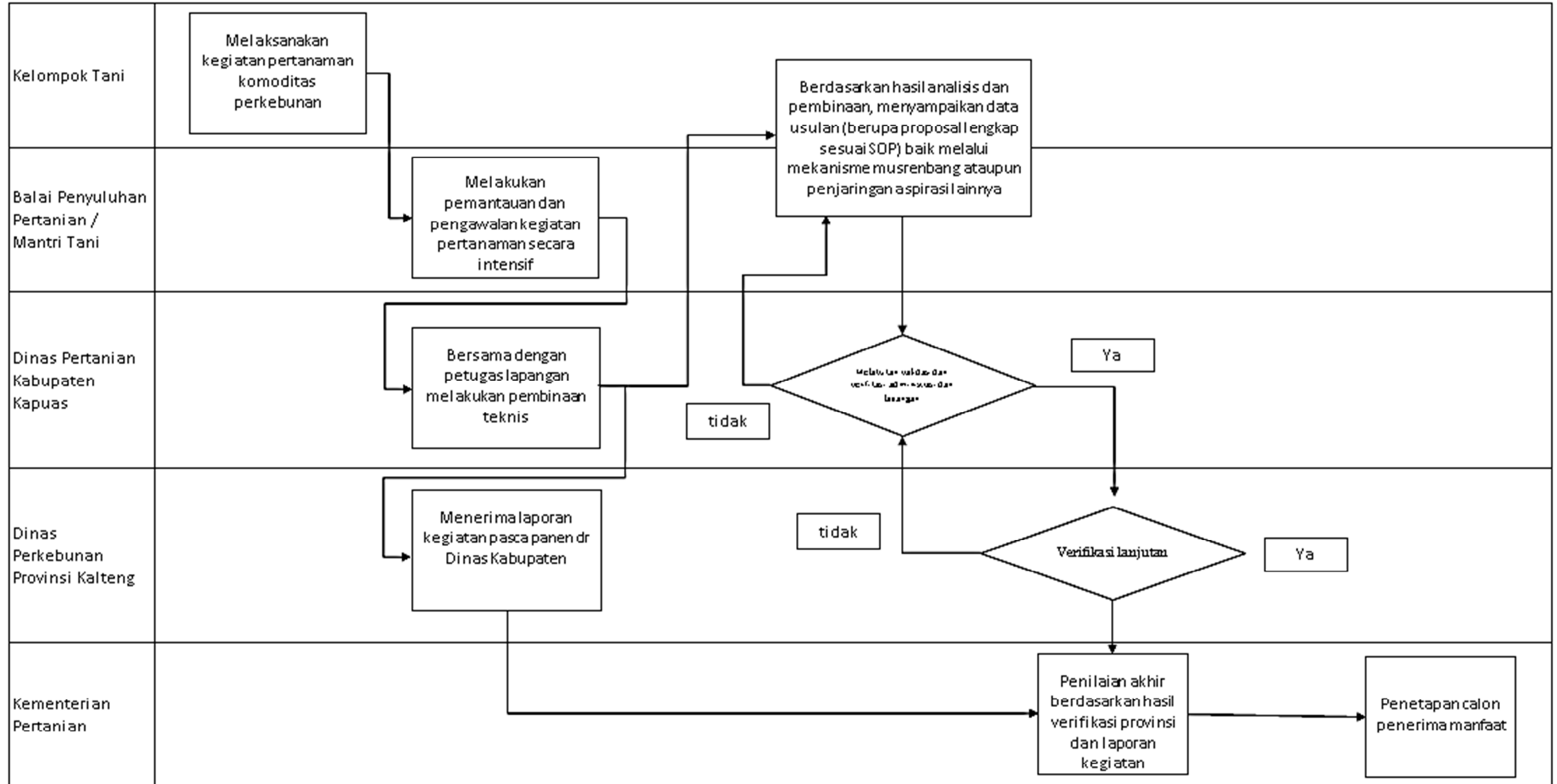
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.02 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura



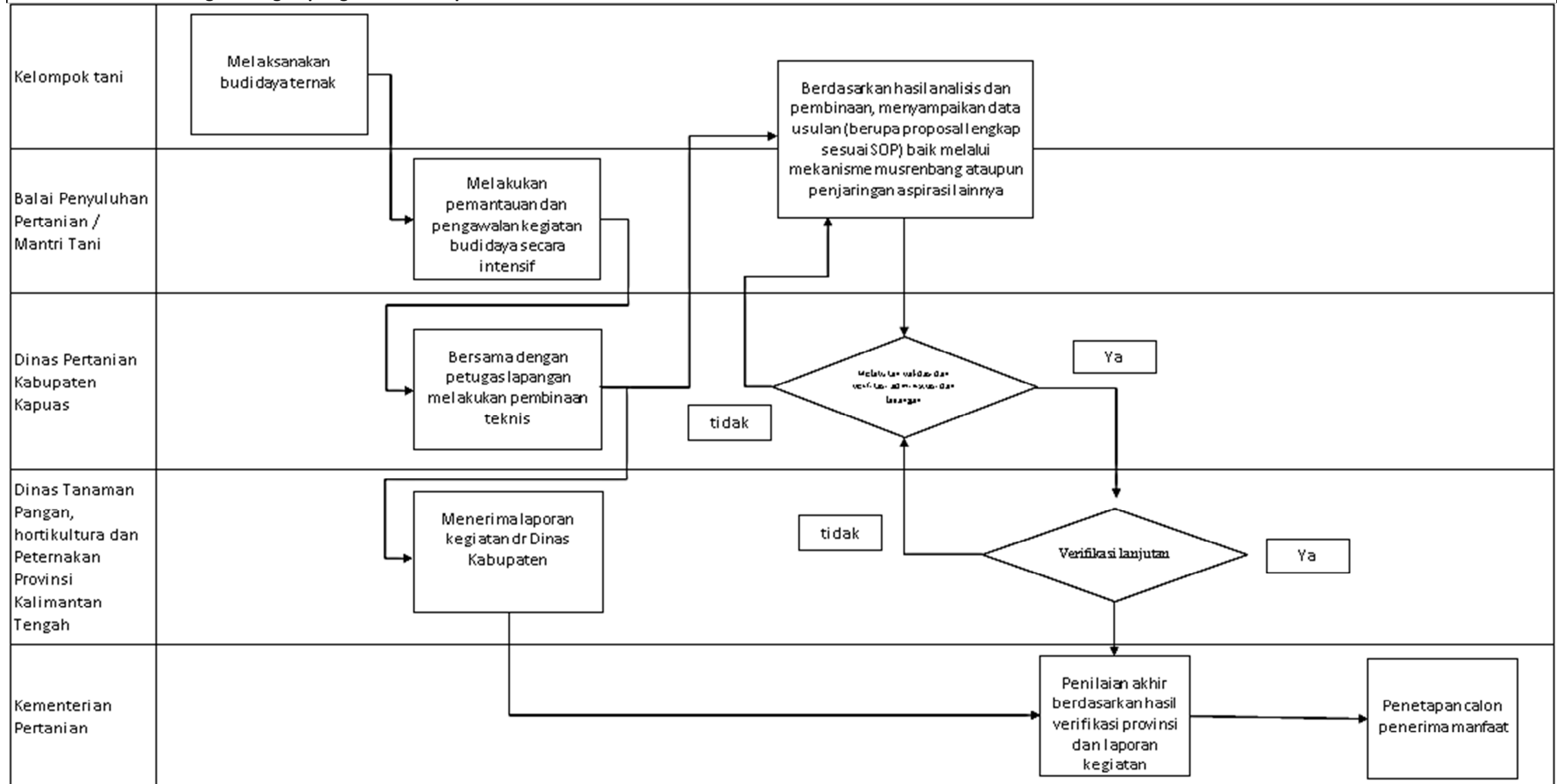
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.03 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan

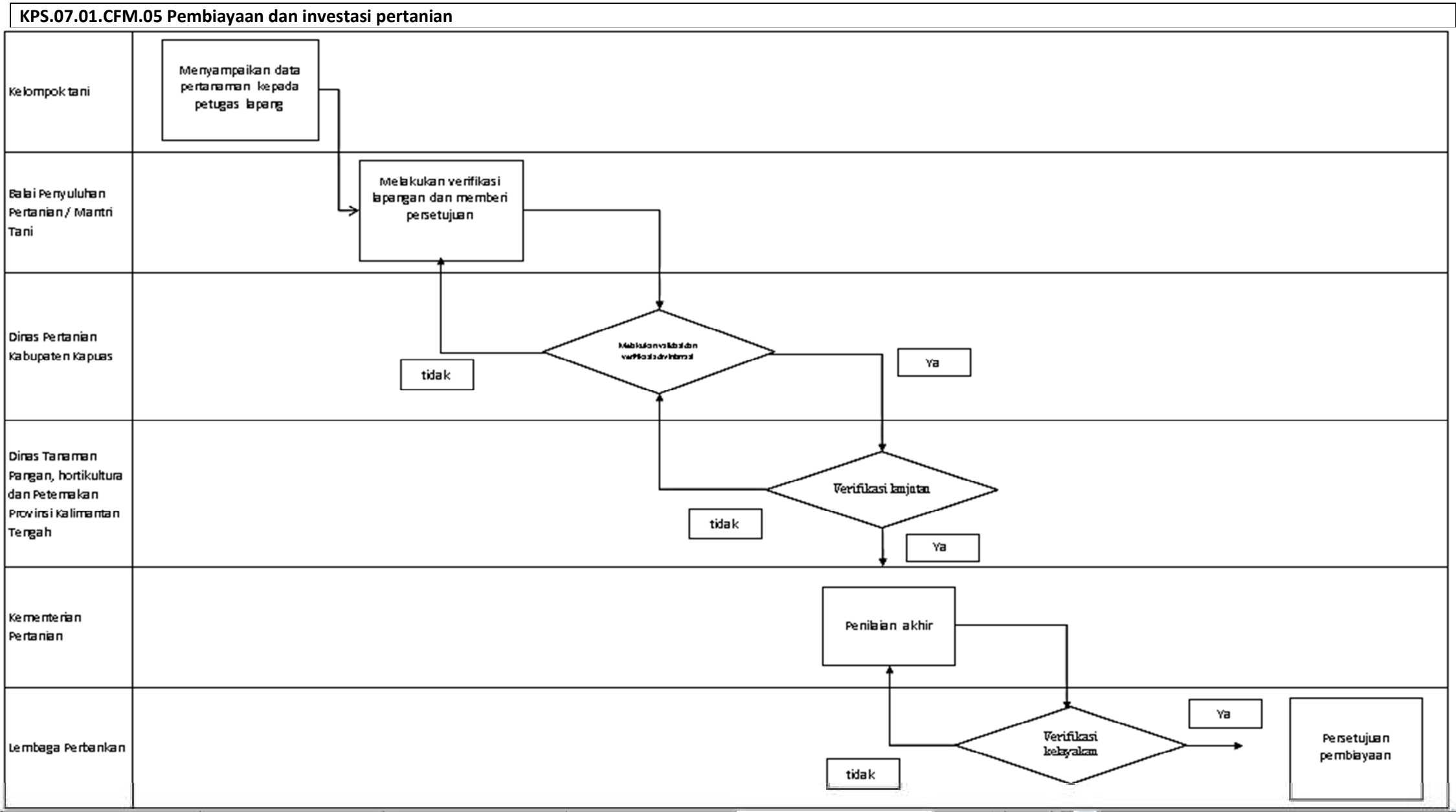


PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.01.CFM.04 Pengembangan pengolahan hasil peternakan



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

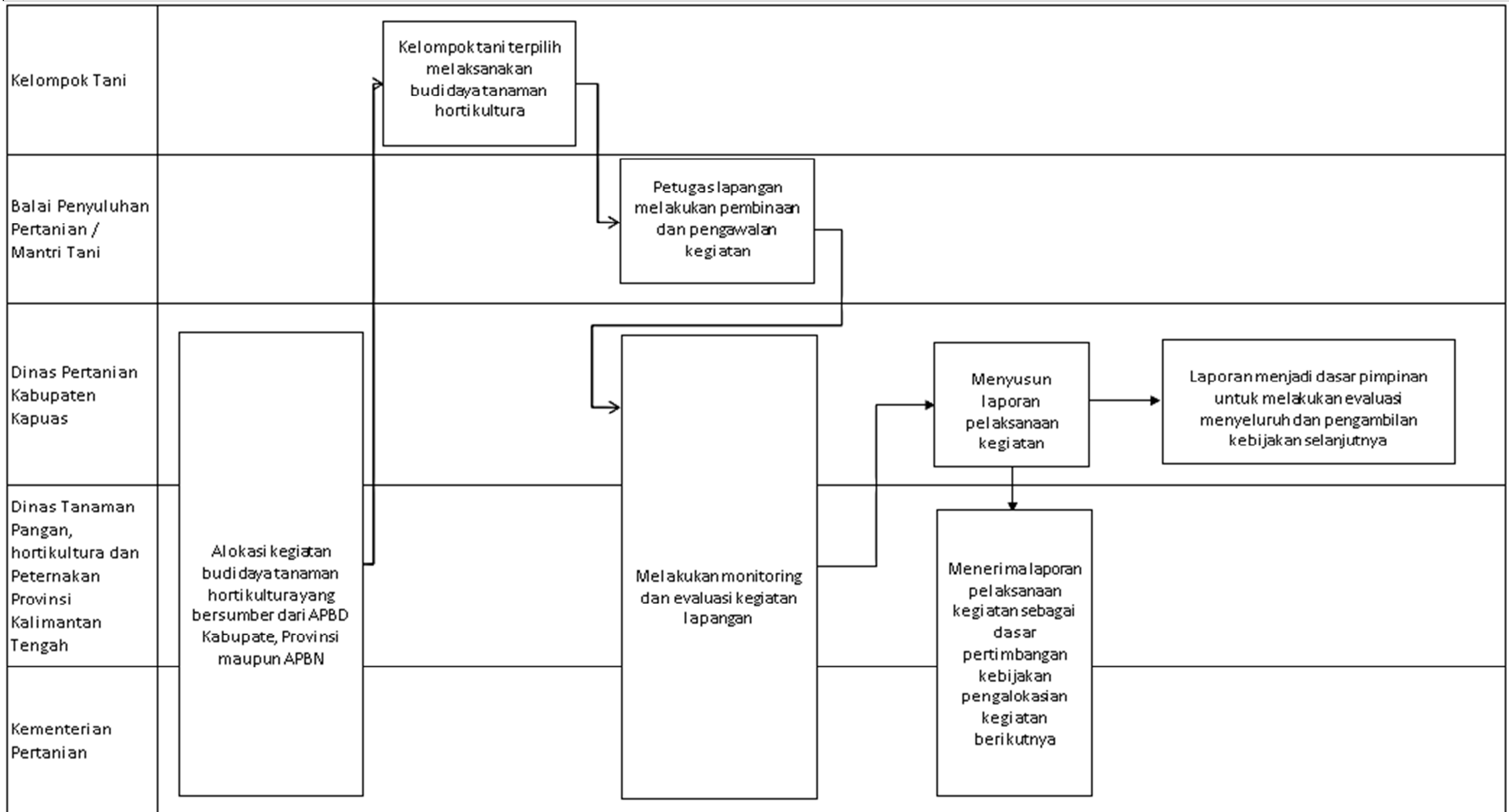
KPS.07.01

Agribisnis Pertanian

KPS.07.01.CFM.01 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	KPS.07.01.CFM.02 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	KPS.07.01.CFM.03 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	KPS.07.01.CFM.04 Pengembangan pengolahan hasil peternakan	KPS.07.01.CFM.05 Pembiayaan dan investasi pertanian
1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian 6. Lembaga Perbankan

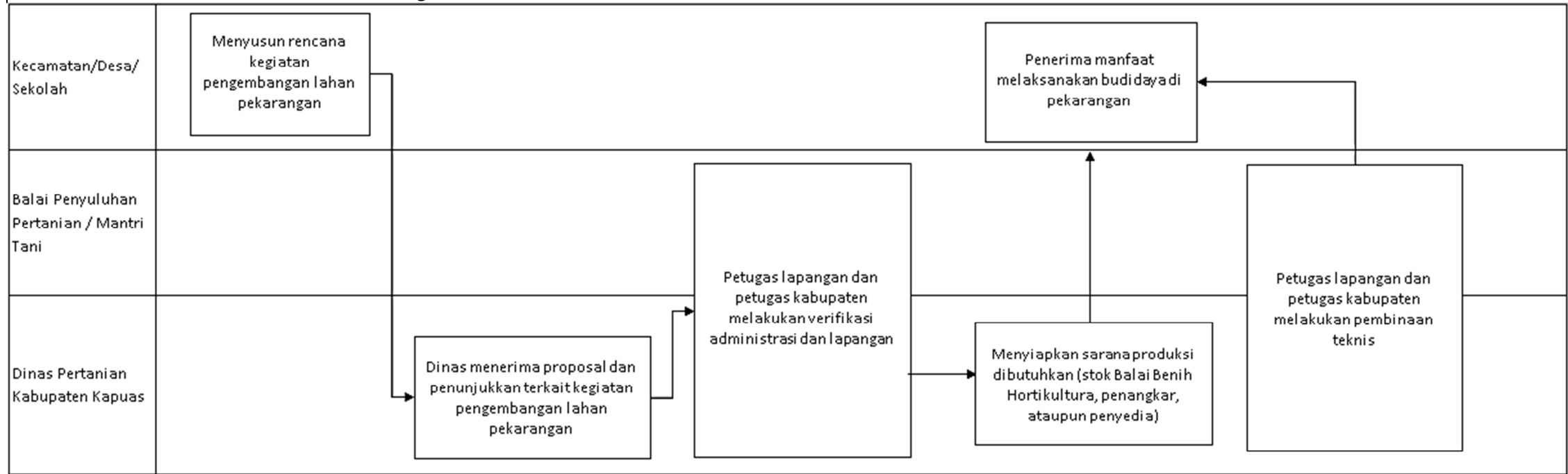
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.01 Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Hortikultura



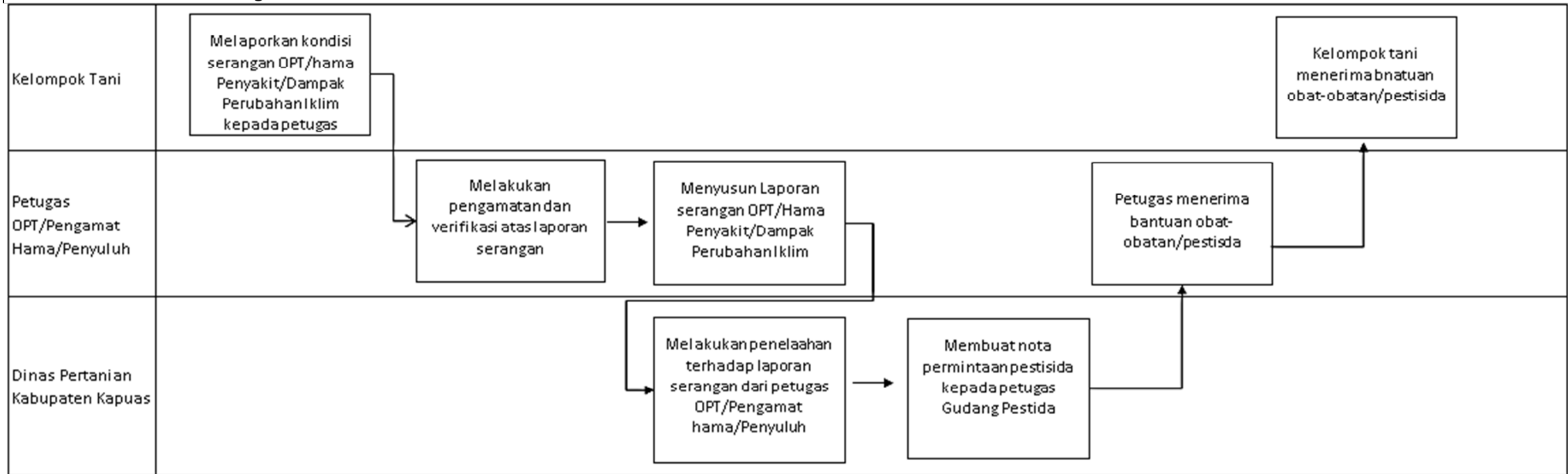
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.02 Pemanfaatan Lahan Pekarangan

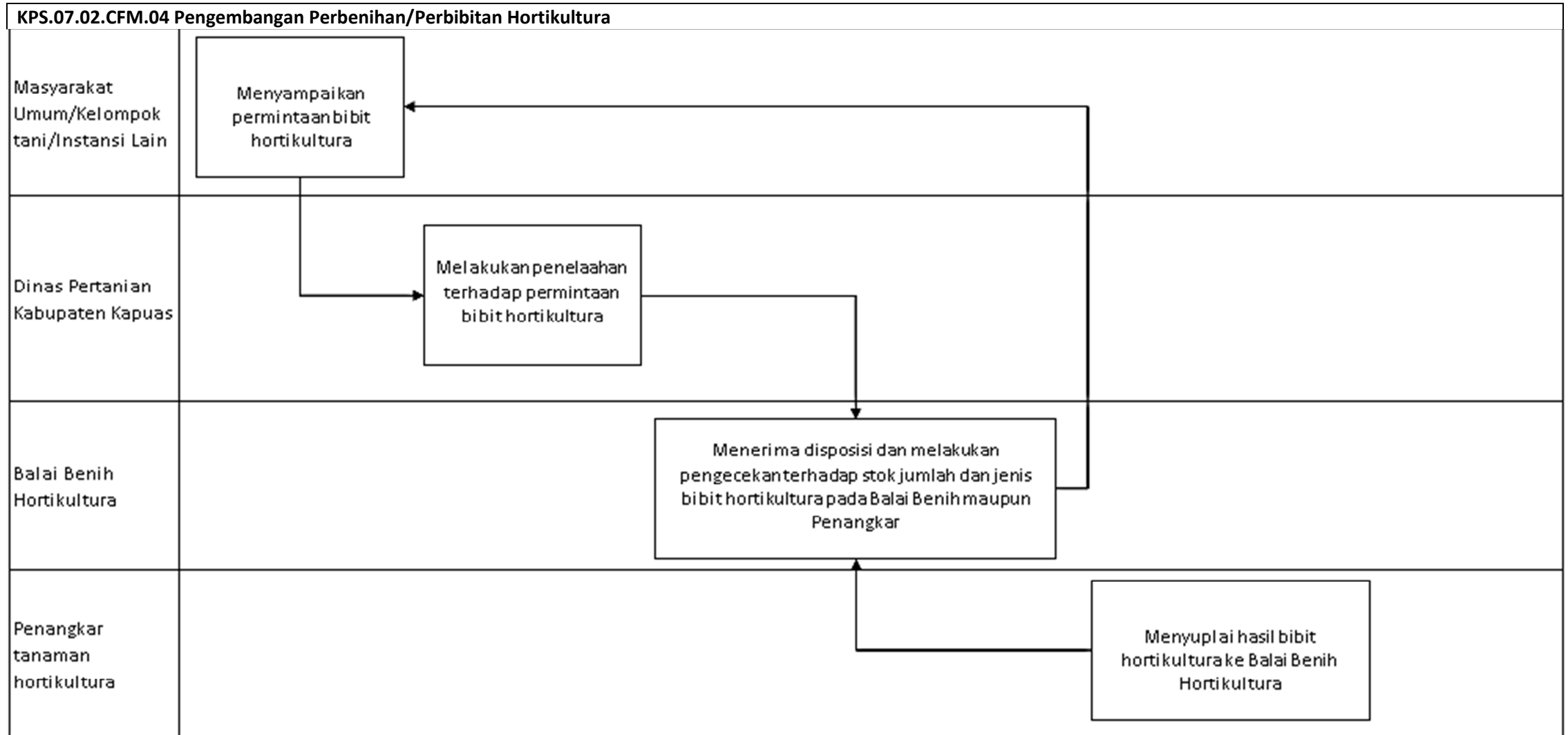


PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.02.CFM.03 Perlindungan Tanaman Hortikultura



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

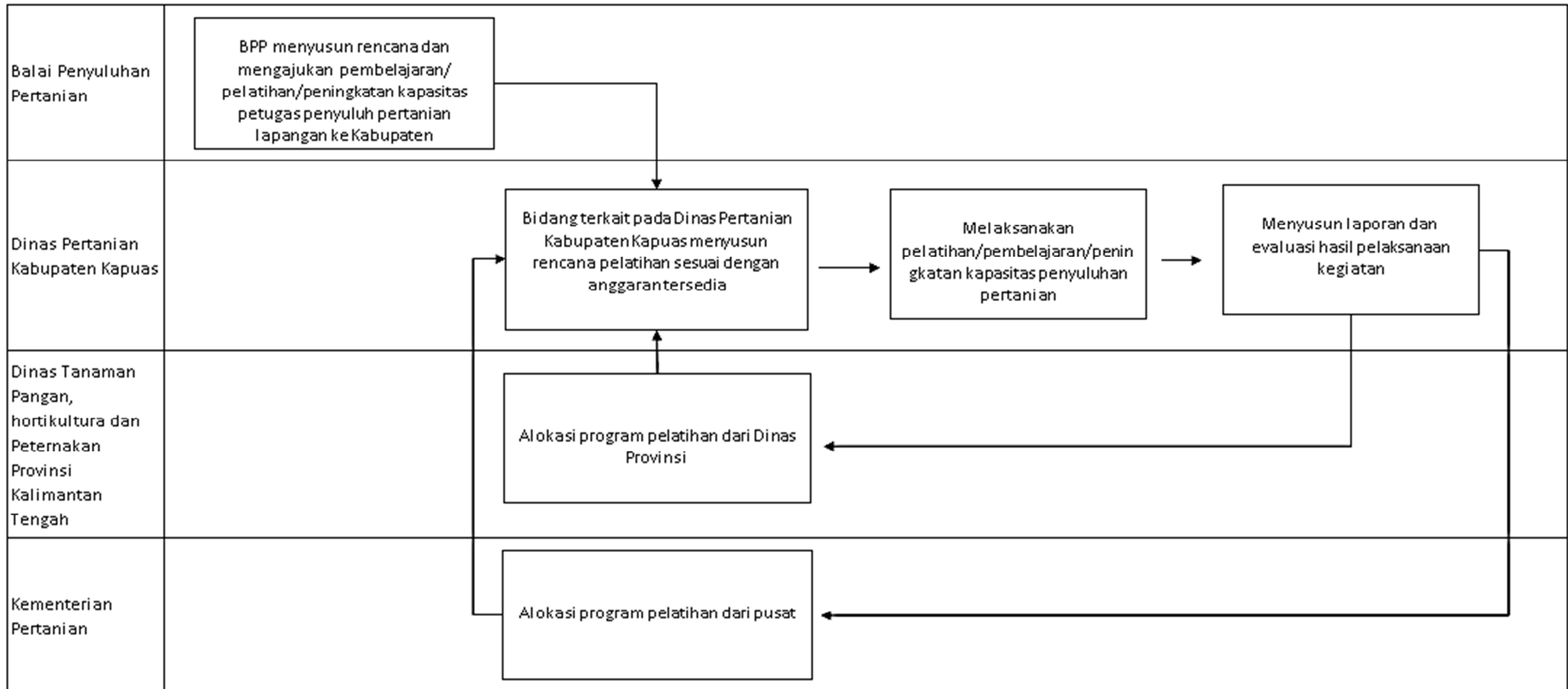
KPS.07.02

Peningkatan Produksi Hortikultura

KPS.07.02.CFM.01 Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	KPS.07.02.CFM.02 Pemanfaatan Lahan Pekarangan	KPS.07.02.CFM.03 Perlindungan Tanaman Hortikultura	KPS.07.02.CFM.04 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kecamatan/Desa/Sekolah 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	1. Kelompok Tani 2. Petugas OPT/Pengamat Hama/PPL 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	1. Masyarakat Umum/Kelompok tani/Instansi Lain 2. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Balai Benih Hortikultura 5. Penangkar tanaman hortikultura

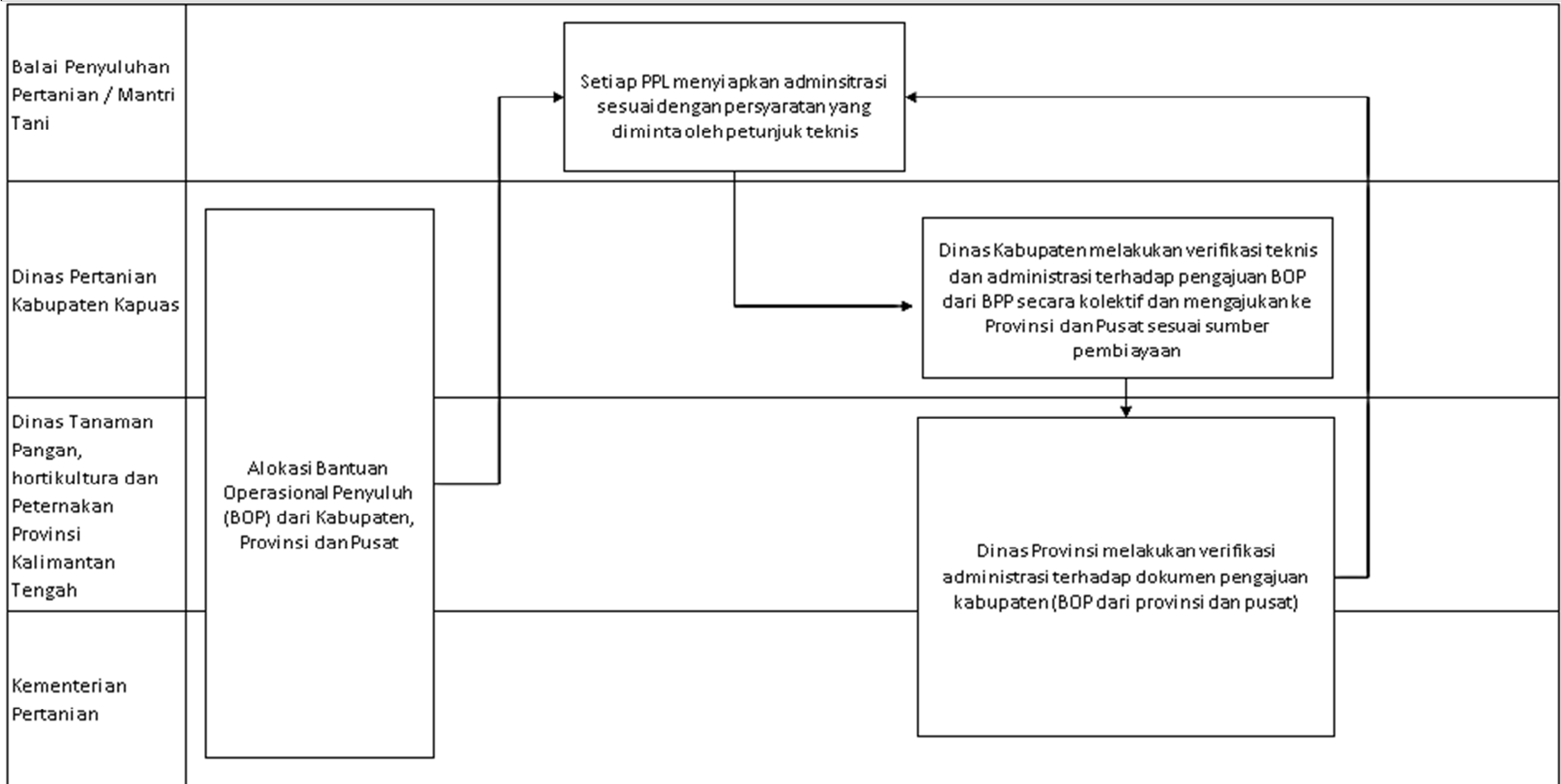
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan



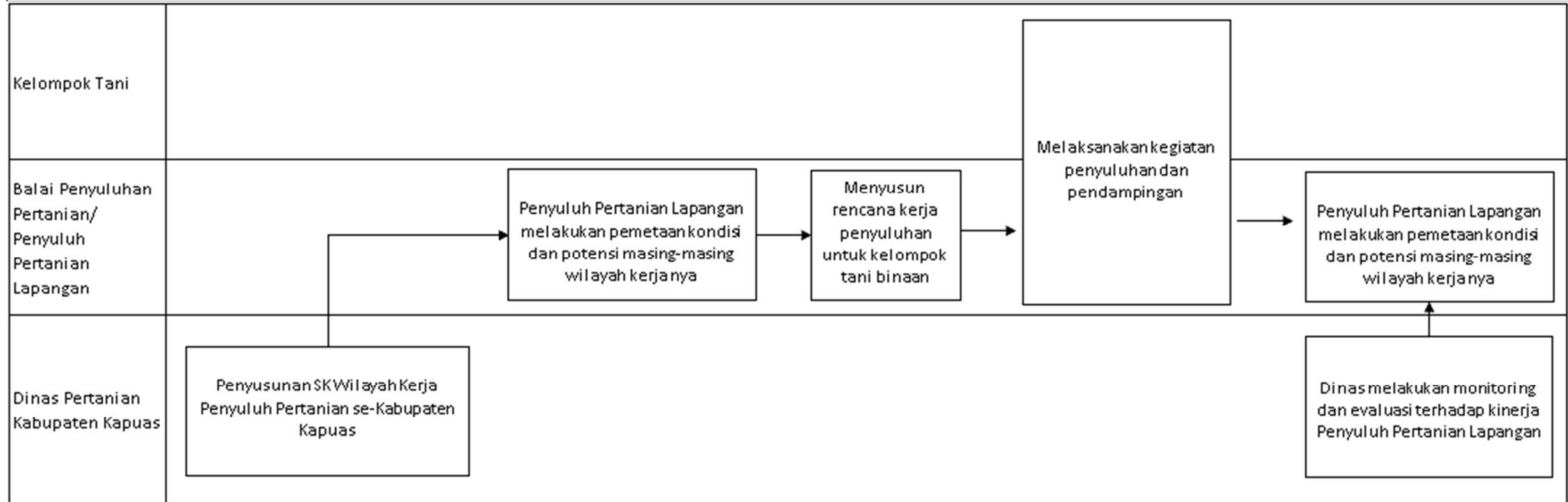
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan



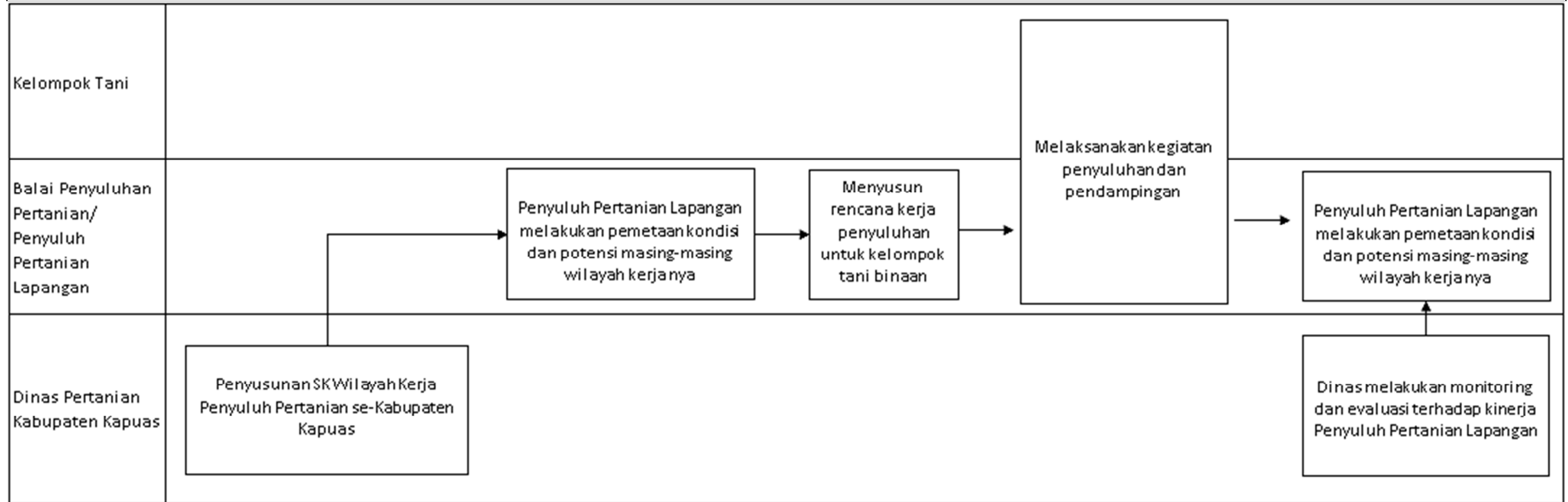
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan



PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.03.CFM.04 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (DAK)



PETA RELASI

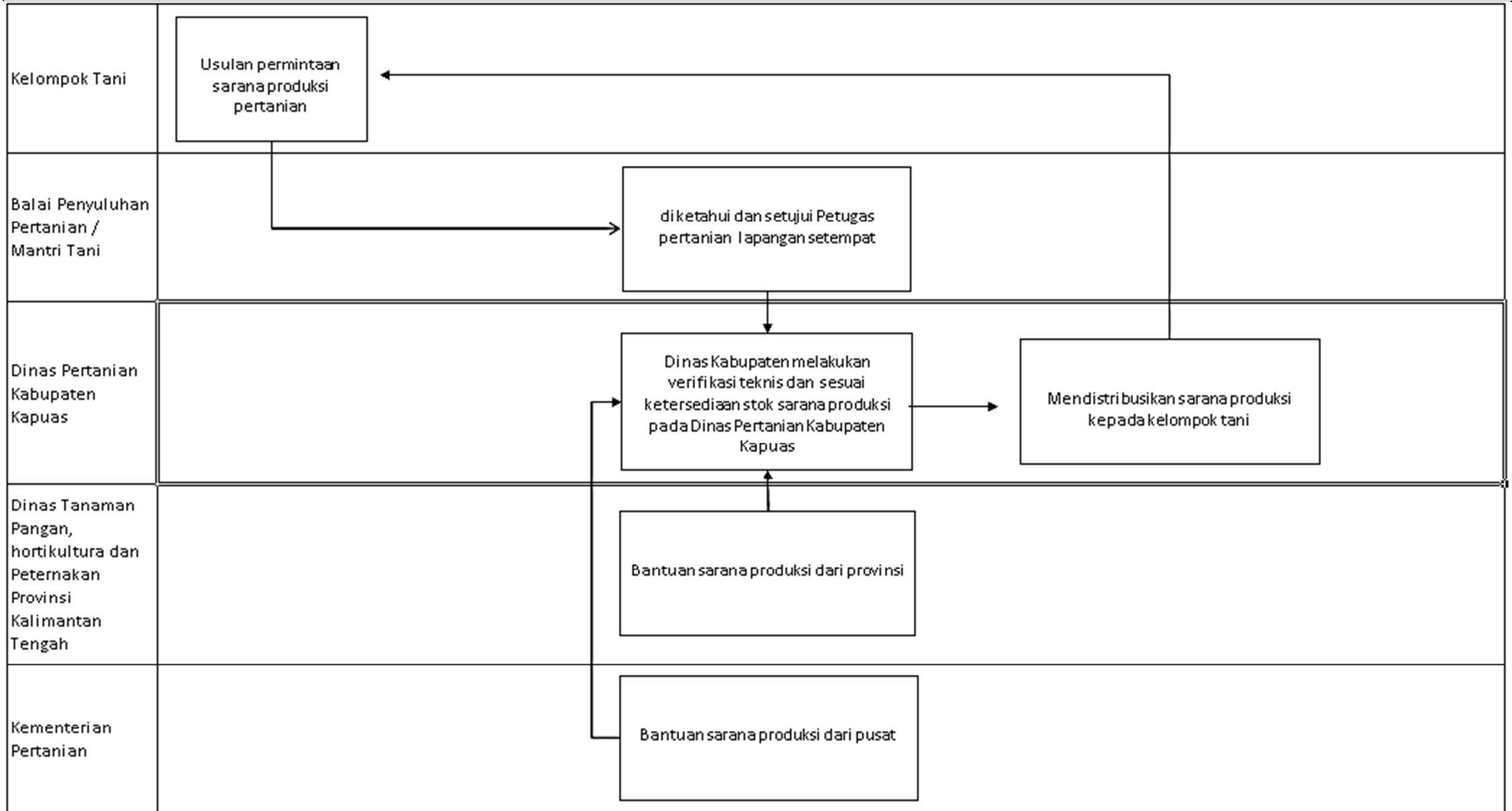
KPS.07.03

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

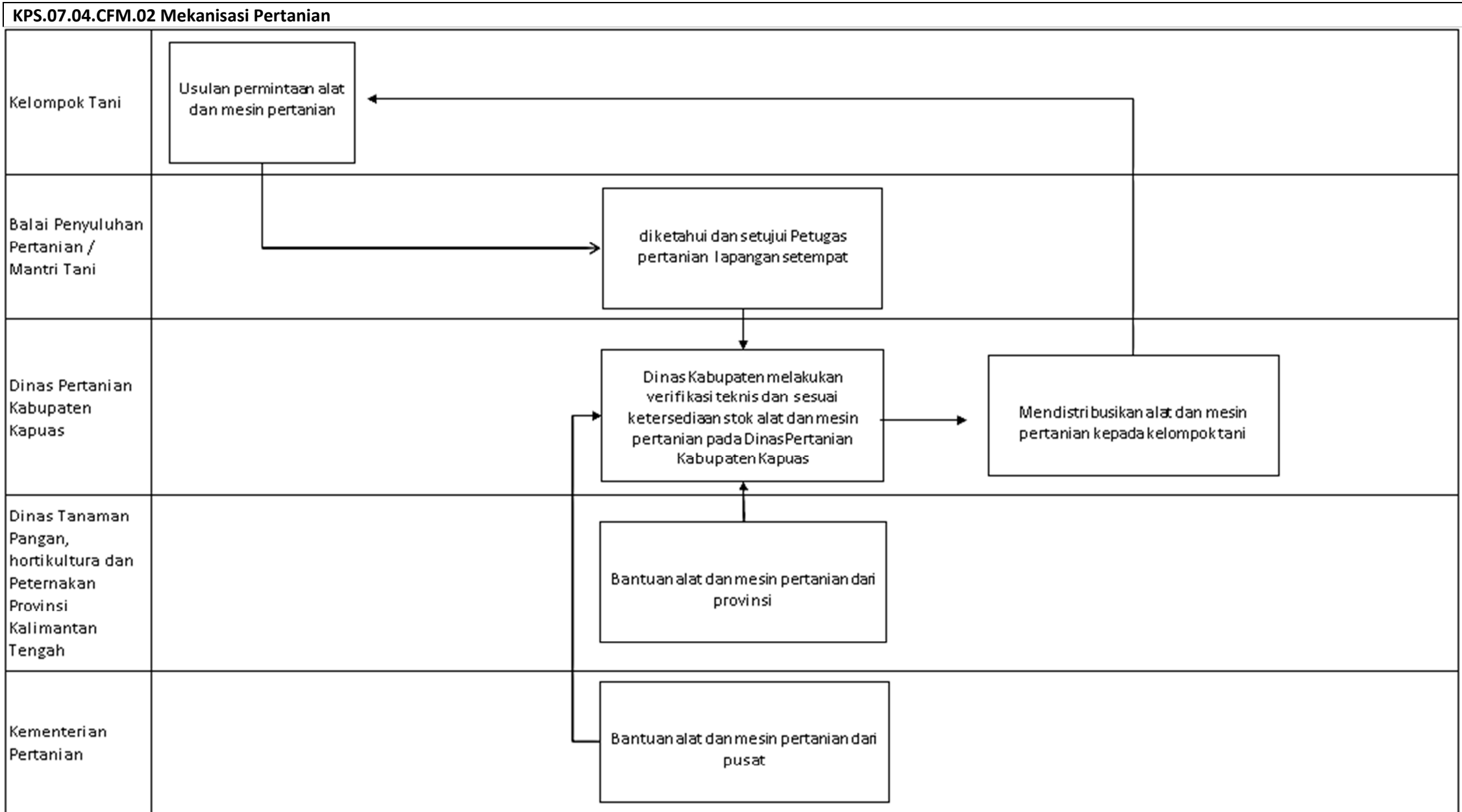
KPS.07.03.CFM.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	KPS.07.03.CFM.02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	KPS.07.03.CFM.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	KPS.07.03.CFM.04 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (DAK)
1. Balai Penyuluhan Pertanian 2. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 3. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 4. Kementerian Pertanian	1. Balai Penyuluhan Pertanian / Mantri Tani 2. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 3. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 4. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/ Penyuluh Pertanian Lapangan 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/ Penyuluh Pertanian Lapangan 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas

PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.01 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

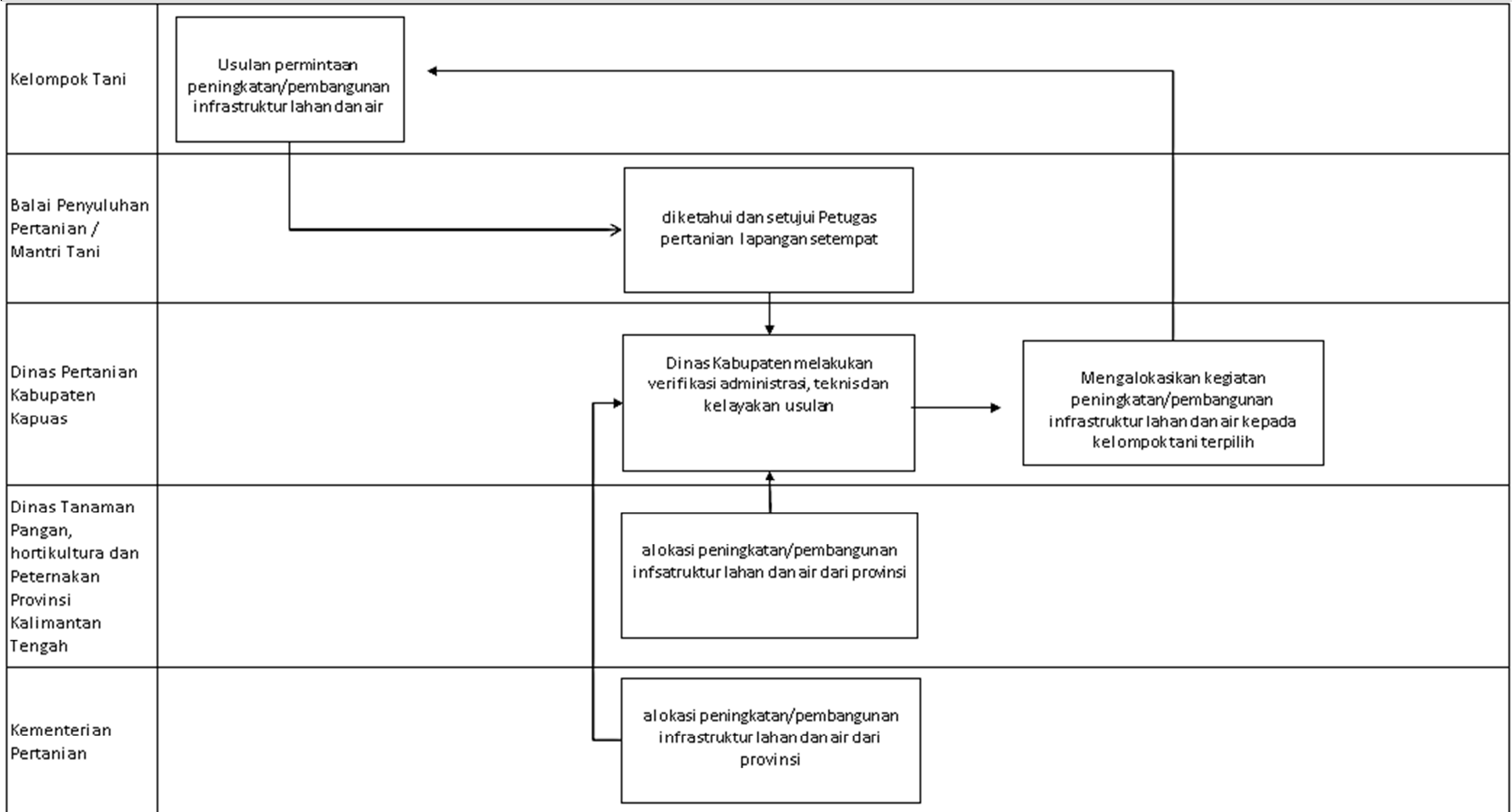


PETA LINTAS FUNGSI



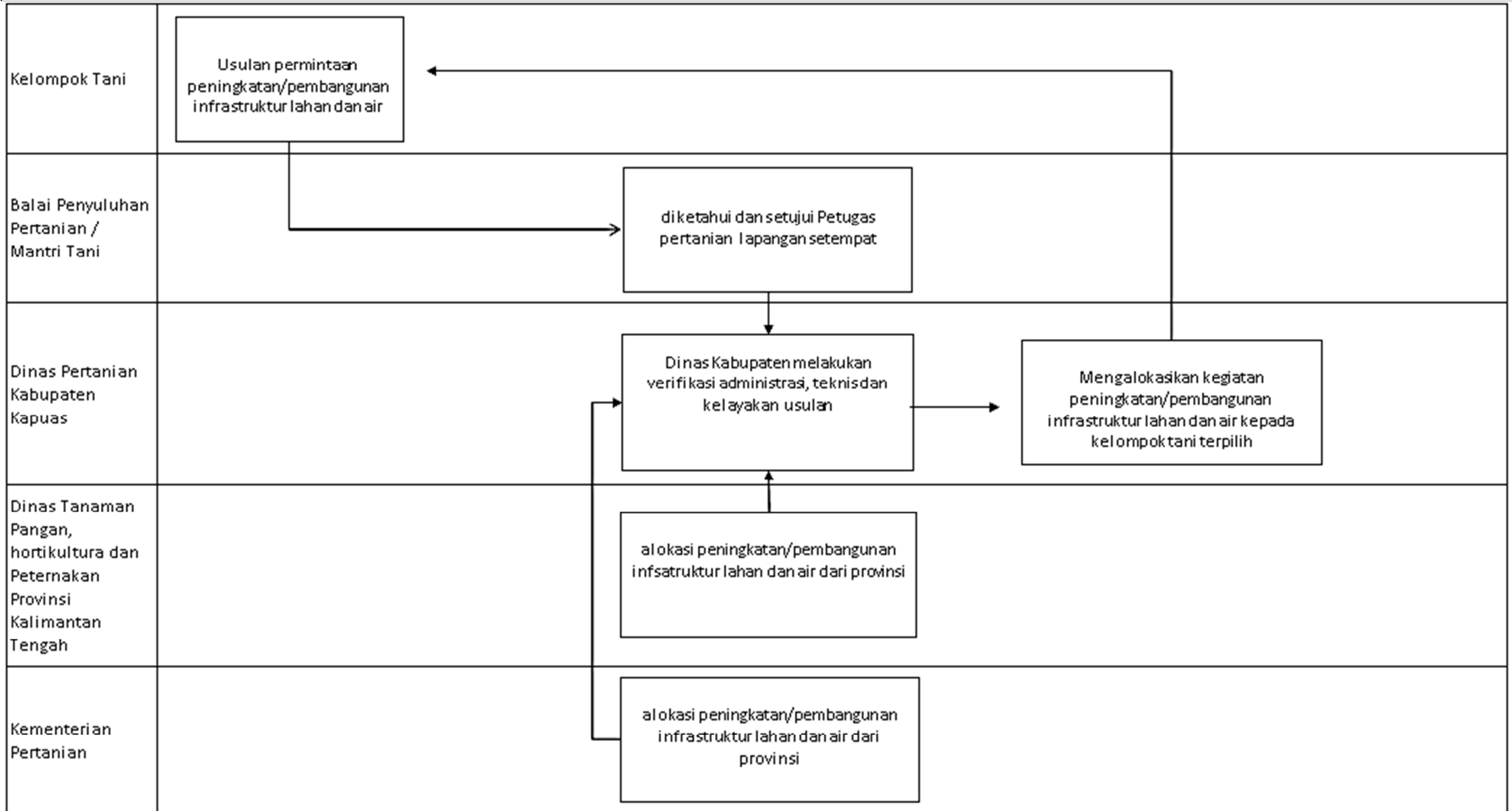
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.03 Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air



PETA LINTAS FUNGSI

KPS.07.04.CFM.04 Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air (DAK)



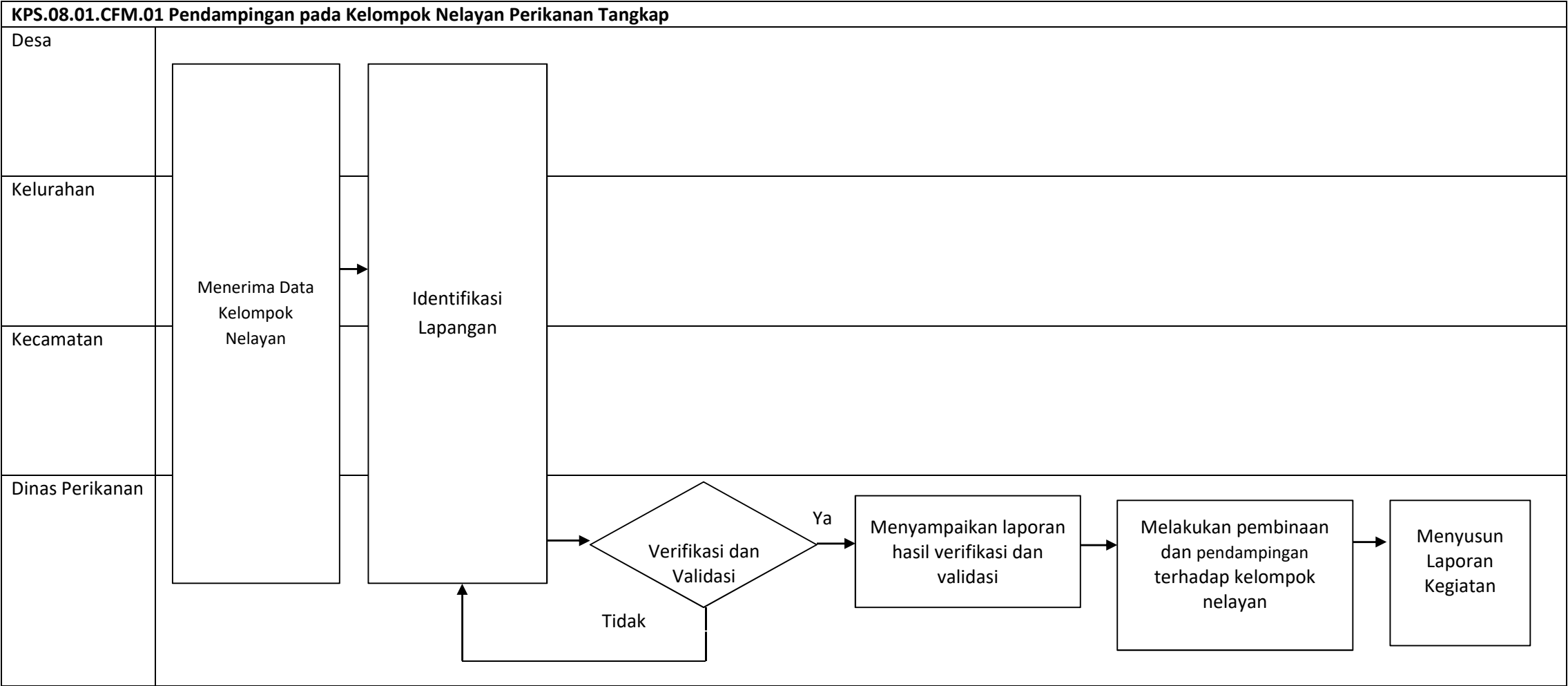
PETA RELASI

KPS.07.04

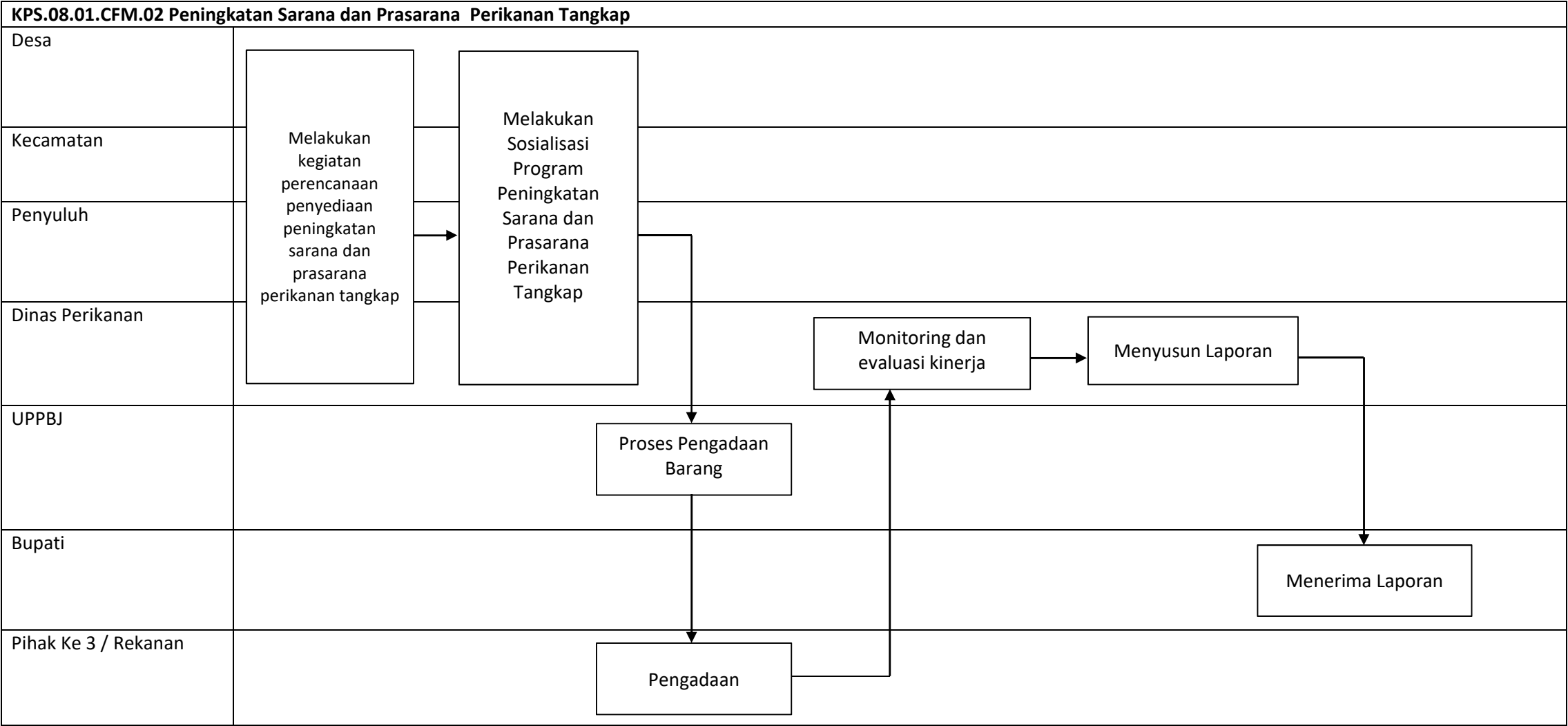
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

KPS.07.04.CFM.01 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	KPS.07.04.CFM.02 Mekanisasi Pertanian	KPS.07.04.CFM.03 Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air	KPS.07.04.CFM.04 Peningkatan Infrastruktur Lahan Dan Air (DAK)
1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian / Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Pternakan Provinsi Kalimantan Tengah 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian / Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Pternakan Provinsi Kalimantan Tengah 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian / Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Pternakan Provinsi Kalimantan Tengah 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian

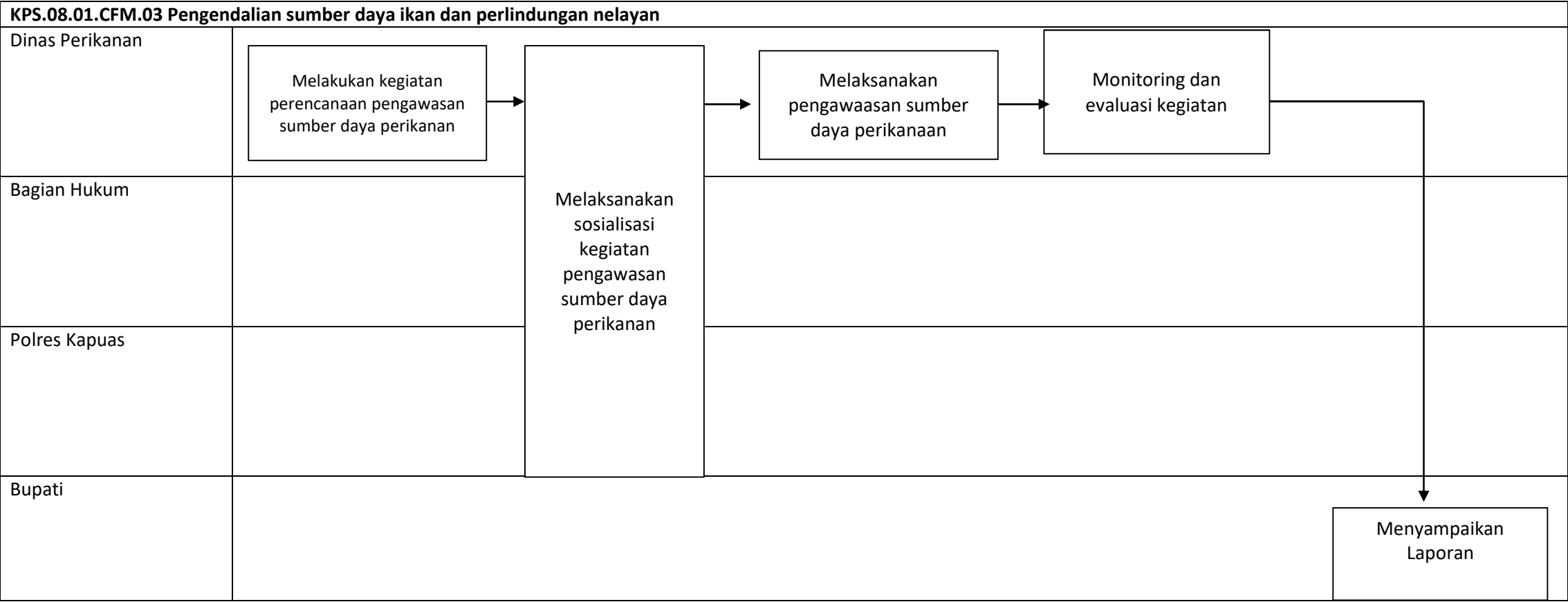
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



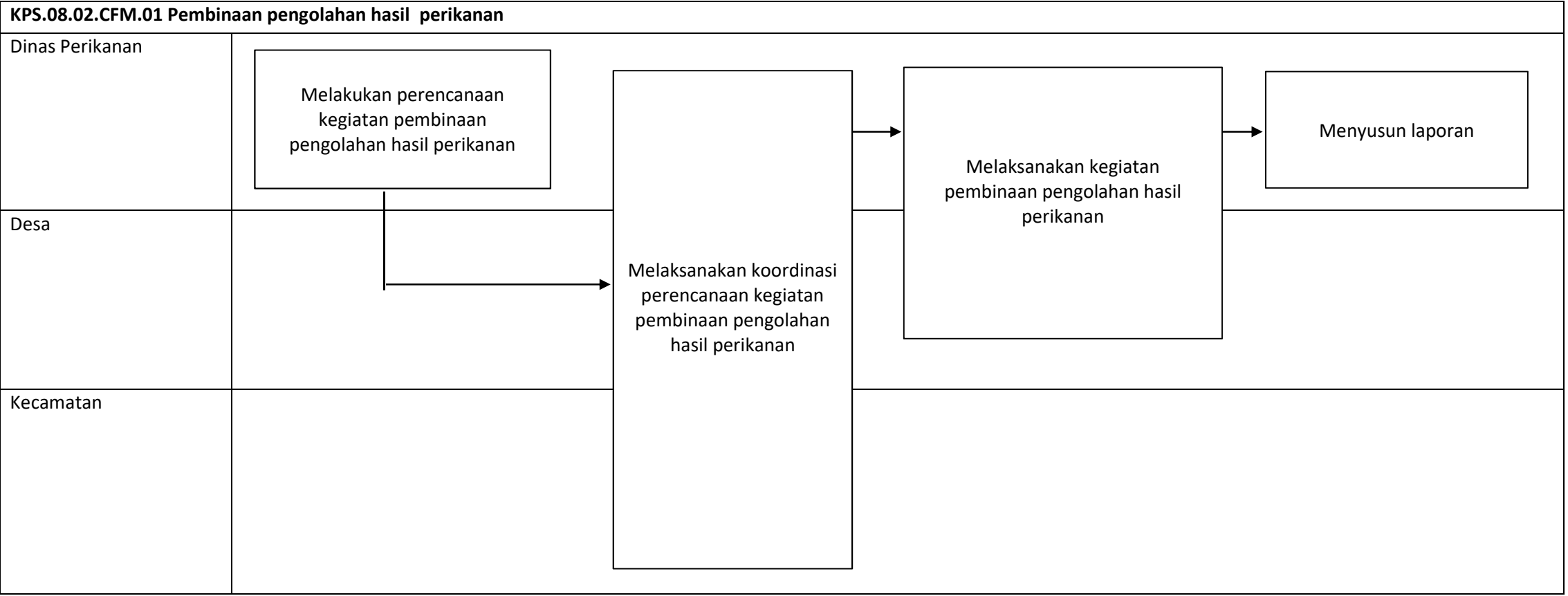
PETA RELASI

KPS.08.01

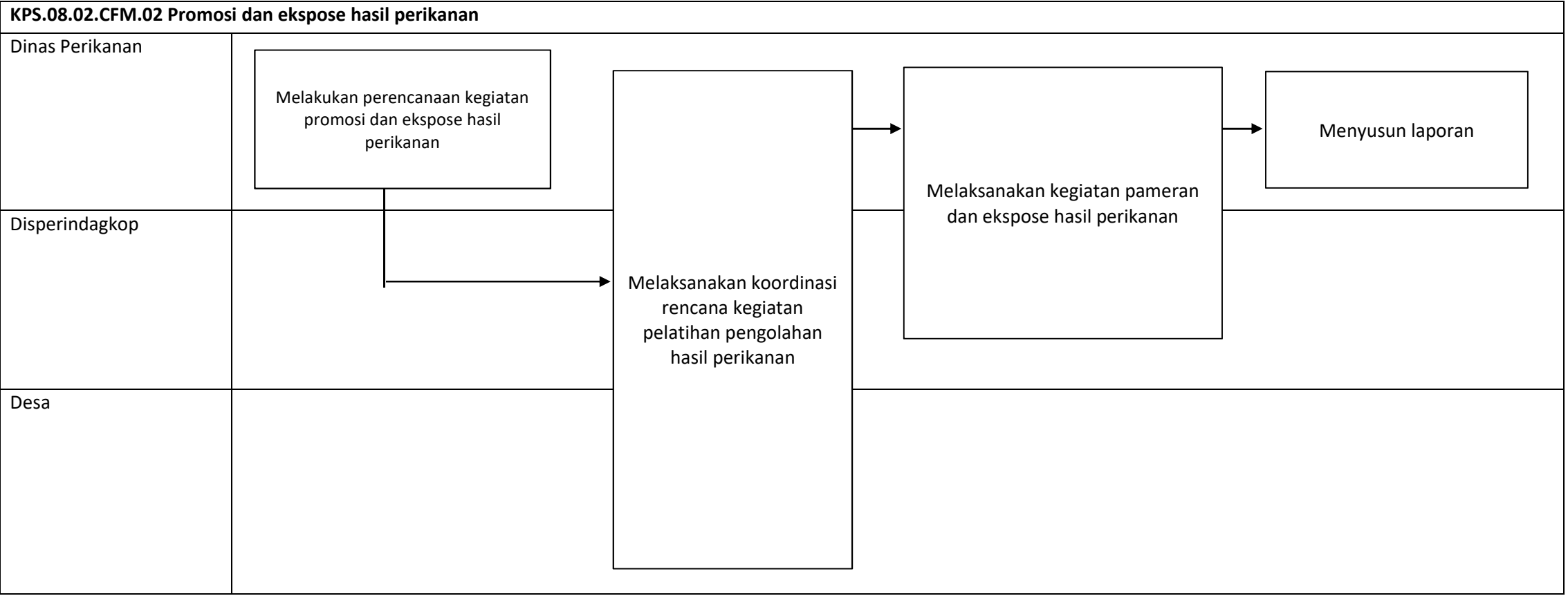
Pengembangan Perikanan Tangkap

KPS.08.01.CFM.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	KPS.08.01.CFM.02 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	KPS.08.01.CFM.03 Pengendalian sumber daya ikan dan perlindungan nelayan
1. Desa 2. Kelurahan 3. Kecamatan 4. Dinas Perikanan	1. Desa 2. Kecamatan 3. Penyuluh 4. Dinas Perikanan 5. UPPBJ 6. Bupati 7. Pihak Ke 3 / Rekanan	1. Dinas Perikanan 2. Bagian Hukum 3. Polres Kapuas 4. Bupati

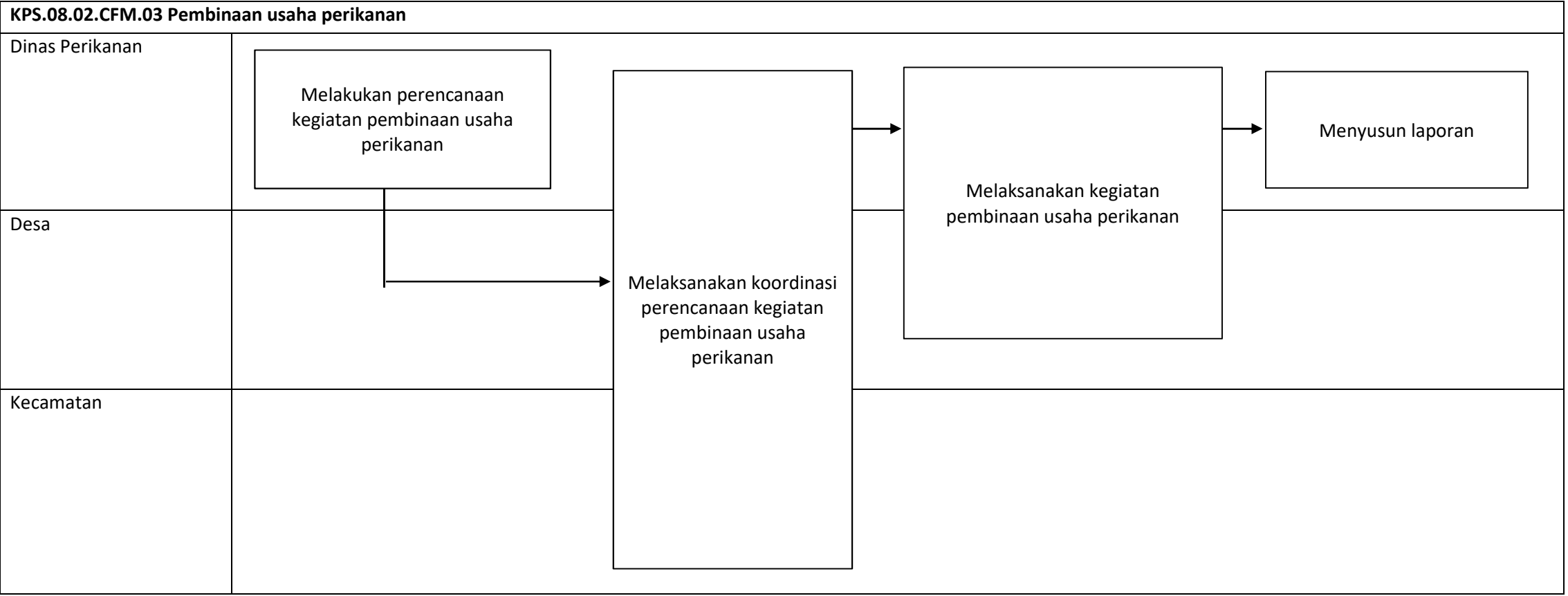
PETA LINTAS FUNGSI



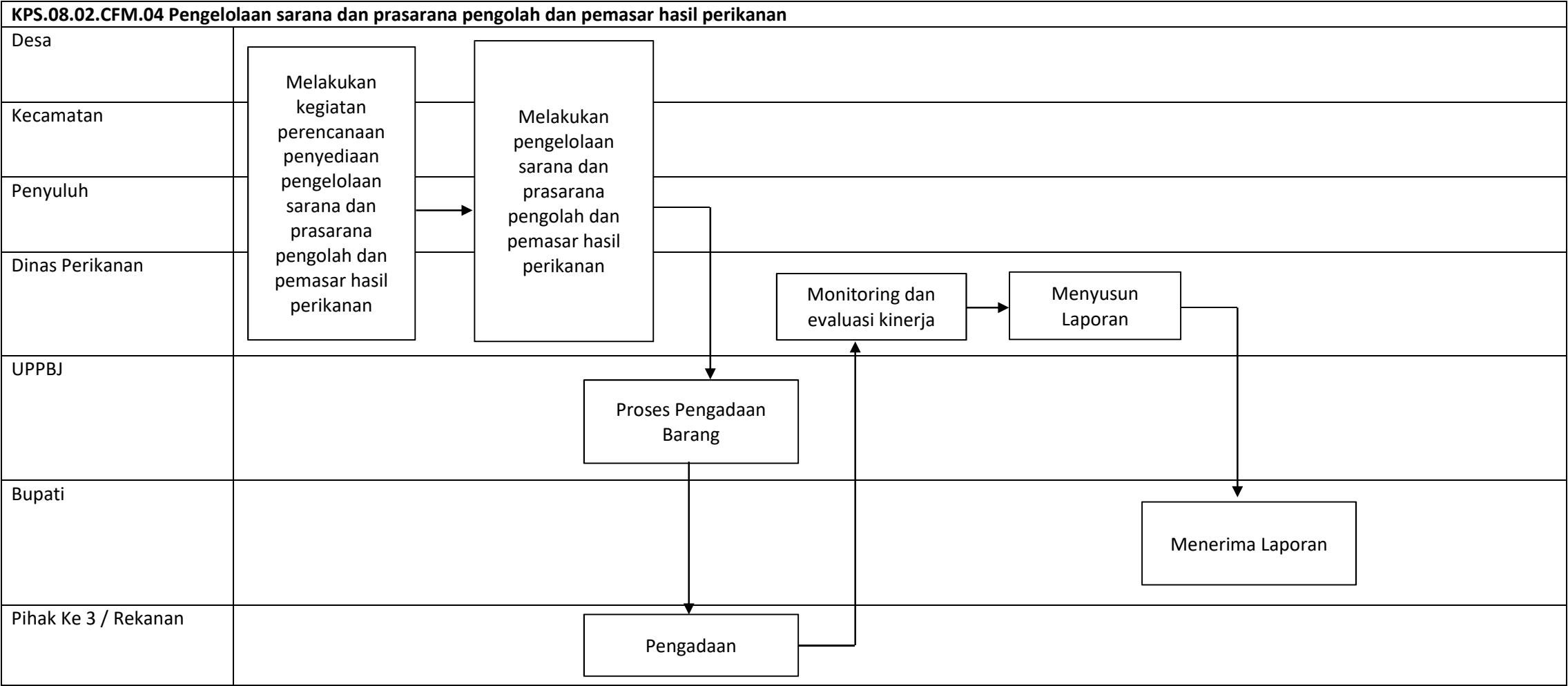
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

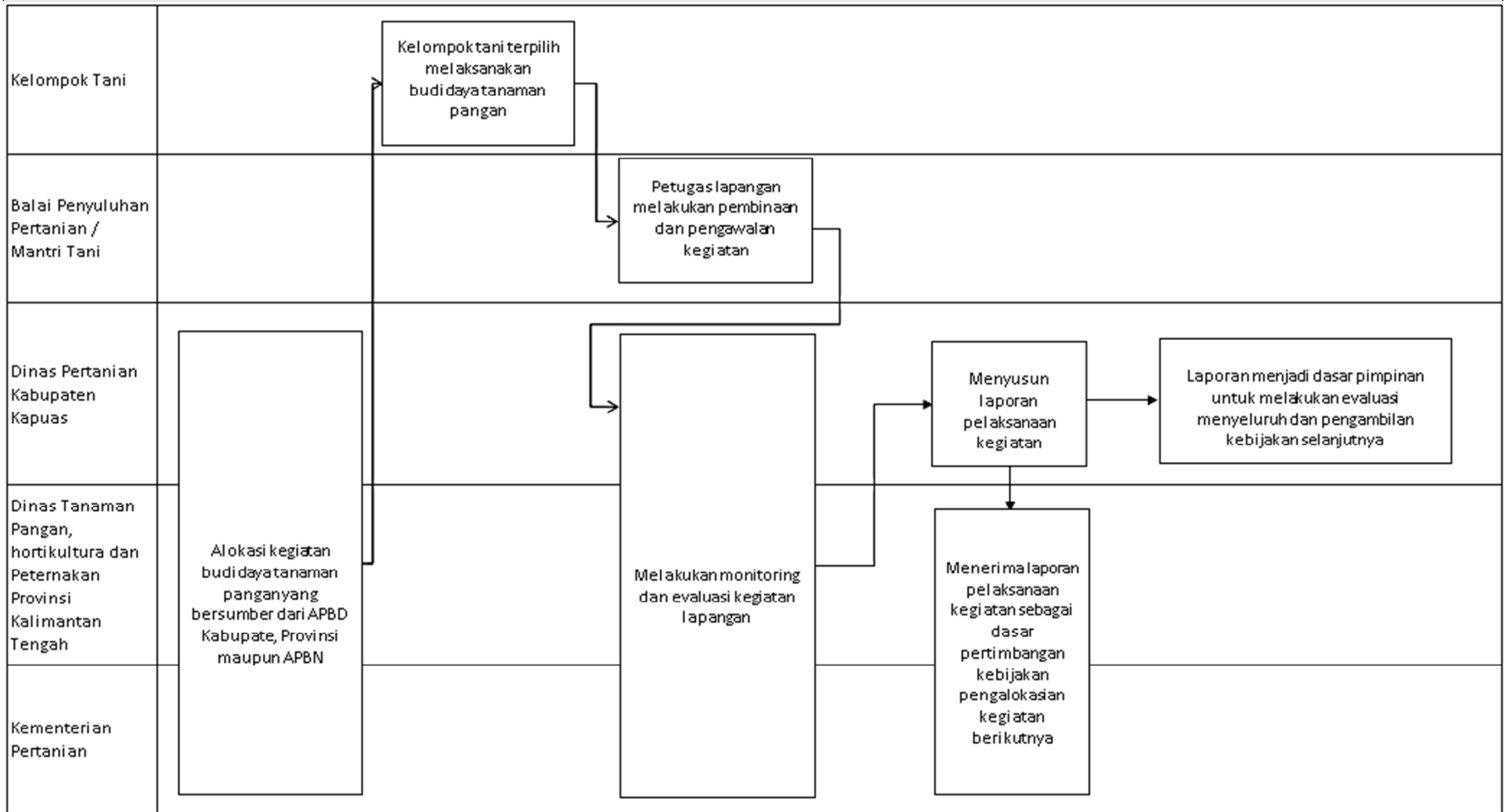
KPS.08.02

Pengelolaan Usaha Perikanan

KPS.08.02.CFM.01 Pembinaan pengolahan hasil perikanan	KPS.08.02.CFM.02 Promosi dan ekspose hasil perikanan	KPS.08.02.CFM.03 Pembinaan usaha perikanan	KPS.08.02.CFM.04 Pengelolaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan
1. Dinas Perikanan 2. Desa 3. Kecamatan	1. Dinas Perikanan 2. Disperindagkop 3. Desa	1. Dinas Perikanan 2. Desa 3. Kecamatan	1. Desa 2. Kecamatan 3. Penyuluh 4. Dinas Perikanan 5. UPPBJ 6. Bupati 7. Pihak Ke 3 / Rekanan

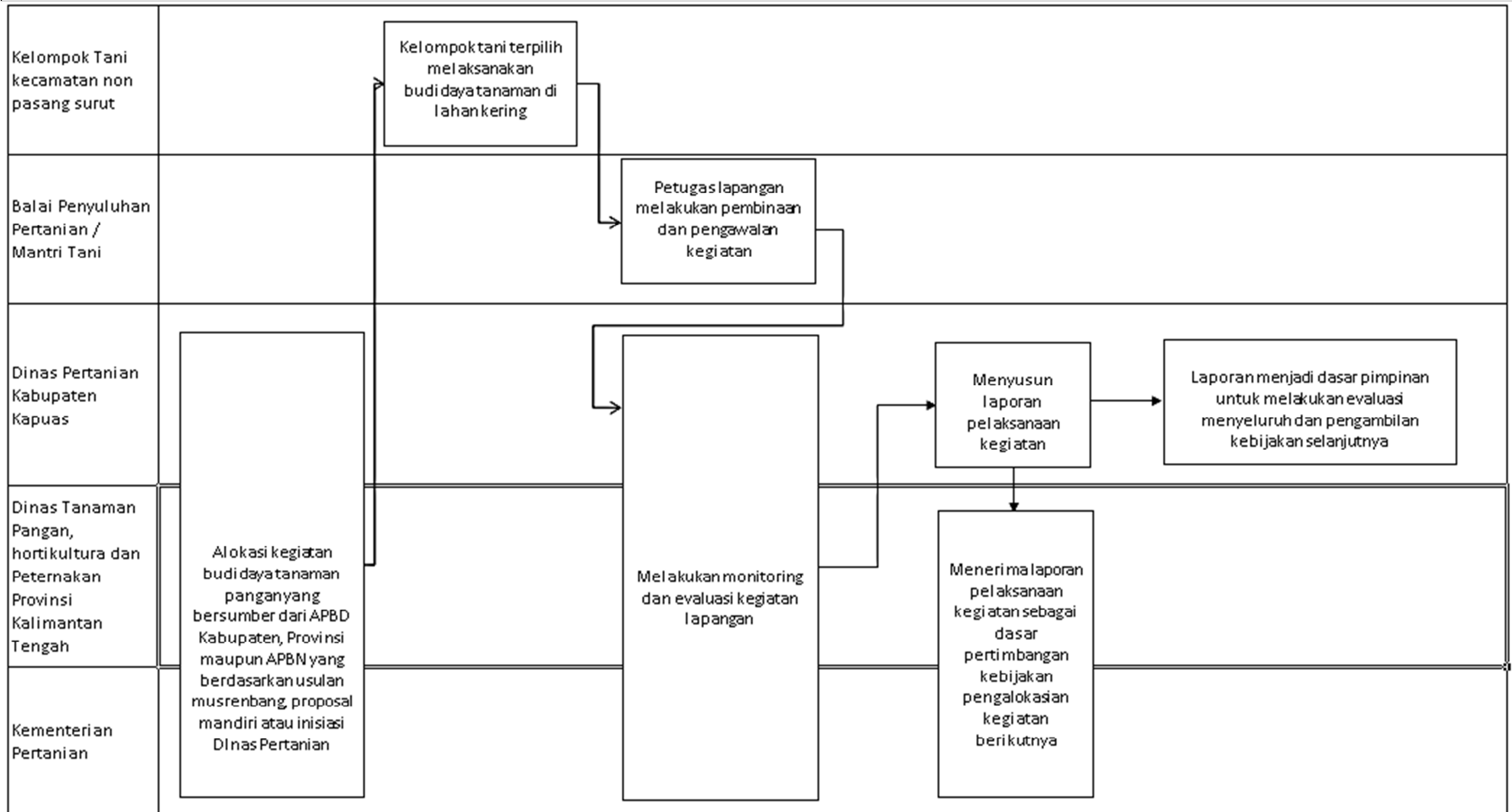
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.01 Pengembangan Indeks Pertanian Tanaman Pangan



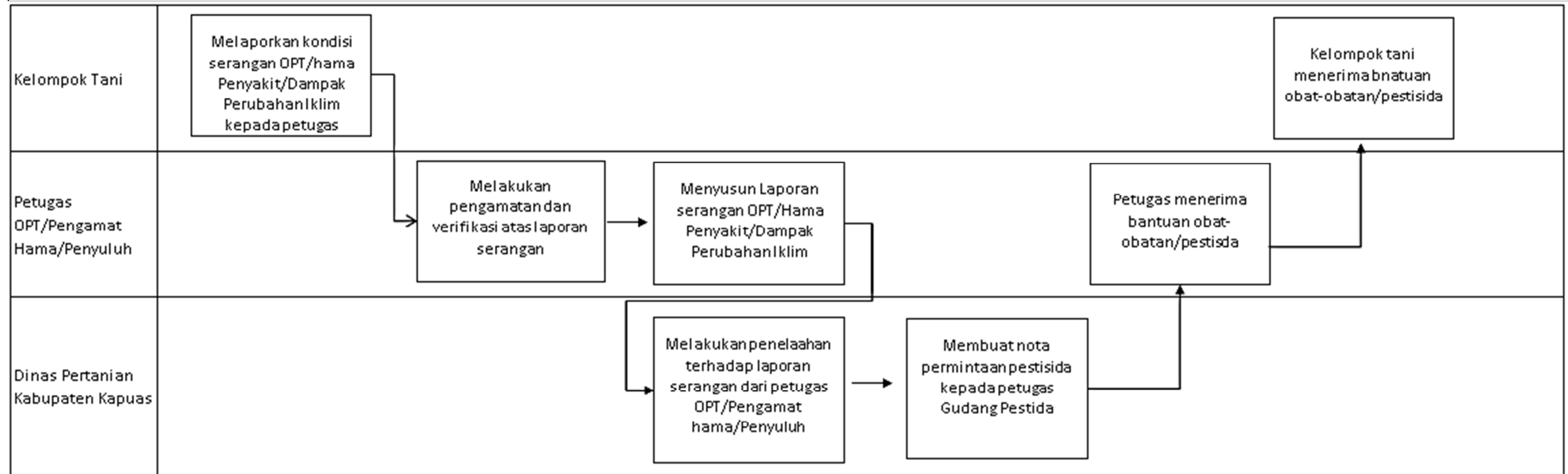
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.02 Pengembangan Tanaman Pangan Pada Lahan Kering



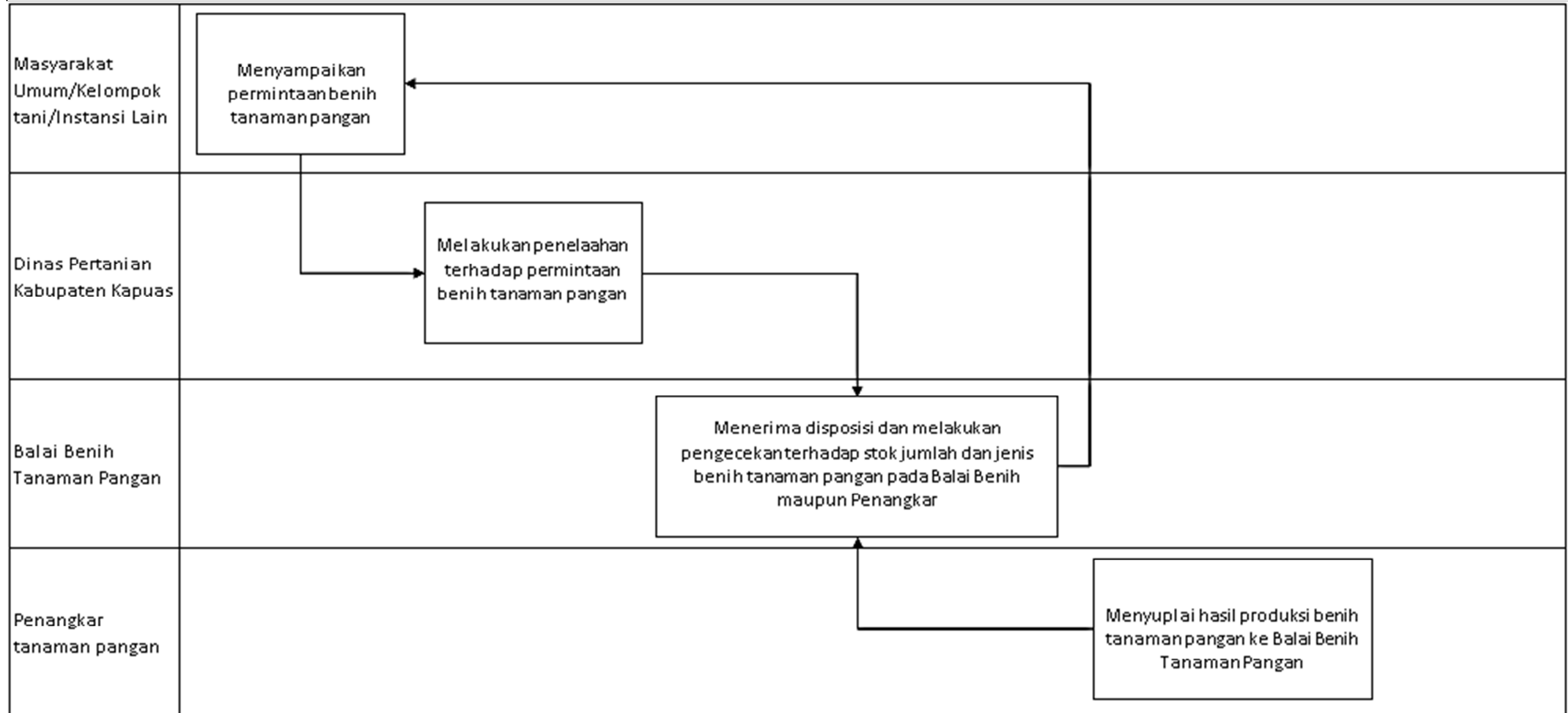
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.03 Perlindungan tanaman pangan



PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.01.CFM.04 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan



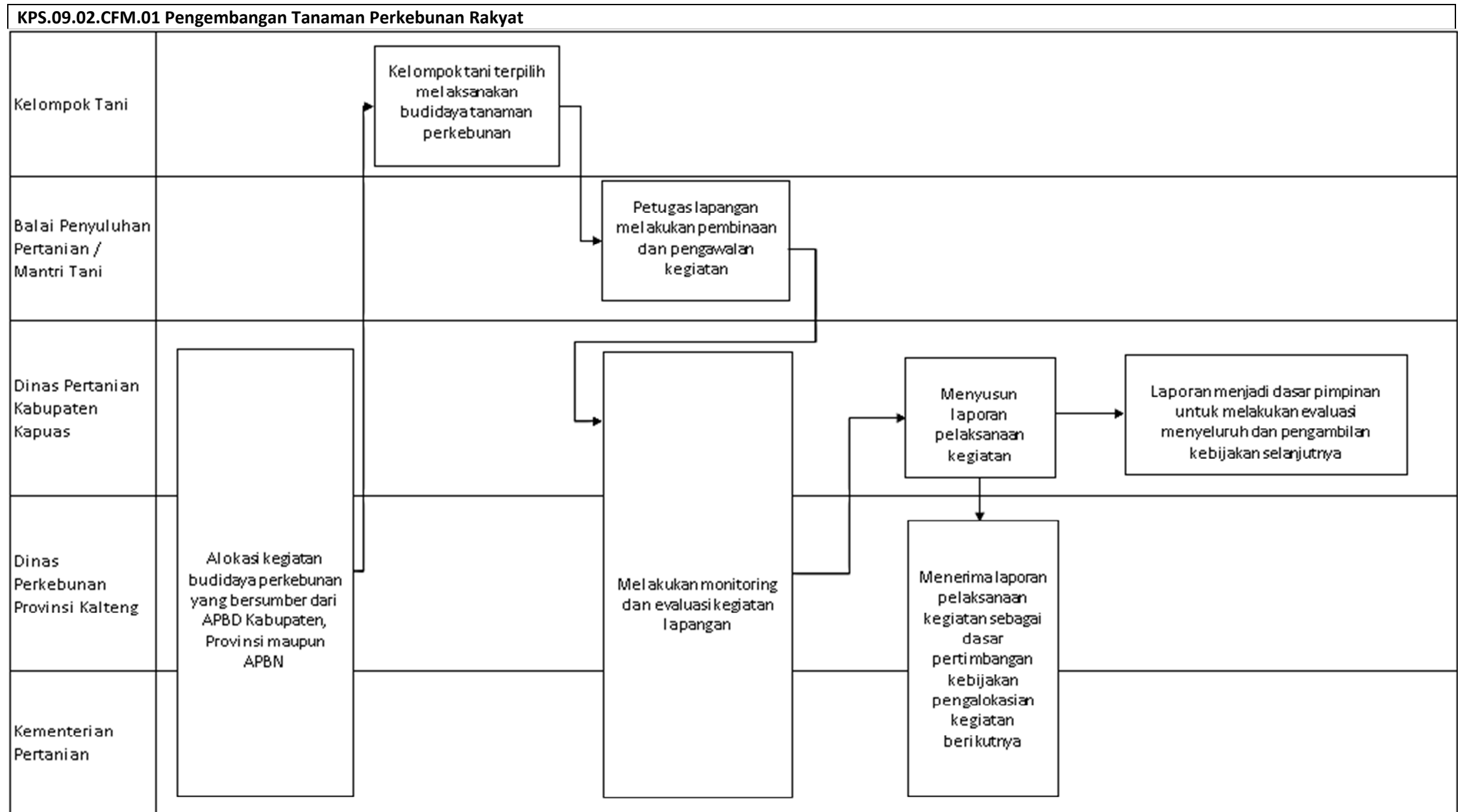
PETA RELASI

KPS.09.01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

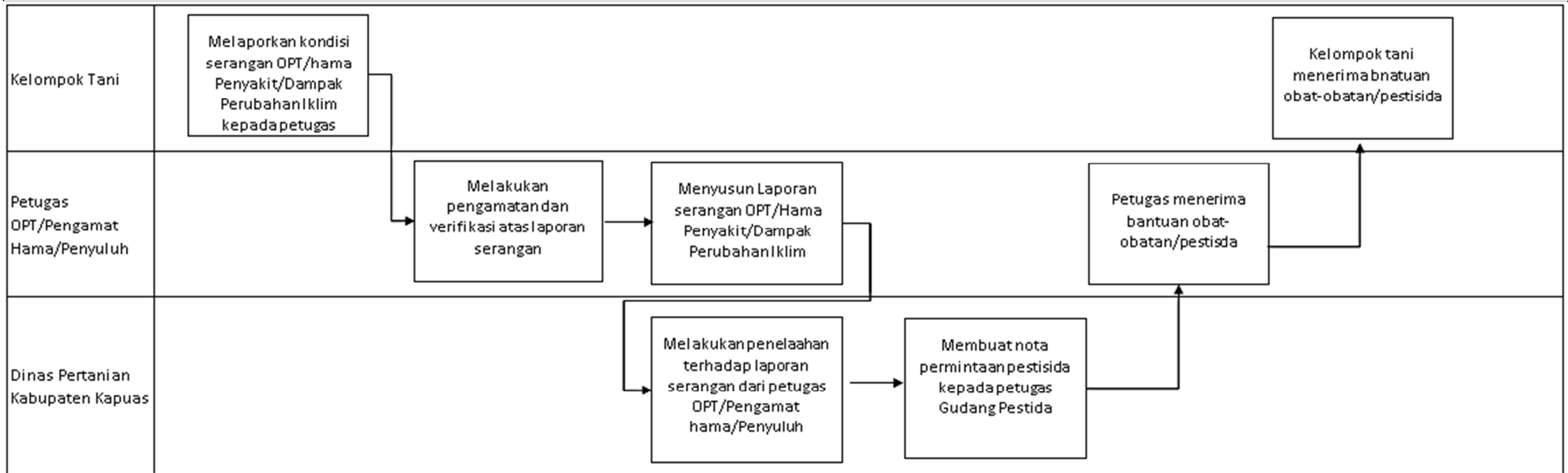
KPS.09.01.CFM.01 Pengembangan Indeks Pertanaman Tanaman Pangan	KPS.09.01.CFM.02 Pengembangan Tanaman Pangan Pada Lahan Kering	KPS.09.01.CFM.03 Perlindungan tanaman pangan	KPS.09.01.CFM.04 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan
1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas TPHP Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani Kecamatan Non Pasang Surut 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	1. Kelompok Tani 2. Petugas OPT/Pengamat Hama/PPL 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	1. Masyarakat Umum/Kelompok tani/Instansi Lain 2. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 3. Balai Benih Tanaman Pangan 4. Penangkar Tanaman Pangan

PETA LINTAS FUNGSI



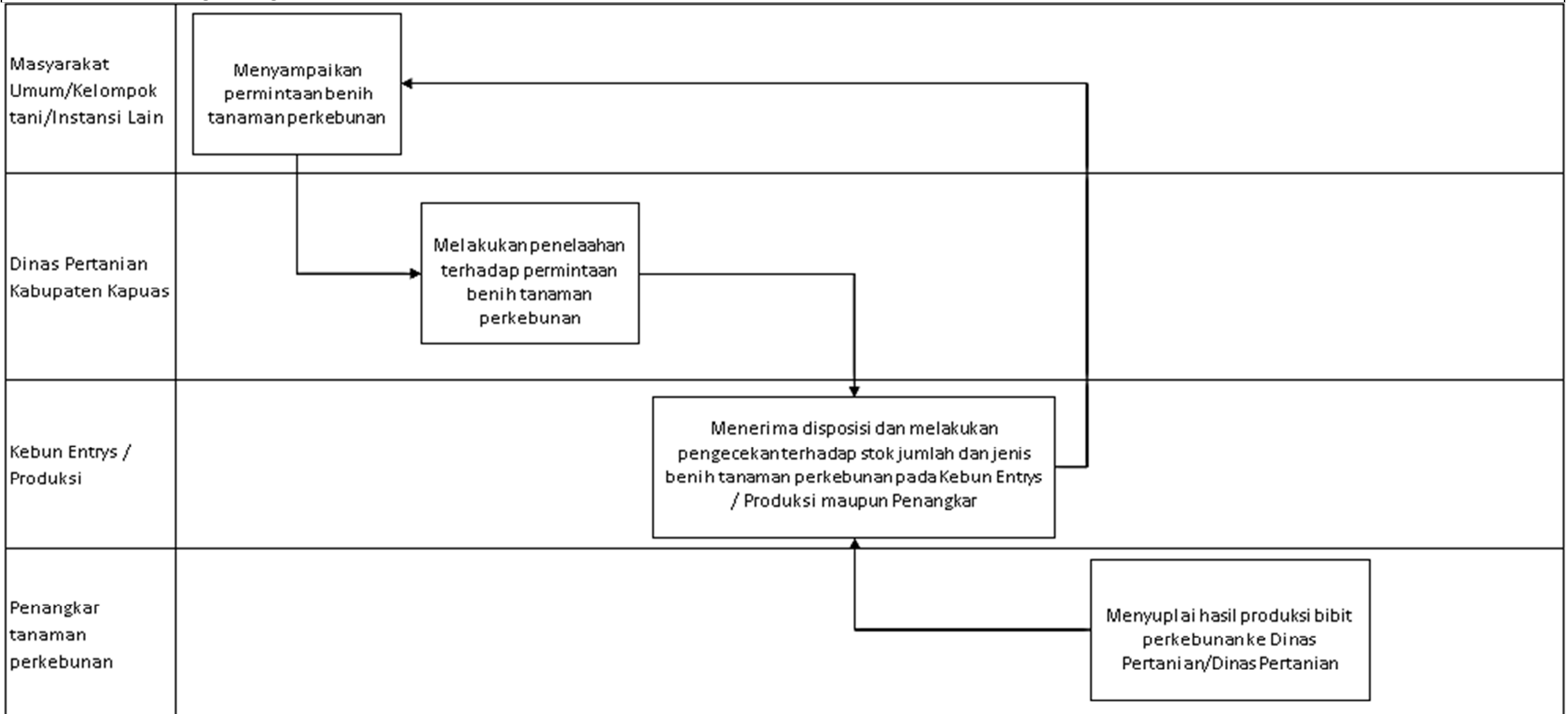
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.02.CFM.02 Perlindungan Tanaman Perkebunan



PETA LINTAS FUNGSI

KPS.09.02.CFM.03 Pengembangan Perbenihan/Perbibian Tanaman Perkebunan



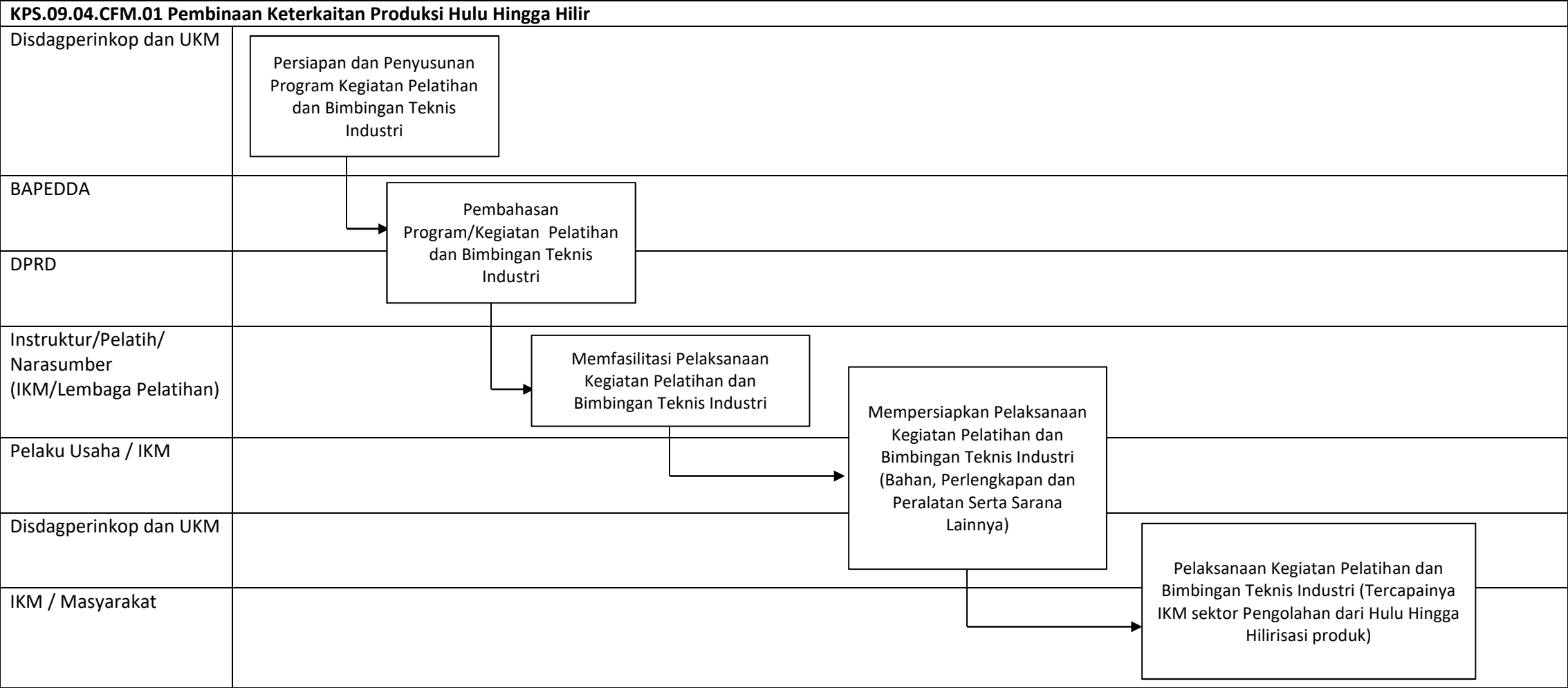
PETA RELASI

KPS.09.02

Peningkatan Produksi Perkebunan

KPS.09.02.CFM.01 Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	KPS.09.02.CFM.02 Perlindungan Tanaman Perkebunan	KPS.09.02.CFM.03 Pengembangan Perbenihan/Perbibian Tanaman Perkebunan
1. Kelompok Tani 2. Balai Penyuluhan Pertanian/Mantri Tani 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 4. Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng 5. Kementerian Pertanian	1. Kelompok Tani 2. Petugas OPT/Pengamat Hama/PPL 3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	1. Masyarakat Umum/Kelompok tani/Instansi Lain 2. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas 3. Kebun Entrys / Kebun Produksi 4. Penangkar Tanaman Perkebunan

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

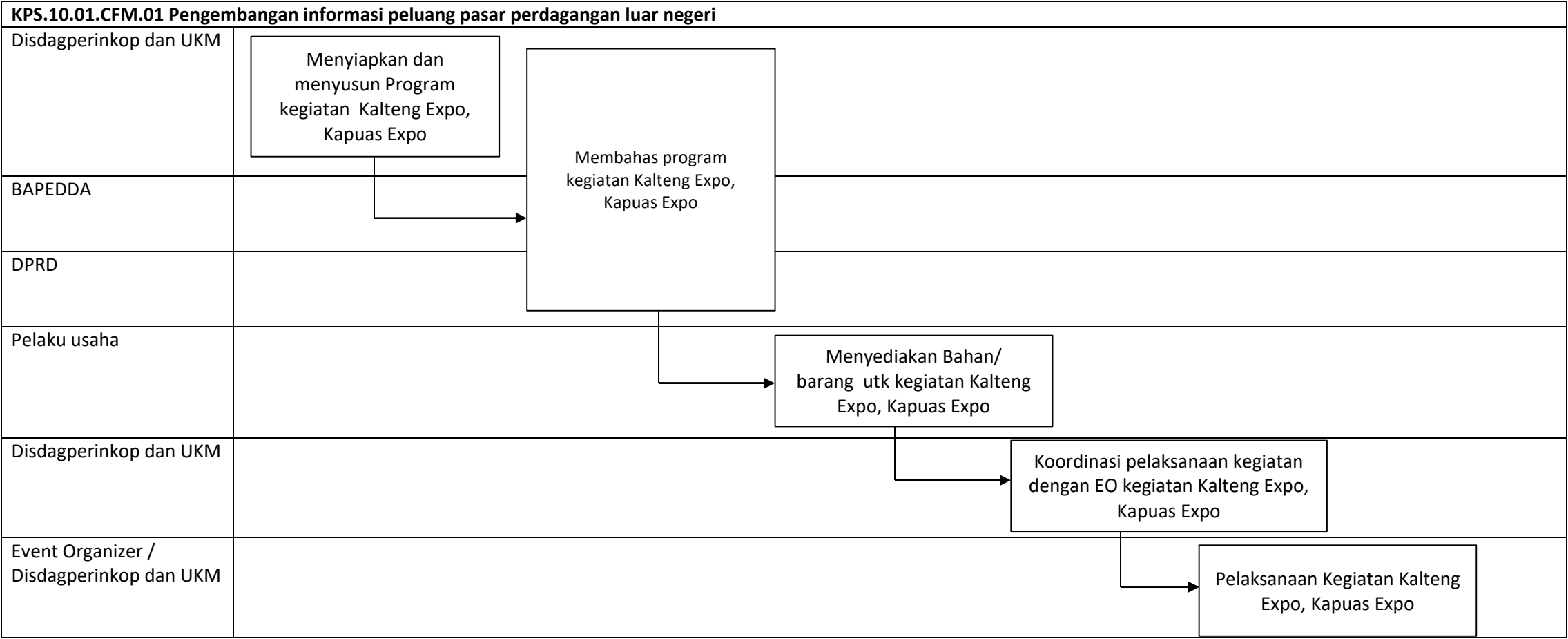
KPS.09.04

Peningkatan kemampuan teknologi industri

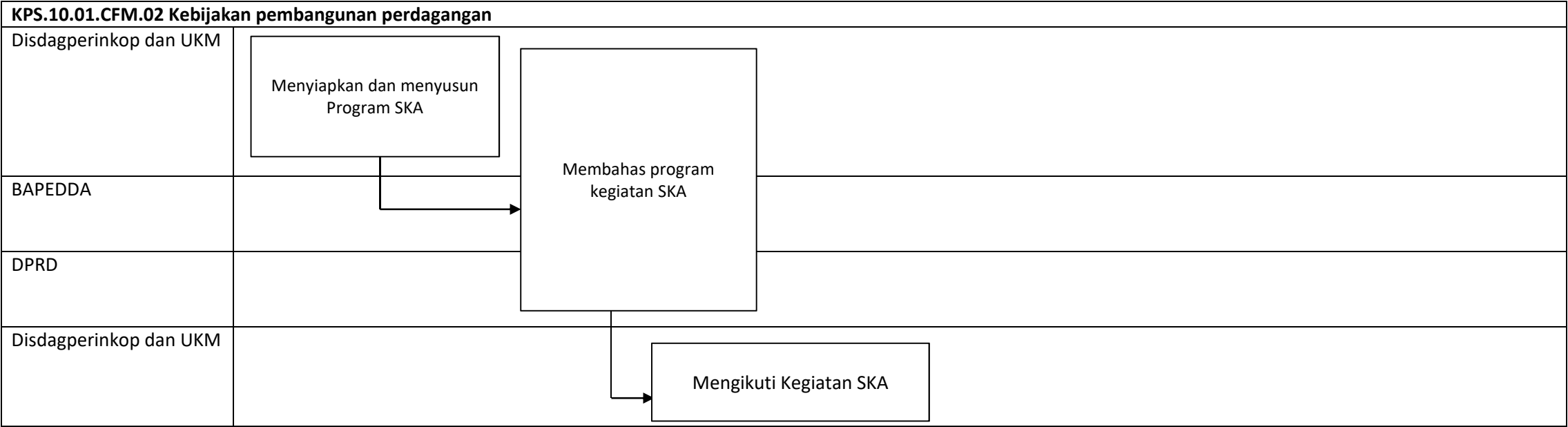
KPS.09.04.CFM.01 Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu Hingga Hilir
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Disdagperinkop dan UKM2. BAPEDDA3. DPRD4. Instruktur/Pelatih/
Narasumber
(IKM/Lembaga Pelatihan)5. Pelaku Usaha / IKM6. IKM / Masyarakat |
|--|

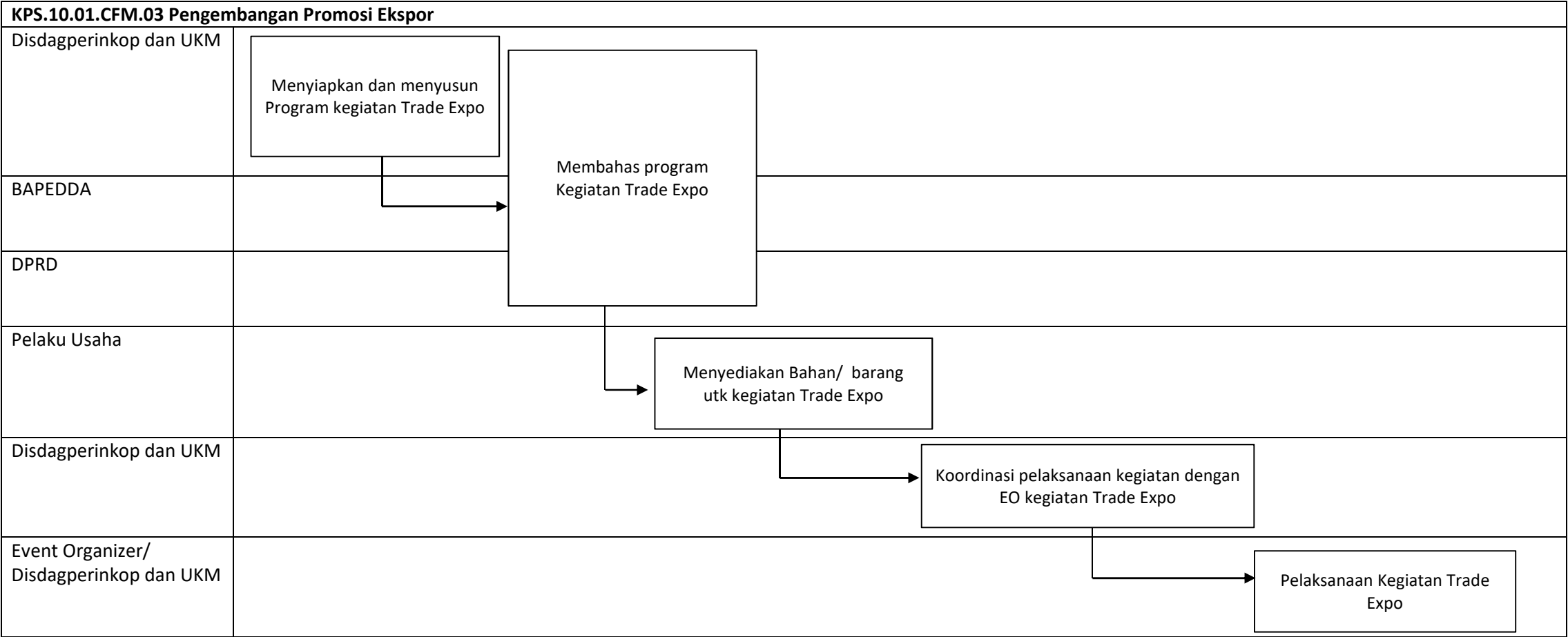
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



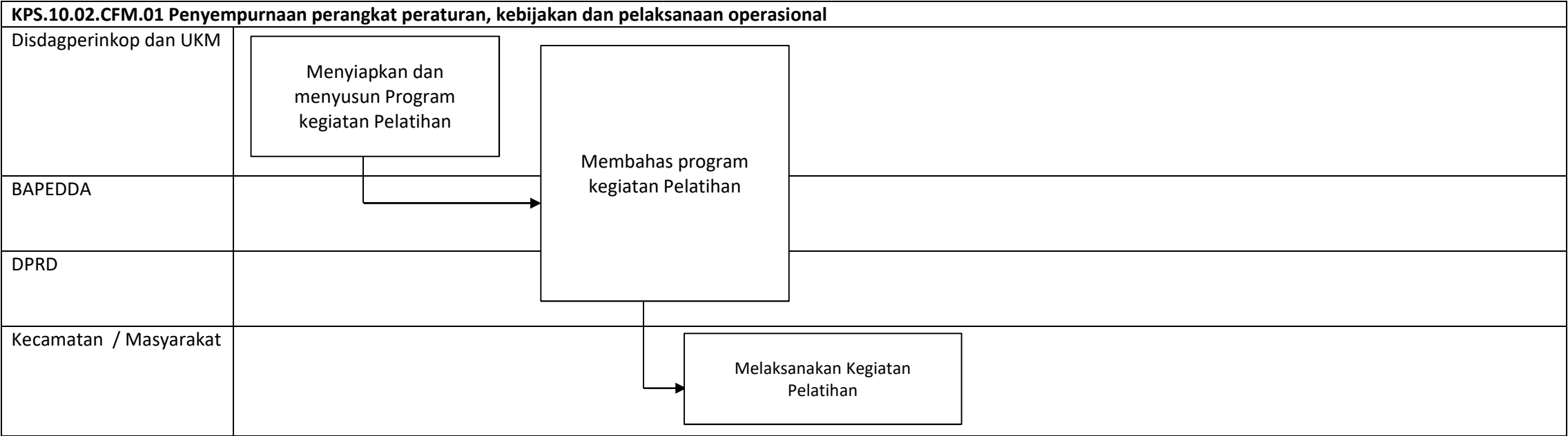
PETA RELASI

KPS.10.01

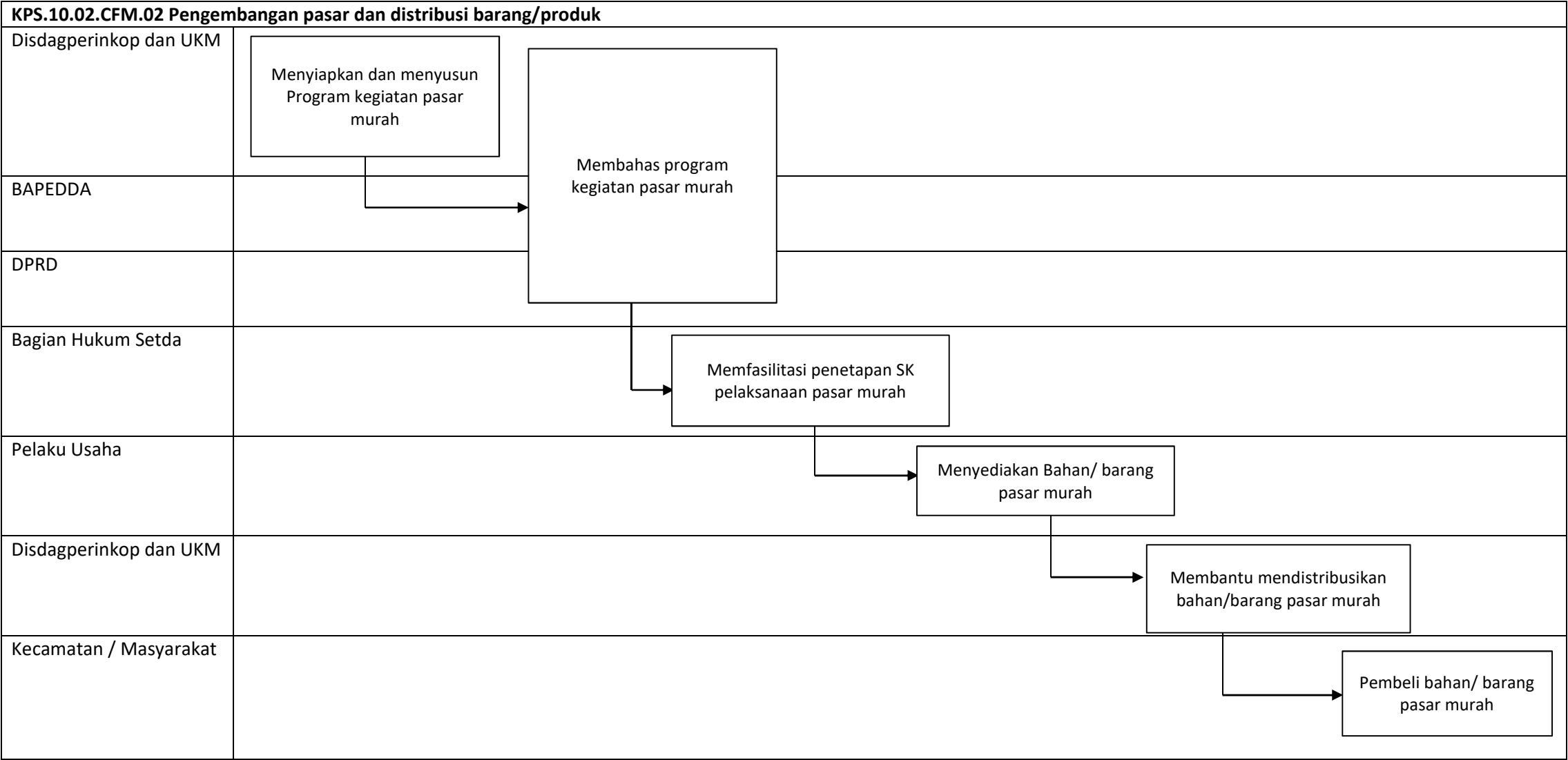
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

KPS.10.01.CFM.01 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	KPS.10.01.CFM.02 Kebijakan pembangunan perdagangan	KPS.10.01.CFM.03 Pengembangan Promosi Ekspor
1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Pelaku usaha 5. Event Organizer / Disdagperinkop dan UKM	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Pelaku Usaha 5. Event Organizer/ Disdagperinkop dan UKM

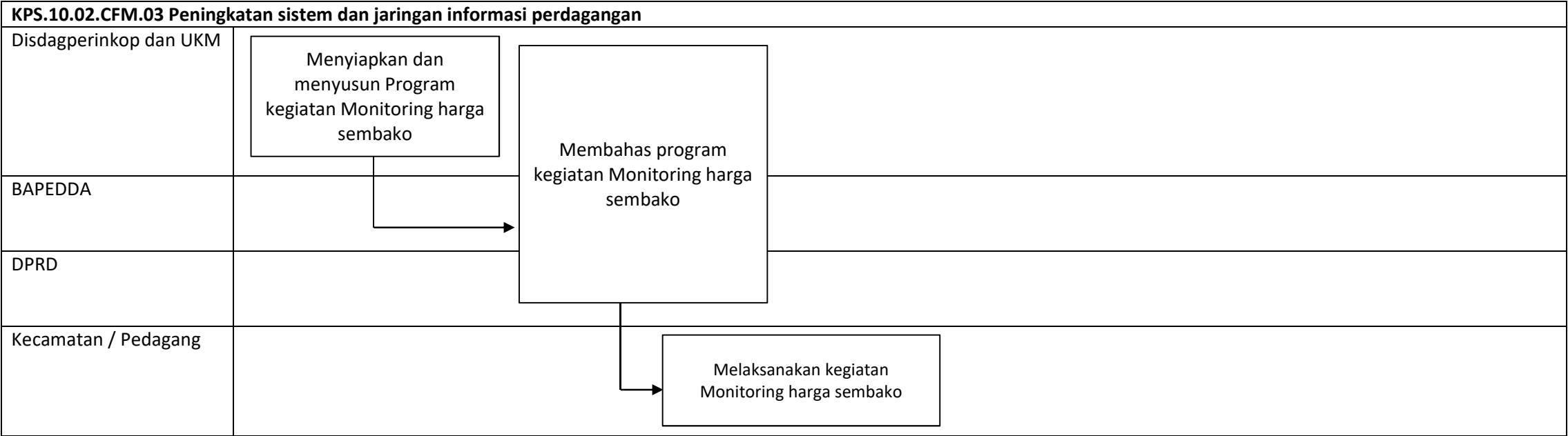
PETA LINTAS FUNGSI



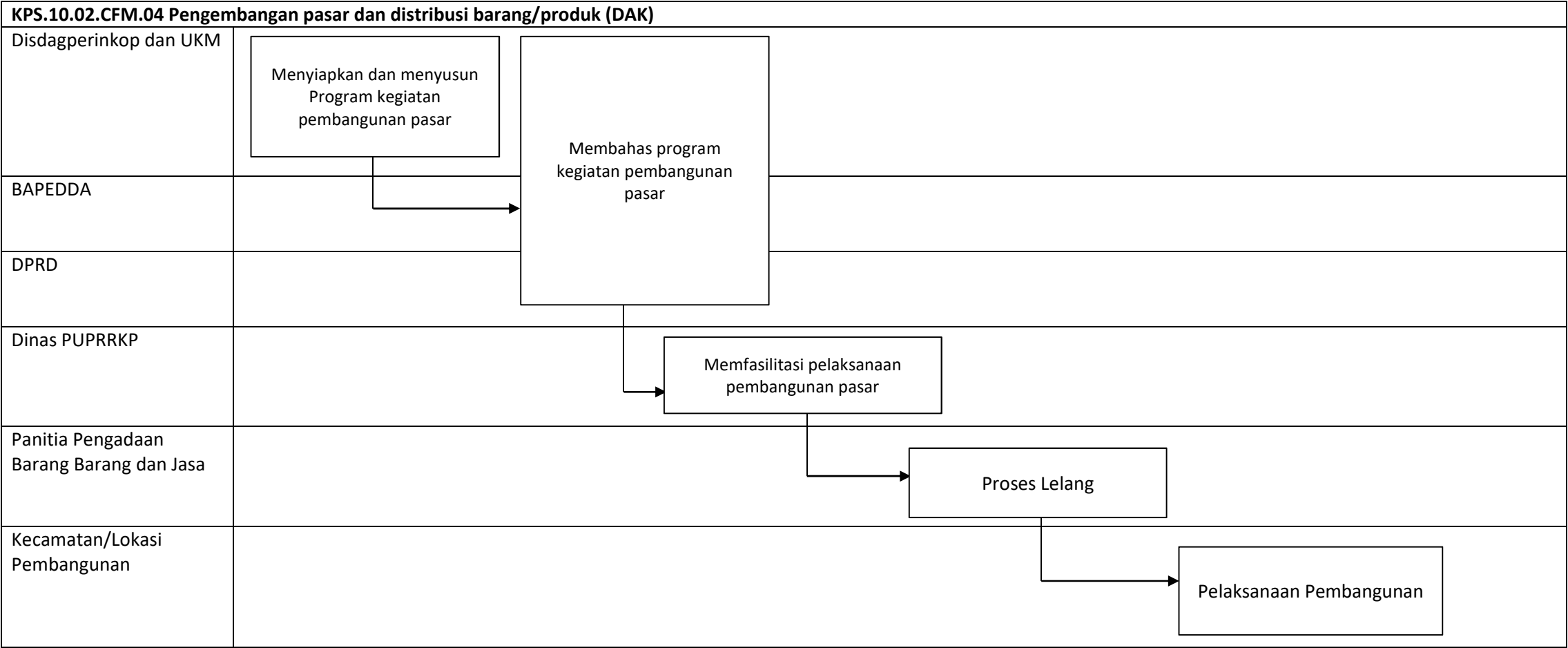
PETA LINTAS FUNGSI



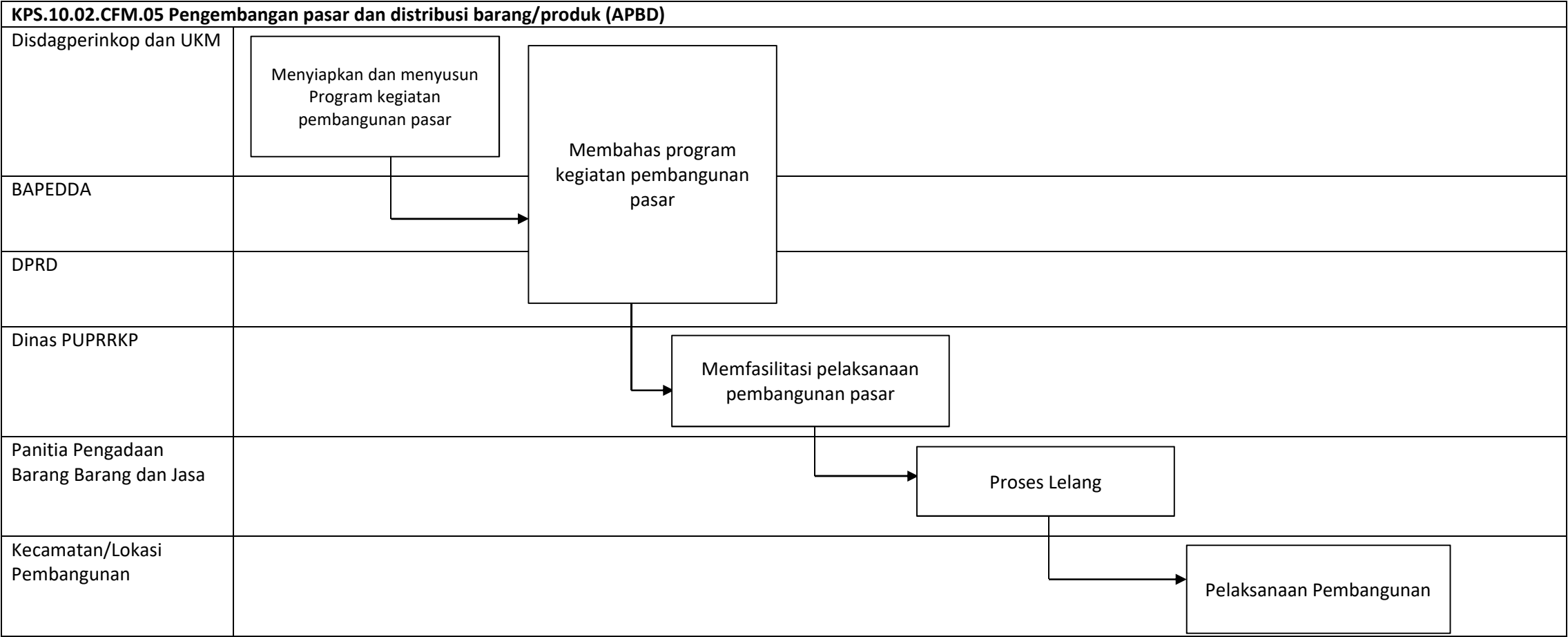
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



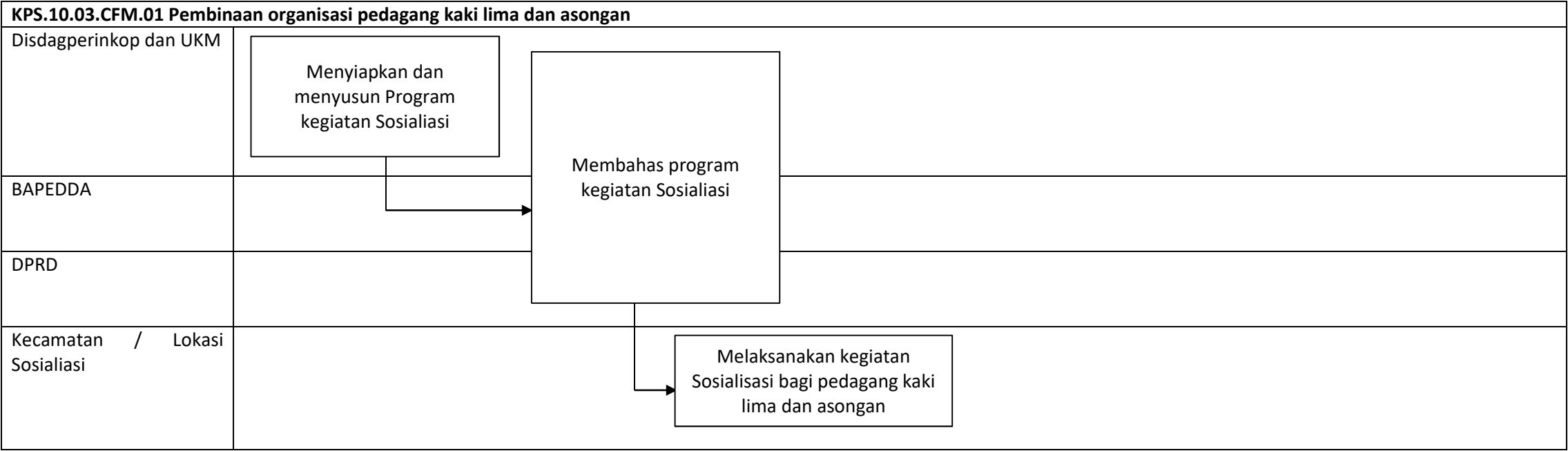
PETA RELASI

KPS.10.02

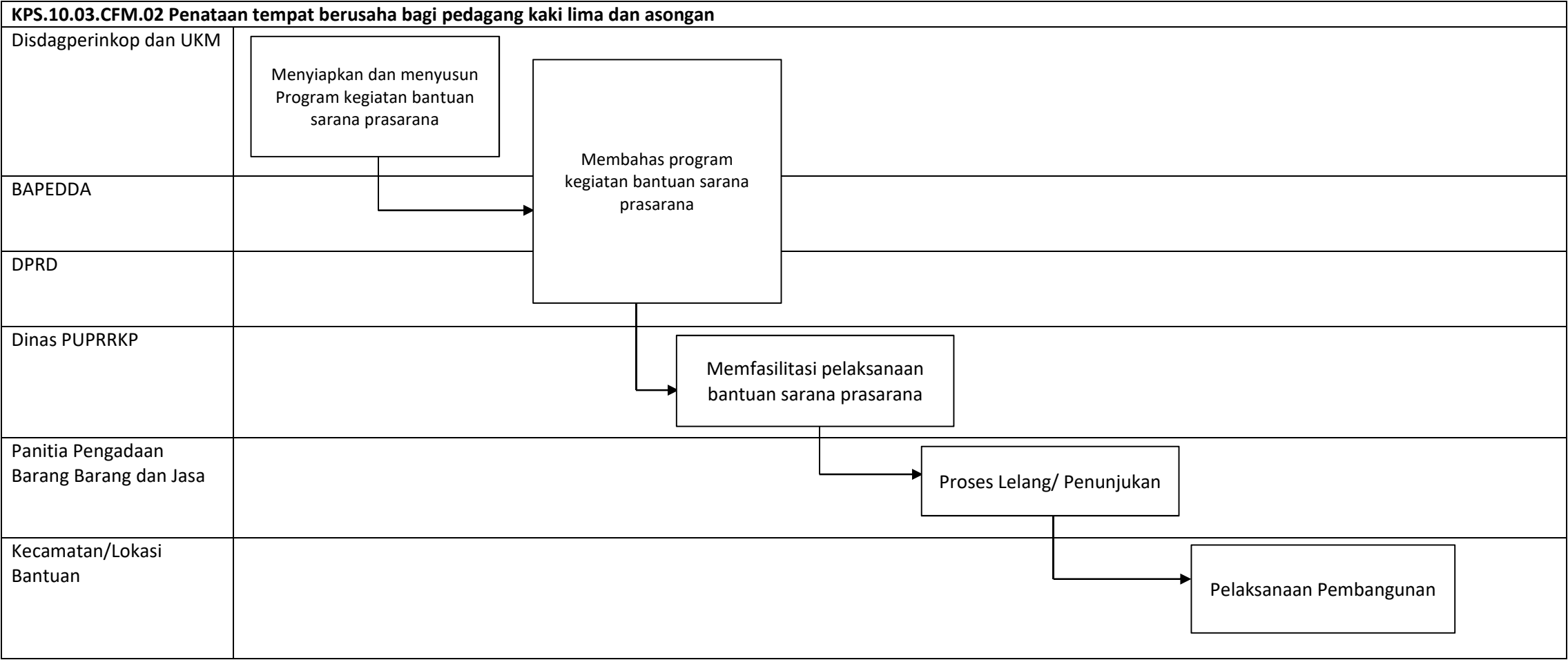
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

KPS.10.02.CFM.01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	KPS.10.02.CFM.02 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	KPS.10.02.CFM.03 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	KPS.10.02.CFM.04 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	KPS.10.02.CFM.05 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (APBD)
1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Kecamatan / Masyarakat	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Bagian Hukum Setda 5. Pelaku Usaha 6. Kecamatan / Masyarakat	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Kecamatan / Pedagang	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Dinas PUPRRKP 5. Panitia Pengadaan Barang Barang dan Jasa 6. Kecamatan/Lokasi Pembangunan	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Dinas PUPRRKP 5. Panitia Pengadaan Barang Barang dan Jasa 6. Kecamatan/Lokasi Pembangunan

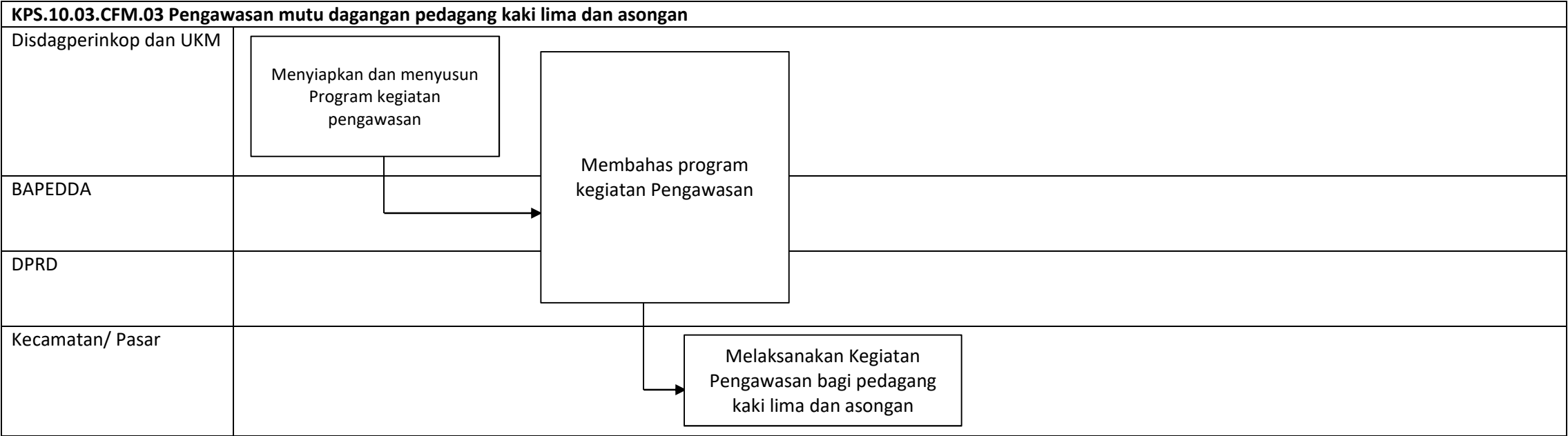
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



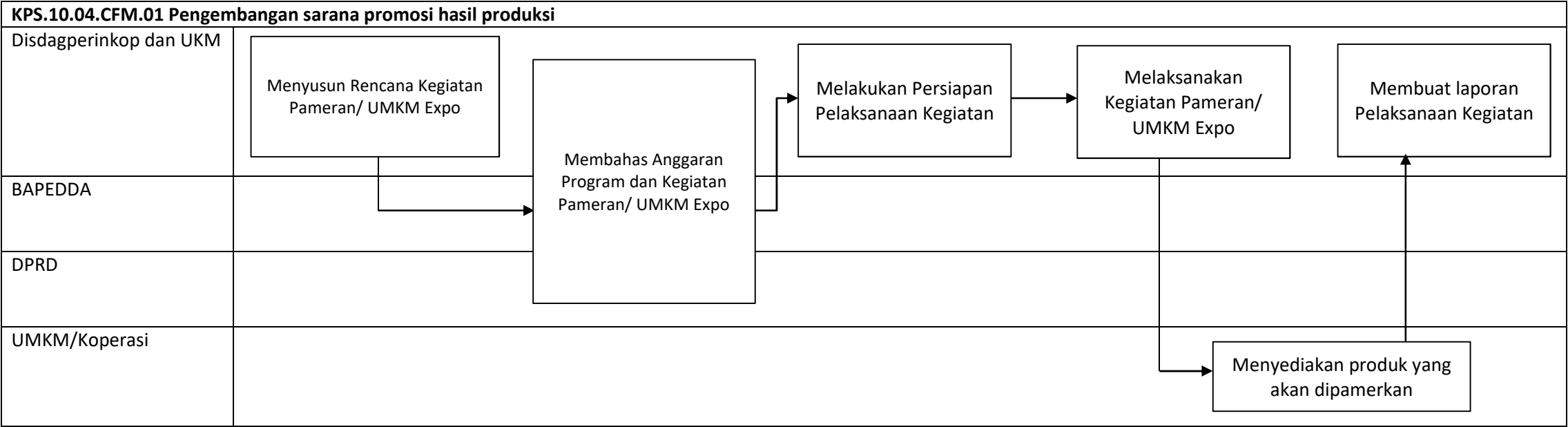
PETA RELASI

KPS.10.03

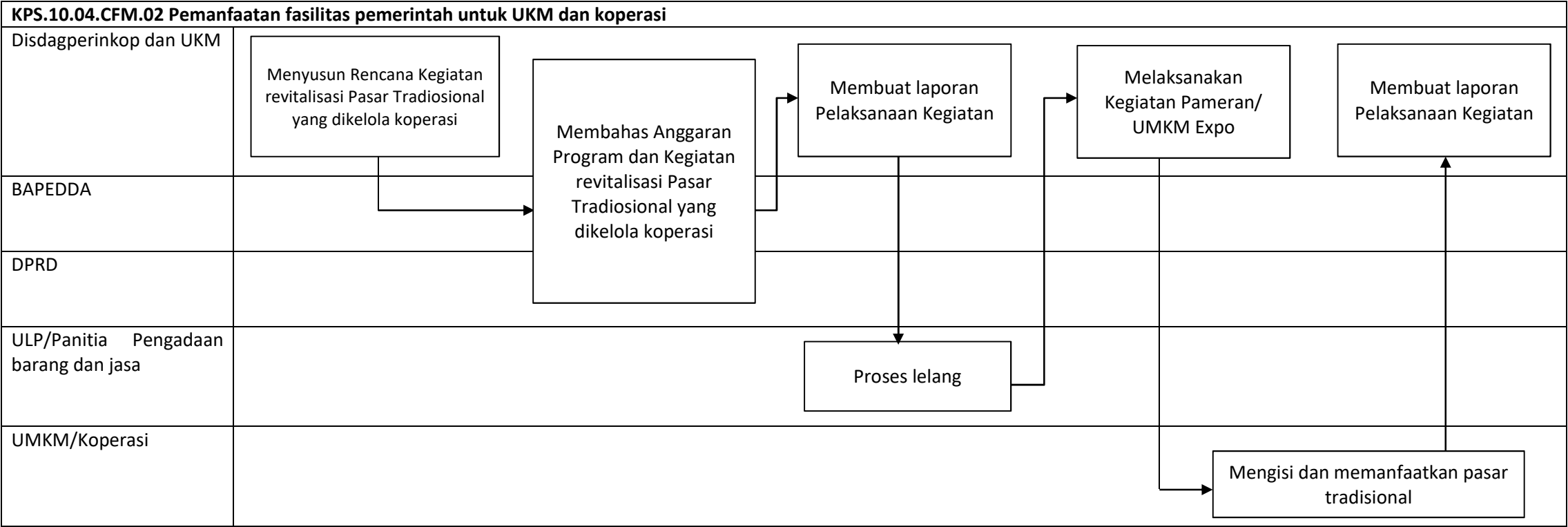
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

KPS.10.03.CFM.01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	KPS.10.03.CFM.02 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	KPS.10.03.CFM.03 Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
1. Dinas Dagperinkop&UKM 2. Bappeda 3. DPRD 4. Kecamatan/Lokasi Sosialisasi	1. Dinas Dagperinkop&UKM 2. Bappeda 3. DPRD 4. Dinas PUPRRKP 5. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kecamatan / Lokasi Bantuan	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Kecamatan/ Pasar

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

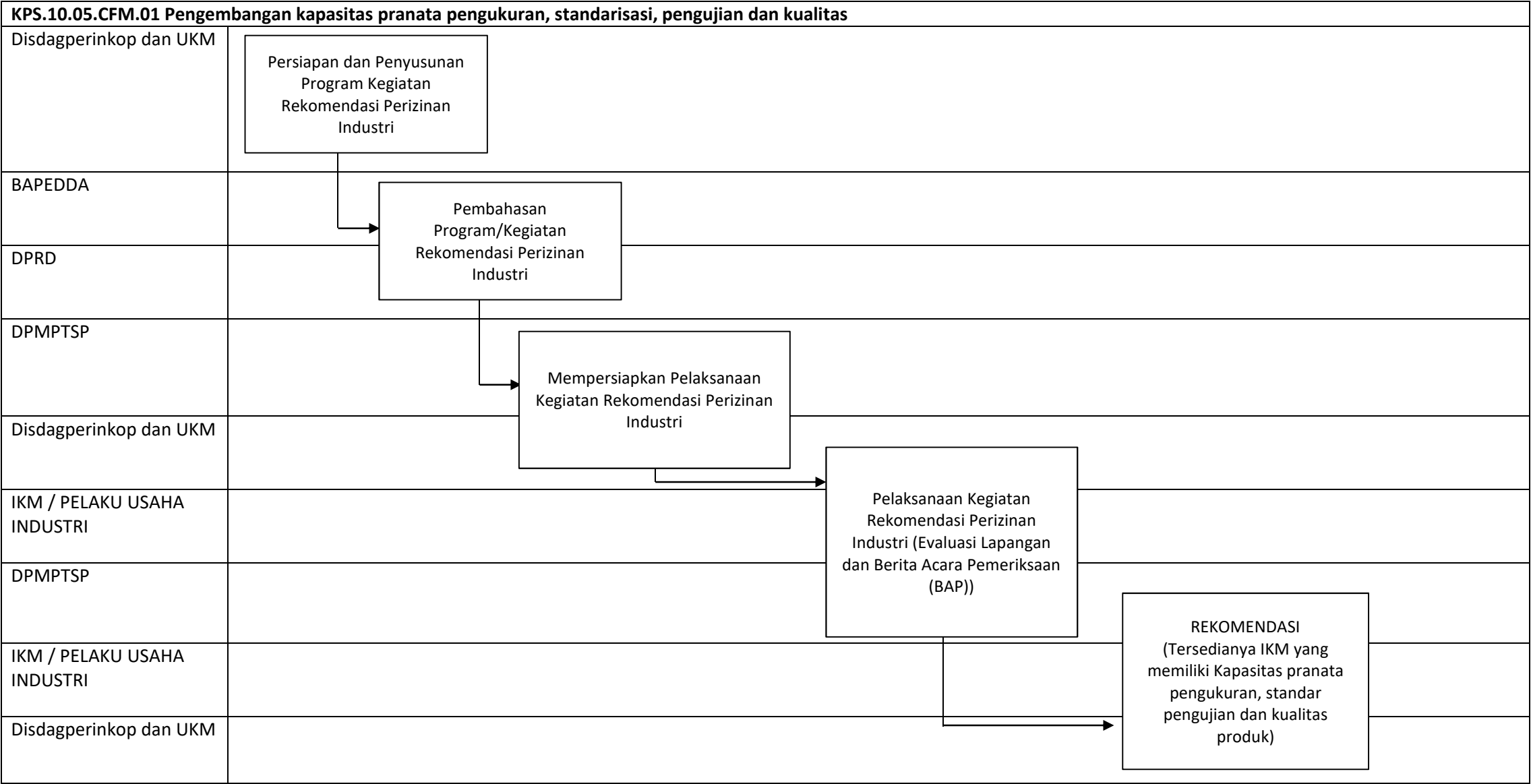
KPS.10.04

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

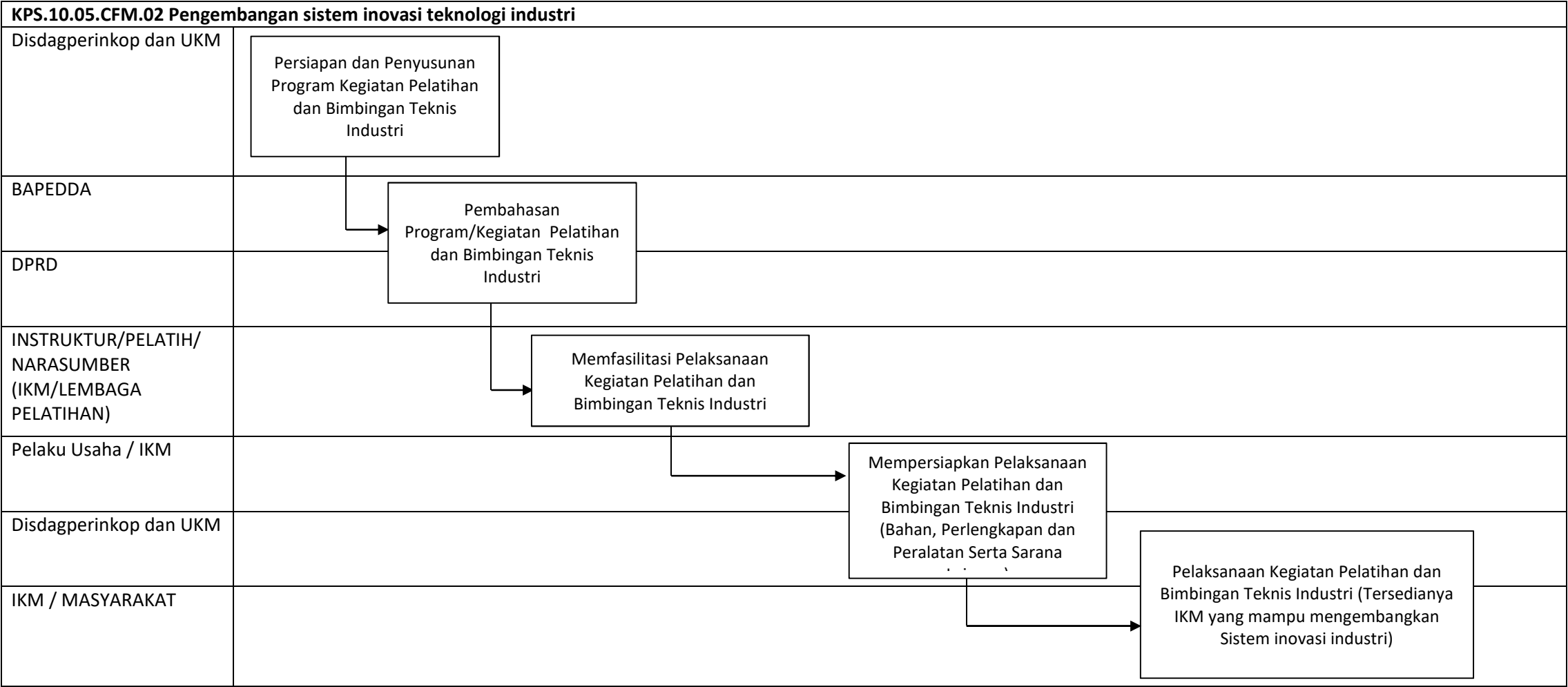
KPS.10.04.CFM.01 Pengembangan sarana promosi hasil produksi
1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. UMKM/Koperasi

KPS.10.04.CFM.02 Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi
1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. ULP/Panitia Pengadaan barang dan jasa 5. UMKM/Koperasi

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



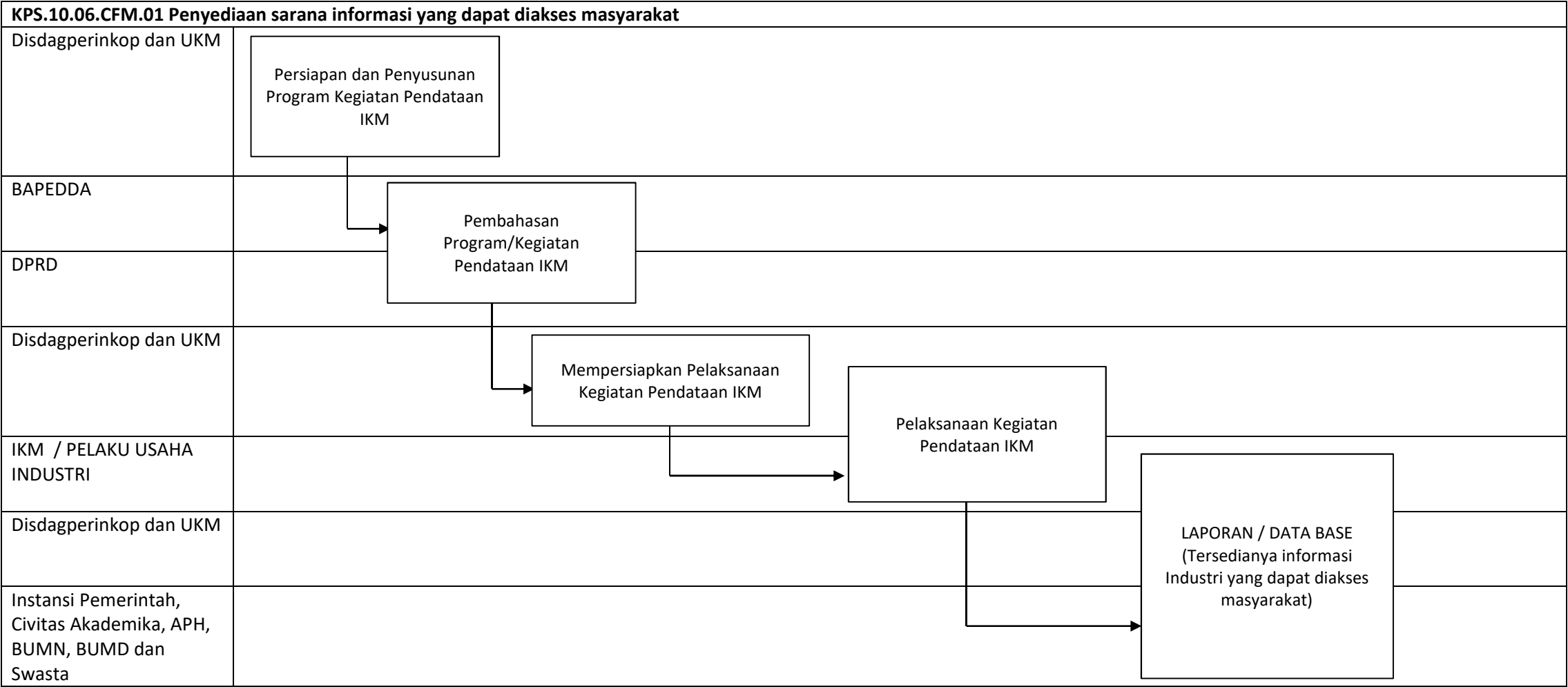
PETA RELASI

KPS.10.05

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

KPS.10.05.CFM.01 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	KPS.10.05.CFM.02 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. DPMPTSP 5. IKM / Pelaku Usaha Industri	1. Disdagperinkop dan UKM 2. BAPEDDA 3. DPRD 4. Instruktur/Pelatih/ Narasumber (IKM/Lembaga Pelatihan) 5. Pelaku Usaha / IKM 6. IKM / Masyarakat

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

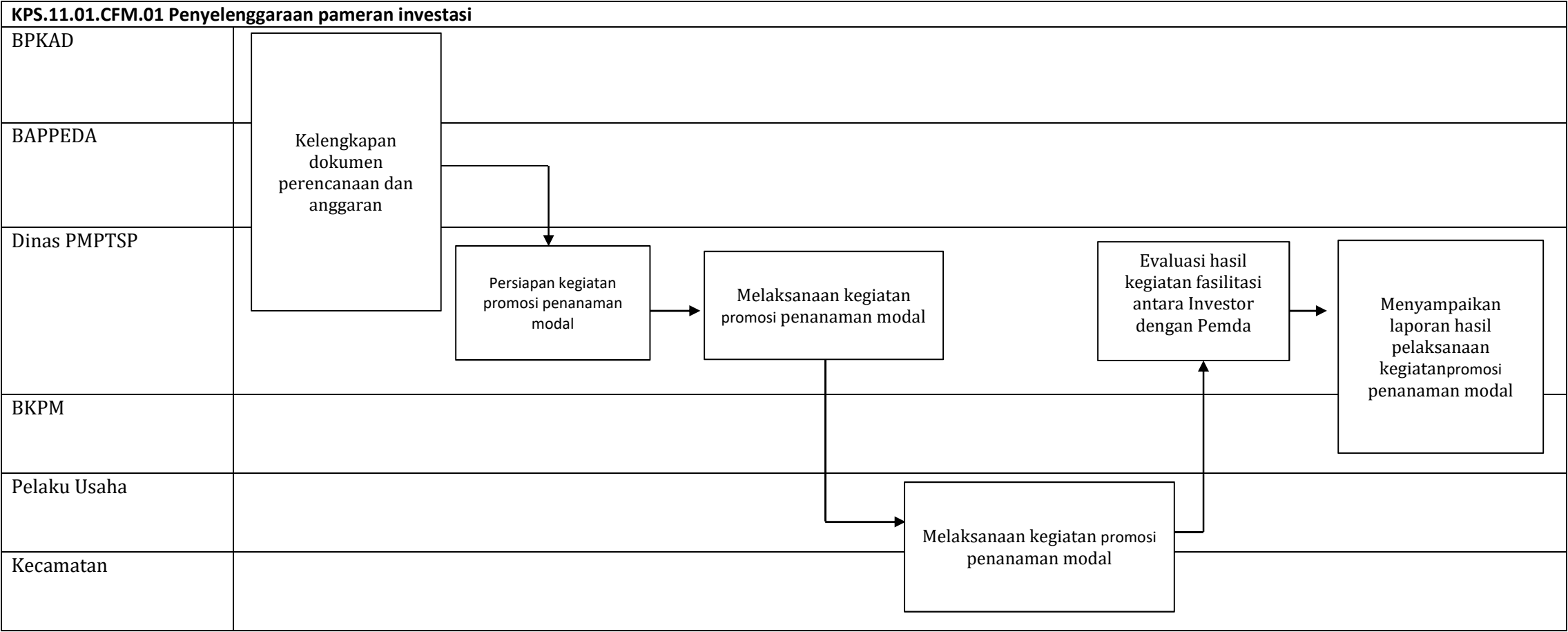
KPS.10.06

Pengembangan sentra-sentra industri potensial

KPS.10.06.CFM.01 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Disdagperinkop dan UKM2. BAPEDDA3. DPRD4. IKM / PELAKU USAHA
INDUSTRI5. Instansi Pemerintah,
Civitas Akademika, APH,
BUMN, BUMD dan
Swasta |
|---|

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

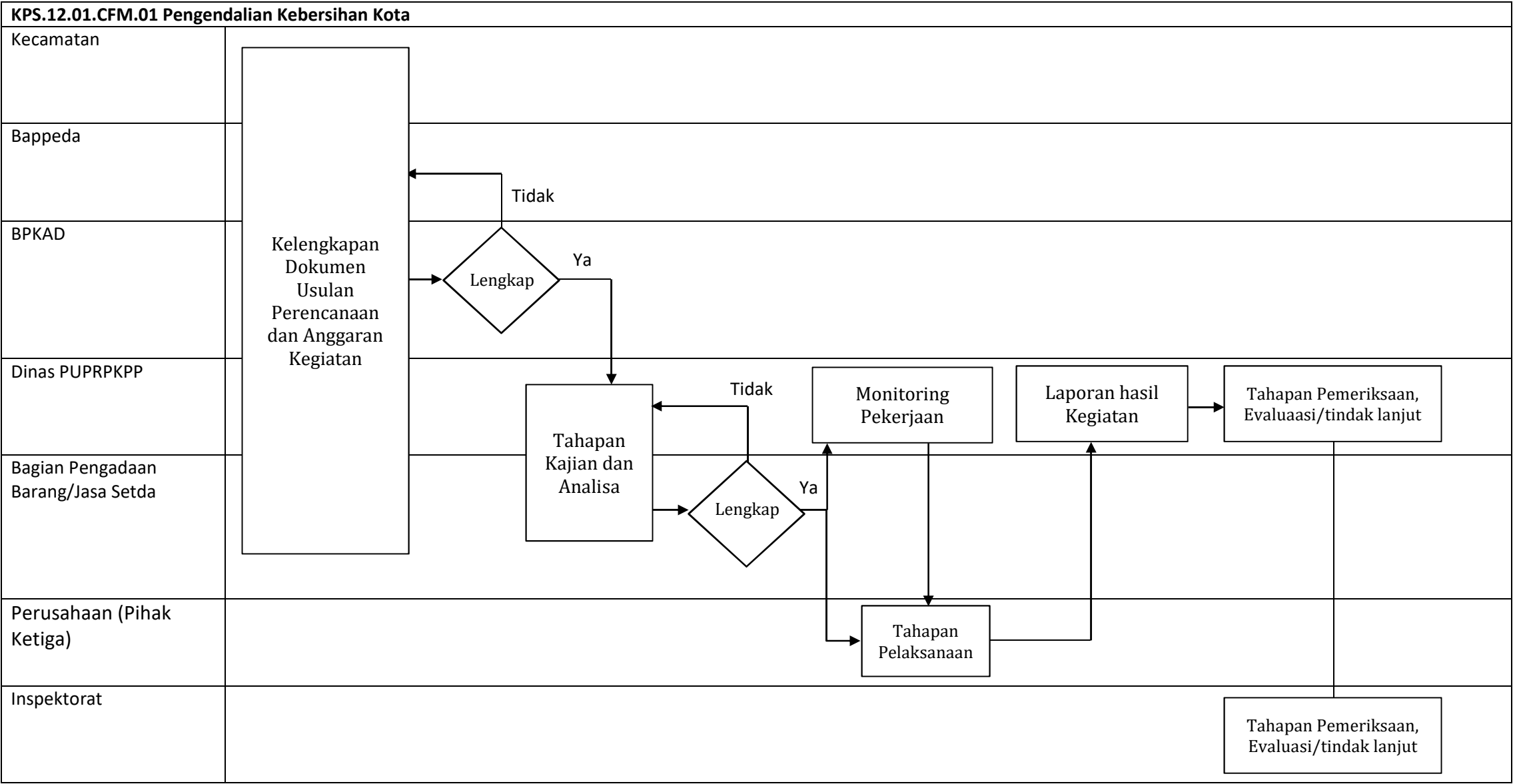
KPS.11.01

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KPS.11.01.CFM.01 Penyelenggaraan pameran investasi

- | |
|---|
| 1. BPKAD
2. BAPPEDA
3. Dinas PMPTSP
4. BKPM
5. Pelaku Usaha
6. Kecamatan |
|---|

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

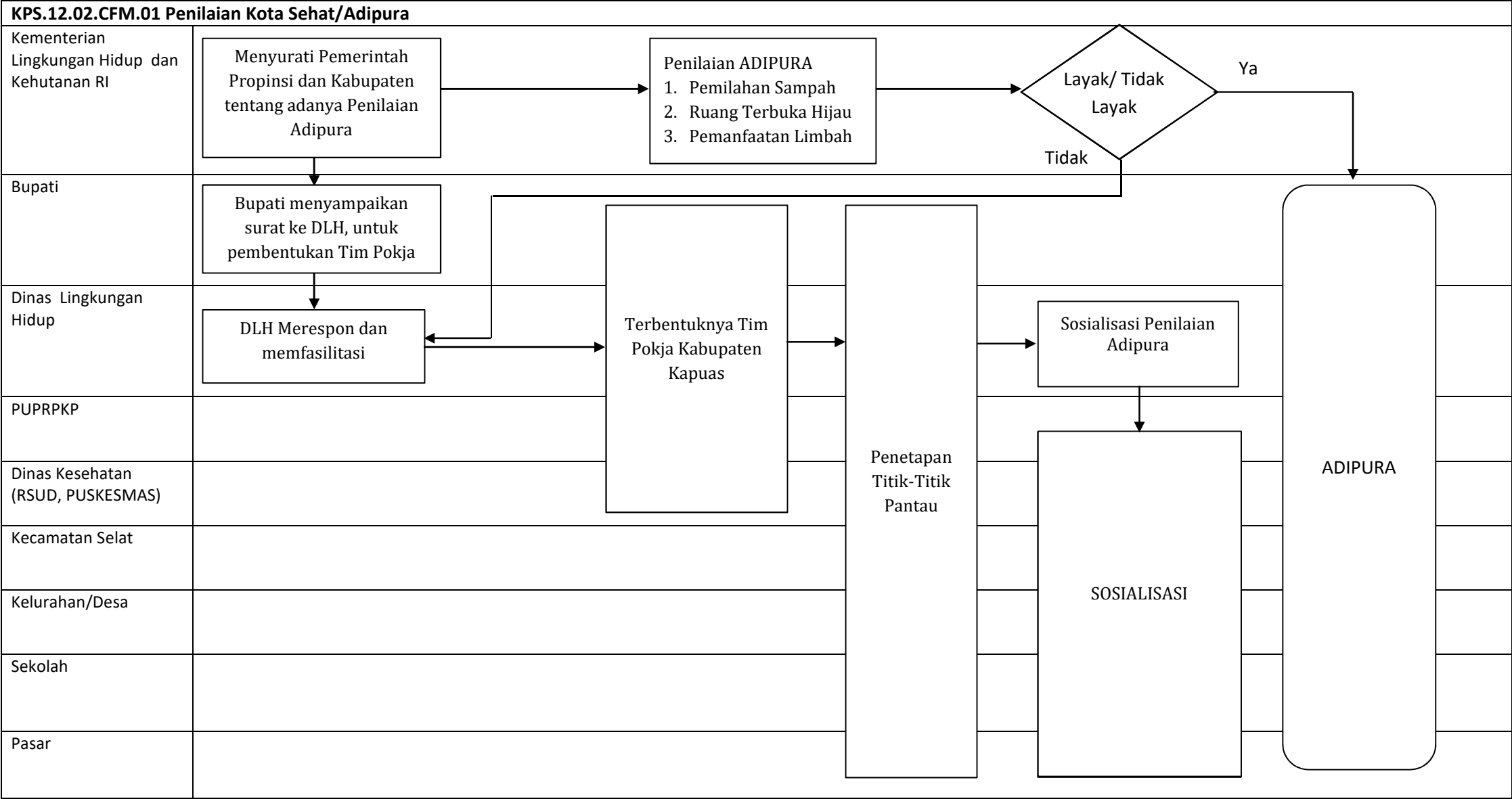
KPS.12.01

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

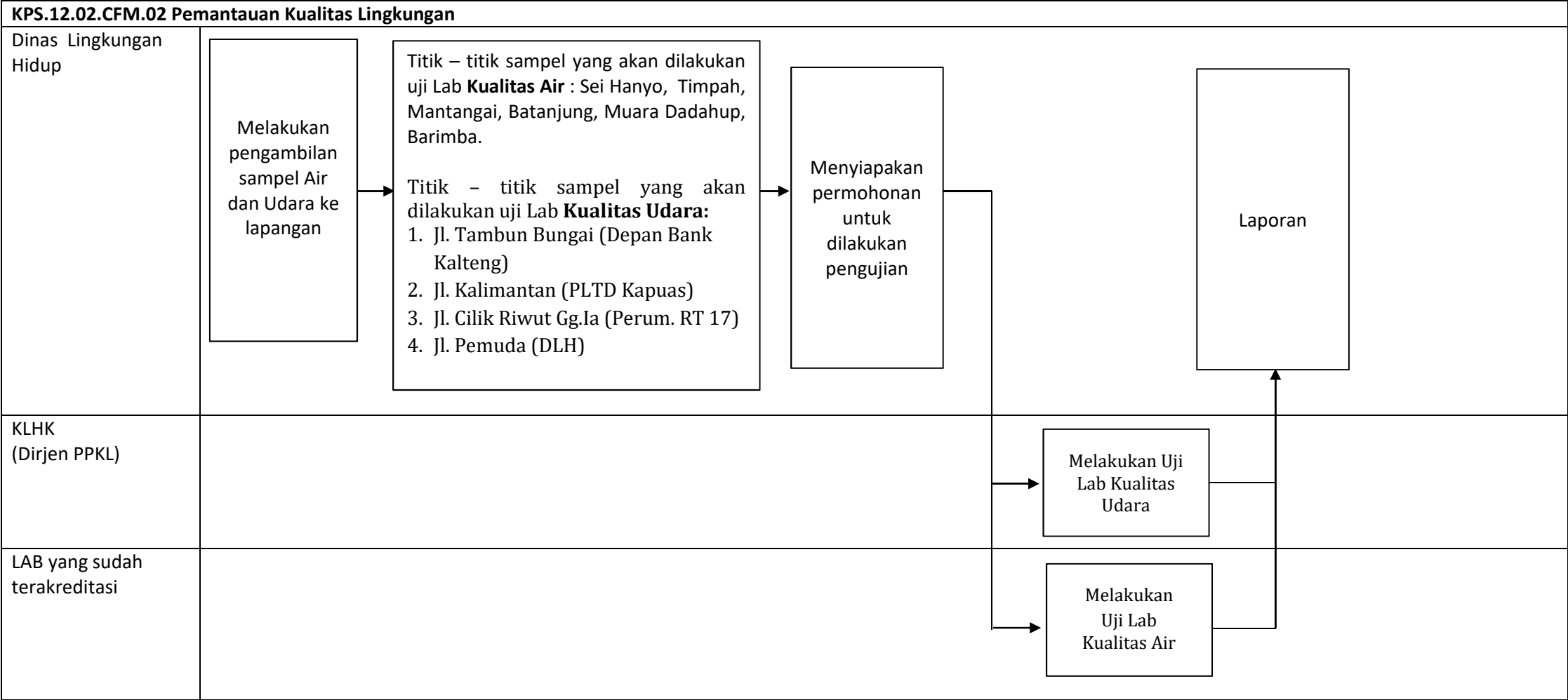
KPS.12.01.CFM.01 Pengendalian Kebersihan Kota
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan2. Bappeda3. BPKAD4. Dinas PUPRPKPP5. Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda6. Perusahaan (Pihak
Ketiga)7. Inspektorat |
|--|

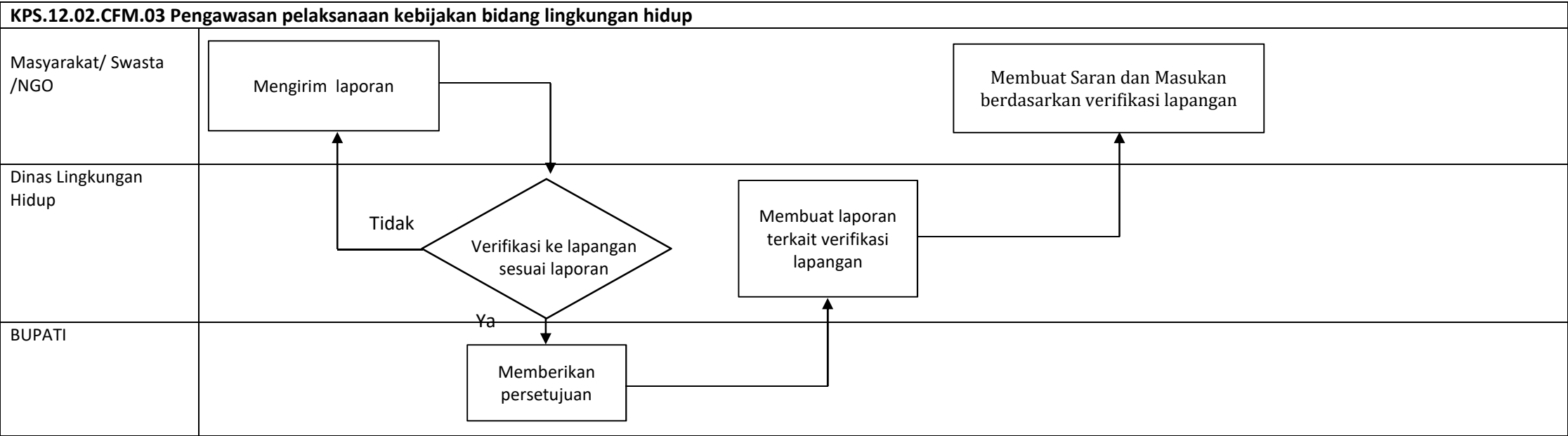
PETA LINTAS FUNGSI



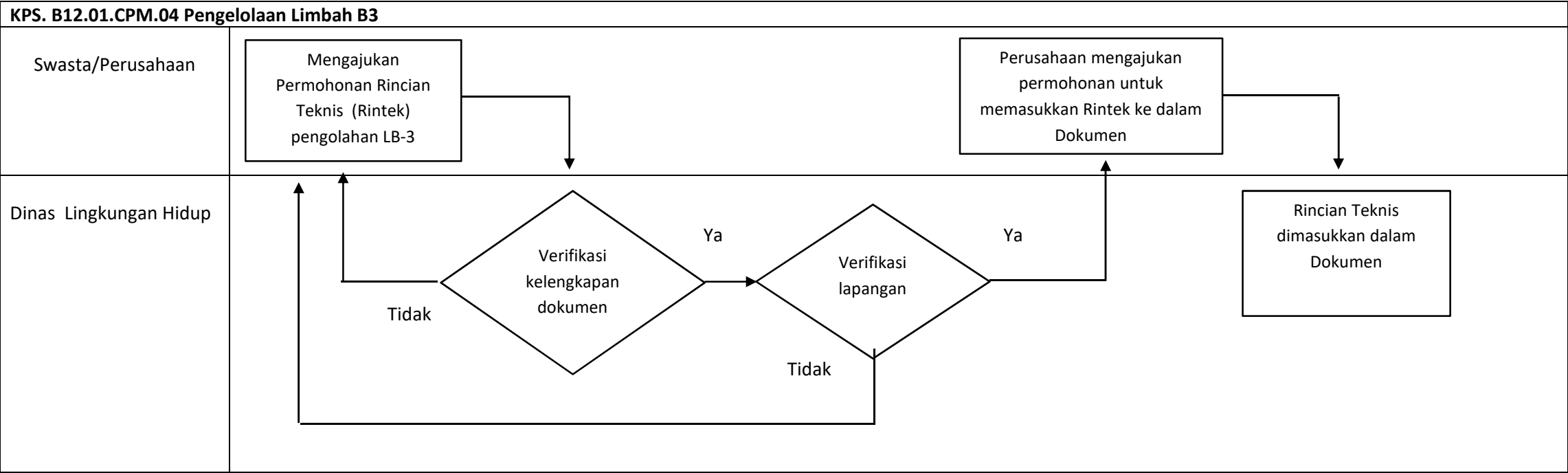
PETA LINTAS FUNGSI



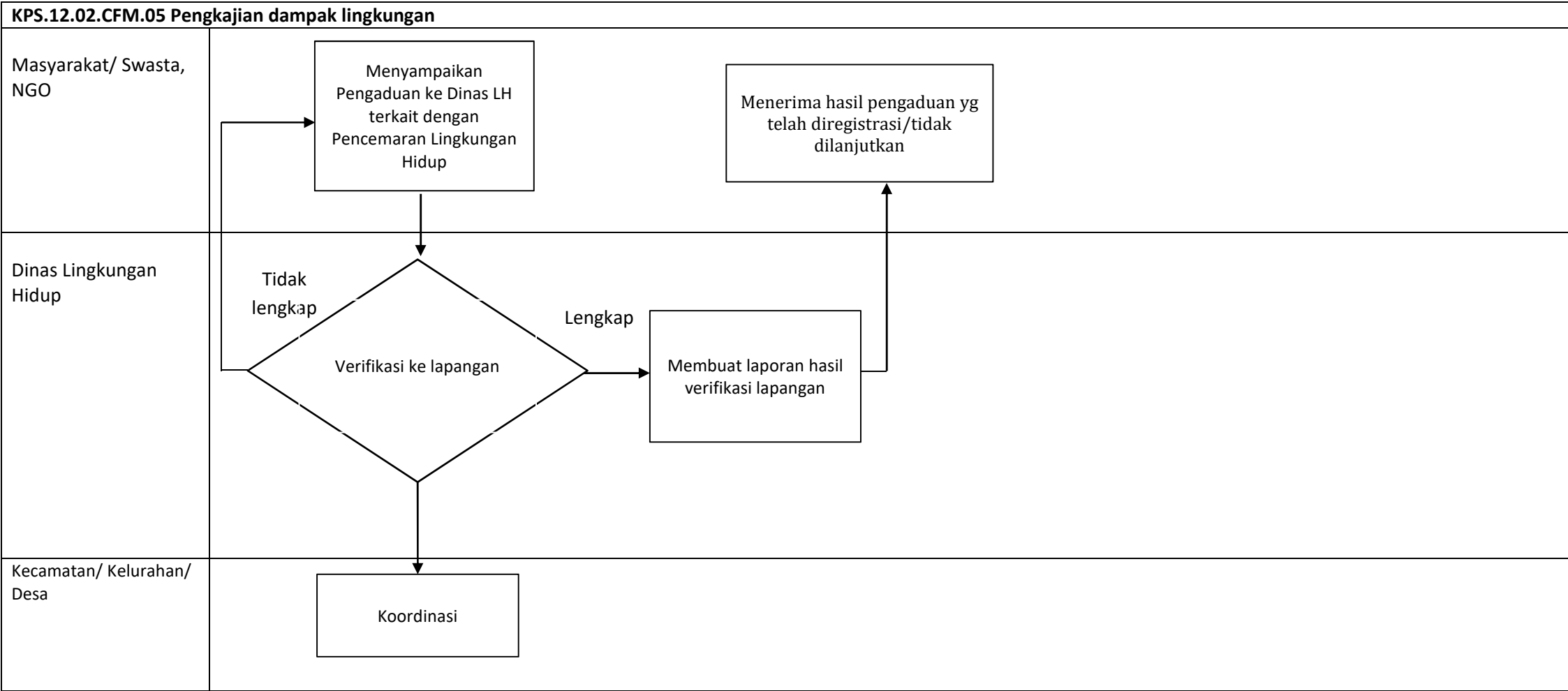
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



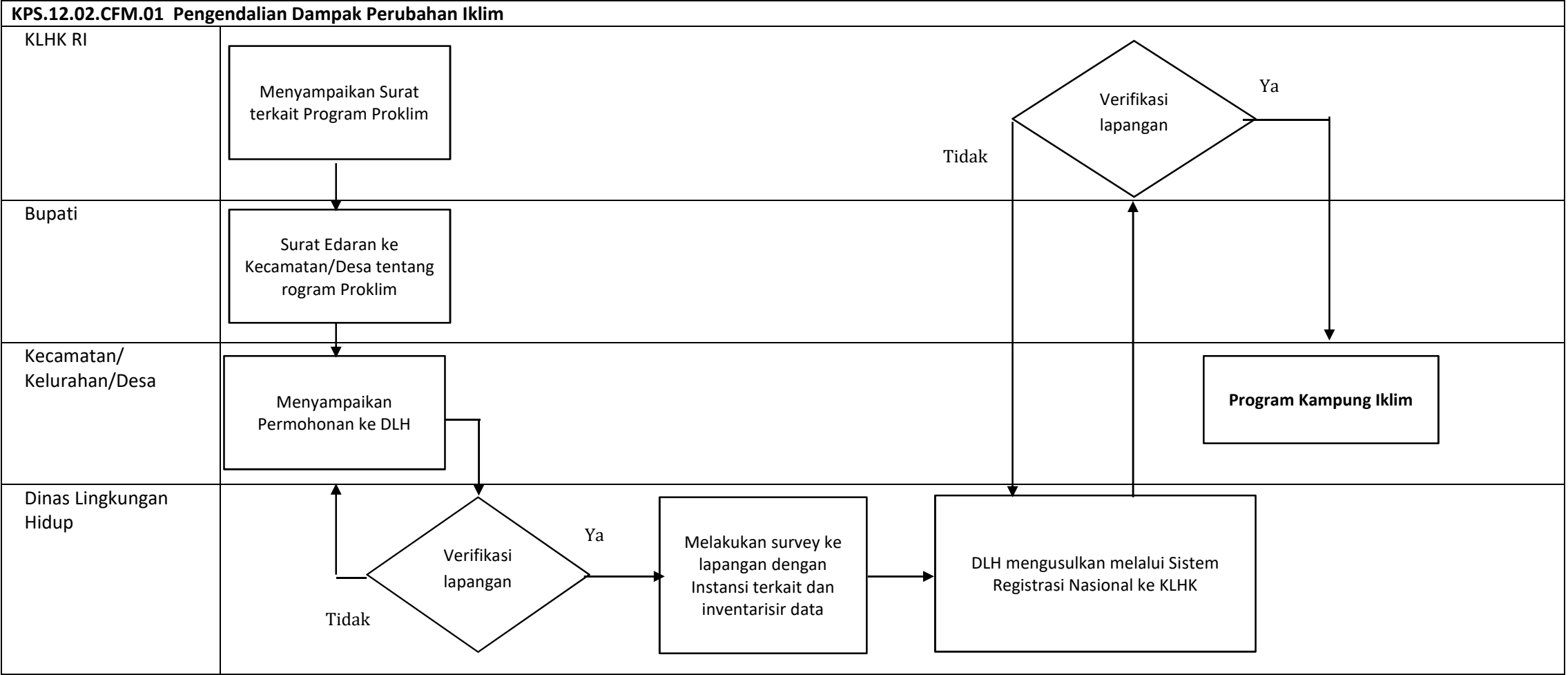
PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.12.02 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				
KPS.12.02.CFM.01 Penilaian Kota Sehat/Adipura	KPS.12.02.CFM.02 Pemantauan Kualitas Lingkungan	KPS.12.02.CFM.03 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	KPS.12.02.CFM.04 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	KPS.12.02.CFM.05 Pengkajian dampak lingkungan
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2. Bupati 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. PUPRPKP 5. Dinas Kesehatan (RSUD, PUSKESMAS) 6. Kecamatan Selat 7. Kelurahan/Desa 8. Sekolah 9. Pasar	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. KLHK (Dirjen PPKL) 3. LAB yang sudah terakreditasi	1. Masyarakat/ Swasta /NGO 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. BUPATI	1. Swasta/Perusahaan 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Masyarakat/ Swasta, NGO 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa

PETA LINTAS FUNGSI



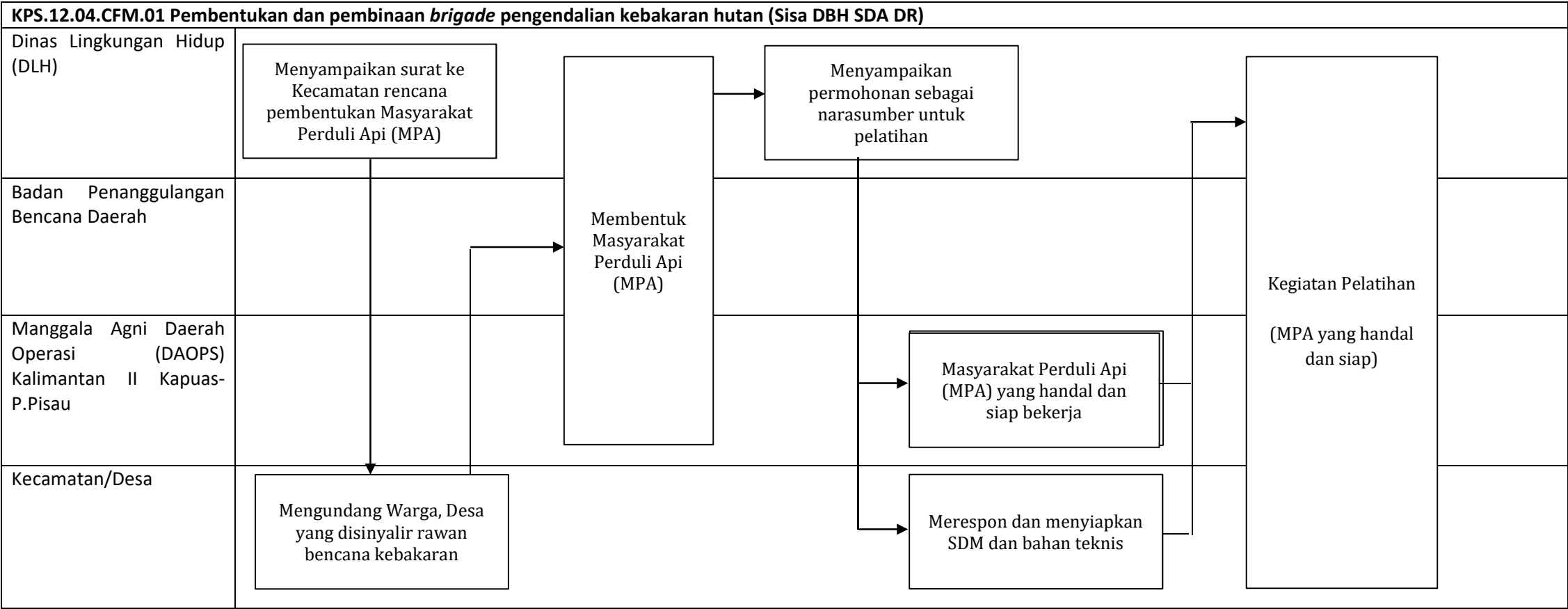
PETA RELASI

KPS.12.03

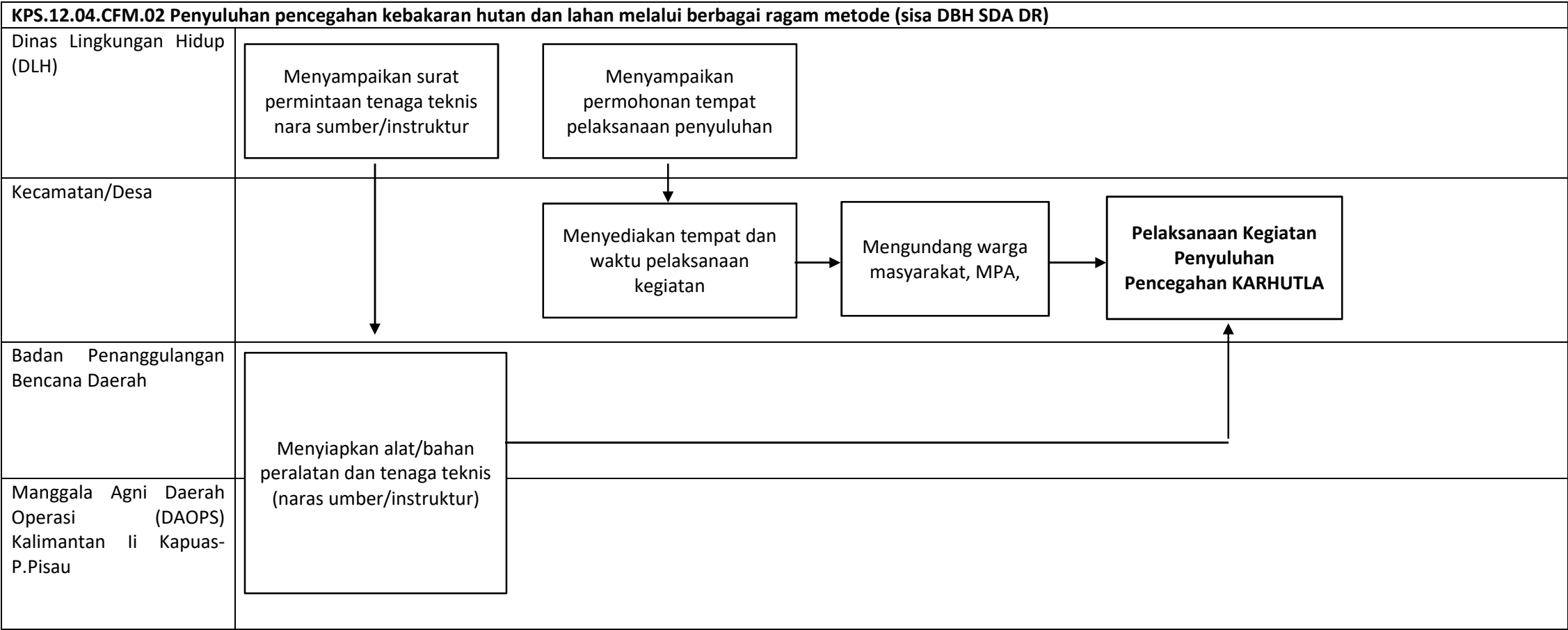
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

KPS.12.03.CFM.01 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1. KLHK RI 2. Bupati 3. Kecamatan/Kelurahan/Desa 4. Dinas Lingkungan Hidup

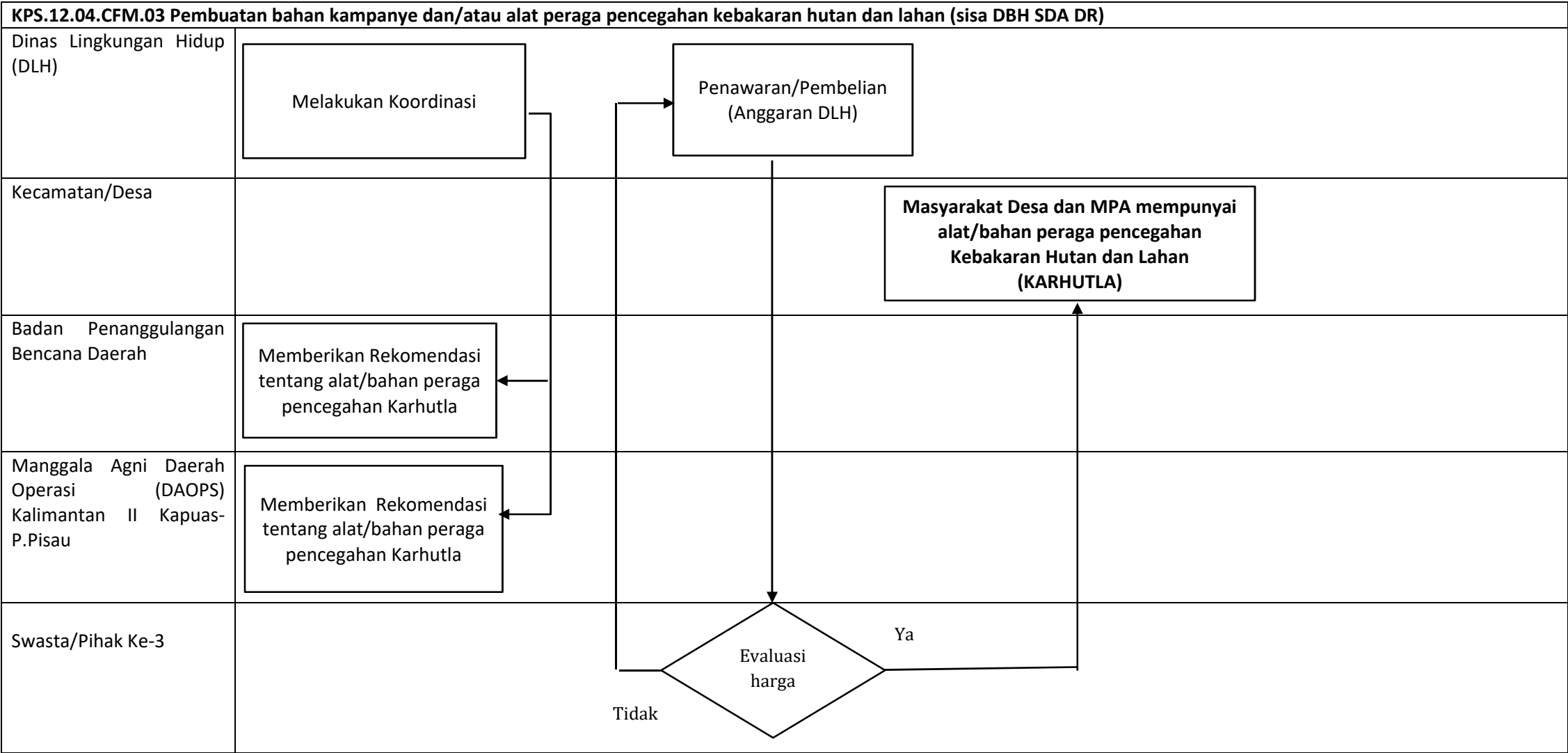
PETA LINTAS FUNGSI



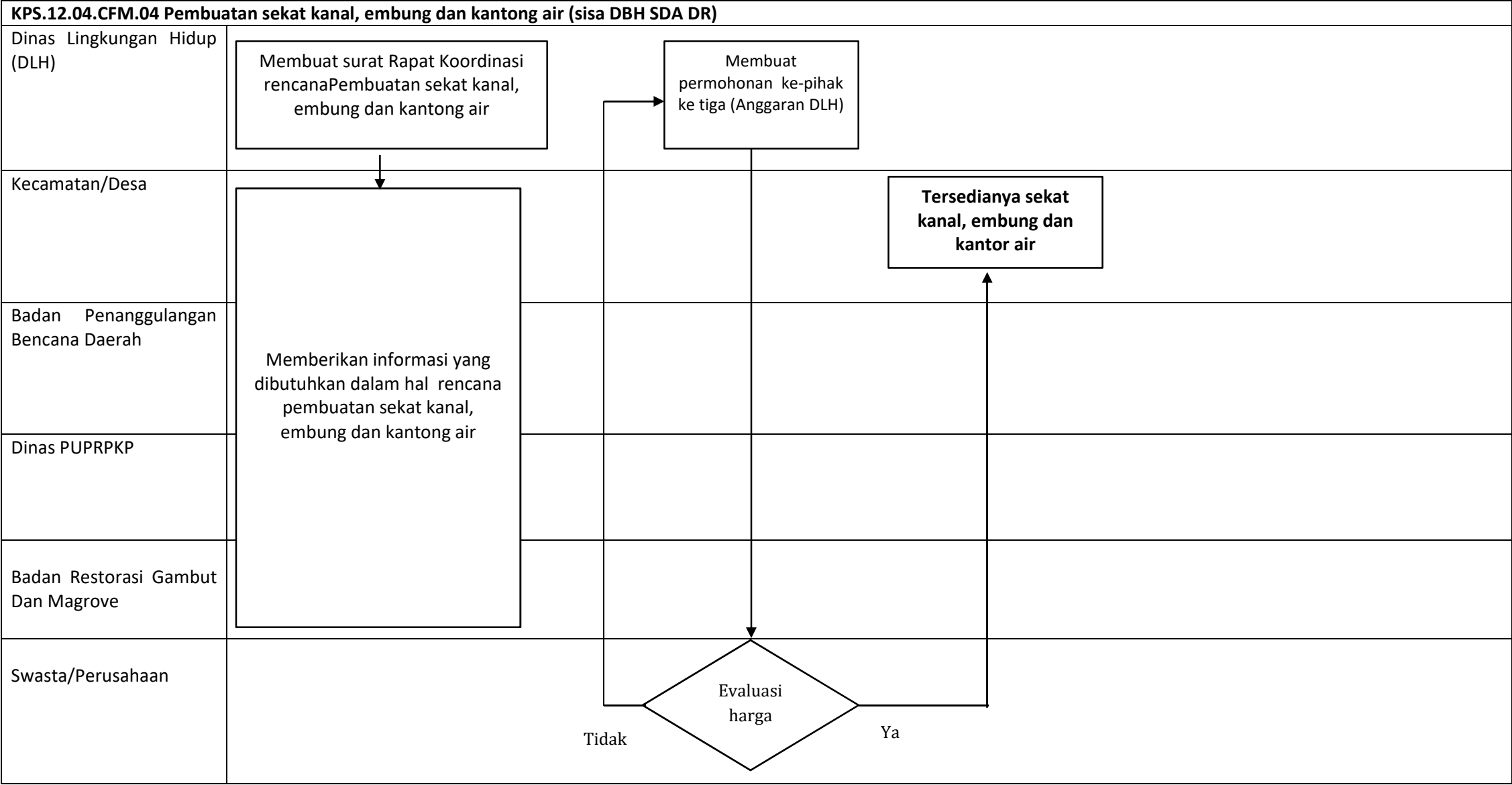
PETA LINTAS FUNGSI



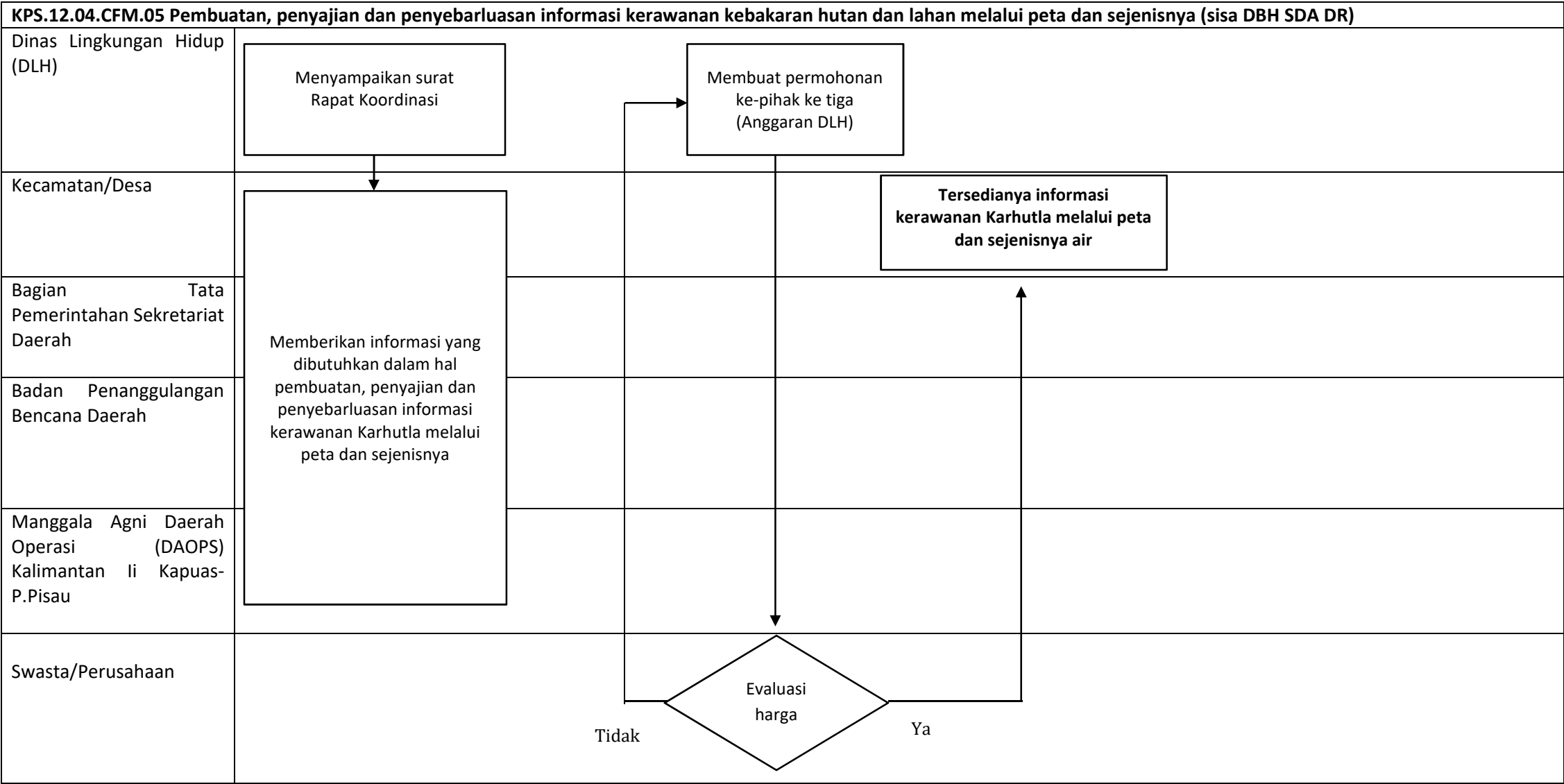
PETA LINTAS FUNGSI



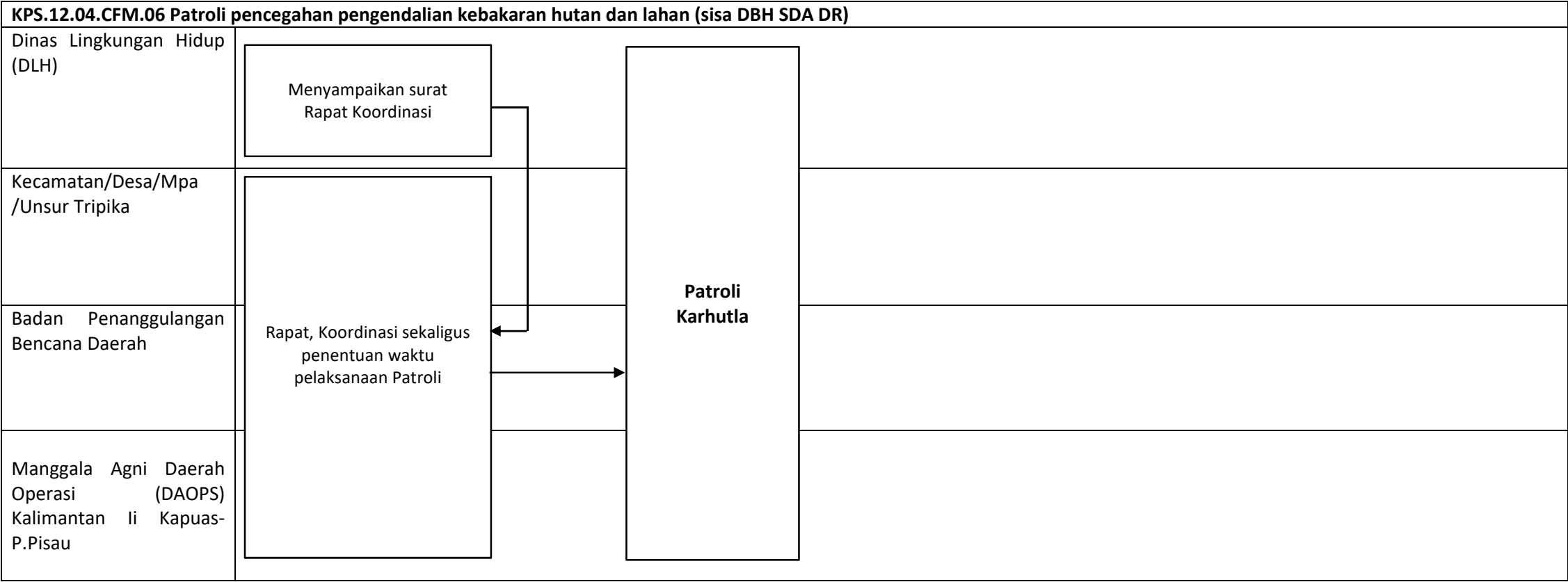
PETA LINTAS FUNGSI



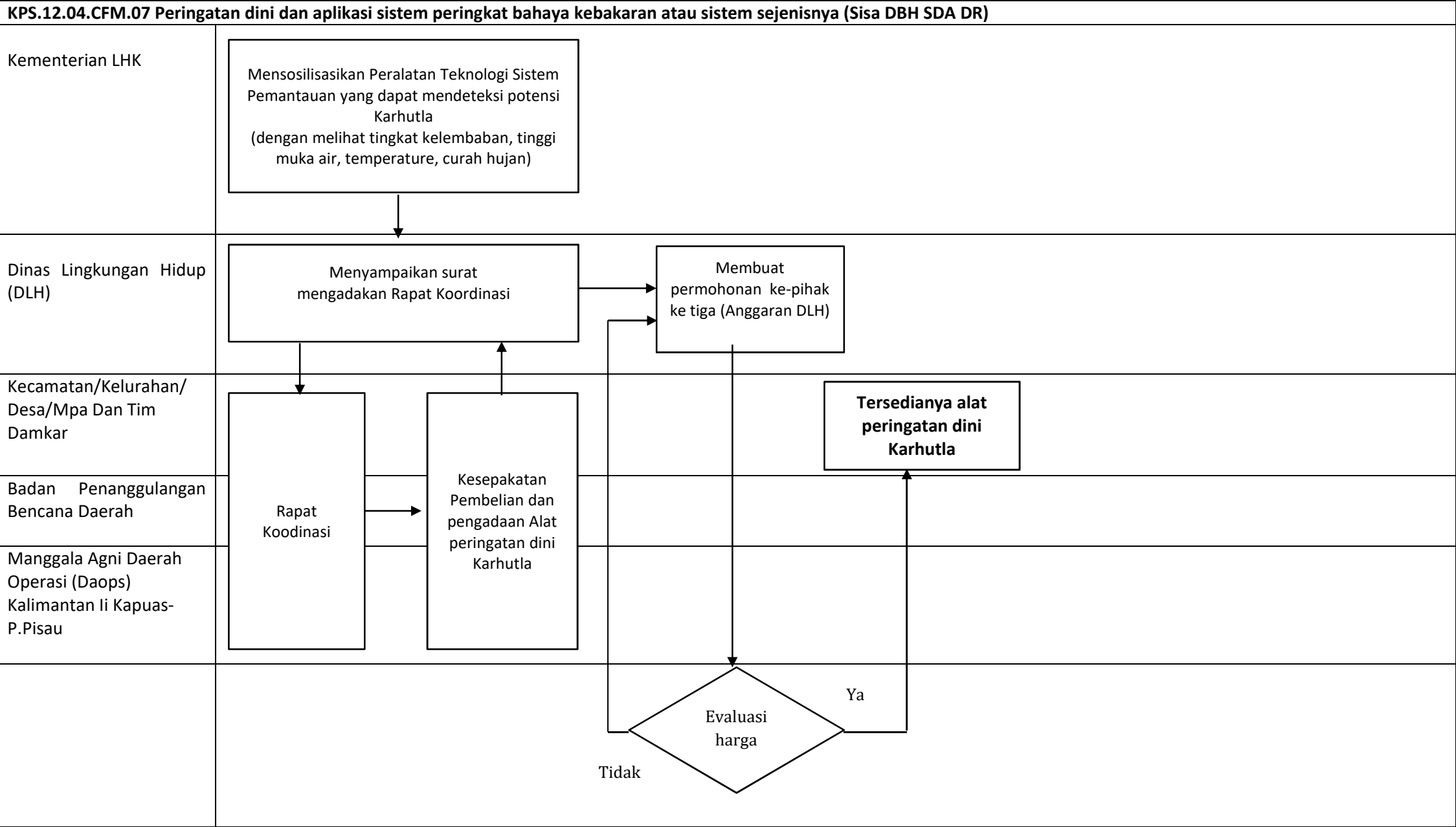
PETA LINTAS FUNGSI



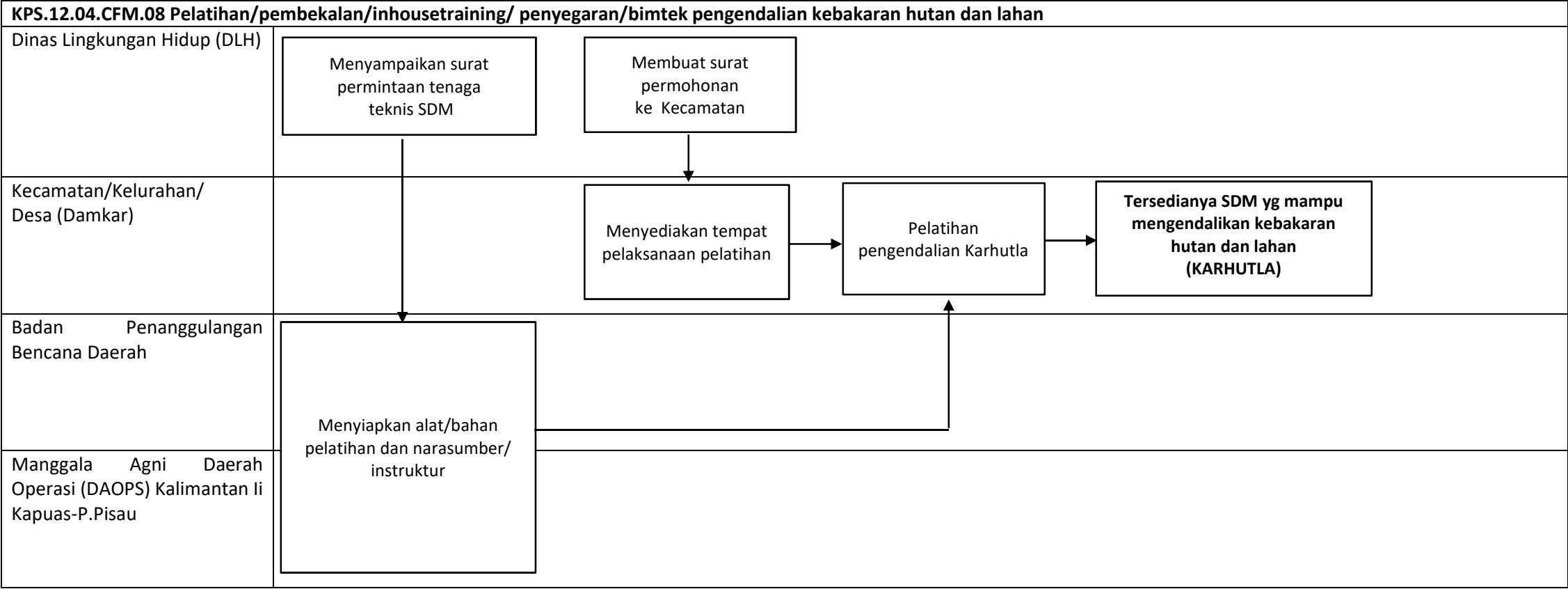
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

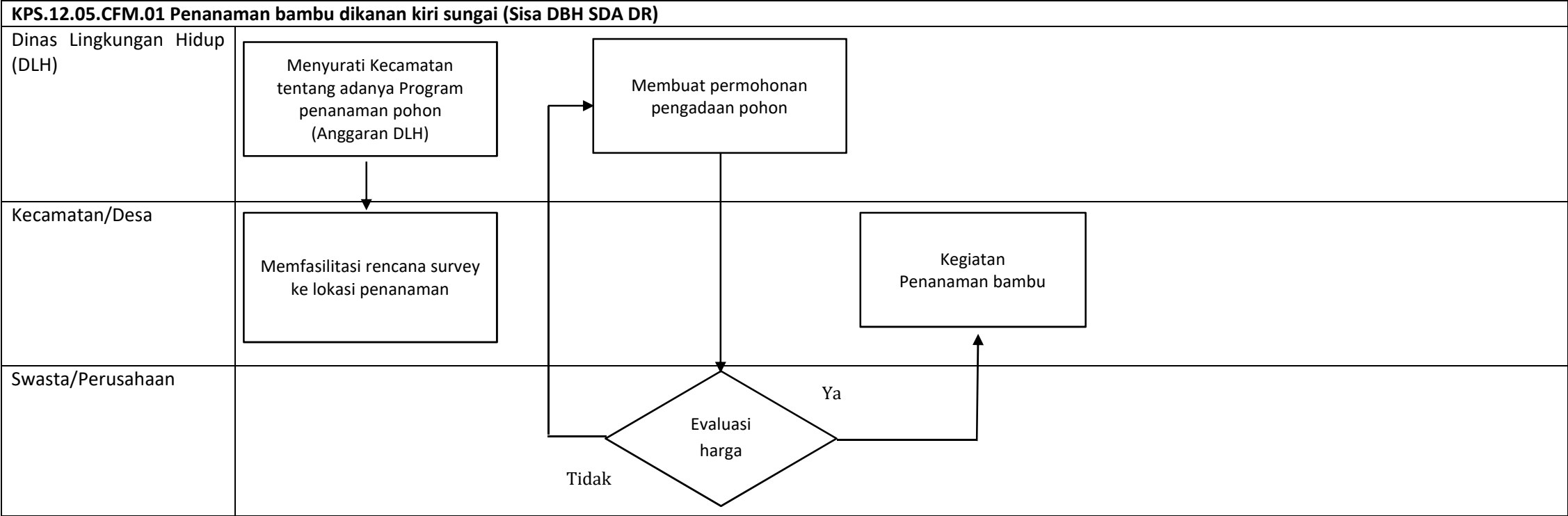
KPS.12.04

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (DBH-DR)

KPS.12.04.CFM.01 Pembentukan dan pembinaan <i>brigade</i> pengendalian kebakaran hutan (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.02 Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.03 Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.04 Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.05 Pembuatan, Penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta dan sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)
1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau 4. Kecamatan/Desa	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2. Kecamatan/Desa 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Kecamatan/Desa 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau 5. Swasta/Pihak Ke-3	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2. Kecamatan/Desa 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Dinas PUPRPKP 5. Badan Restorasi Gambut Dan Magrove 6. Swasta/Perusahaan	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2. Kecamatan/Desa 3. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau 6. Swasta/Perusahaan

KPS.12.04.CFM.06 Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.07 Peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya (Sisa DBH SDA DR)	KPS.12.04.CFM.08 Pelatihan/pembekalan/<i>inhousetraining</i>/ penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan
1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2. Kecamatan/Desa/Mpa /Unsur Tripika 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau	1. Kementerian LHK 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 3. Kecamatan/Kelurahan/Desa/Mpa Dan Tim Damkar 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau	1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 2. Kecamatan/Kelurahan/Desa (Damkar) 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS) Kalimantan II Kapuas-P.Pisau

PETA LINTAS FUNGSI



RELASI

KPS.12.05

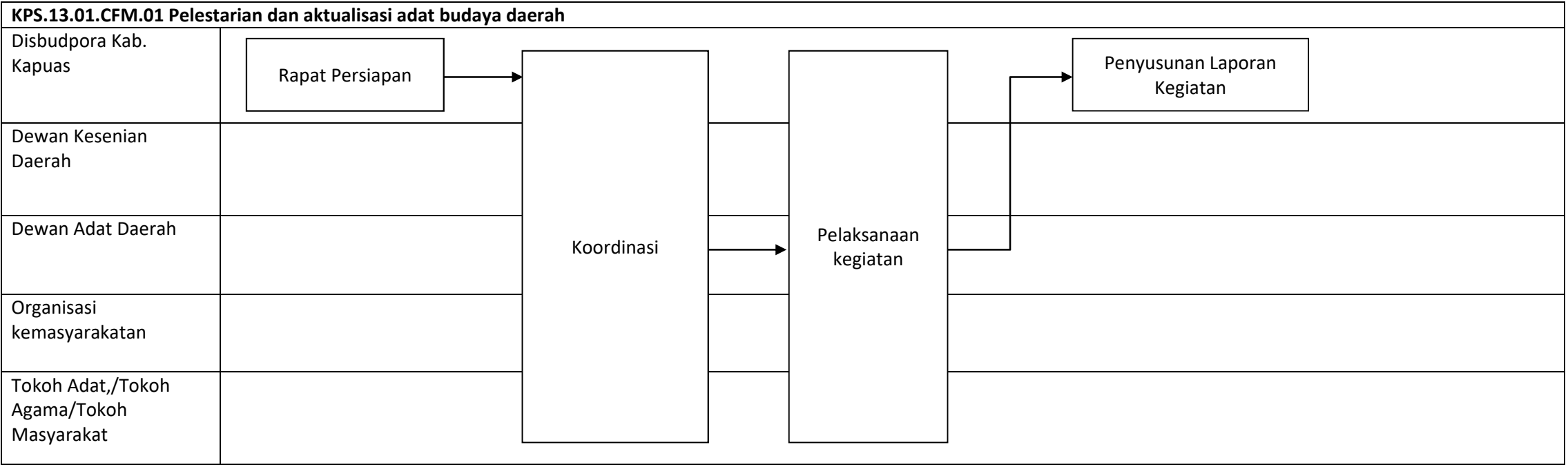
Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan DTA, sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah (DBH DR)

KPS.12.05.CFM.01

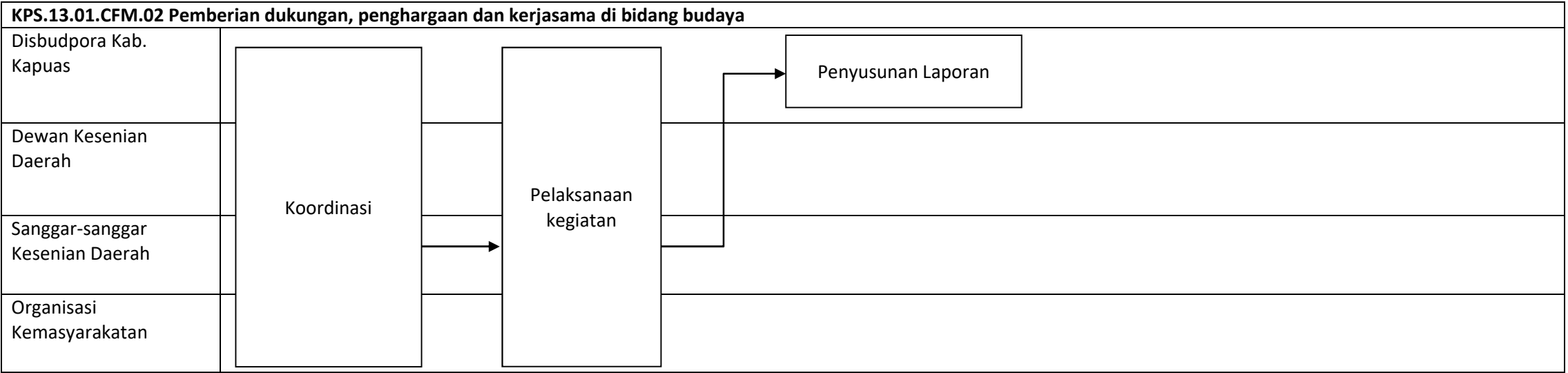
**Penanaman bambu di kanan
kiri sungai (Sisa DBH SDA DR)**

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Kecamatan/Desa
3. Swasta/Perusahaan

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

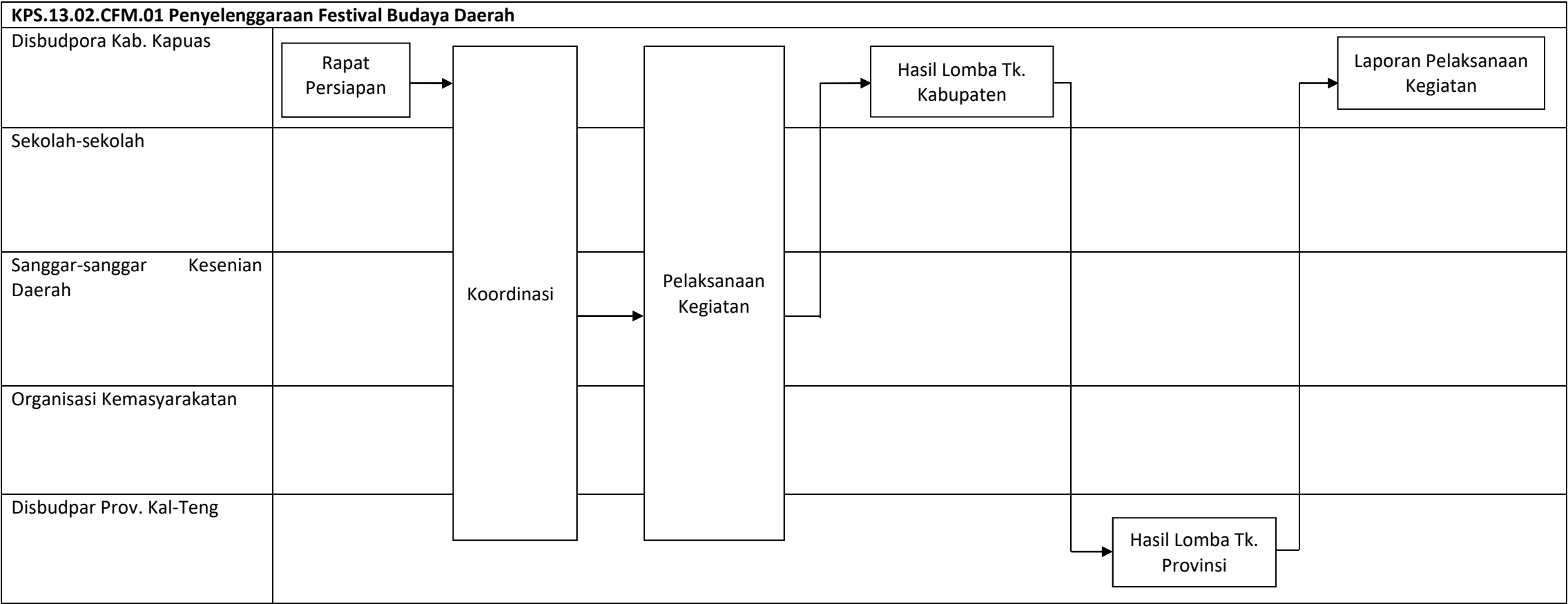
KPS.13.01

Pengembangan Nilai Budaya

KPS.13.01.CFM.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1. Disbudpora Kab. Kapuas 2. Dewan Kesenian Daerah 3. Dewan Adat Daerah 4. Organisasi Kemasyarakatan 5. Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

KPS.13.01.CFM.02 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. Disbudpora Kab. Kapuas 2. Dewan Kesenian Daerah 3. Sanggar-sanggar Kesenian daerah 4. Organisasi Kemasyarakatan

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.13.02

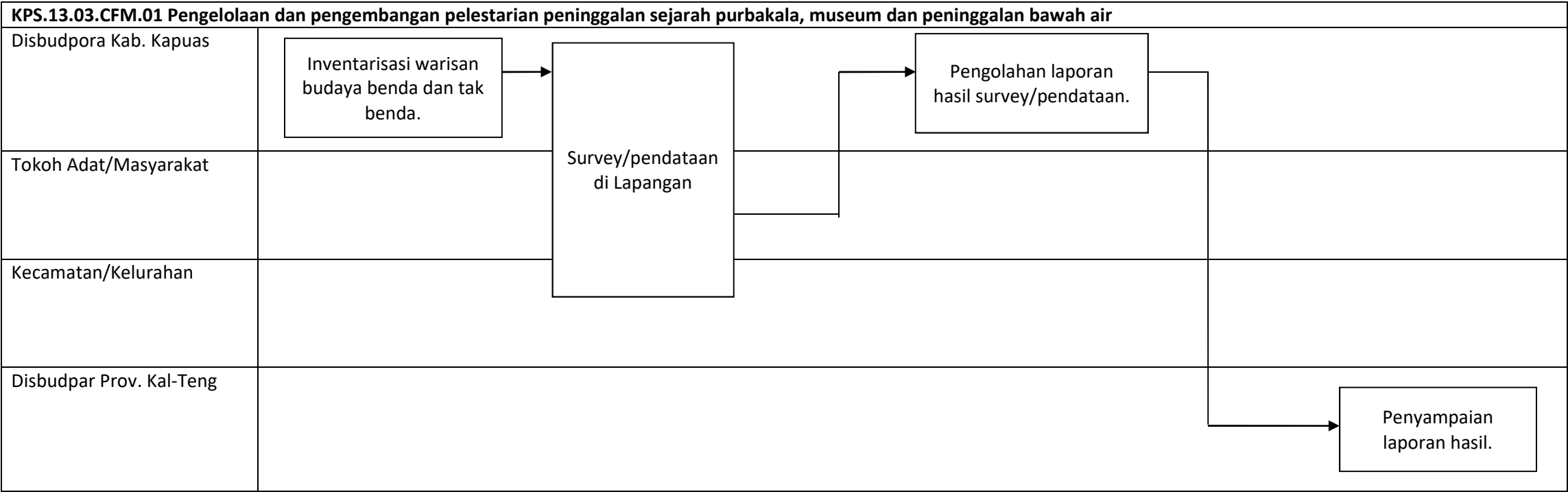
Pengelolaan Keragaman Budaya

KPS.13.02.CFM.01

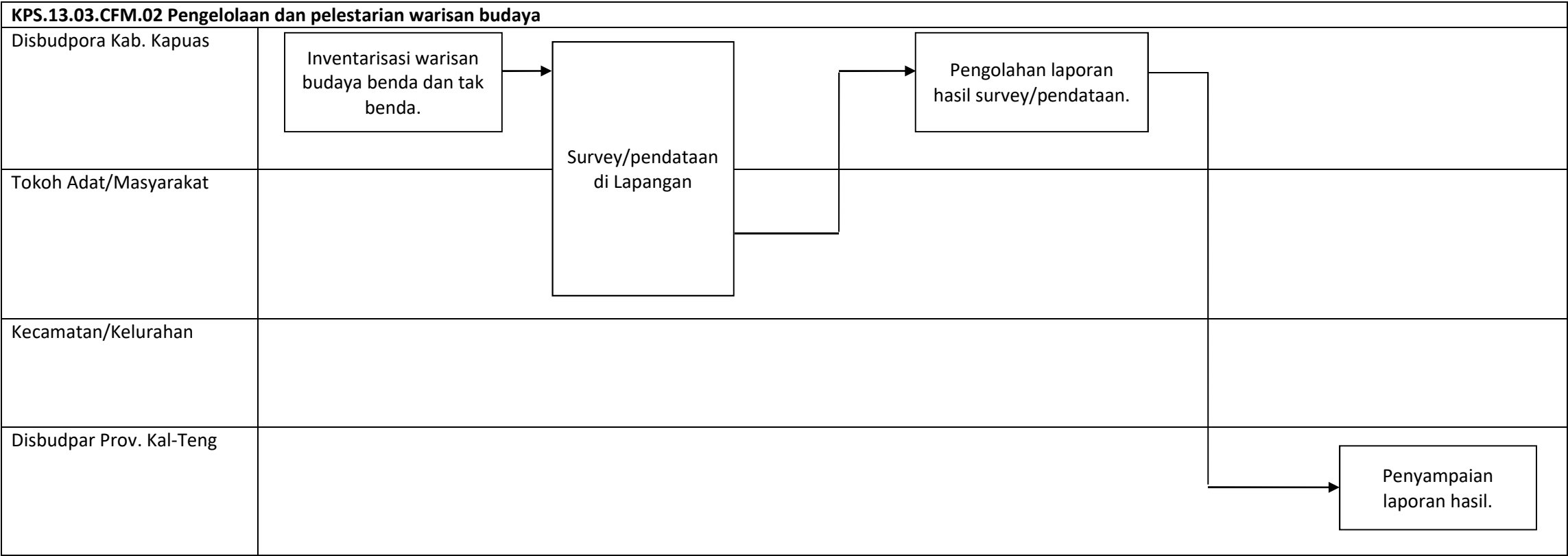
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1. Disbudpora Kab. Kapuas
2. Sekolah-sekolah
3. Sanggar-sanggar
Kesenian Daerah
4. Organisasi
Kemasyarakatan
5. Disbudpar Prov. Kal-
Teng

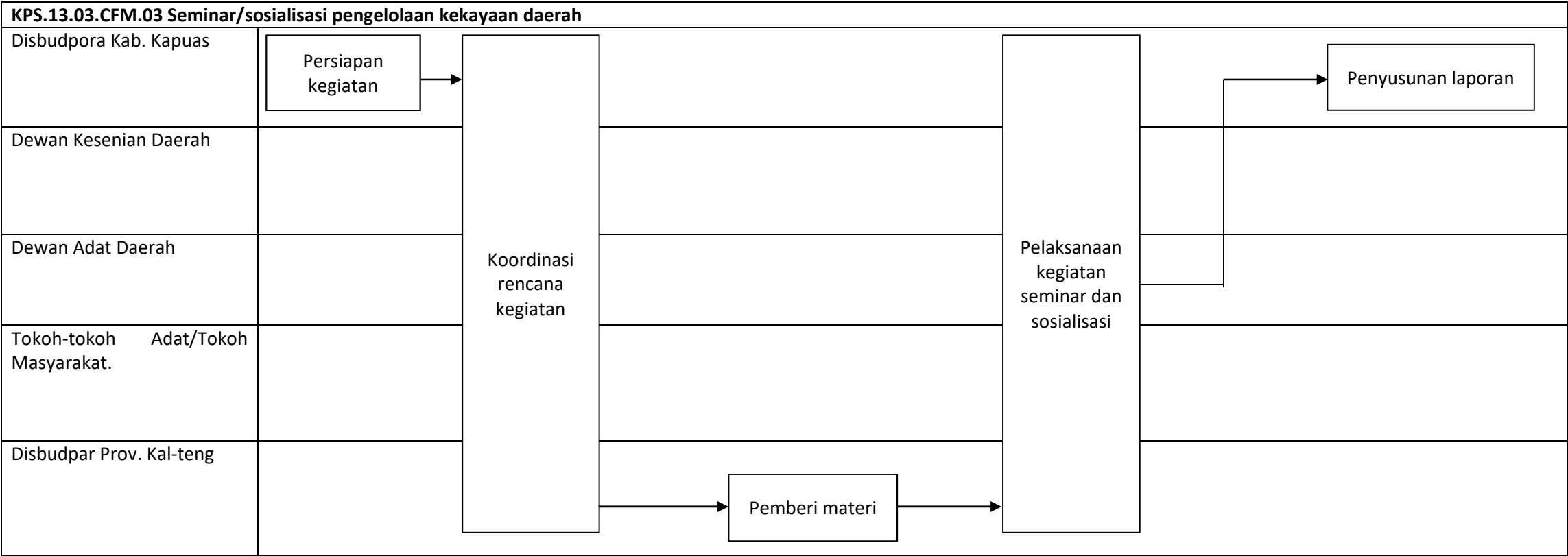
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



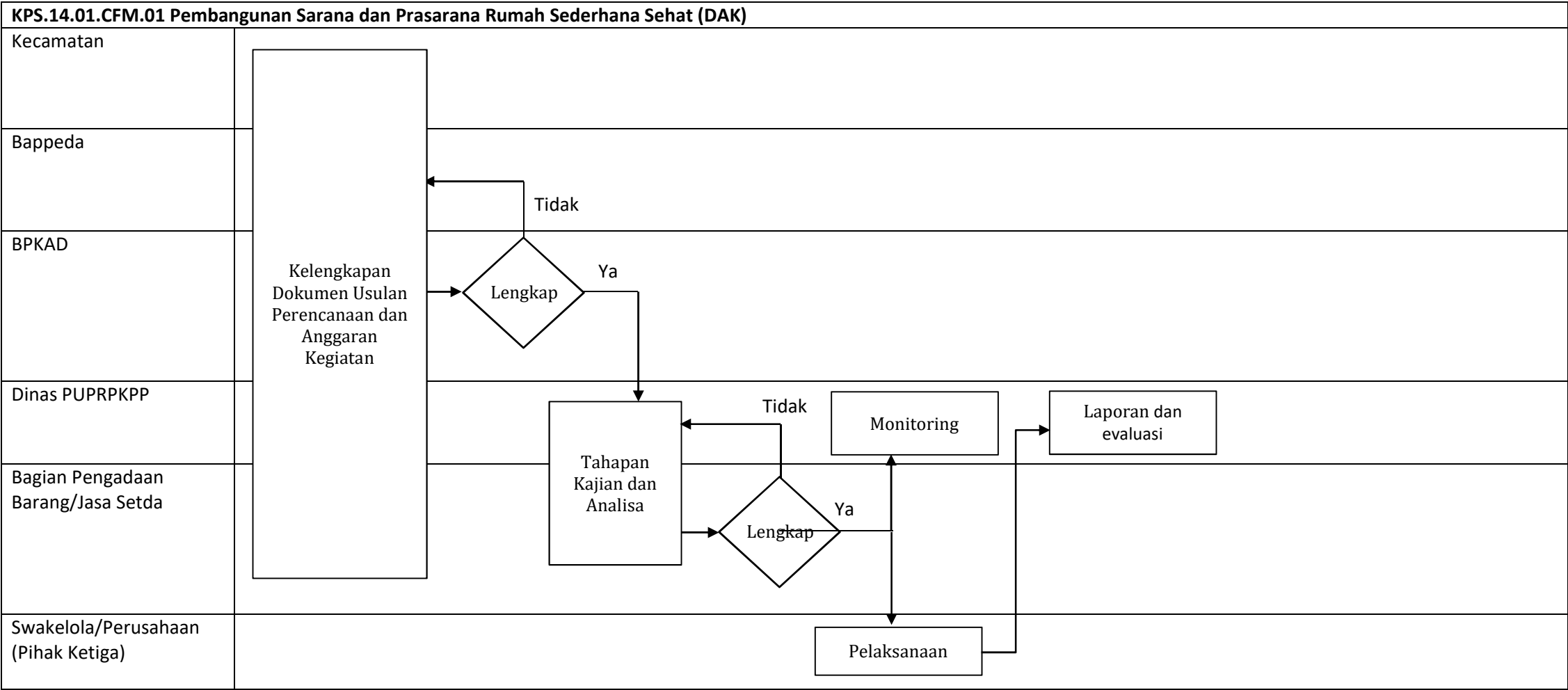
PETA RELASI

KPS.13.03

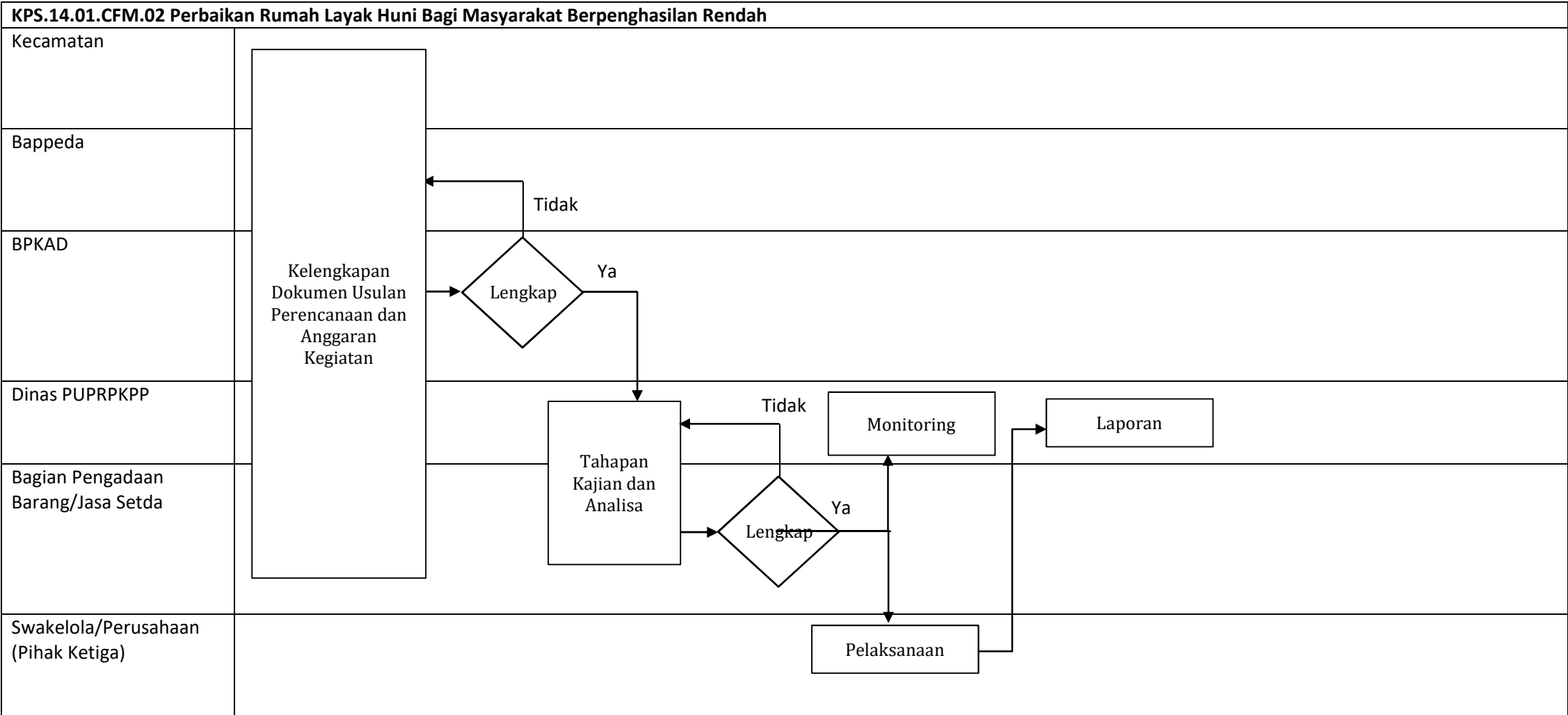
Pengelolaan Kekayaan Budaya

KPS.13.03.CFM.01 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1. Disbudpora Kab. Kapuas 2. Tokoh Adat/Masyarakat 3. Kecamatan/Kelurahan 4. Disbudpar Prov. Kal-Teng	KPS.13.03.CFM.02 Pengelolaan dan pelestarian warisan budaya 1. Disbudpora Kab. Kapuas 2. Tokoh Adat/Masyarakat 3. Kecamatan/Kelurahan 4. Disbudpar Prov. Kal-Teng	KPS.13.03.CFM.03 Seminar/sosialisasi pengelolaan kekayaan daerah 1. Disbudpora Kab. Kapuas 2. Dewan Kesenian Daerah 3. Dewan Adat Daerah 4. Tokoh-tokoh Adat/Tokoh Masyarakat. 5. Disbudpar Prov. Kal-teng
---	---	---

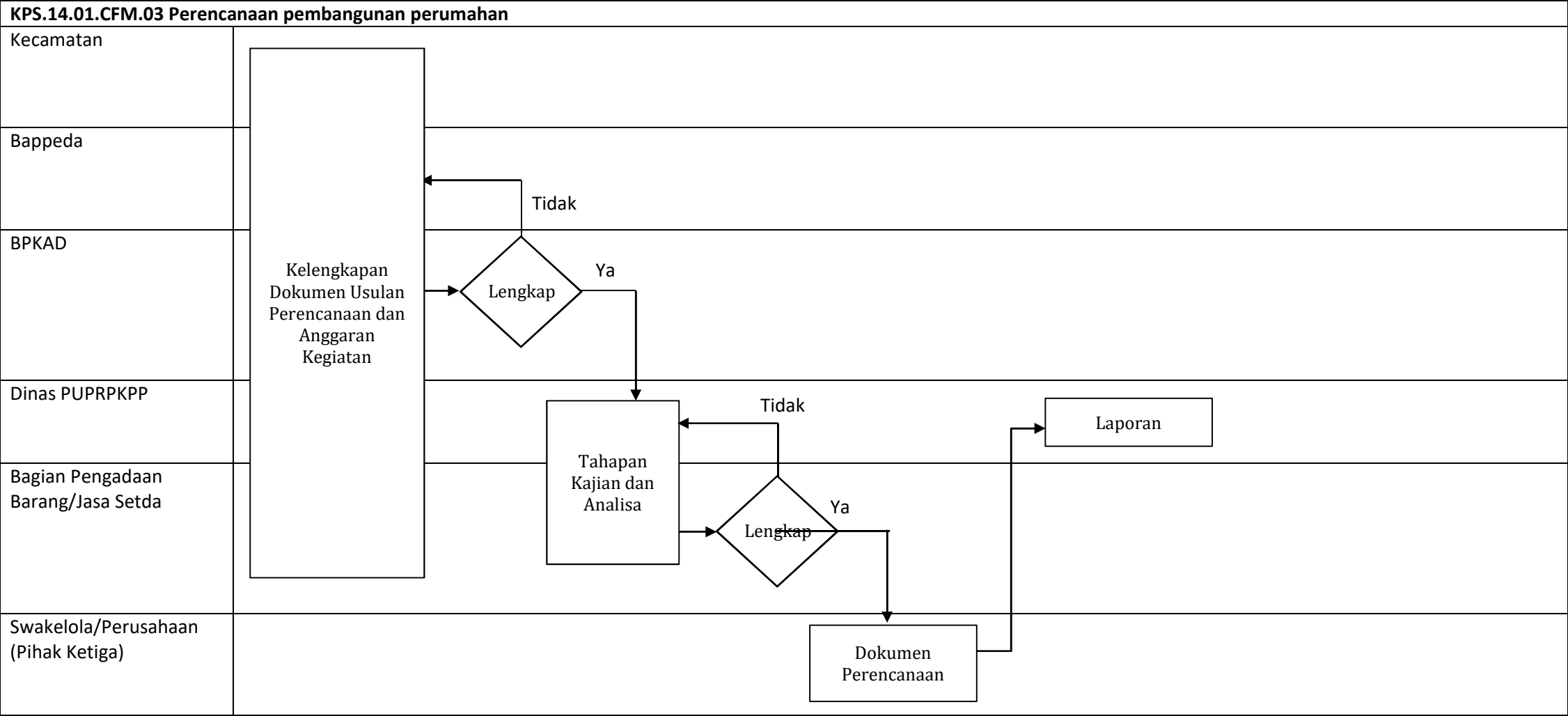
PETA LINTAS FUNGSI



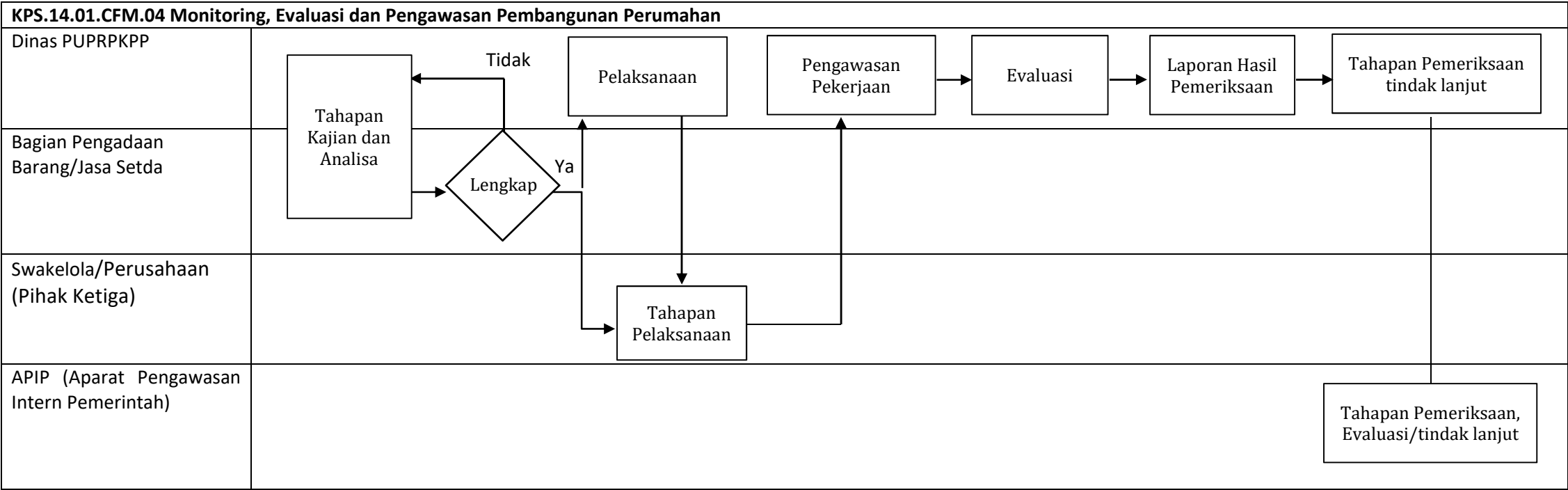
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



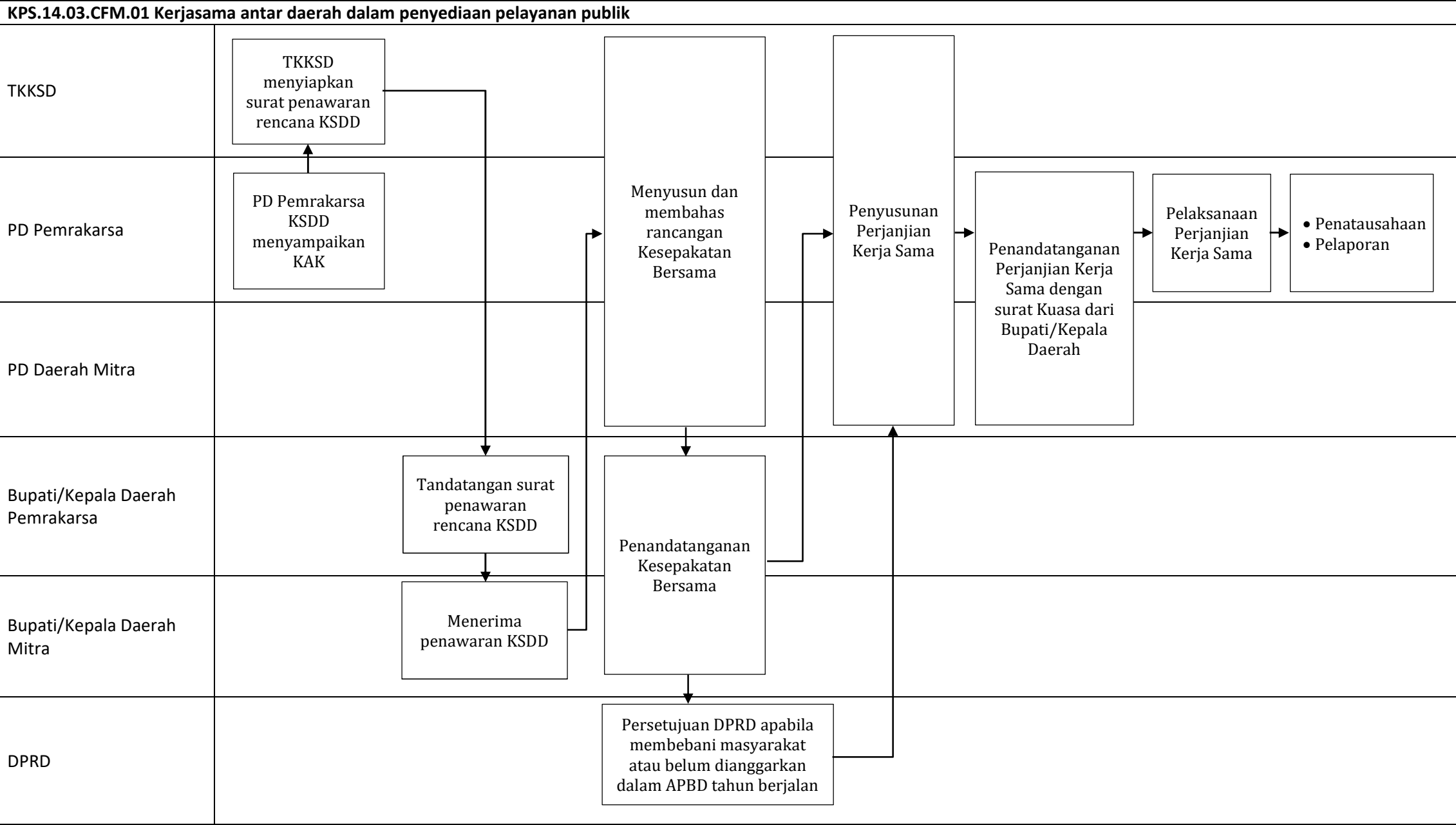
PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.14.01 Pengembangan Perumahan			
KPS.14.01.CFM.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)	KPS.14.01.CFM.02 Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	KPS.14.01.CFM.03 Perencanaan pembangunan perumahan	KPS.14.01.CFM.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Perumahan
1. Kecamatan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Dinas PUPRPKPP 5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	1. Kecamatan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Dinas PUPRPKPP 5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	1. Kecamatan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Dinas PUPRPKPP 5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda 6. Swakelola/Perusahaan (Pihak Ketiga)	1. Dinas PUPRPKPP 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda 3. Swakelola/Perusahaan (Pihak Ketiga) 4. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.14.03

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

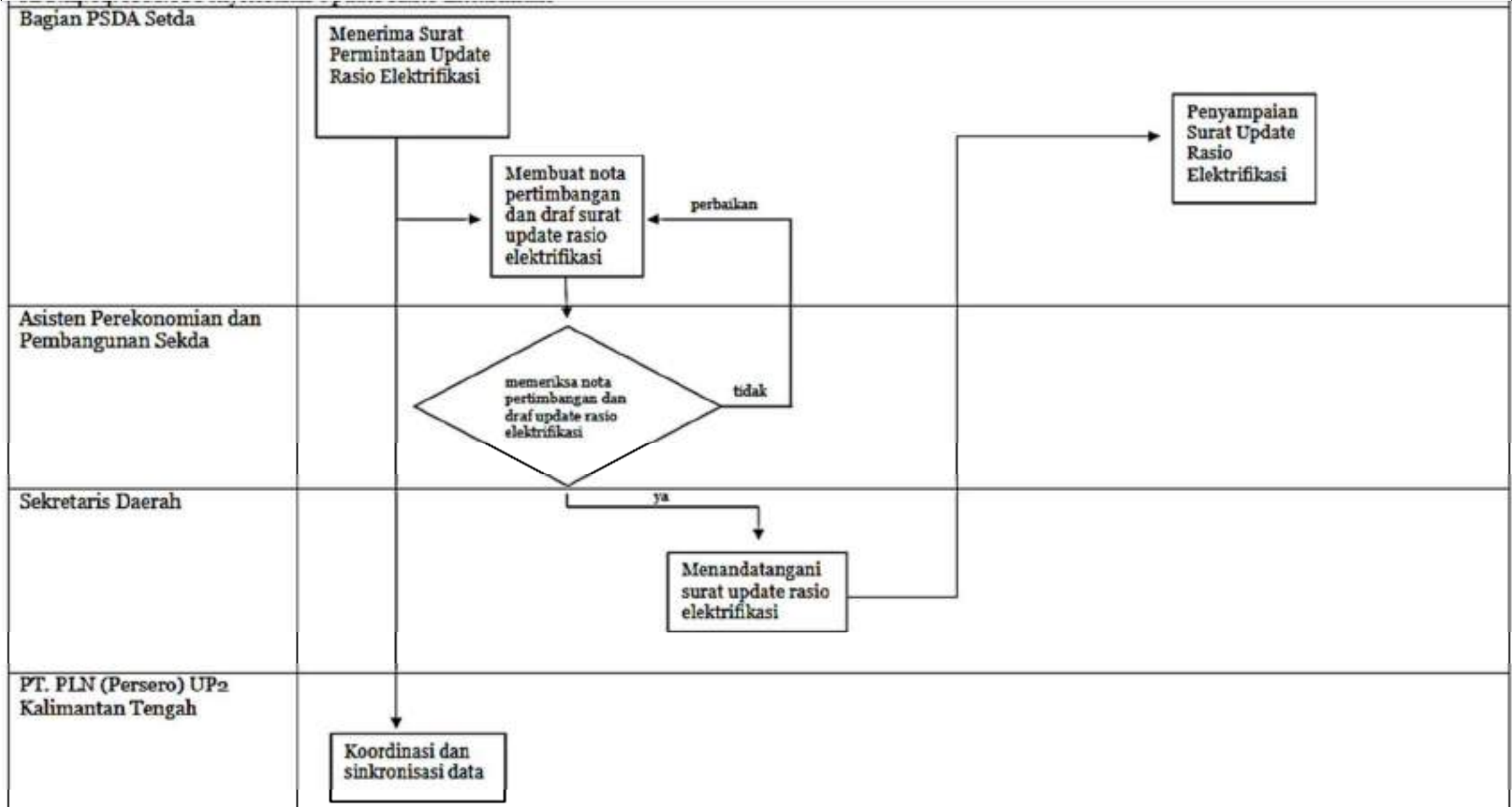
KPS.14.03.CFM.01

**Kerjasama antar daerah
dalam penyediaan
pelayanan publik**

1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
2. Perangkat Daerah Pemrakarsa
3. Perangkat Daerah Mitra
4. Bupati/Kepala Daerah Pemrakarsa
5. Bupati/Kepala Daerah Mitra
6. DPRD

PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Update Rasio Elektrifikasi)



KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Rekomendasi Lokasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya)

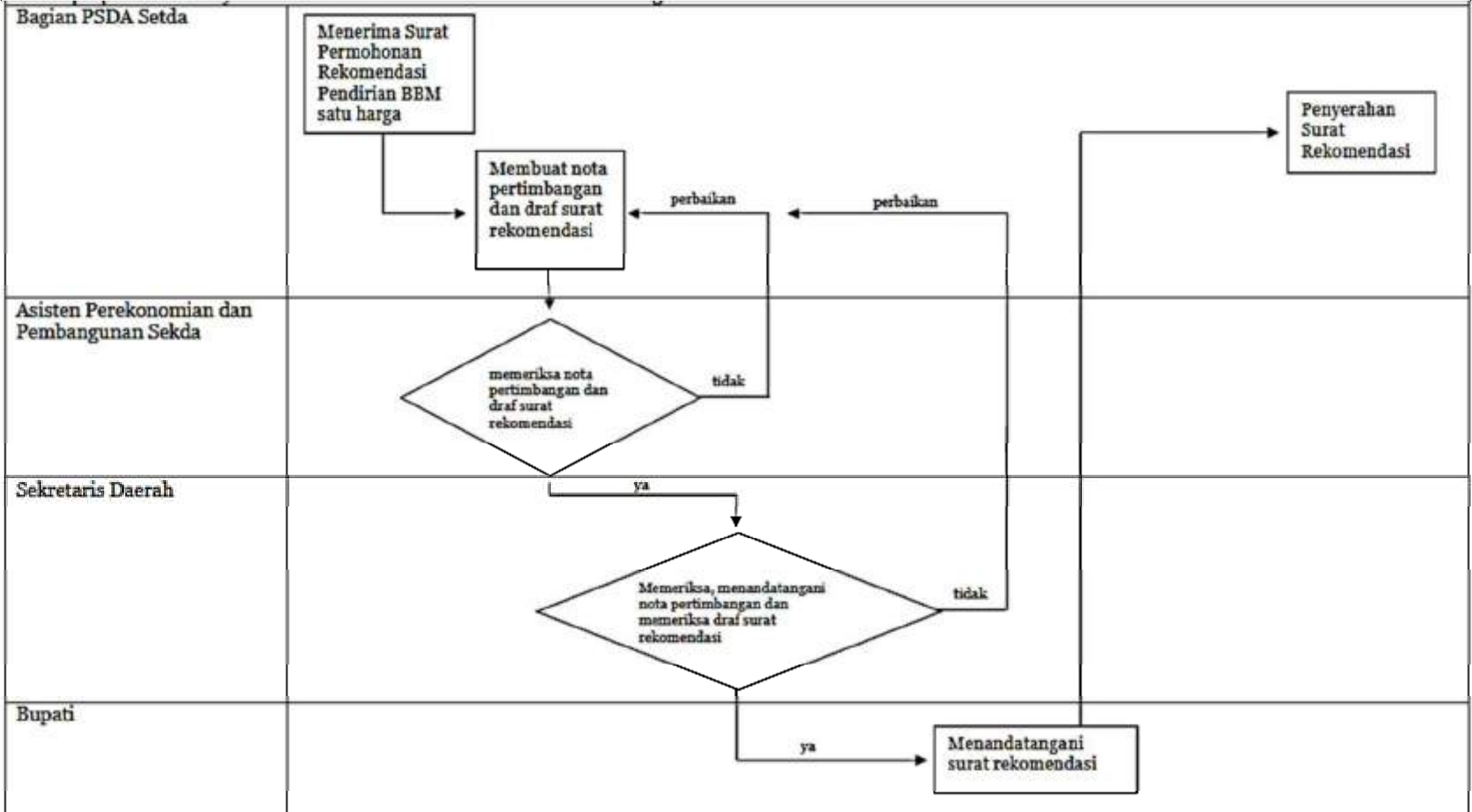


KPS.14.04.CFM.01 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Surat Dukungan Pembangunan Listrik Desa)



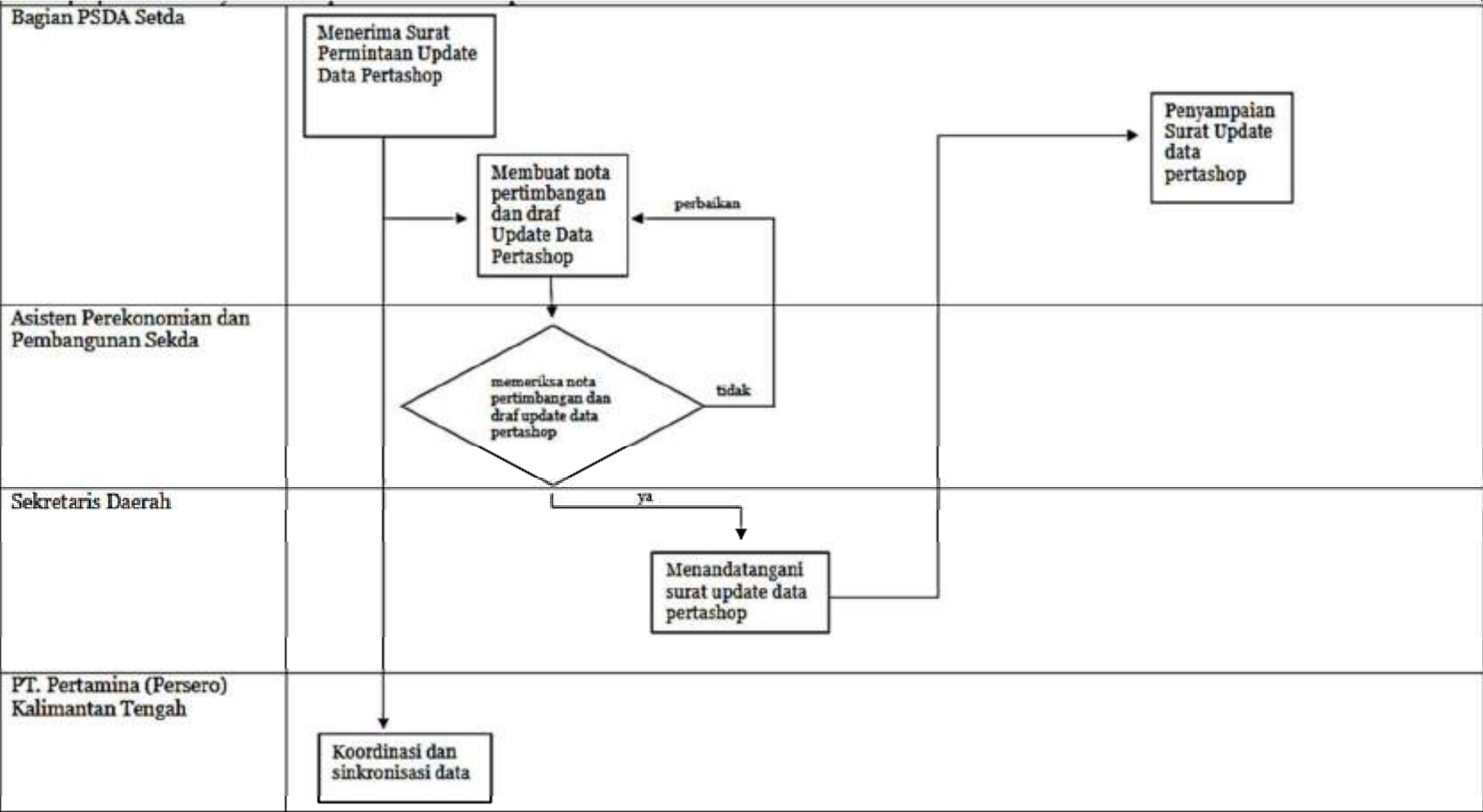
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Rekomendasi Pendirian BBM Satu Harga)



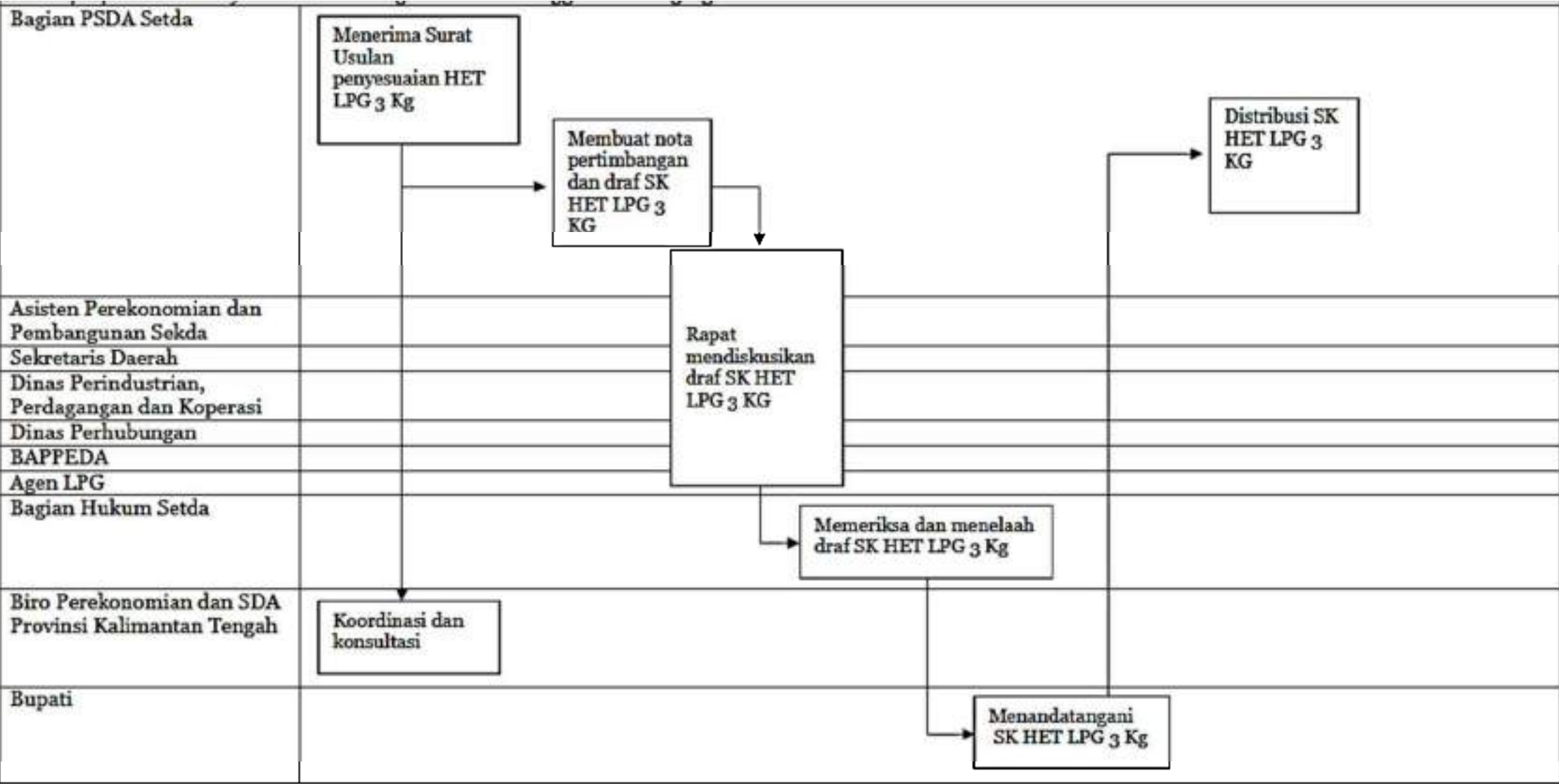
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Update Data Pertashop)



PETA LINTAS FUNGSI

KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian SK Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg)



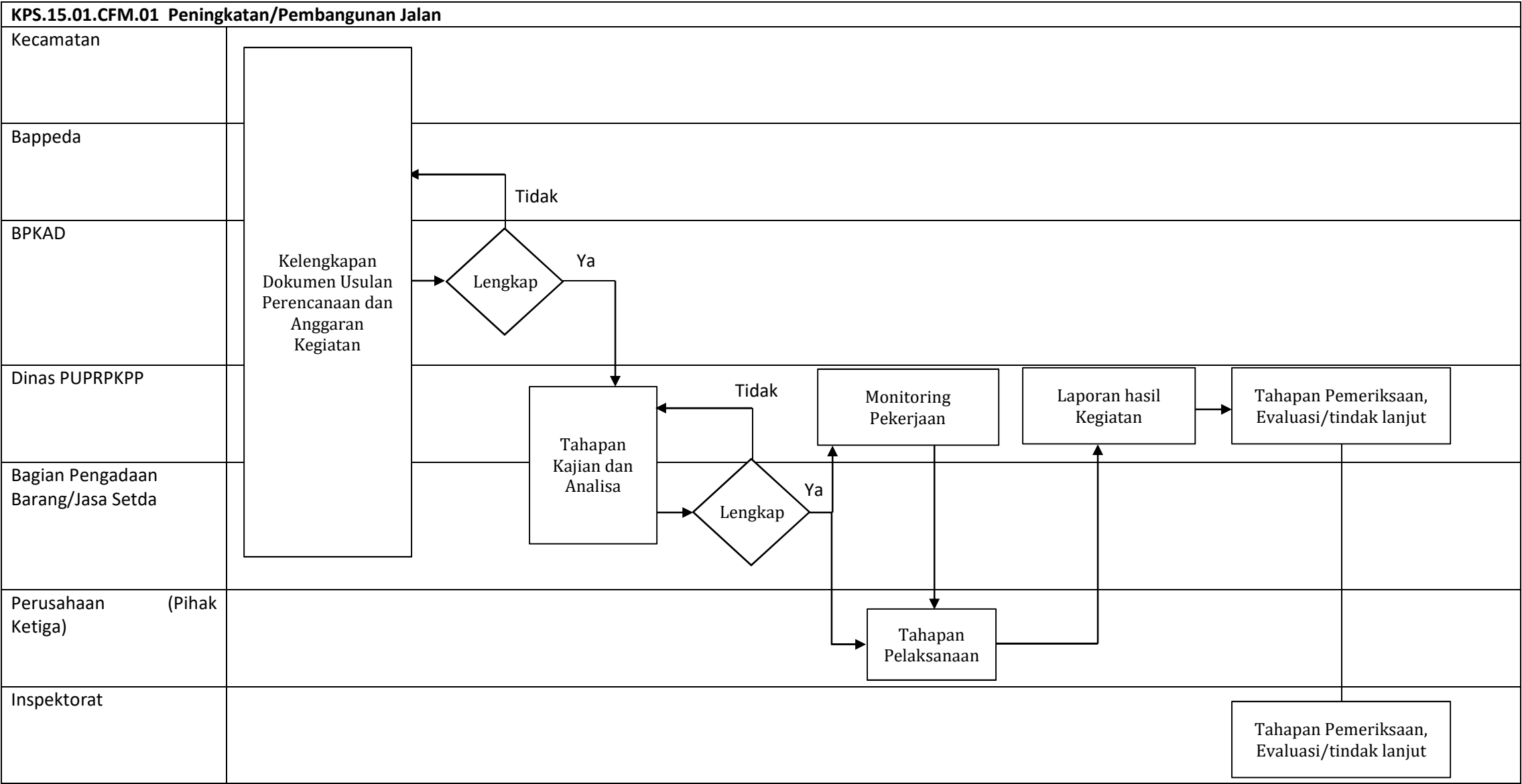
KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Surat Dukungan Usulan Penambahan Kuota LPG 3 Kg)



PETA RELASI

KPS.14.04 Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan Energi dan sumber daya mineral			
KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Update Rasio Elektrifikasi)	KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Rekomendasi Lokasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya)	KPS.14.04.CFM.01 Pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (Penyelesaian Surat Dukungan Pembangunan Listrik Desa)	
1. Bagian PSDA Setda 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah 4. PT. PLN (Persero) UP2 Kalimantan Tengah	8. Bagian PSDA Setda 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 10. Sekretaris Daerah 11. Bupati 12. Camat terkait	1. Bagian PSDA Setda 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah 4. Bupati	
KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Rekomendasi Pendirian BBM Satu Harga)	KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Update Data Pertashop)	KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian SK Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg)	KPS.14.04.CFM.02 Pemanfaatan gas tambang dan minyak (Penyelesaian Surat Dukungan Usulan Penambahan Kuota LPG 3 Kg)
1. Bagian PSDA Setda 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah 4. Bupati	1. Bagian PSDA Setda 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah 4. PT. Pertamina (Persero) Kalimantan Tengah	1. Bagian PSDA Setda 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5. BAPPEDA 6. Dinas Perhubungan 7. Bagian Hukum Setda 8. Agen LPG 9. Biro Perekonomian dan SDA Provinsi Kalteng	1. Bagian PSDA Setda 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda 3. Sekretaris Daerah 4. Bupati

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

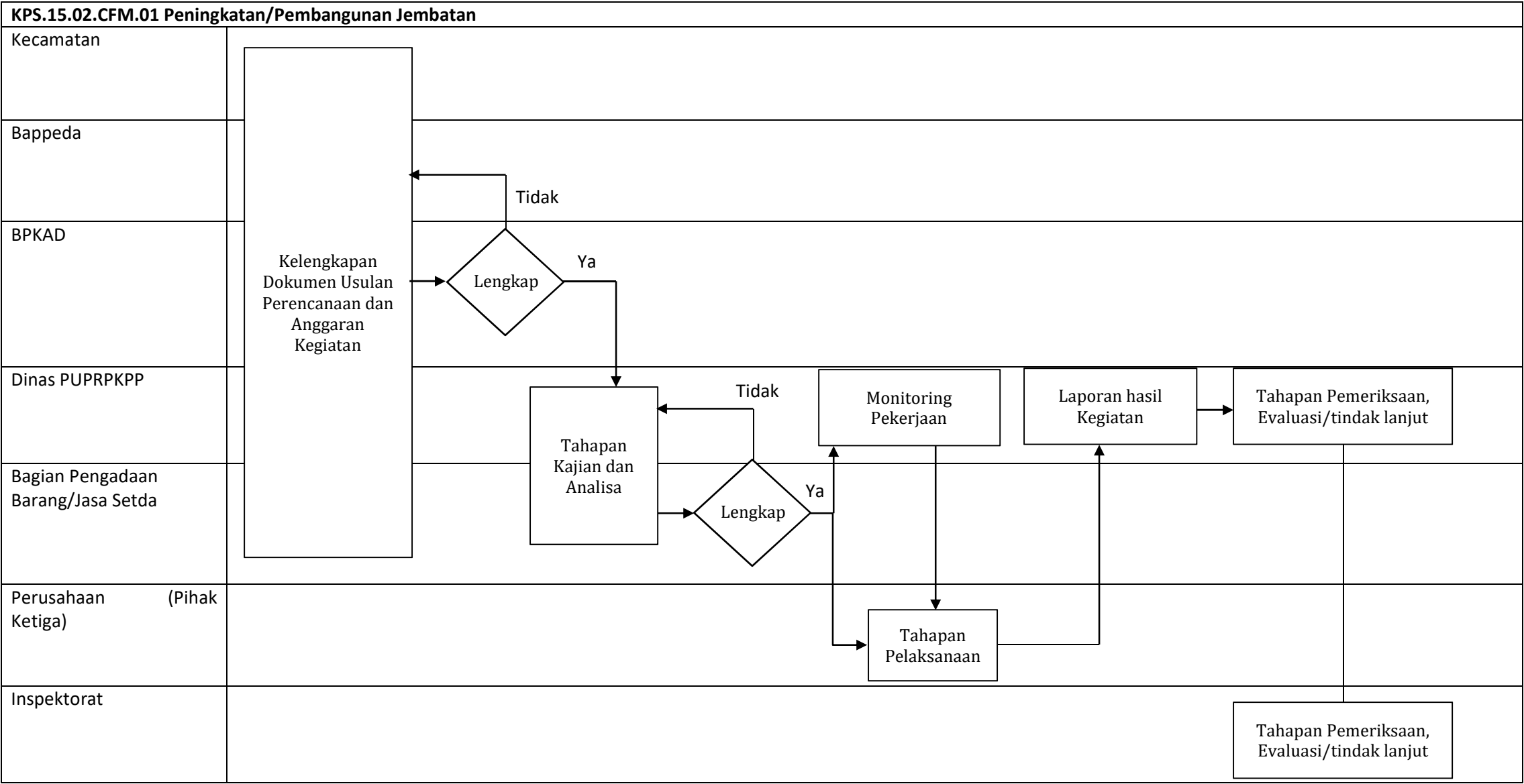
KPS.15.01

Peningkatan/Pembangunan Jalan

KPS.15.01.CFM.01 Peningkatan/Pembangunan Jalan

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan2. Bappeda3. BPKAD4. Dinas PUPRPKPP5. Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda6. Perusahaan (Pihak
Ketiga)7. Inspektorat |
|--|

PETA LINTAS FUNGSI



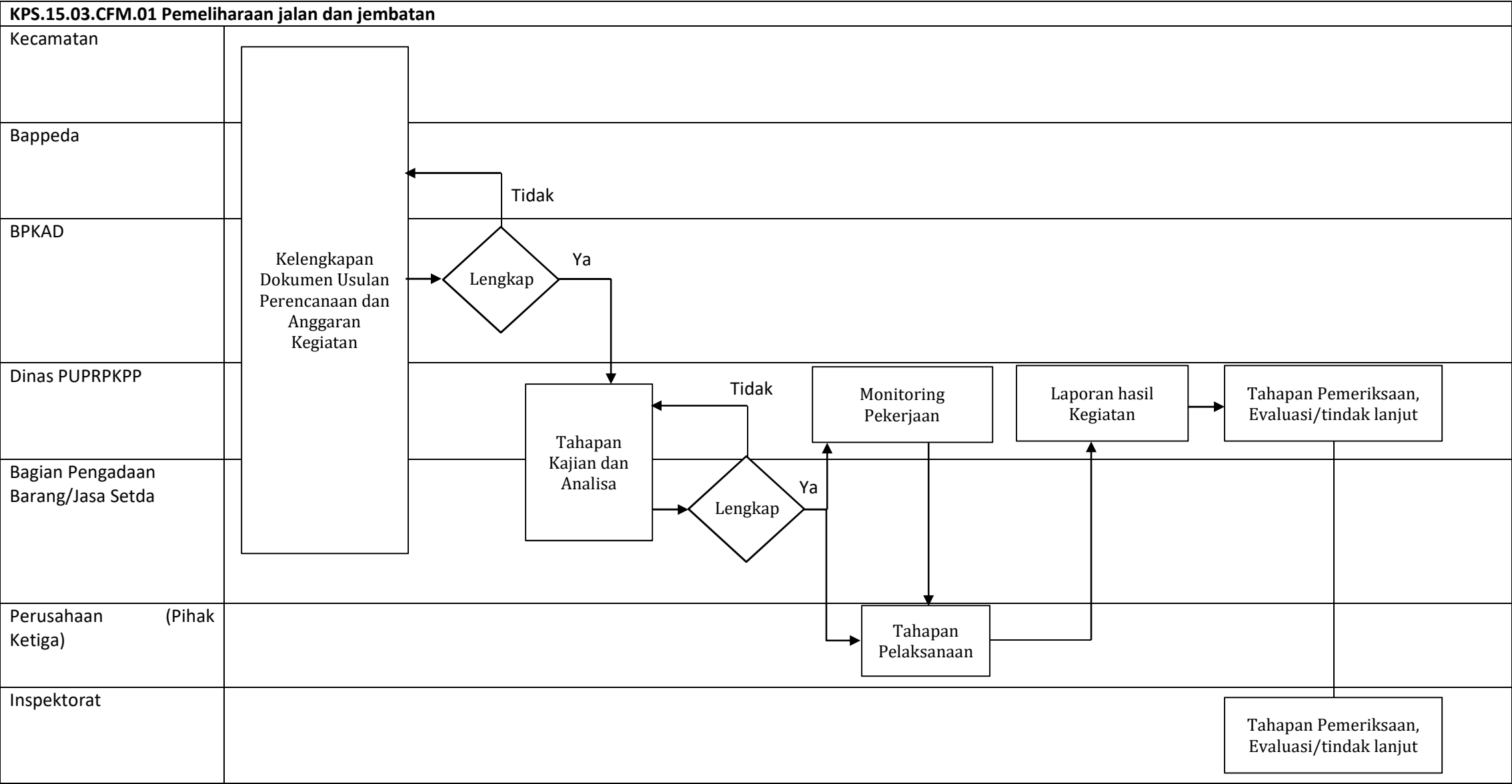
PETA RELASI

KPS.15.02
Peningkatan/Pembangunan Jembatan

KPS.15.02.CFM.01 Peningkatan/Pembangunan Jembatan
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan2. Bappeda3. BPKAD4. Dinas PUPRPKPP5. Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda6. Perusahaan (Pihak
Ketiga)7. Inspektorat |
|--|

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

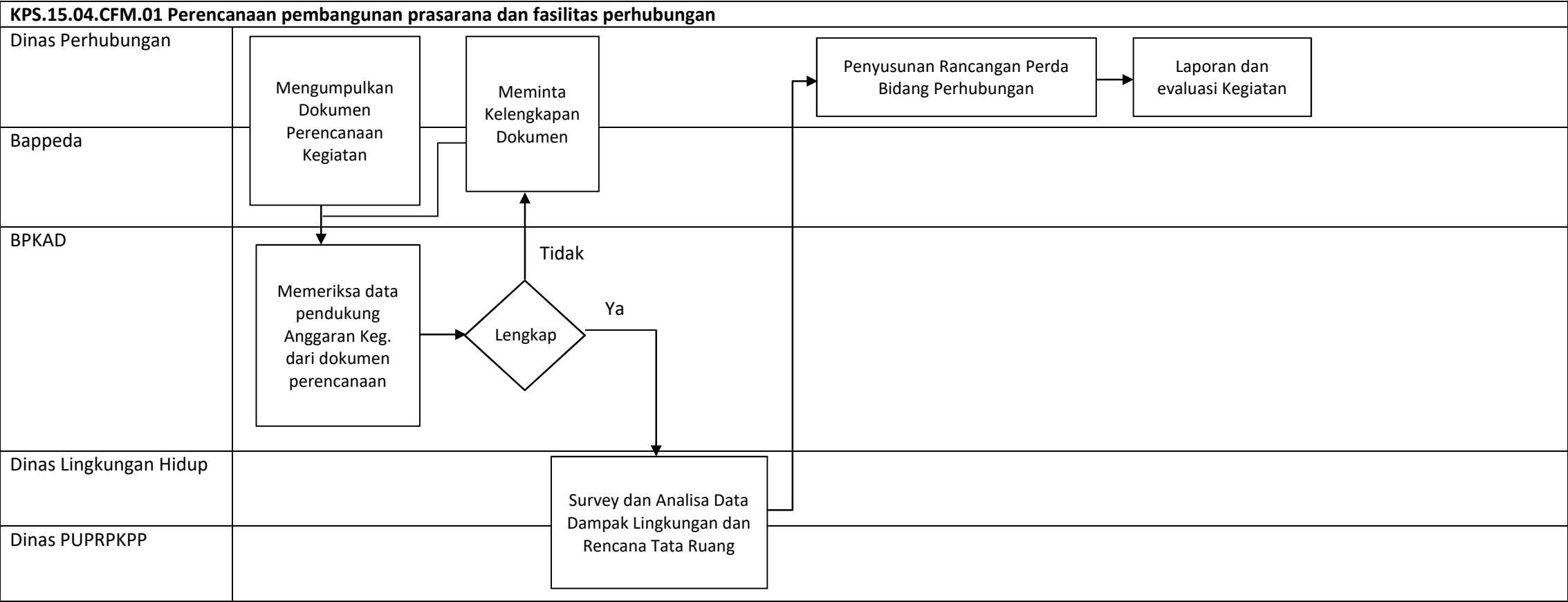
KPS.15.03

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

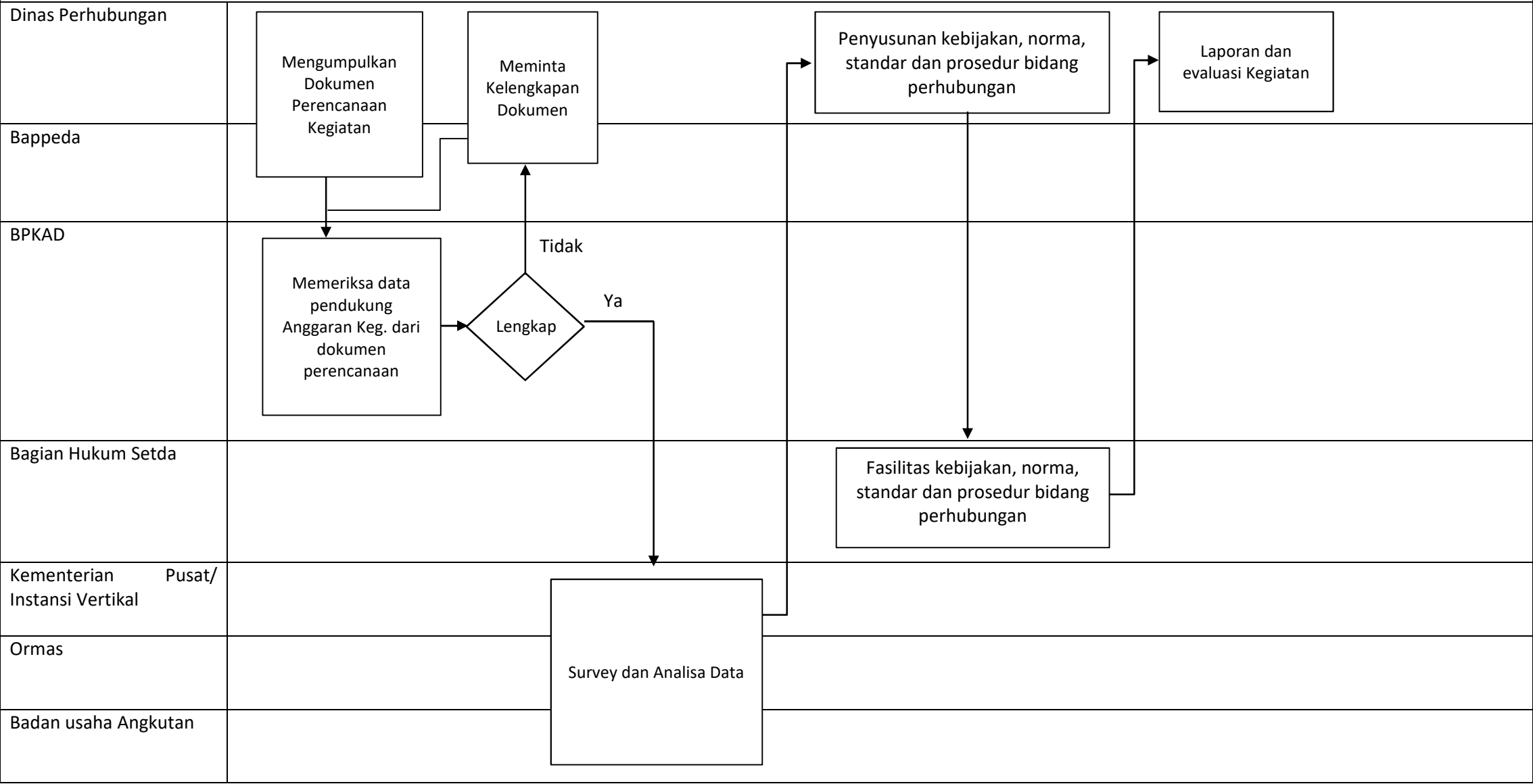
KPS.15.03.CFM.01 Pemeliharaan jalan dan jembatan

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan2. Bappeda3. BPKAD4. Dinas PUPRPKPP5. Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Setda6. Pihak Ketiga7. Inspektorat |
|---|

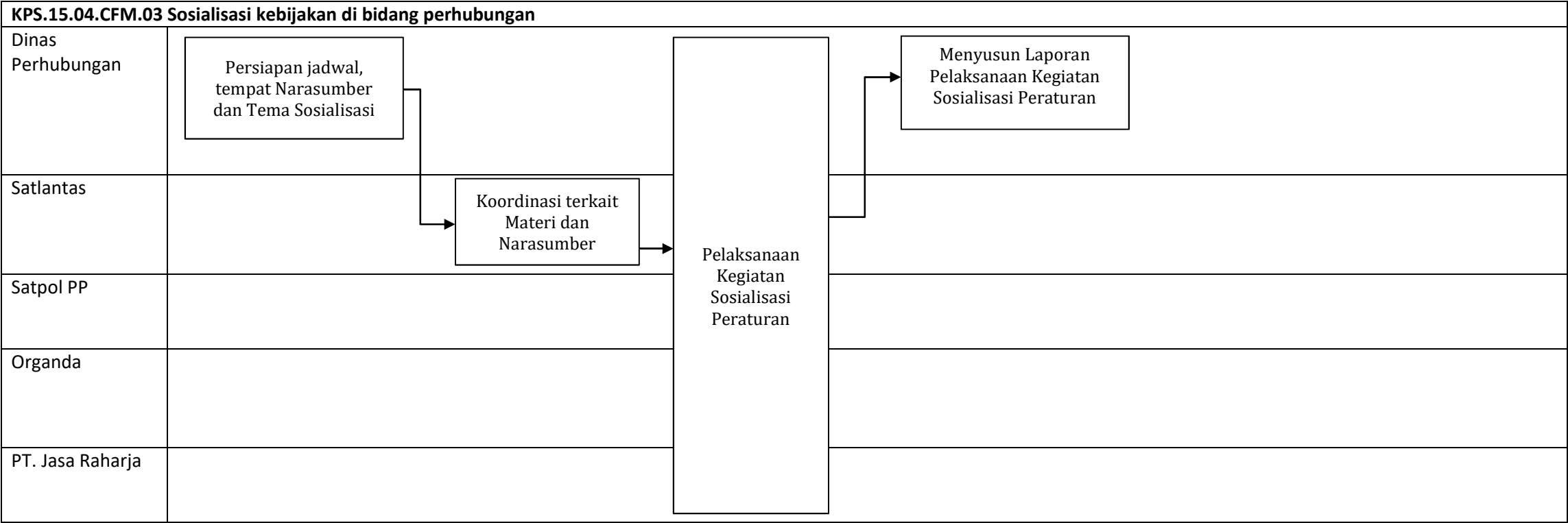
PETA LINTAS FUNGSI



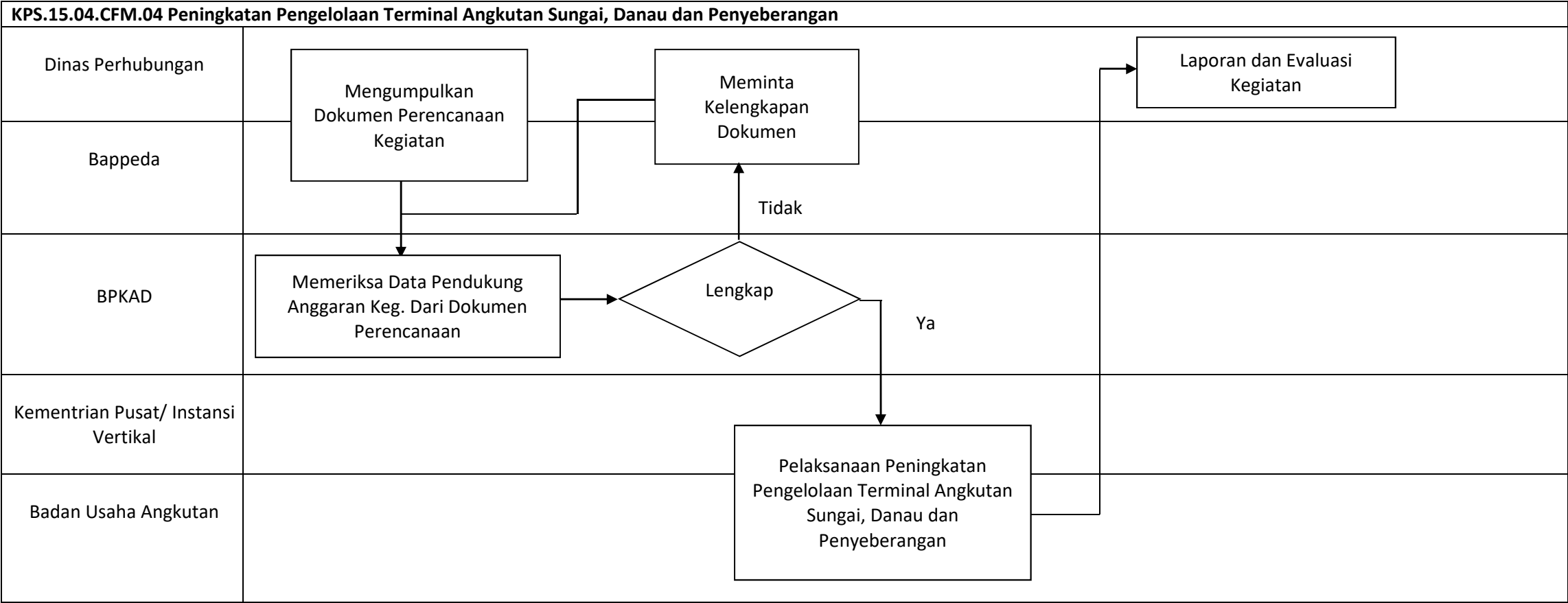
KPS.15.04.CFM.02 Penusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan



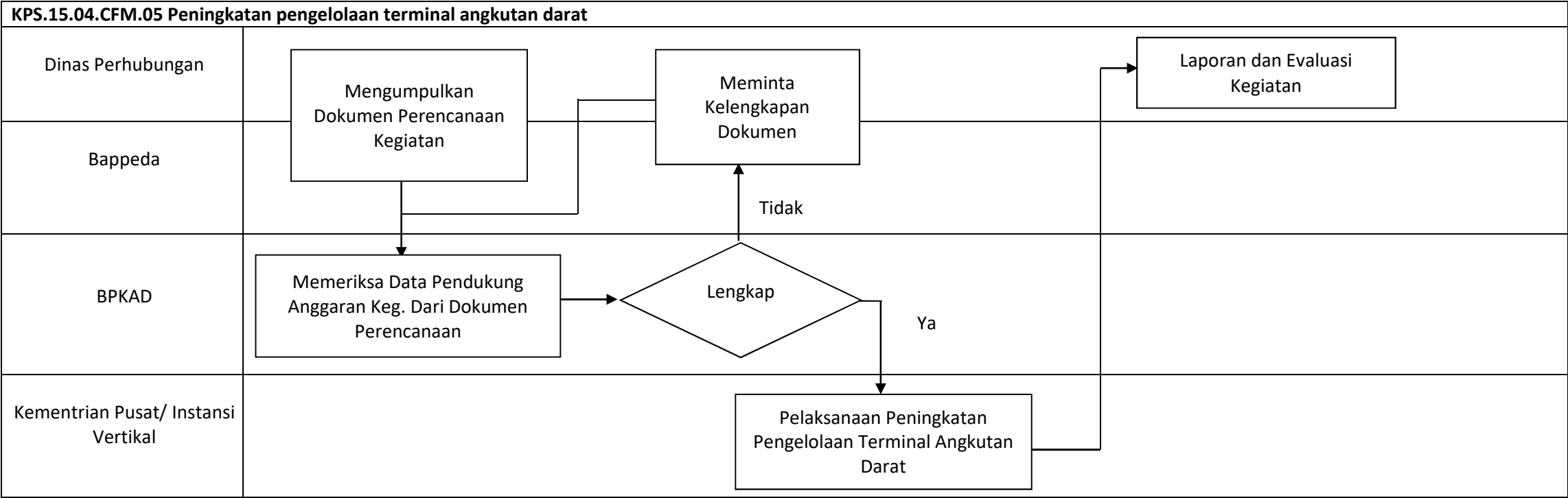
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



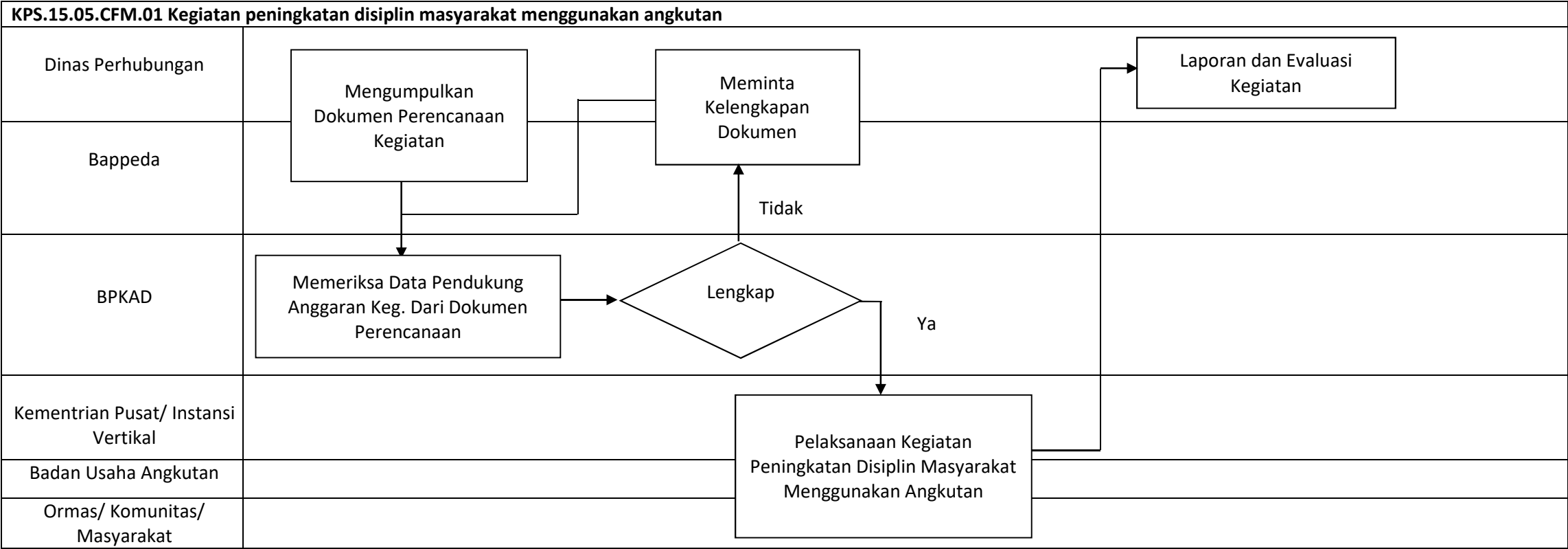
PETA LINTAS FUNGSI



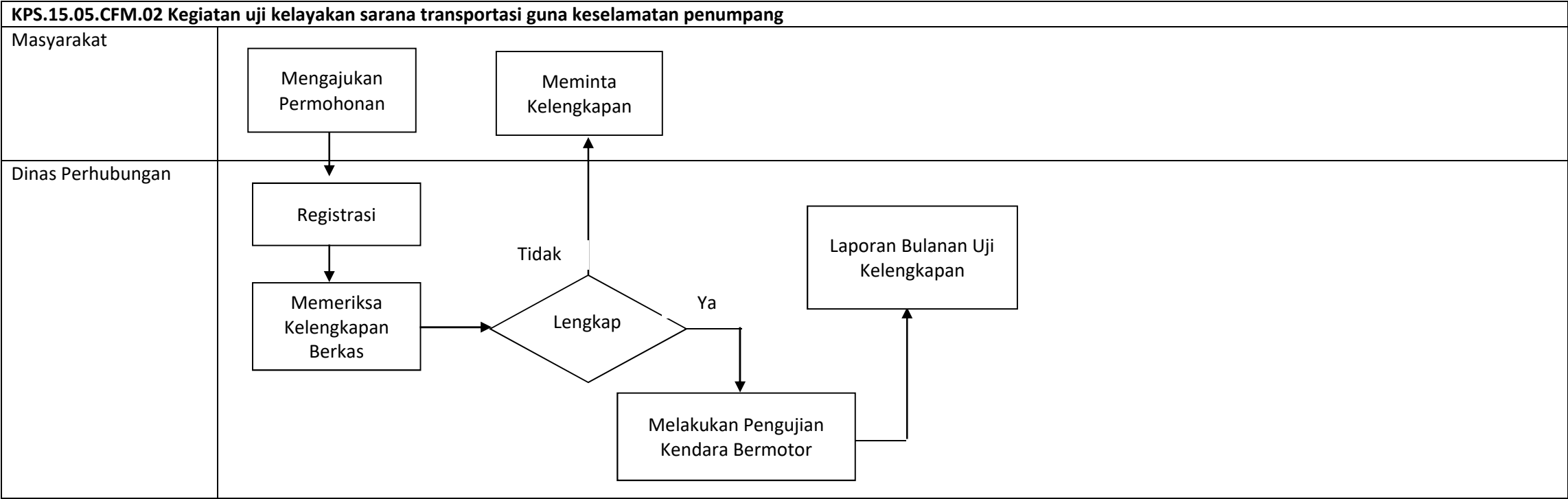
PETA RELASI

KPS.15.04 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
KPS.15.04.CFM.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	KPS.15.04.CFM.02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	KPS.15.04.CFM.03 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	KPS.15.04.CFM.04 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	KPS.15.04.CFM.05 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1. Dinas Perhubungan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas PUPRPKPP	1. Dinas Perhubungan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Bagian Hukum Setda 5. Kementerian Pusat/ Instansi Vertikal 6. Organisasi Masyarakat 7. Badan usah Angkutan	1. Dinas Perhubungan 2. Satlantas 3. Satpol PP 4. Organisasi Angkutan Darat (Organda) 5. PT. Jasa Raharja	1. Dinas Perhubungan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Kementerian Pusat/ Instansi Vertikal 5. Badan Usaha Angkutan	1. Dinas Perhubungan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Kementerian Pusat/ Instansi Vertikal

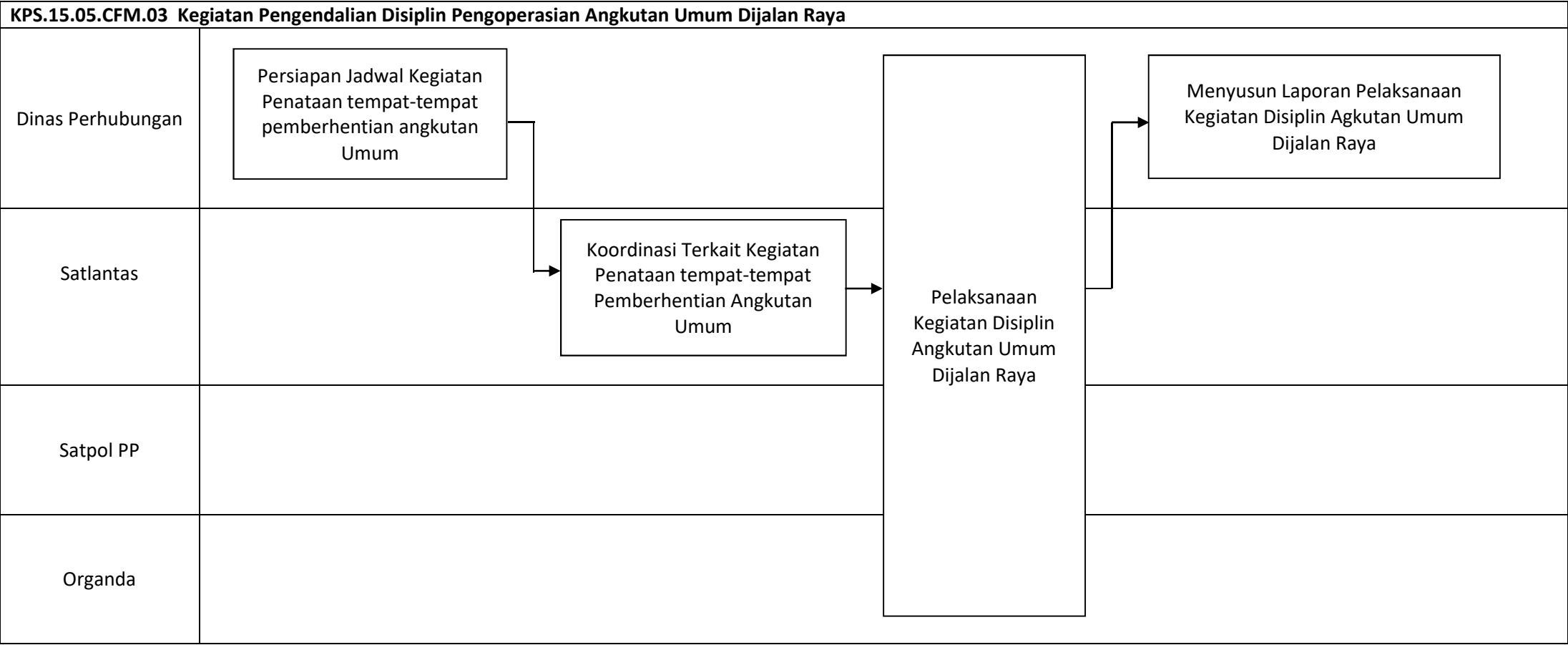
PETA LINTAS FUNGSI



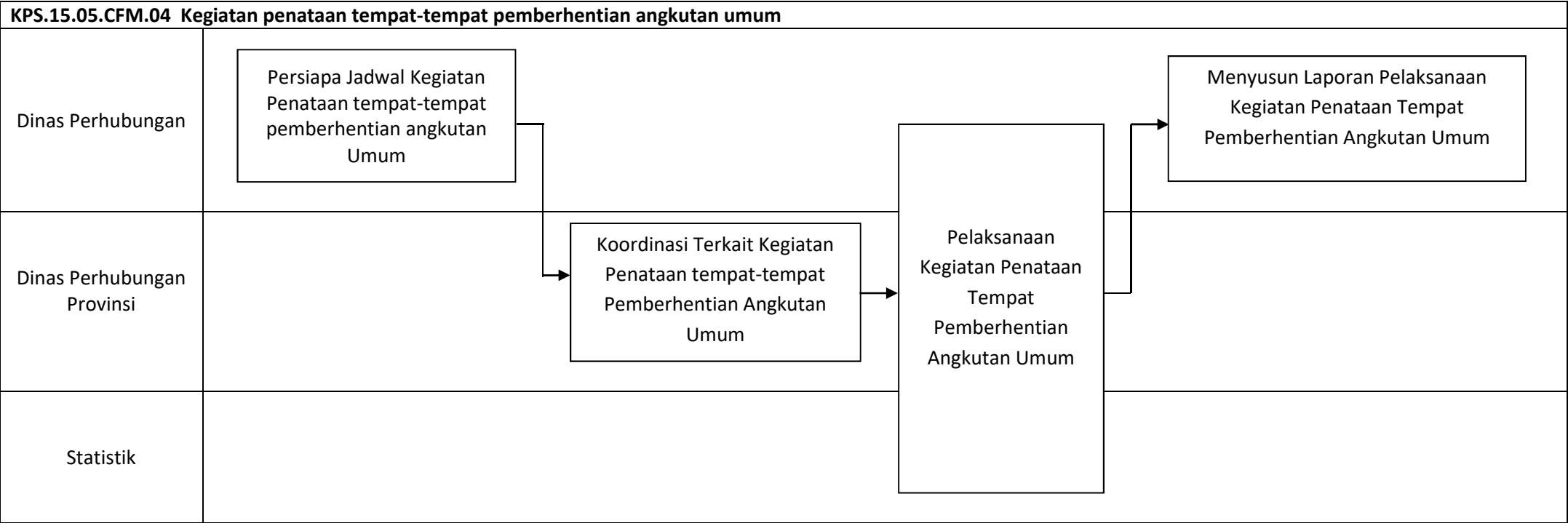
PETA LINTAS FUNGSI



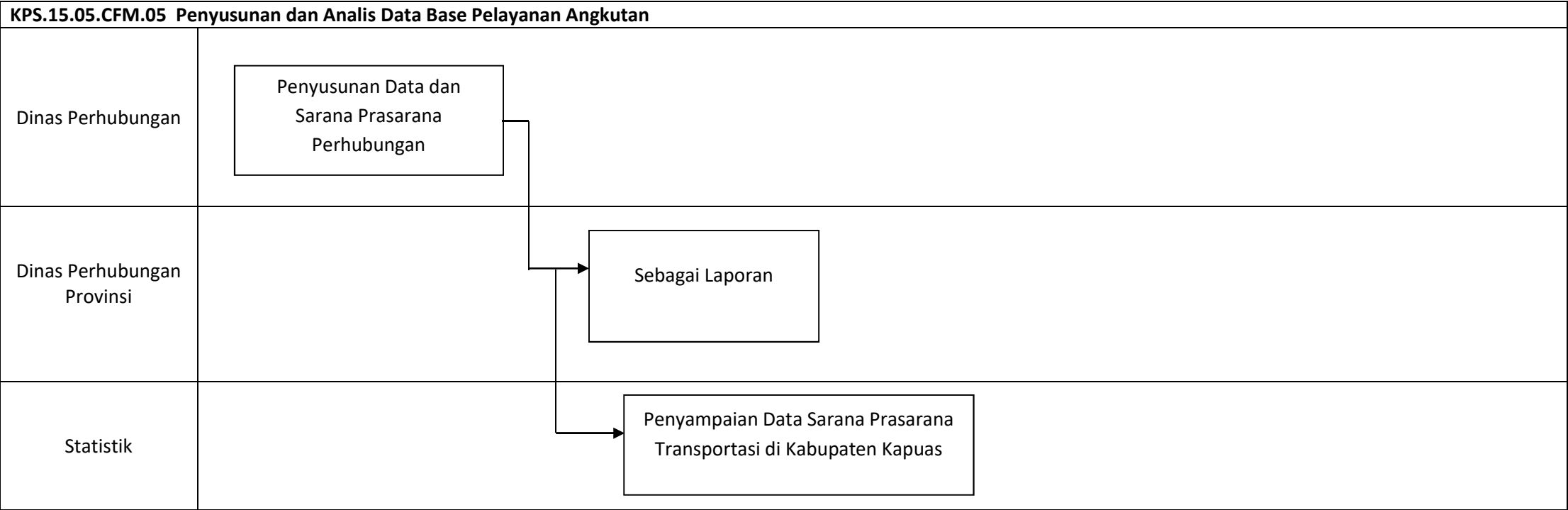
PETA LINTAS FUNGSI



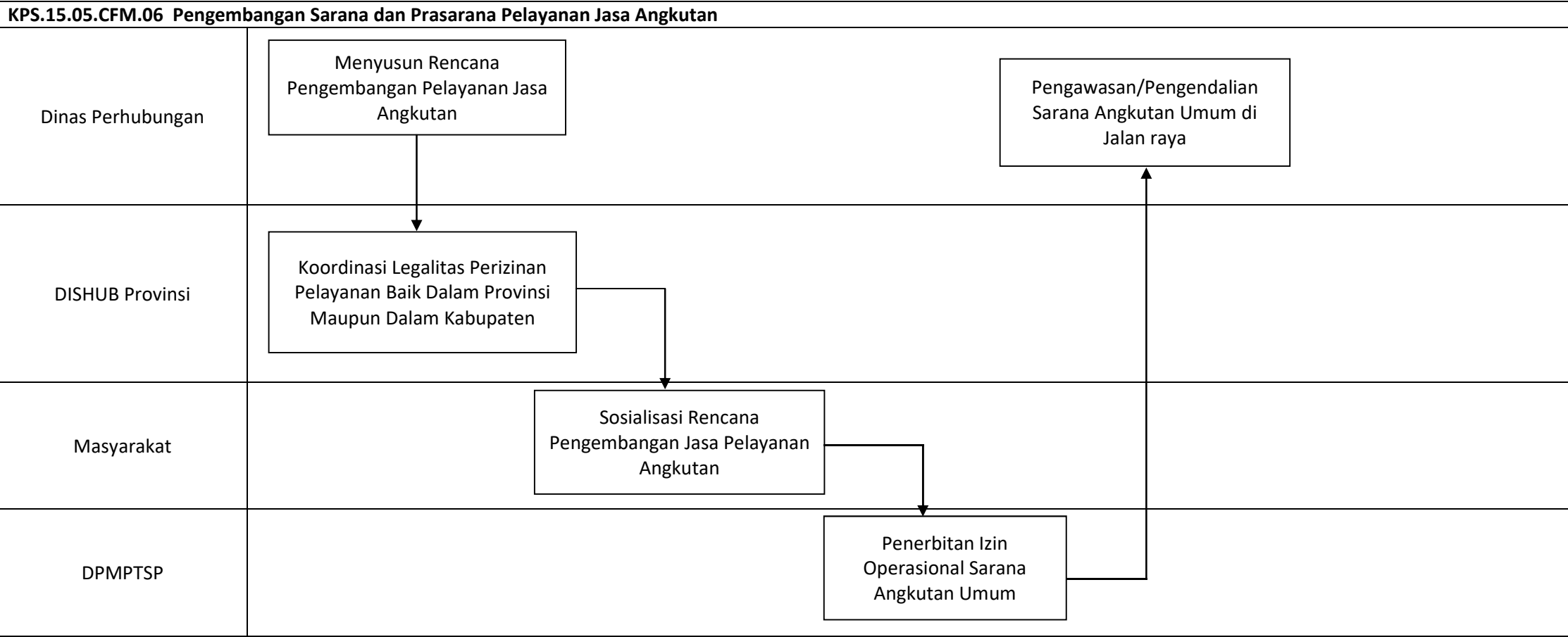
PETA LINTAS FUNGSI



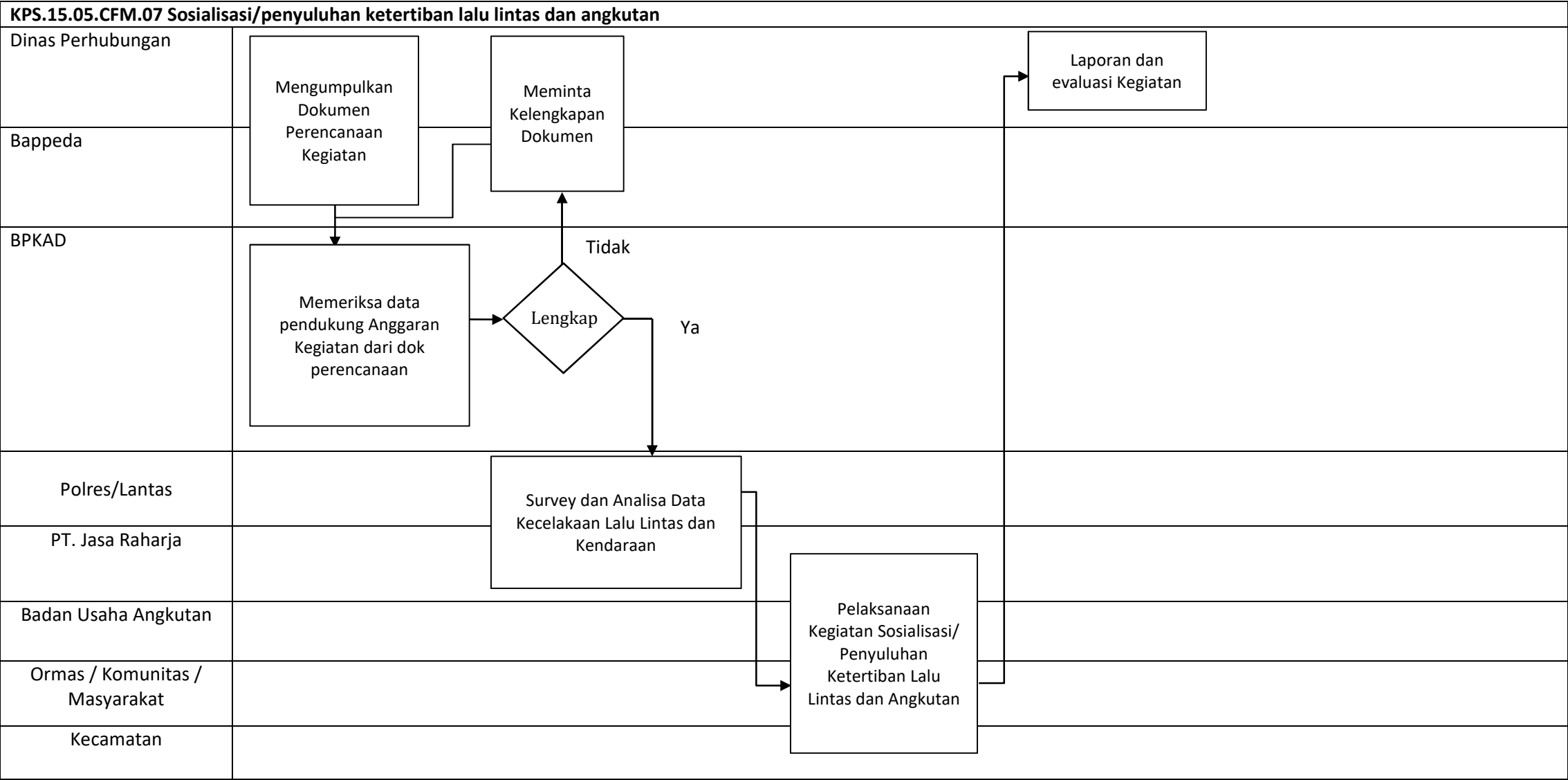
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



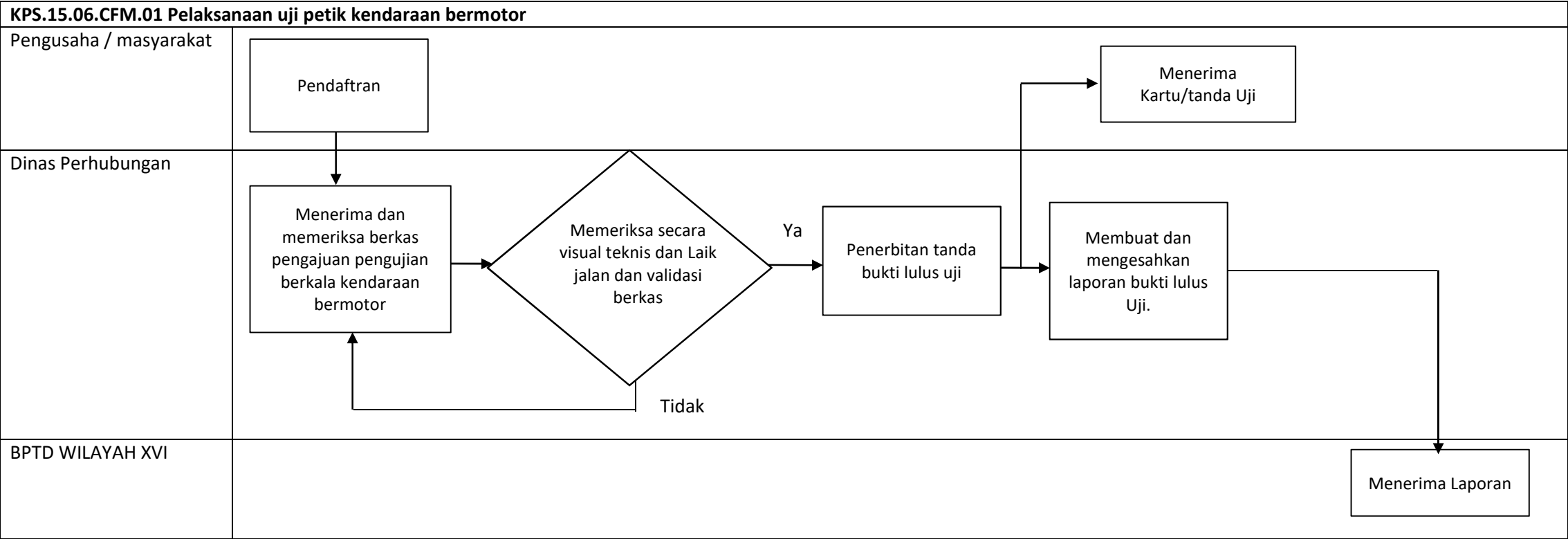
PETA RELASI

KPS.15.05

Peningkatan Pelayanan Angkutan

KPS.15.05.CFM.01 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1. Dinas Perhubungan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Kementrian Pusat/ Instansi Vertikal 5. Badan Usaha Angkutan 6. Ormas/ Komunitas/ Masyarakat	KPS.15.05.CFM.02 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1. Masyarakat 2. Dinas Perhubungan	KPS.15.05.CFM.03 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 1. Dinas Perhubungan 2. Satlantas 3. Satpol PP 4. Organisasi Angkutan Darat (Organda)	KPS.15.05.CFM.04 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perhubungan Provinsi 3. Statistik	KPS.15.05.CFM.05 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perhubungan Provinsi 3. Statistik
KPS.15.05.CFM.06 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1. Dinas Perhubungan 2. DISHUB Provinsi 3. Masyarakat 4. DPMPTSP	KPS.15.05.CFM.07 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1. Dinas Perhubungan 2. Bappeda 3. BPKAD 4. Polres/Lantas 5. PT. Jasa Raharja 6. Badan Usaha Angkutan 7. Ormas / Komunitas / Masyarakat 8. Kecamatan			

PETA LINTAS FUNGSI



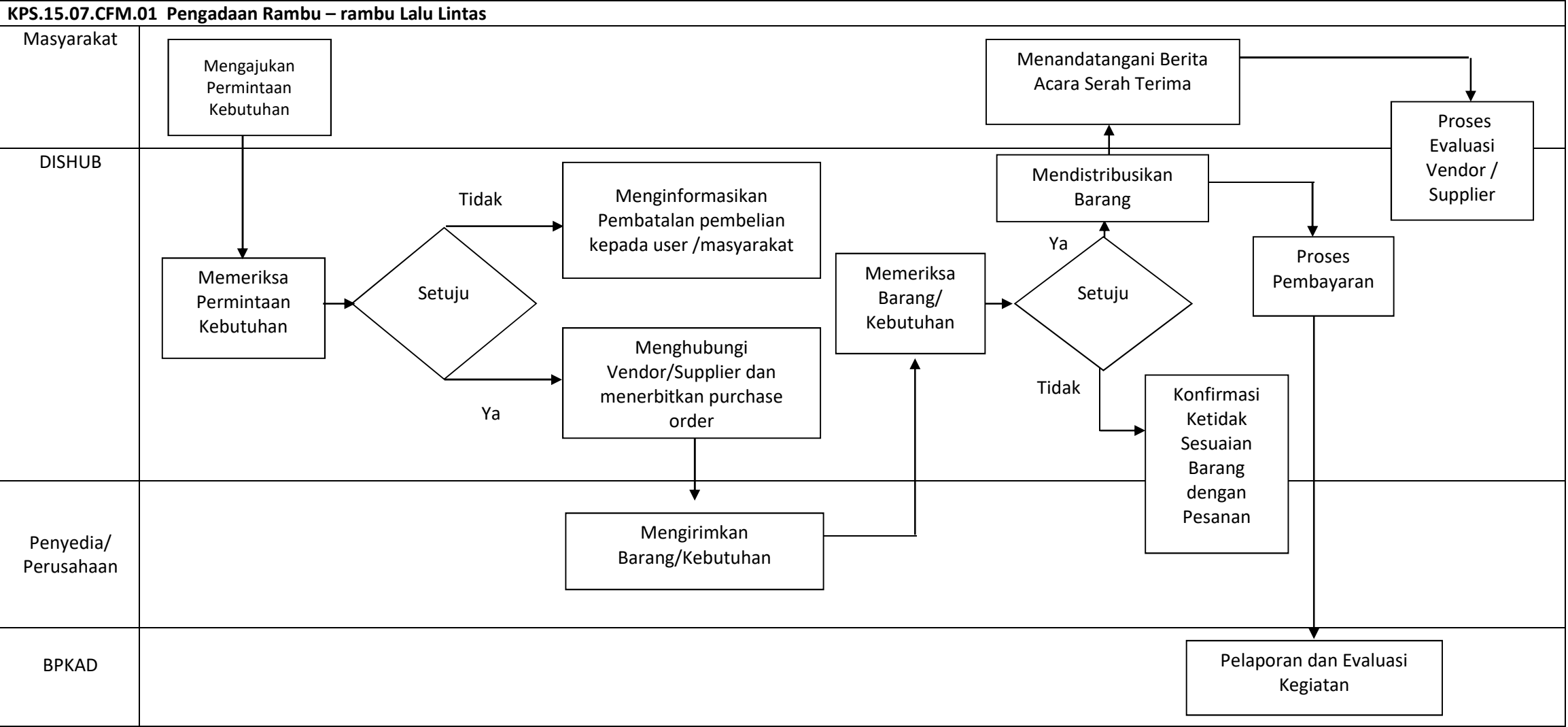
PETA RELASI

KPS.15.06

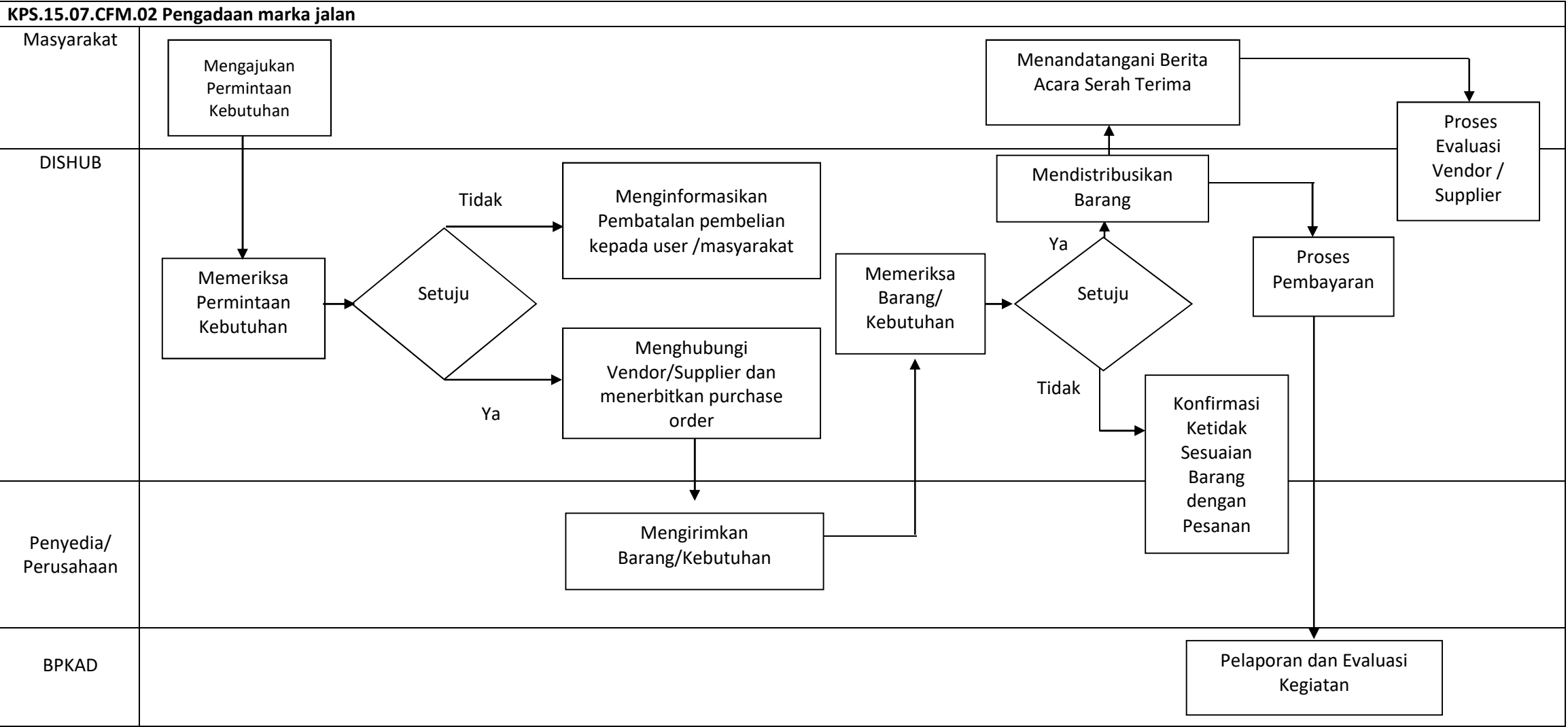
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

KPS.15.06.CFM.01 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1. Pengusaha / masyarakat 2. Dinas Perhubungan 3. BPTD WILAYAH XVI

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

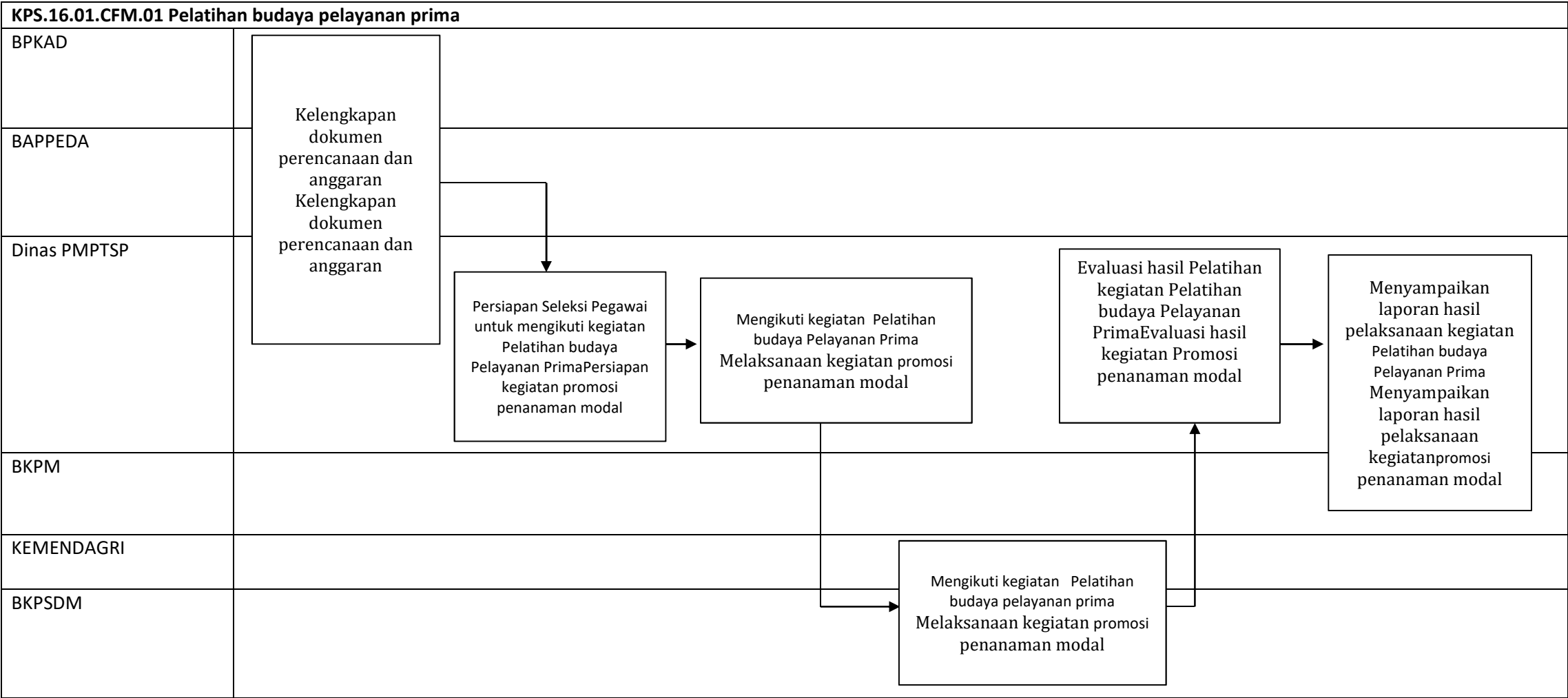
KPS.15.07

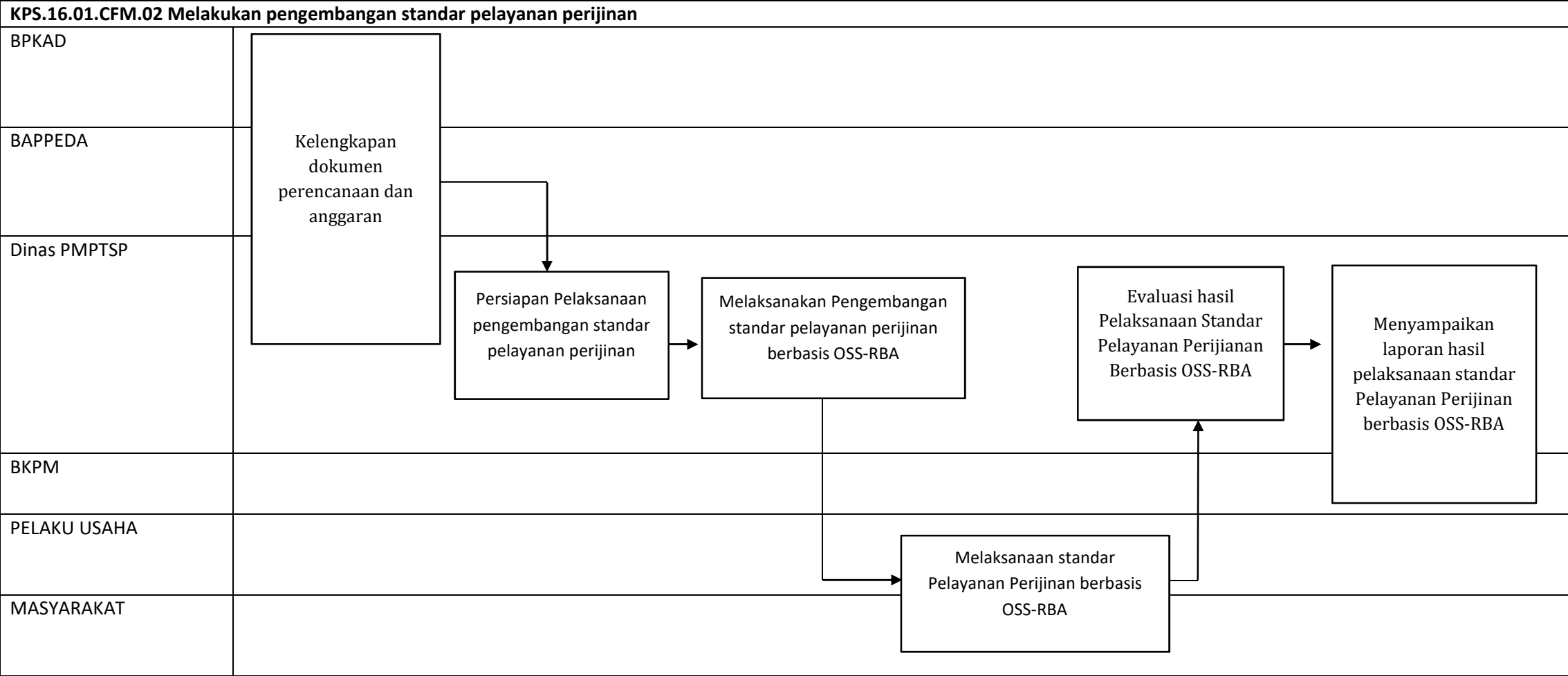
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

KPS.15.07.CFM.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1. Masyarakat 2. DISHUB 3. Penyedia/Perusahaan 4. BPKAD

KPS.15.07.CFM.02 Pengadaan marka jalan
1. Masyarakat 2. DISHUB 3. Penyedia/Perusahaan 4. BPKAD

PETA LINTAS FUNGSI





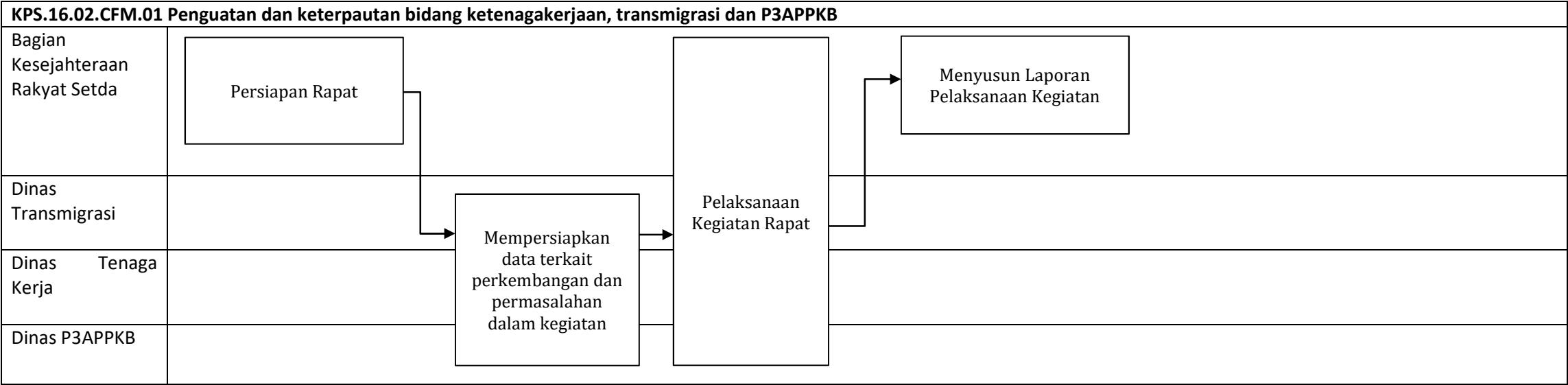
PETA RELASI

KPS.16.01

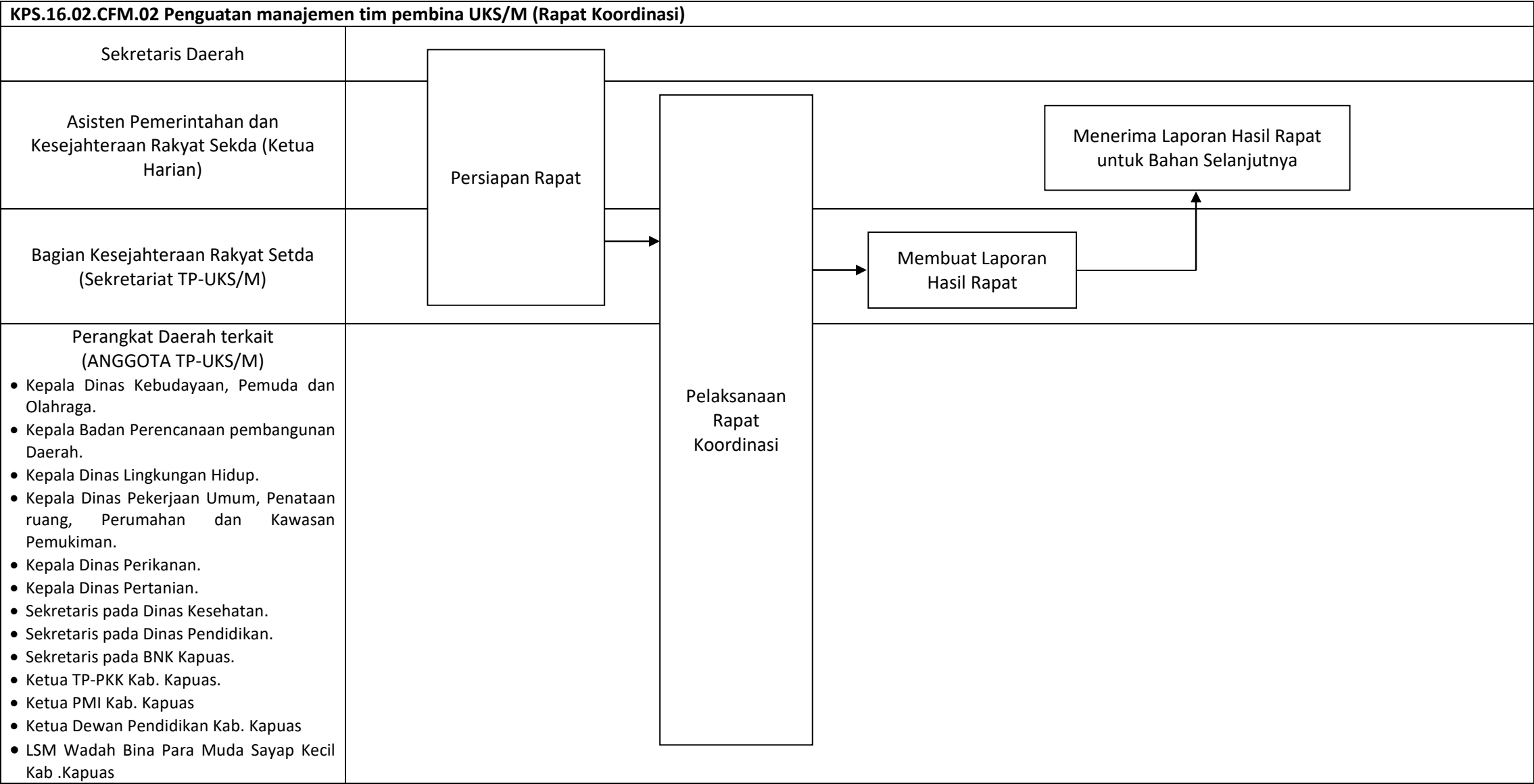
Pengembangan Administrasi Pelayanan

KPS.16.01.CFM.01 Pelatihan budaya pelayanan prima	KPS.16.01.CFM.02 Melakukan pengembangan standar pelayanan perijinan
1. BPKAD 2. BAPPEDA 3. Dinas PMPTSP 4. BKPM 5. KEMENDAGRI 6. BKPSDM	1. BPKAD 2. BAPPEDA 3. Dinas PMPTSP 4. BKPM 5. PELAKU USAHA 6. MASYARAKAT

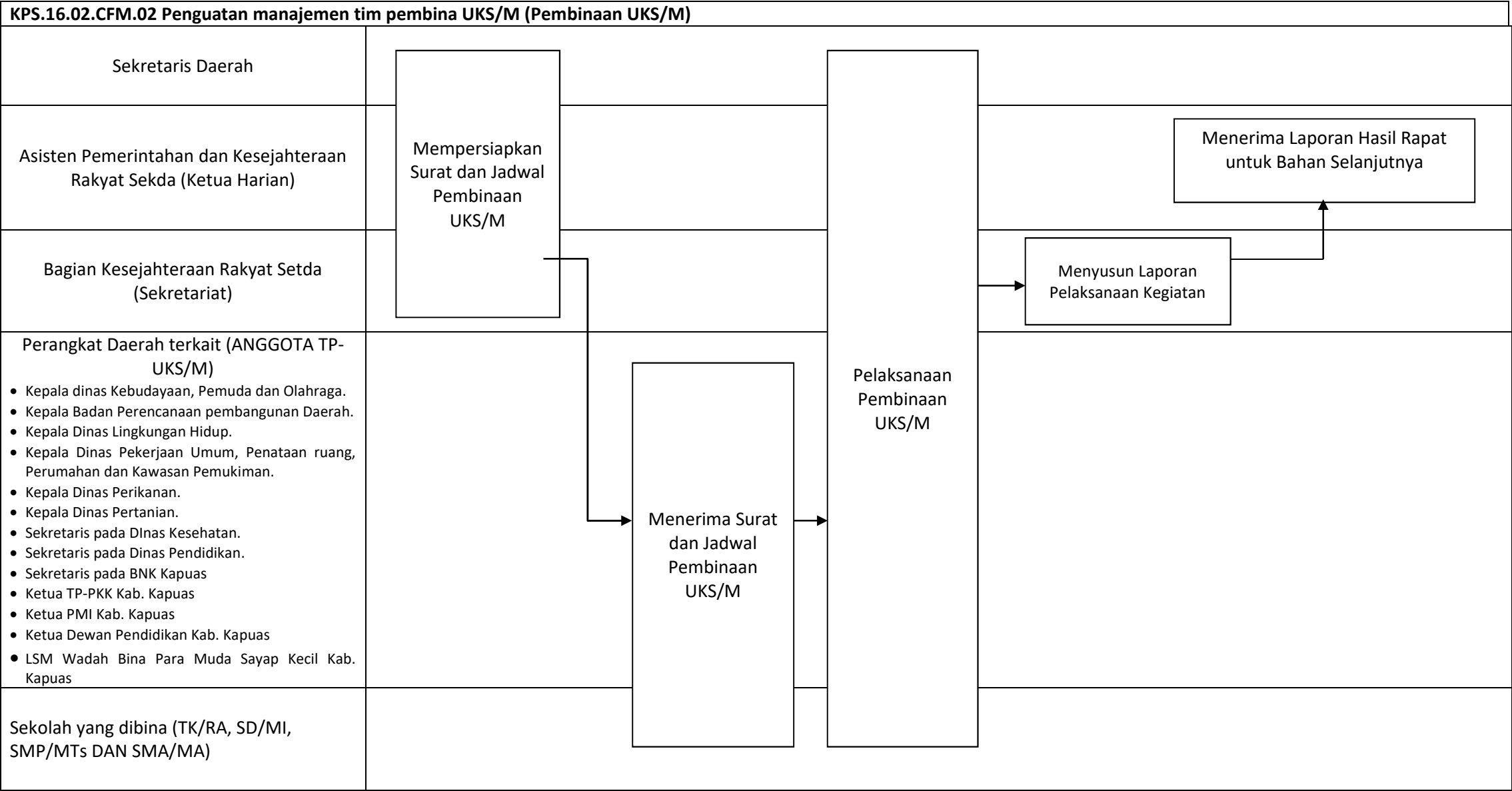
PETA LINTAS FUNGSI



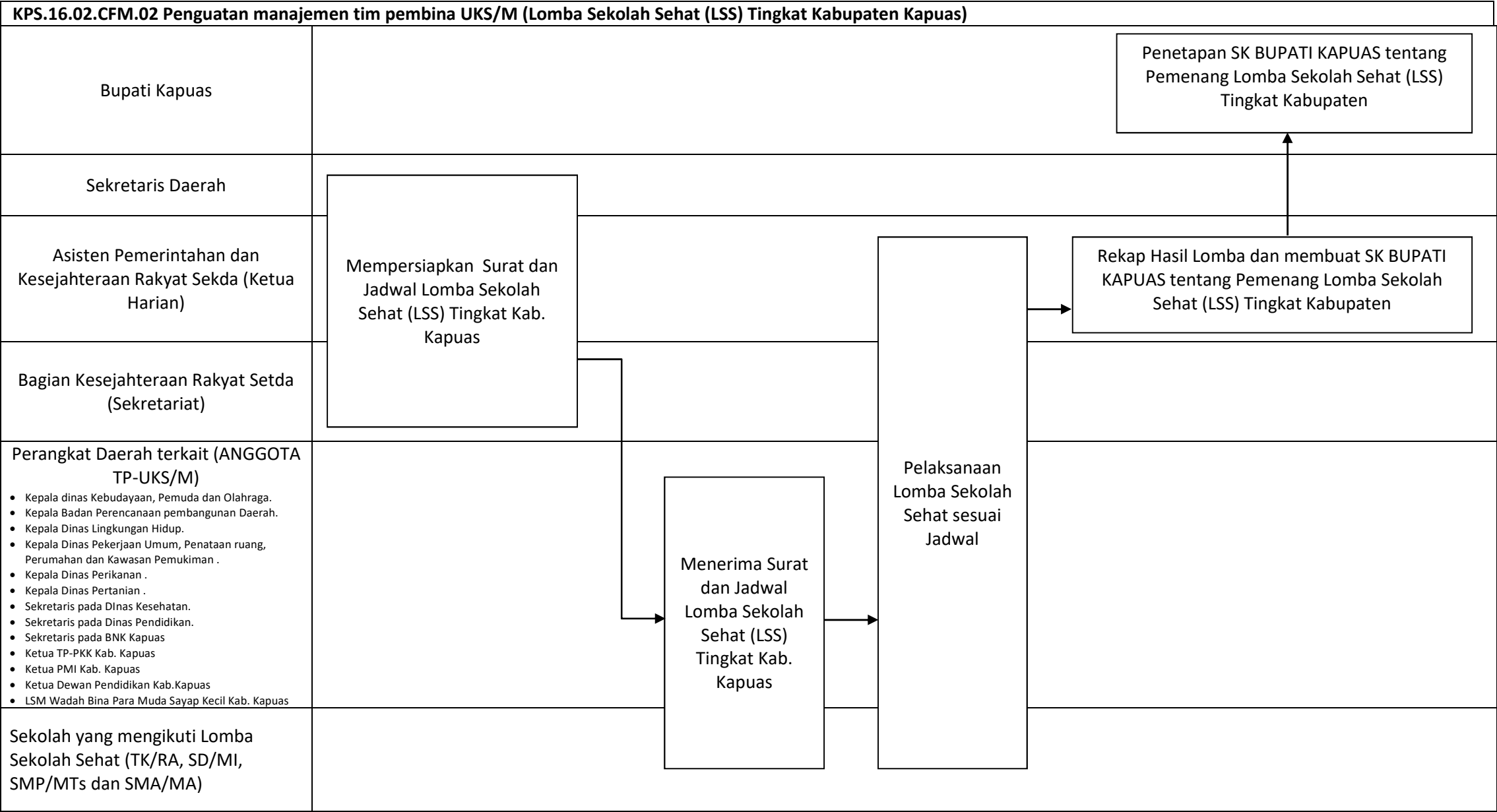
PETA LINTAS FUNGSI



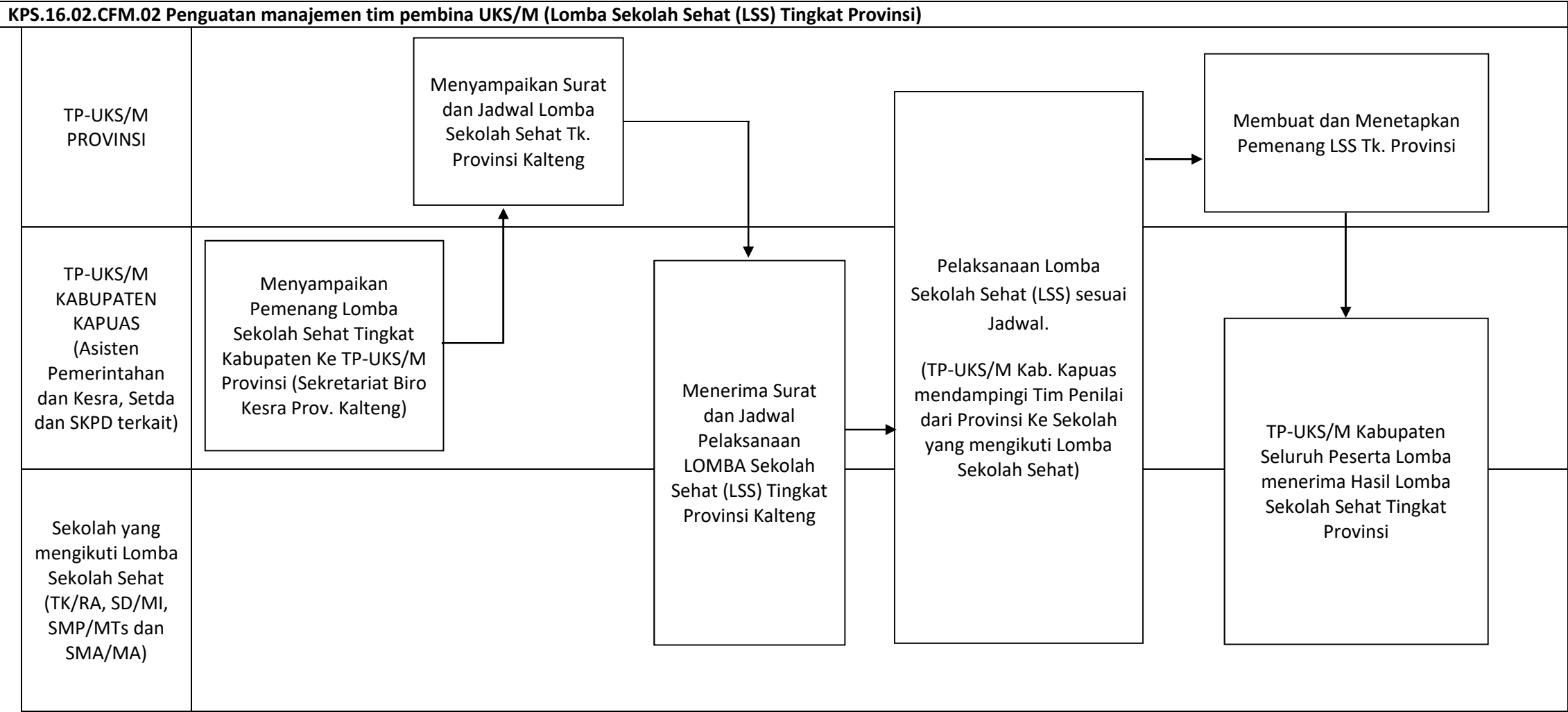
PETA LINTAS FUNGSI



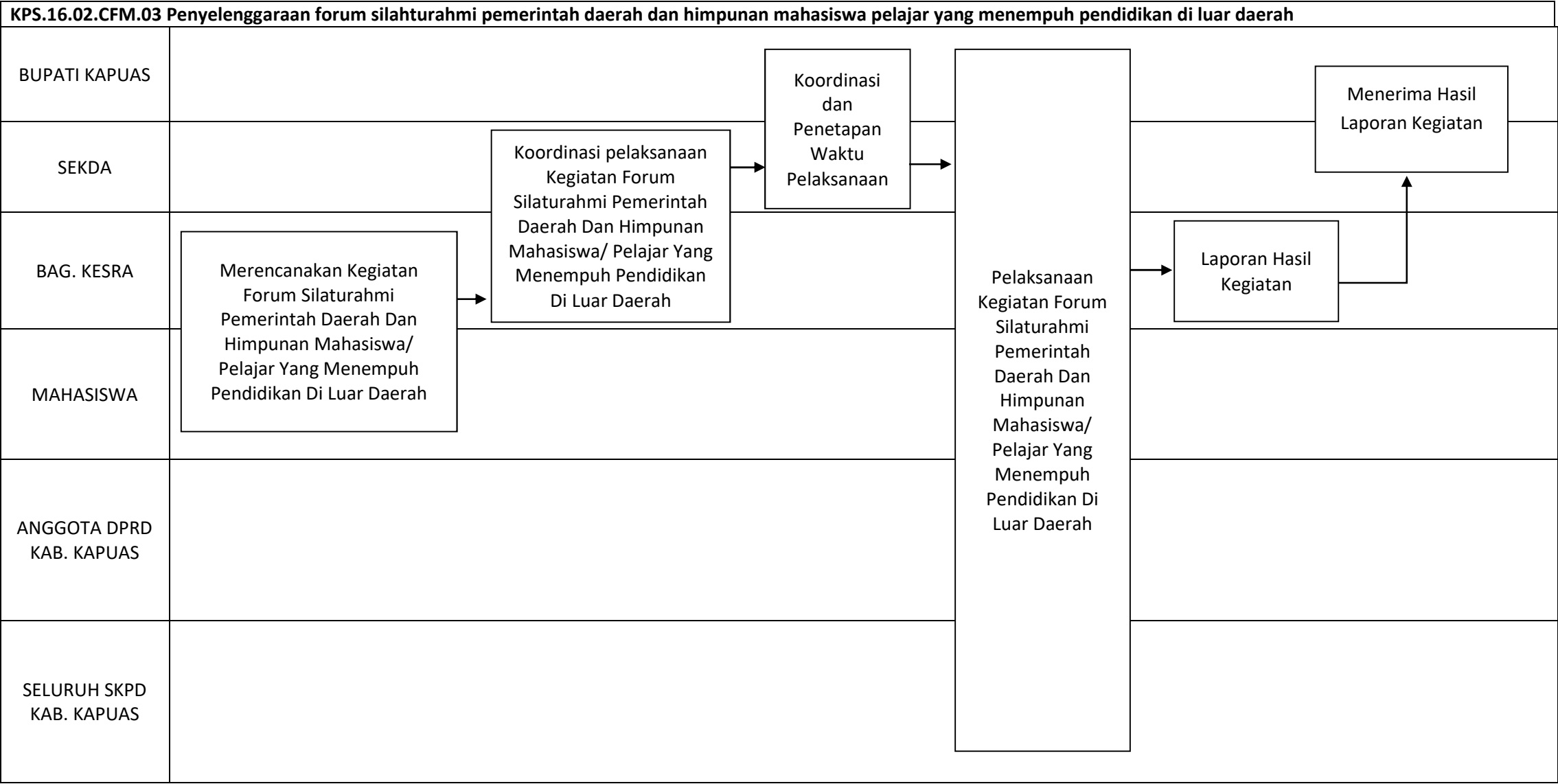
PETA LINTAS FUNGSI



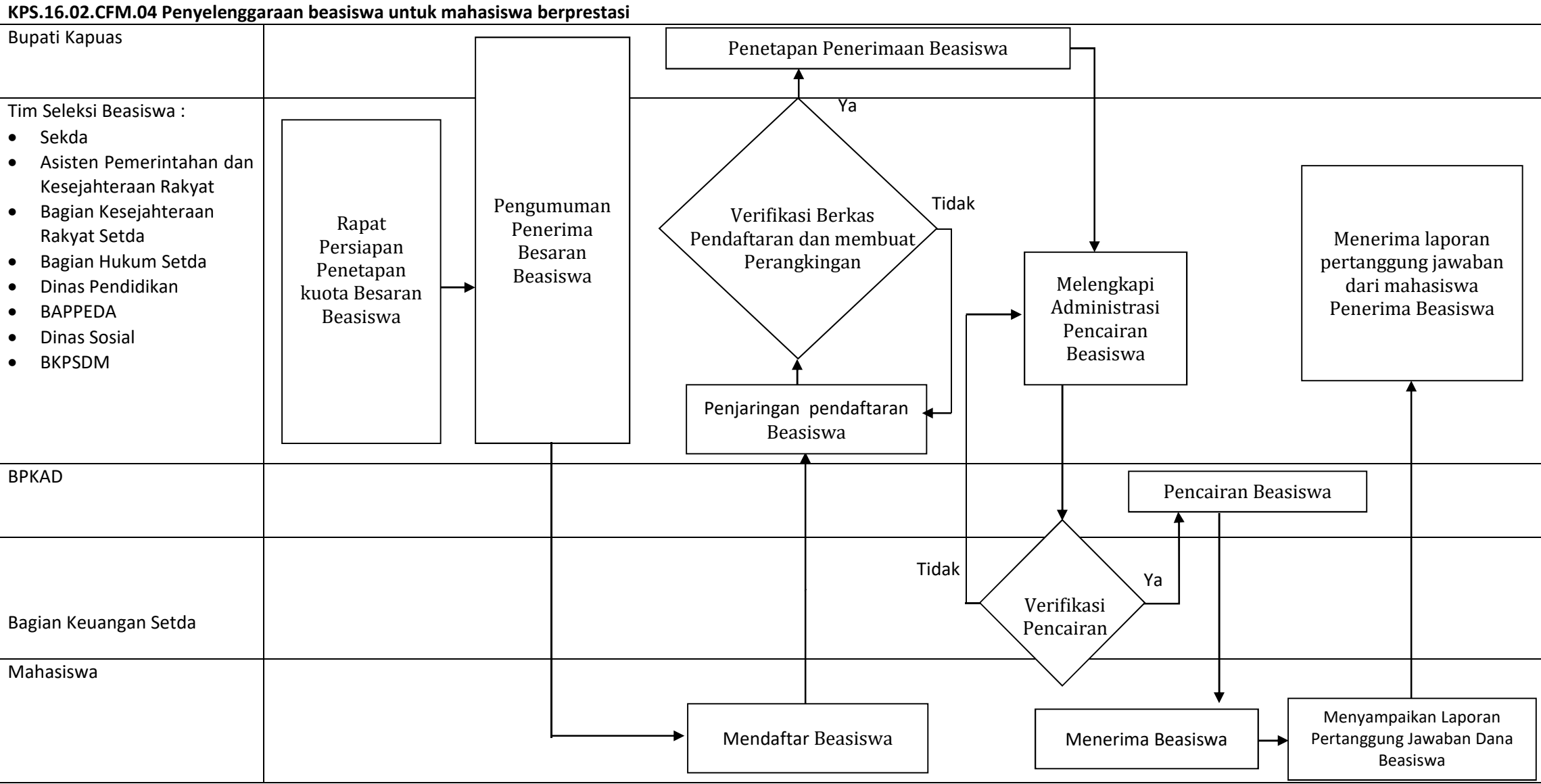
PETA LINTAS FUNGSI



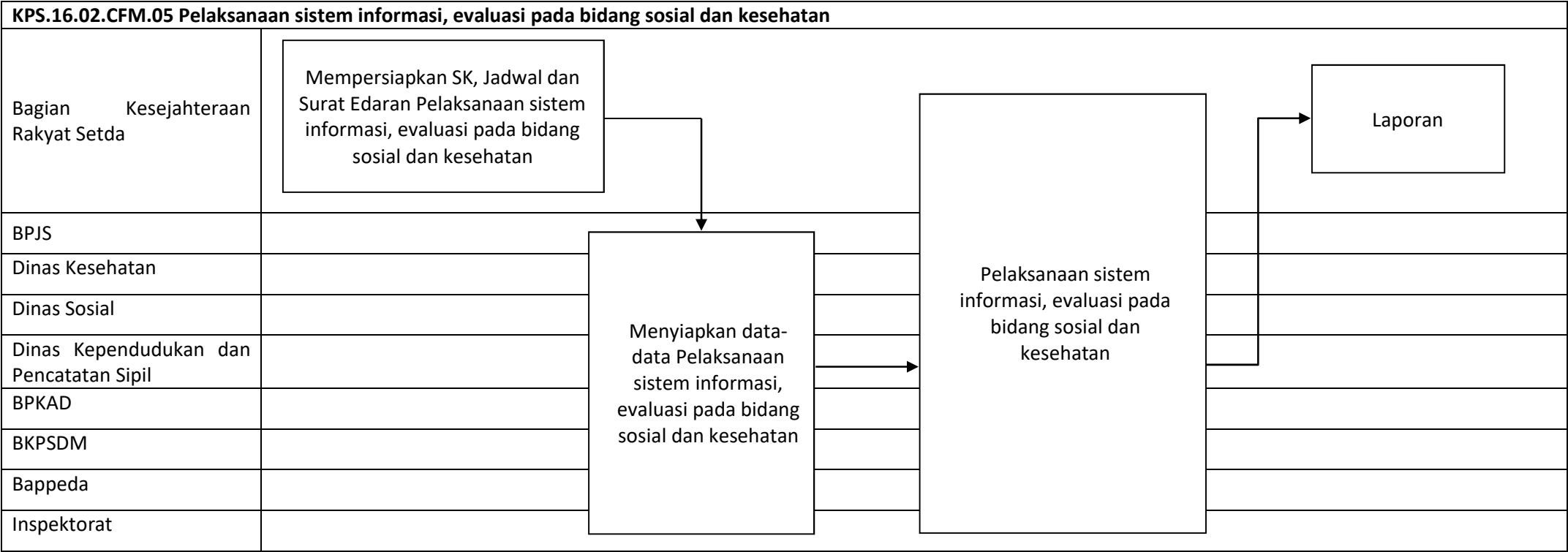
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

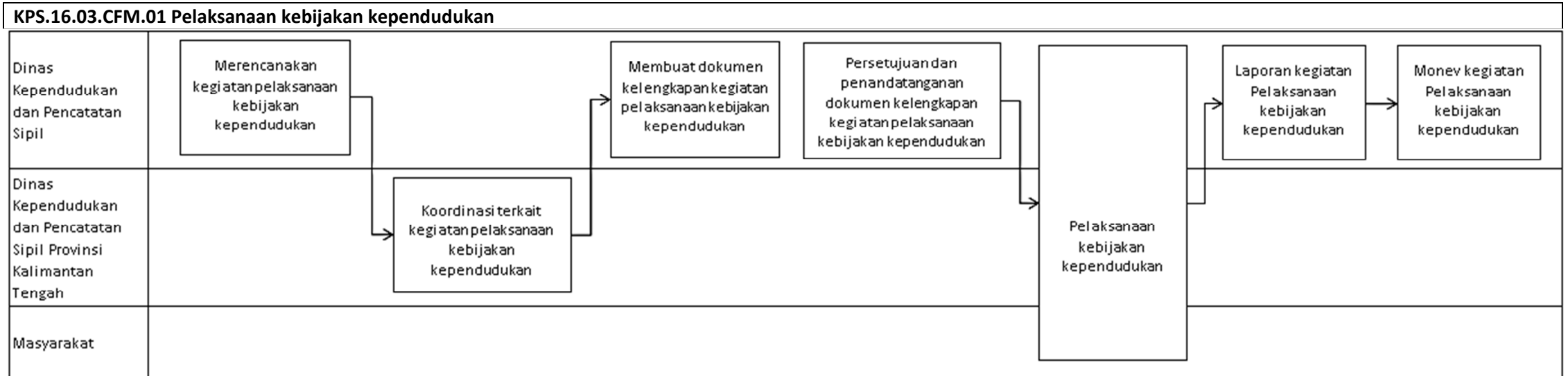
KPS.16.02

Administrasi pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat

KPS.16.02.CFM.01 Penguatan dan keterpautan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan P3APKB	KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Rapat Koordinasi)	KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Pembinaan UKS/M)	KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten Kapuas)	KPS.16.02.CFM.02 Penguatan manajemen tim pembina UKS/M (Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi)
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 2. Dinas Transmigrasi 3. Dinas Tenaga Kerja 4. Dinas P3APKB	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda (Ketua Harian) 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda (Sekretariat TP-UKS/M) 4. Perangkat Daerah terkait (Anggota TP-UKS/M) • Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. • Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah. • Kepala Dinas Lingkungan Hidup. • Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. • Kepala Dinas Perikanan. • Kepala Dinas Pertanian. • Sekretaris pada Dinas Kesehatan. • Sekretaris pada Dinas Pendidikan. • Sekretaris pada BNK Kapuas. • Ketua TP-PKK Kab. Kapuas. • Ketua PMI Kab. Kapuas • Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kapuas • LSM Wadah Bina Para Muda Sayap Kecil Kab .Kapuas	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda (Ketua Harian) 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda (Sekretariat) 4. Perangkat Daerah terkait (Anggota-UKS/M) • Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. • Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah. • Kepala Dinas Lingkungan Hidup. • Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. • Kepala Dinas Perikanan. • Kepala Dinas Pertanian. • Sekretaris pada Dinas Kesehatan. • Sekretaris pada Dinas Pendidikan. • Sekretaris pada BNK Kapuas • Ketua TP-PKK Kab. Kapuas • Ketua PMI Kab. Kapuas • Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kapuas • LSM Wadah Bina Para Muda Sayap Kecil Kab. Kapuas 5. Sekolah yang dibina (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA)	1. Bupati Kapuas 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda (Ketua Harian) 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda (Sekretariat) 5. Perangkat Daerah terkait (Anggota-UKS/M) • Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. • Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah. • Kepala Dinas Lingkungan Hidup. • Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman • Kepala Dinas Perikanan . • Kepala Dinas Pertanian . • Sekretaris pada Dinas Kesehatan. • Sekretaris pada Dinas Pendidikan. • Sekretaris pada BNK Kapuas • Ketua TP-PKK Kab. Kapuas • Ketua PMI Kab. Kapuas • Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kapuas • LSM Wadah Bina Para Muda Sayap Kecil Kab. Kapuas 6. Sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA)	1. TP-UKS/M PROVINSI 2. TP-UKS/M KABUPATEN KAPUAS (Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda dan SKPD terkait) 3. Sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA)

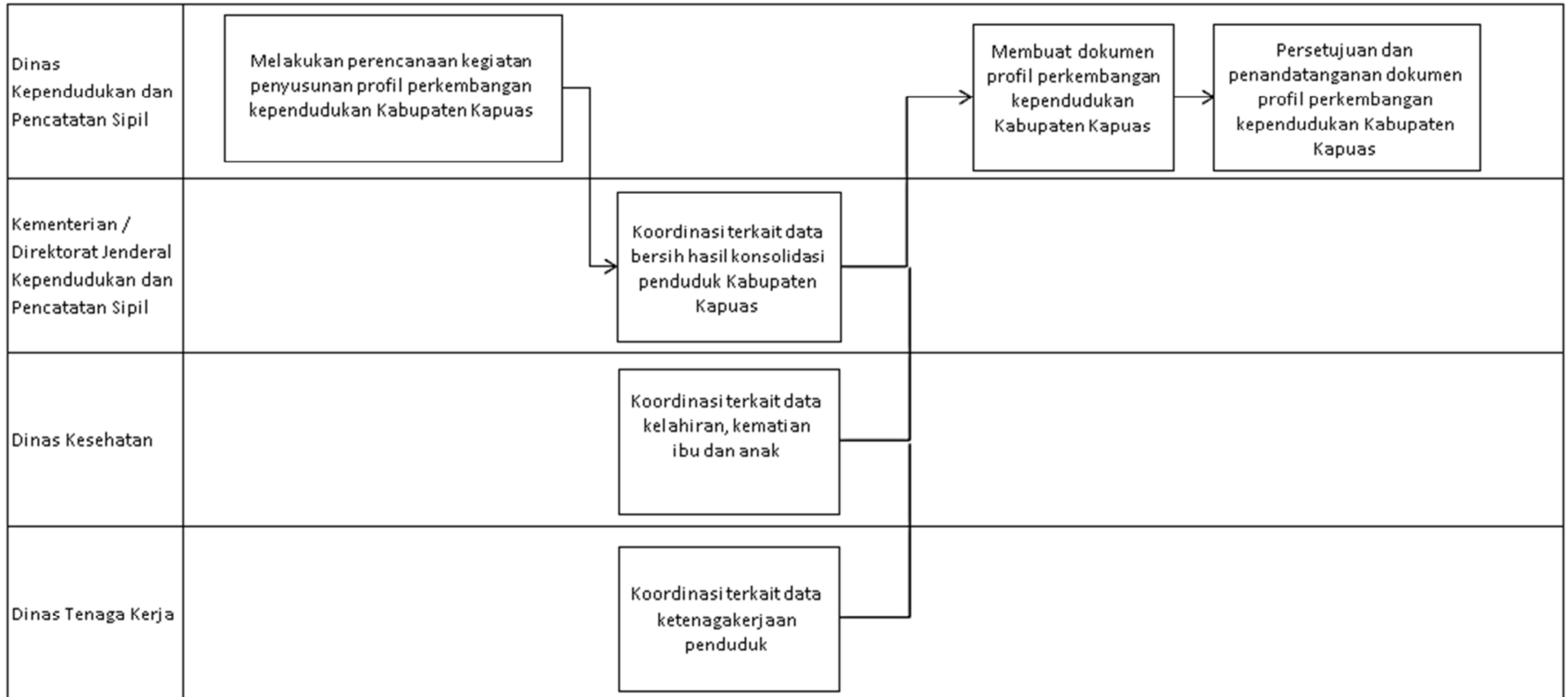
KPS.16.02.CFM.03 Penyelenggaraan forum silaturahmi pemerintah daerah dan himpunan mahasiswa pelajar yang menempuh pendidikan di luar daerah	KPS.16.02.CFM.04 Penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	KPS.16.02.CFM.05 Pelaksanaan sistem informasi, evaluasi pada bidang sosial dan kesehatan
1. Bupati Kapuas 2. Sekretaris Dareah 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 4. Mahasiswa 5. Anggota DPRD Kab. Kapuas 6. Seluruh SKPD Kab. Kapuas	1. Bupati Kapuas 2. Tim Seleksi Beasiswa : • Sekda • Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pendidikan • BAPPEDA • Dinas Sosial • BKPSDM 3. BPKAD 4. Bagian Keuangan Setda 5. Mahasiswa	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 2. BPJS 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. BPKAD 7. BKPSDM 8. Bappeda 9. Inspektorat

PETA LINTAS FUNGSI

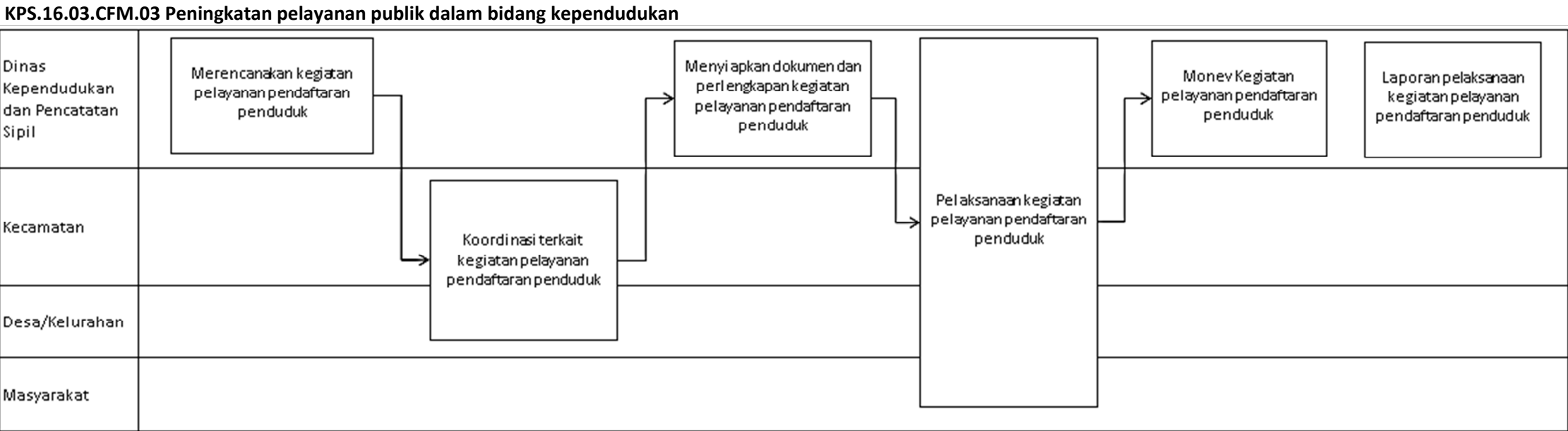


PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.02 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

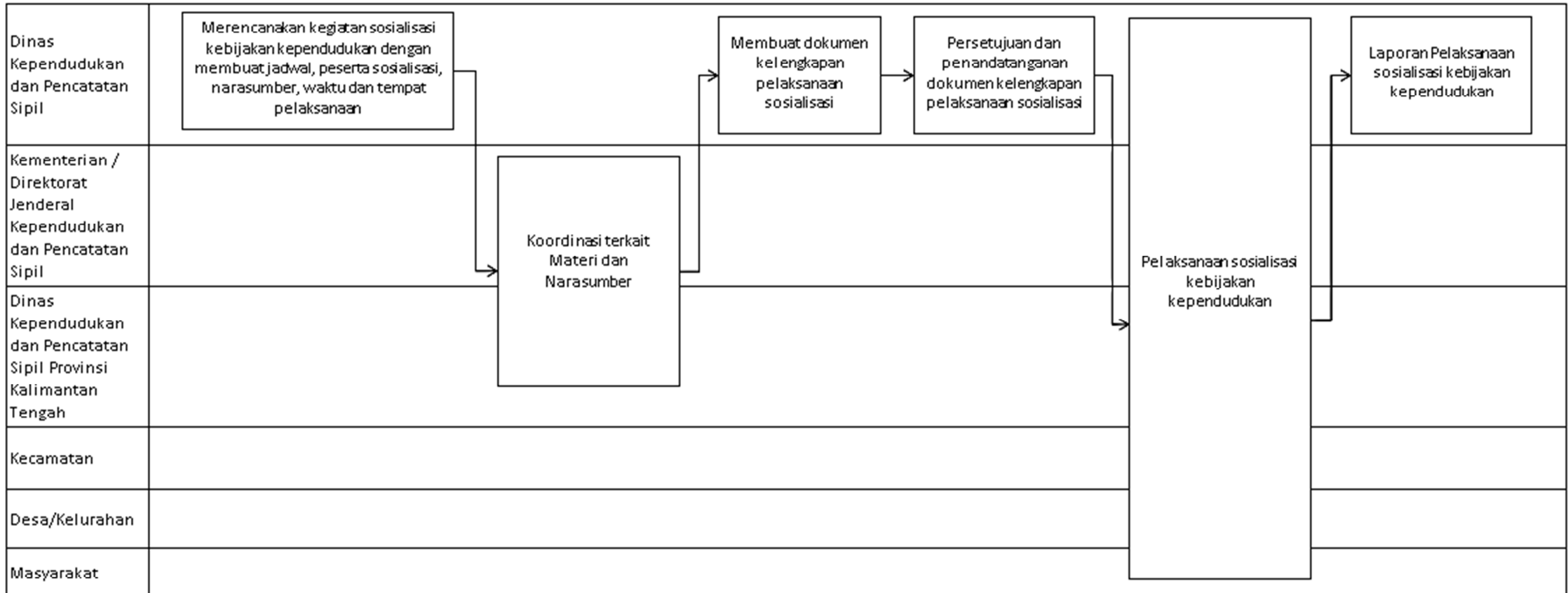


PETA LINTAS FUNGSI

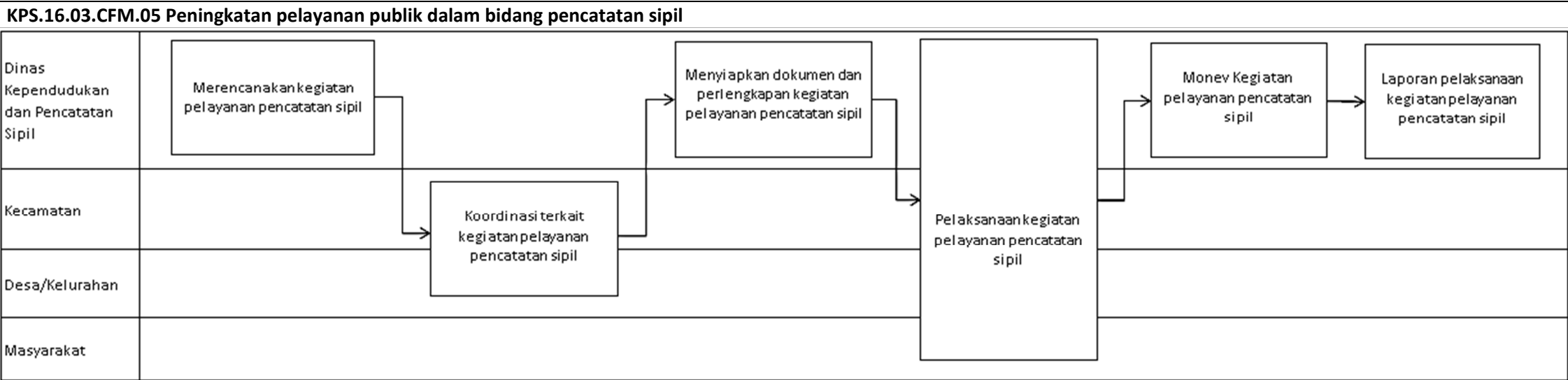


PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.03.CFM.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan



PETA LINTAS FUNGSI

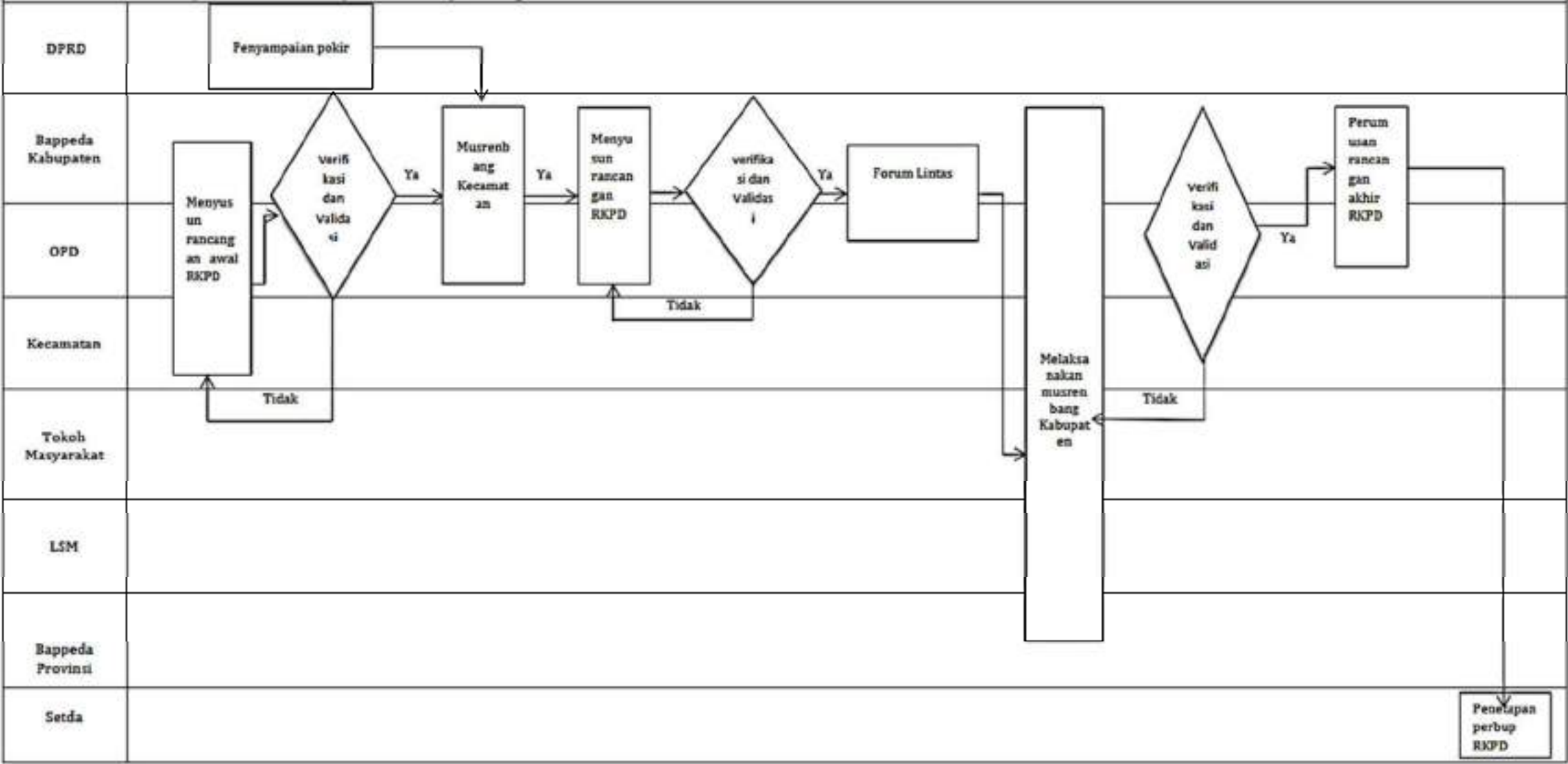


PETA RELASI

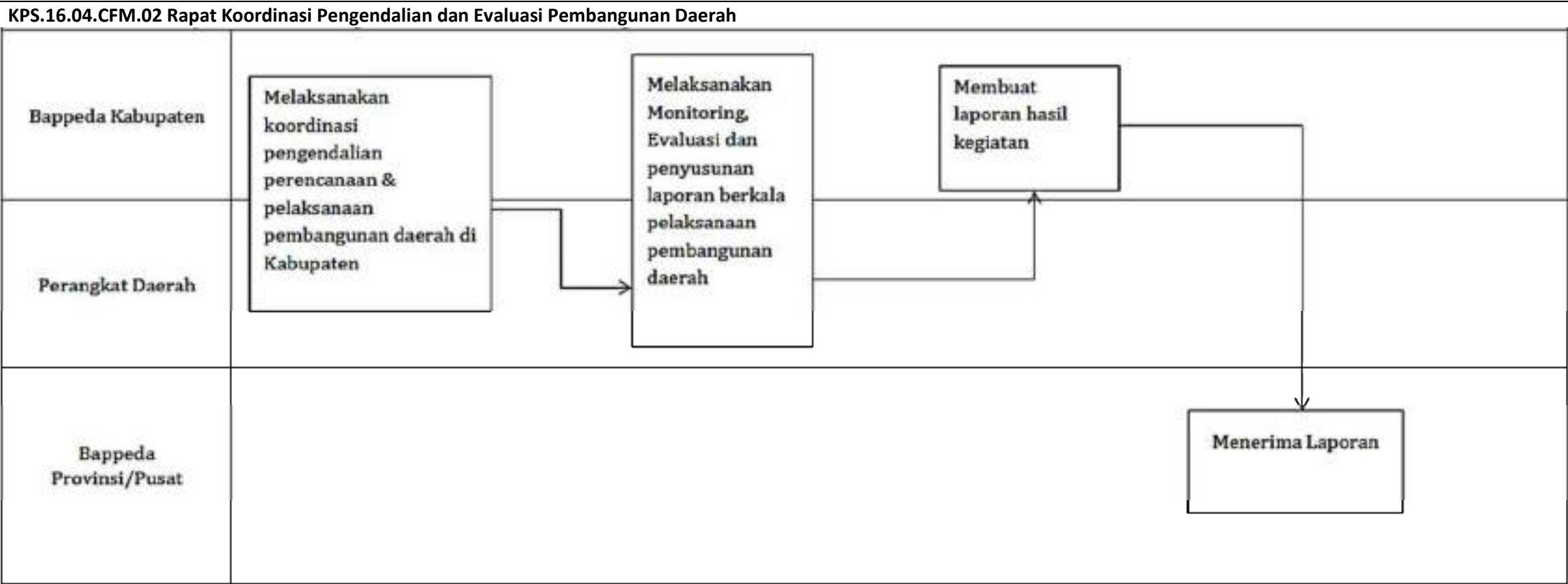
KPS.16.03 Penataan administrasi kependudukan				
KPS.16.03.CFM.01 Pelaksanaan kebijakan kependudukan	KPS.16.03.CFM.02 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	KPS.16.03.CFM.03 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	KPS.16.03.CFM.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan	KPS.16.03.CFM.05 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah 3. Masyarakat	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kementerian / Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Tenaga Kerja	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kecamatan 3. Desa/Kelurahan 4. Masyarakat	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kementerian / Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah 4. Kecamatan 5. Desa/Kelurahan 6. Masyarakat	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kecamatan 3. Desa/Kelurahan 4. Masyarakat

PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.04.CFM.01 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah



PETA LINTAS FUNGSI



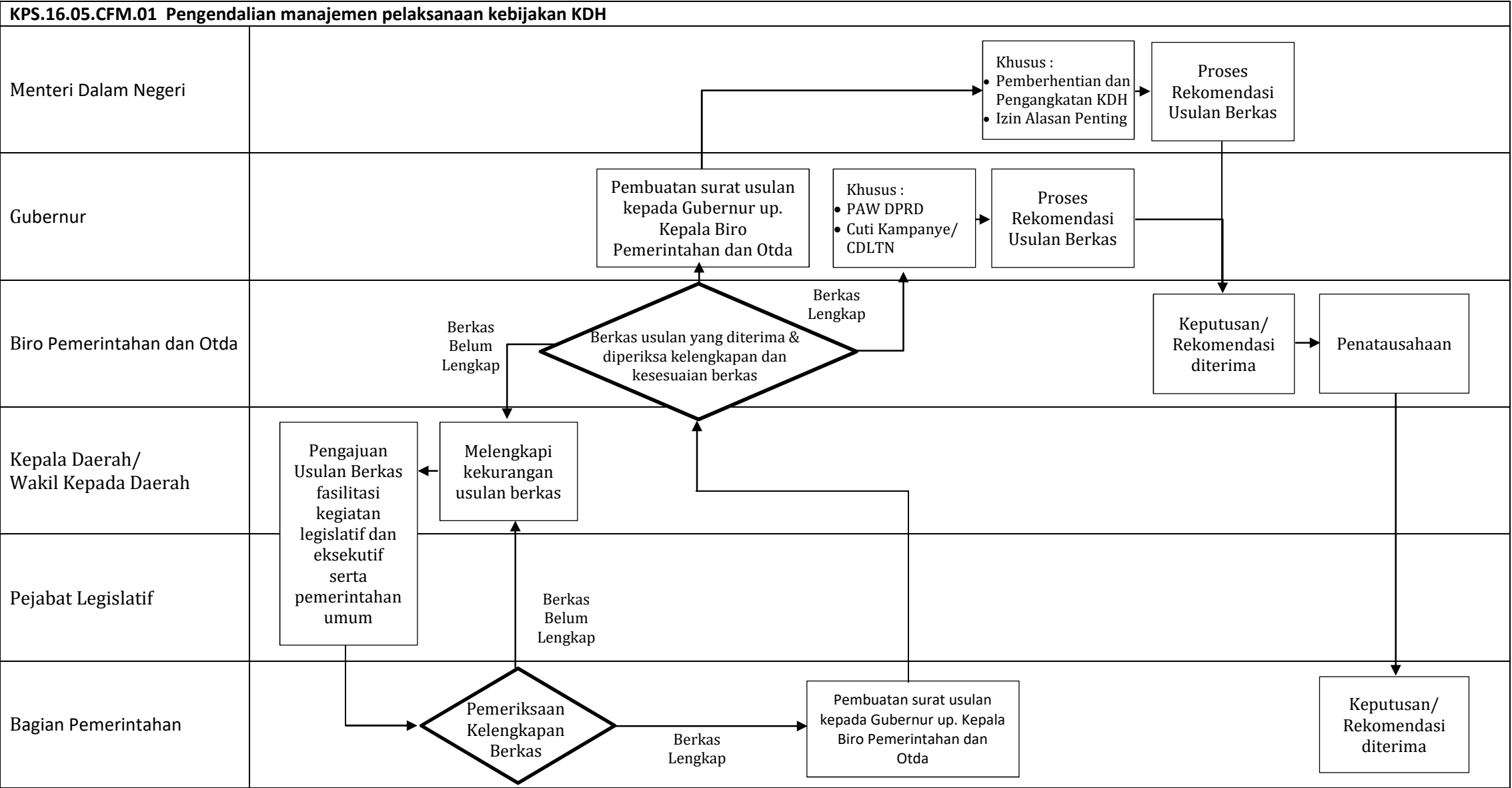
PETA RELASI

KPS.16.04

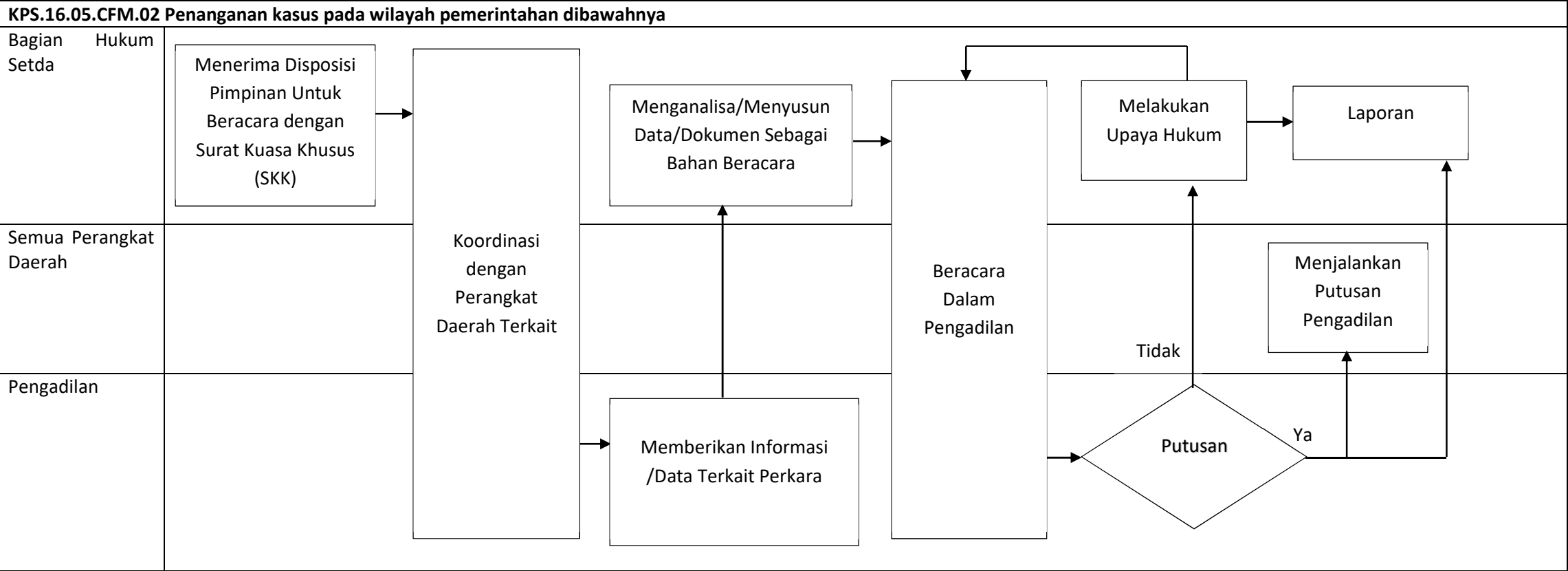
Perencanaan Pembangunan Daerah

KPS.16.04.CFM.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	KPS.16.04.CFM.02 Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1. DPRD 2. Bappeda Kabupaten 3. OPD 4. Kecamatan 5. Tokoh Masyarakat 6. LSM 7. Bappeda Provinsi 8. Setda	1. Bappeda Kabupaten 2. Perangkat Daerah 3. Bappeda Provinsi/Pusat

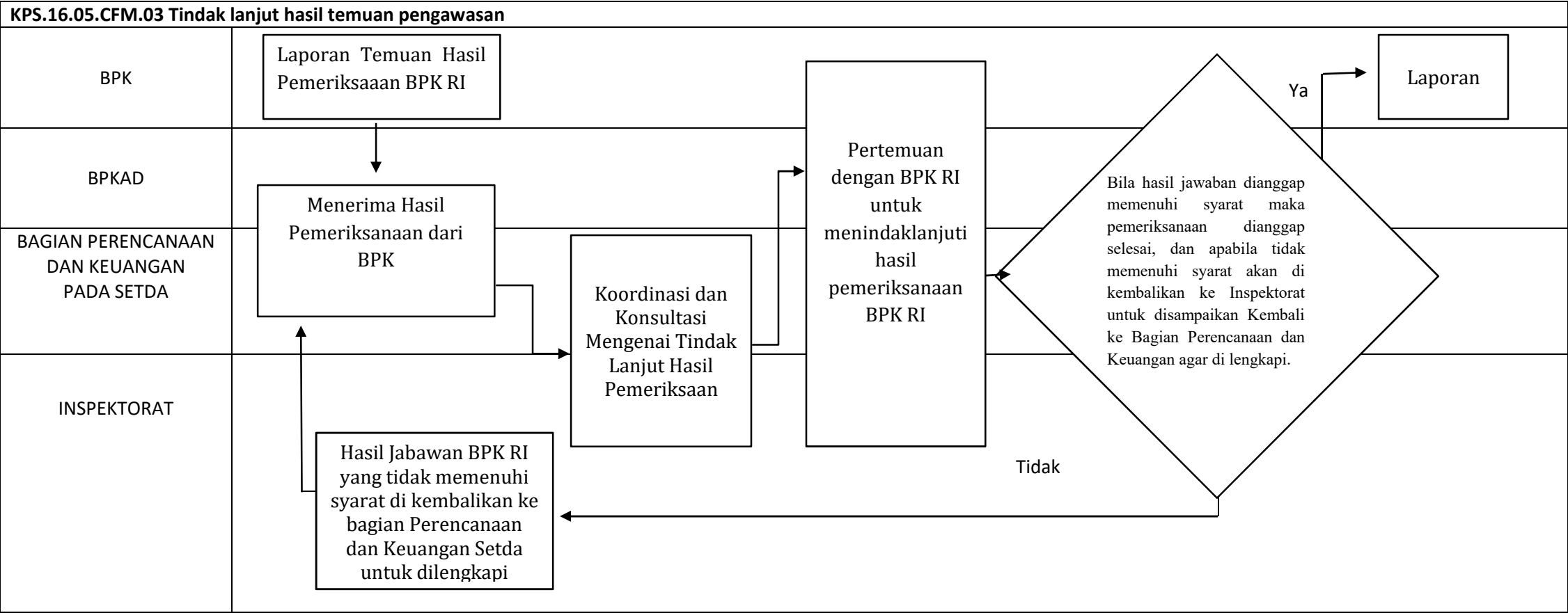
PETA LINTAS FUNGSI



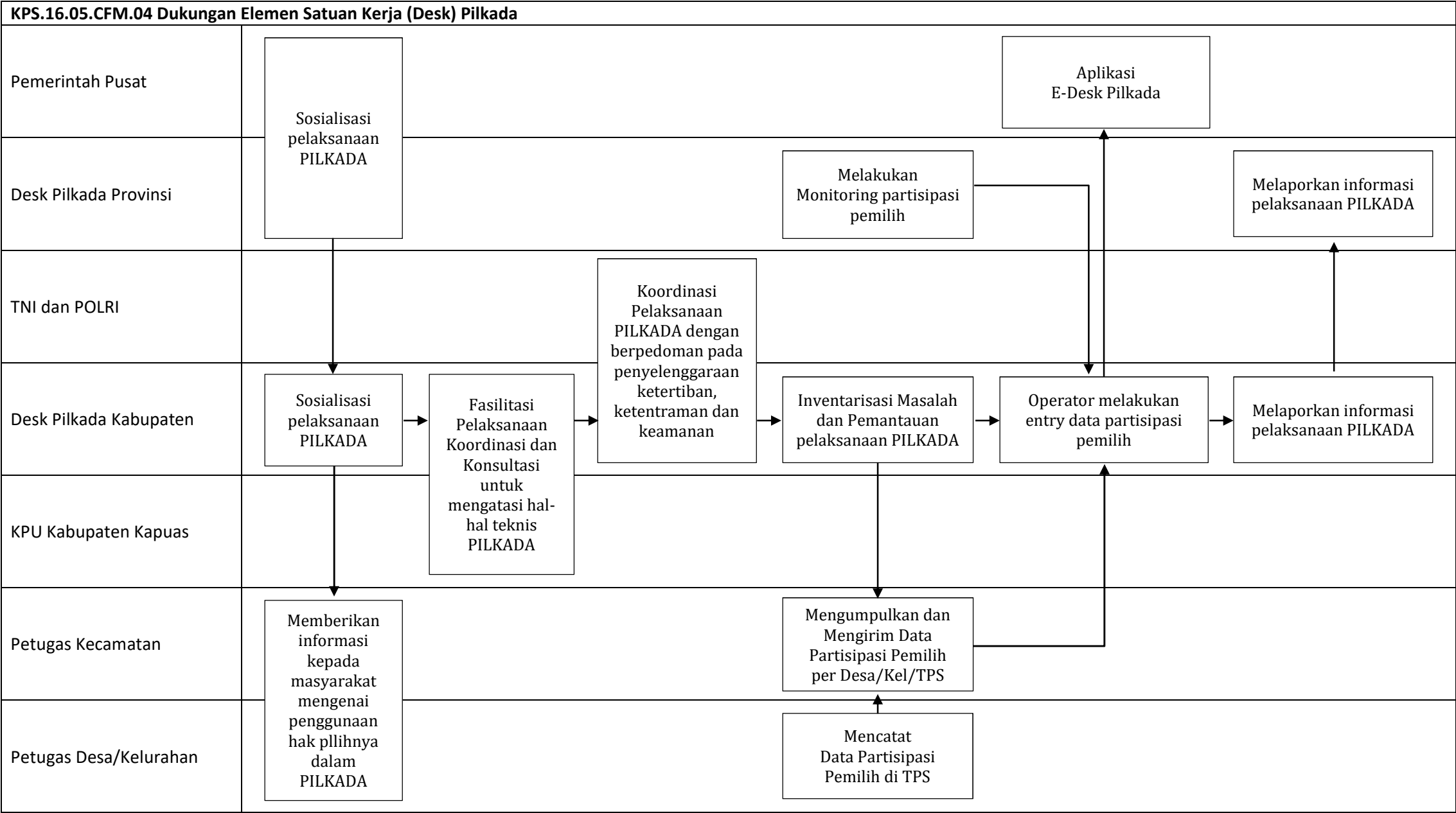
PETA LINTAS FUNGSI



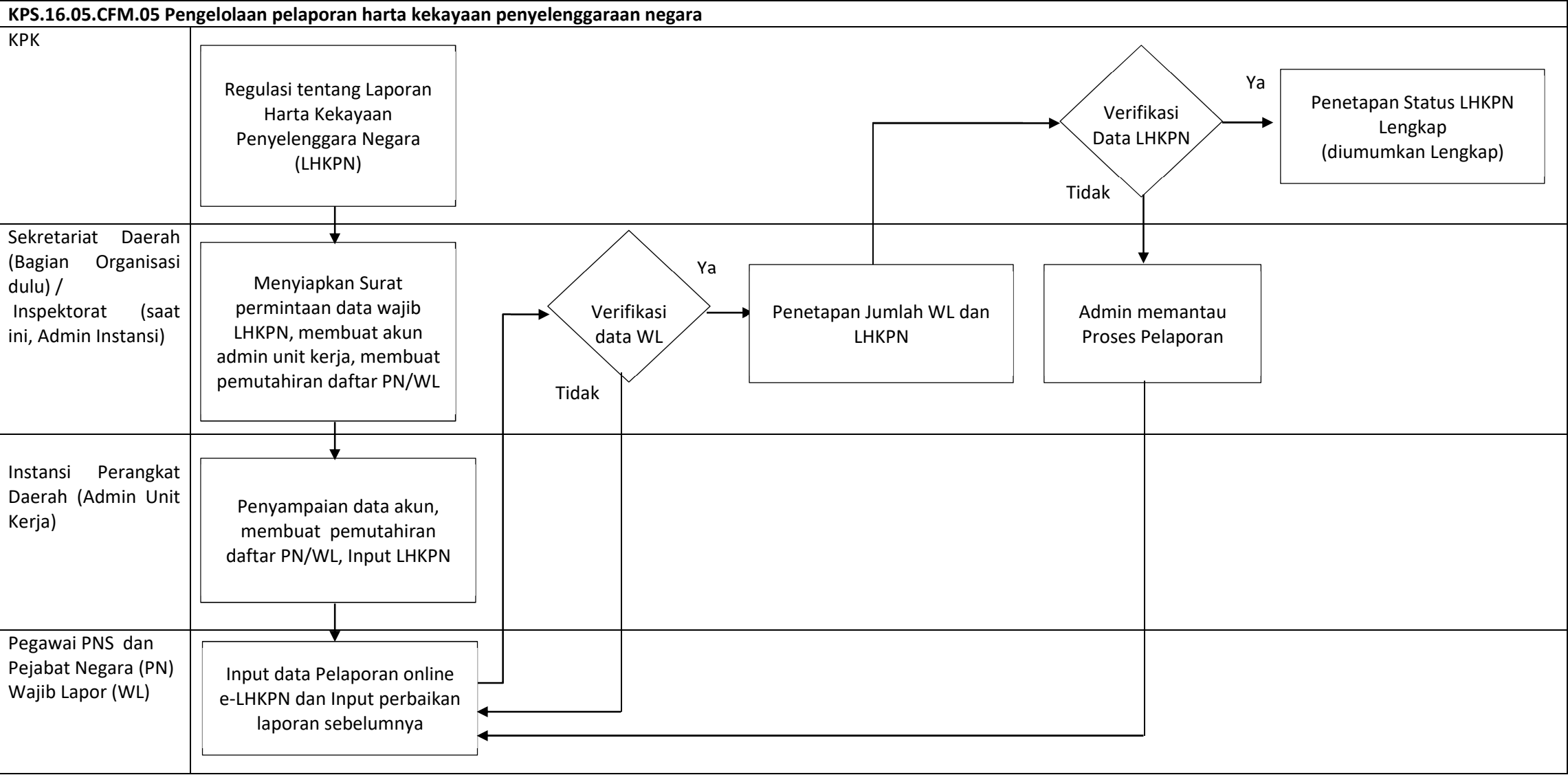
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



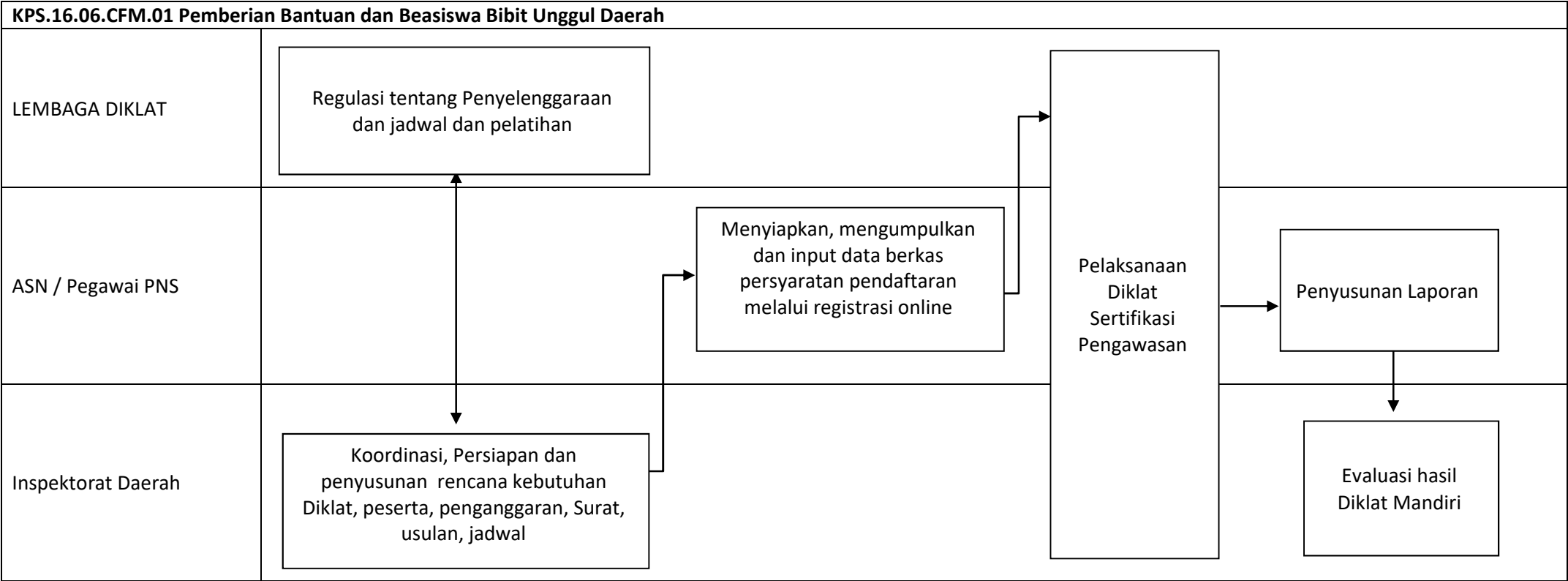
PETA LINTAS FUNGSI



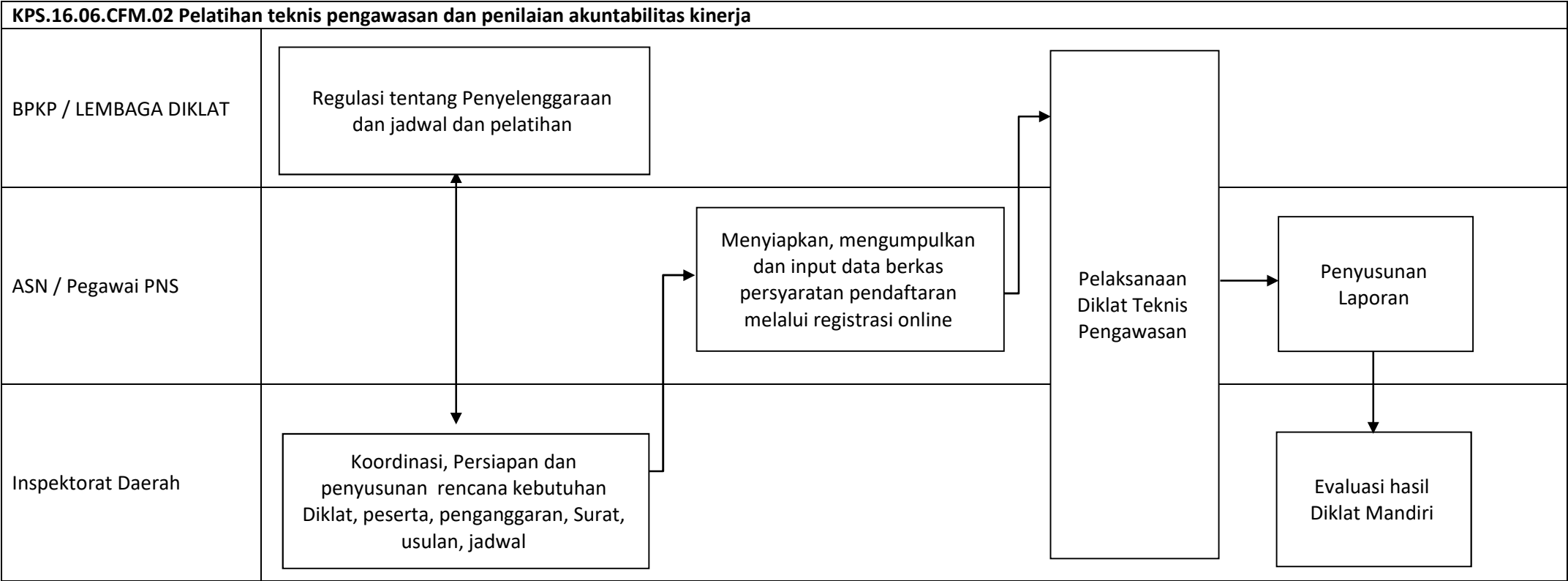
PETA RELASI

KPS.16.05 Peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH				
KPS.16.05.CFM.01 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	KPS.16.05.CFM.02 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	KPS.16.05.CFM.03 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	KPS.16.05.CFM.04 Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada	KPS.16.05.CFM.05 Pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
1. Menteri Dalam Negeri 2. Gubernur 3. Biro Pemerintahan dan Otda 4. Kepala Daerah/ 5. Wakil Kepada Daerah 6. Pejabat Legislatif 7. Bagian Pemerintahan	1. Bagian Hukum Setda 2. Semua Perangkat Daerah 3. Pengadilan	1. BPK 2. BPKAD 3. Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Setda 4. Inspektorat	1. Pemerintah Pusat 2. Desk Pilkada Provinsi 3. TNI dan POLRI 4. Desk Pilkada Kabupaten 5. KPU Kabupaten Kapuas 6. Petugas Kecamatan 7. Petugas Desa/Kelurahan	1. KPK 2. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dulu) /n Inspektorat (saat ini, Admin Instansi) 3. Instansi Perangkat Daerah (Admin Unit Kerja) 4. Pegawai PNS dan Pejabat Negara (PN) Wajib Lapor (WL)

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



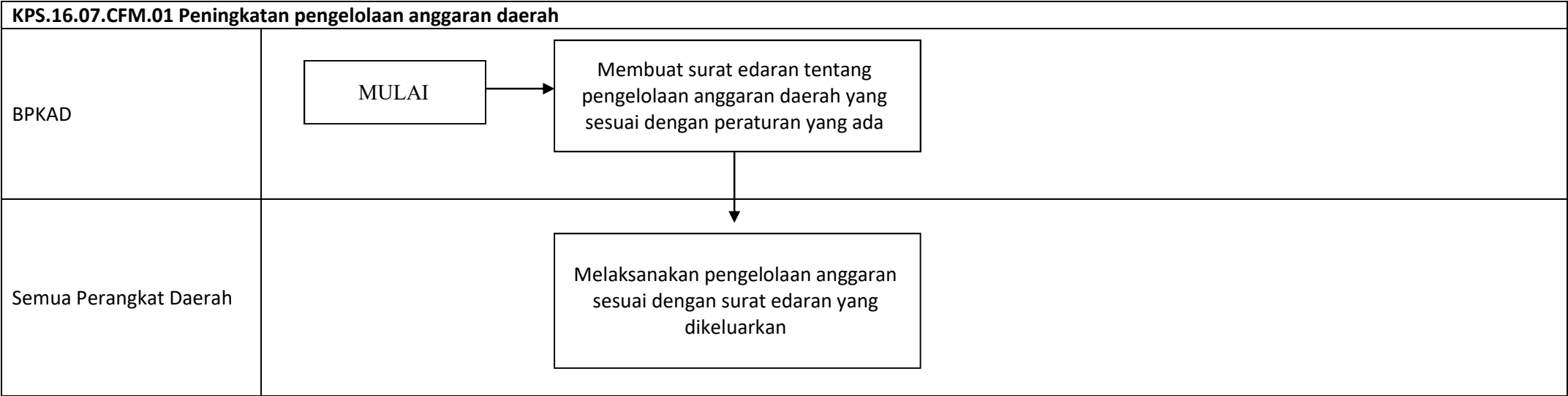
PETA RELASI

KPS.16.06

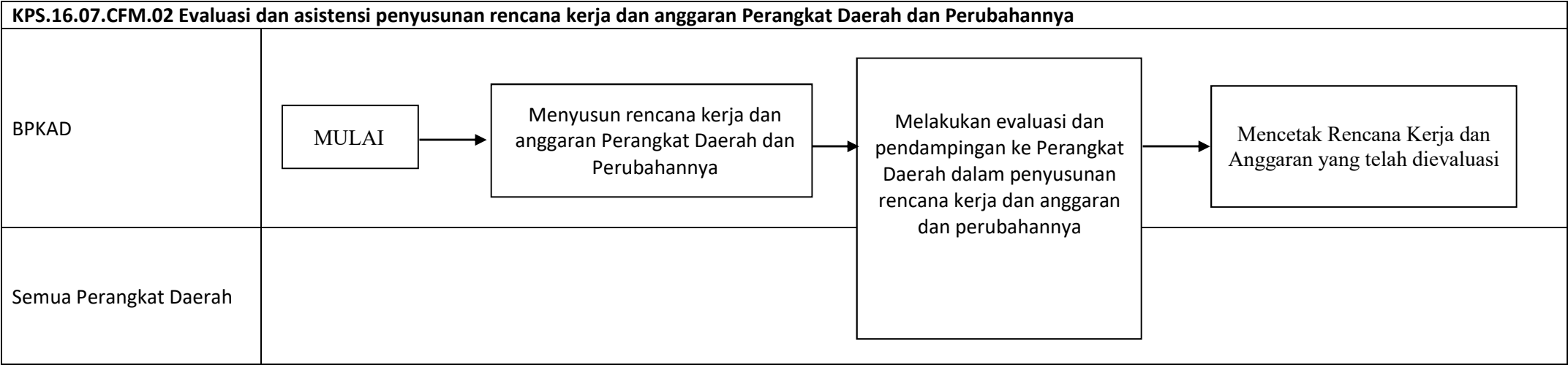
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

KPS.16.06.CFM.01 Pemberian Bantuan dan Beasiswa Bibit Unggul Daerah	KPS.16.06.CFM.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1. LEMBAGA DKLAT 2. ASN / Pegawai PNS 3. Inspektorat Daerah	4. BPKP / LEMBAGA DKLAT 5. ASN / Pegawai PNS 6. Inspektorat Daerah

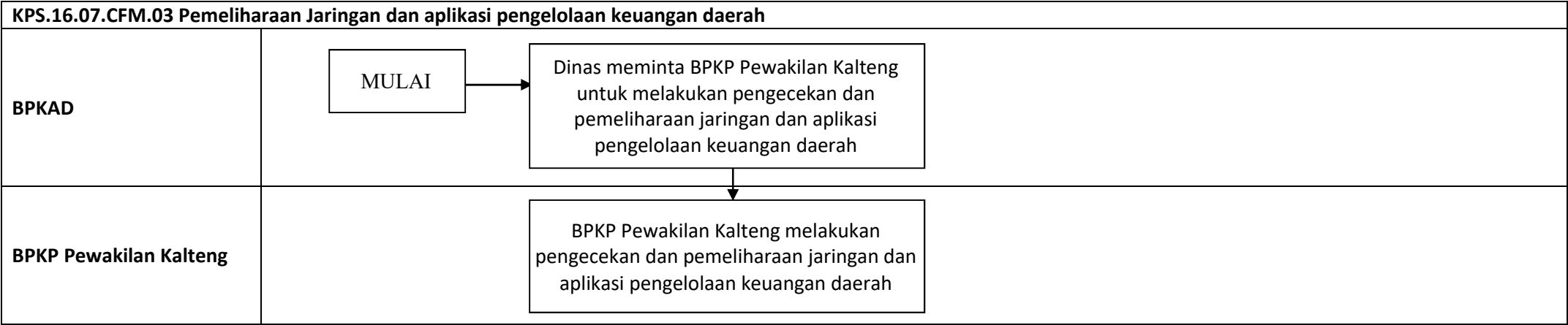
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI

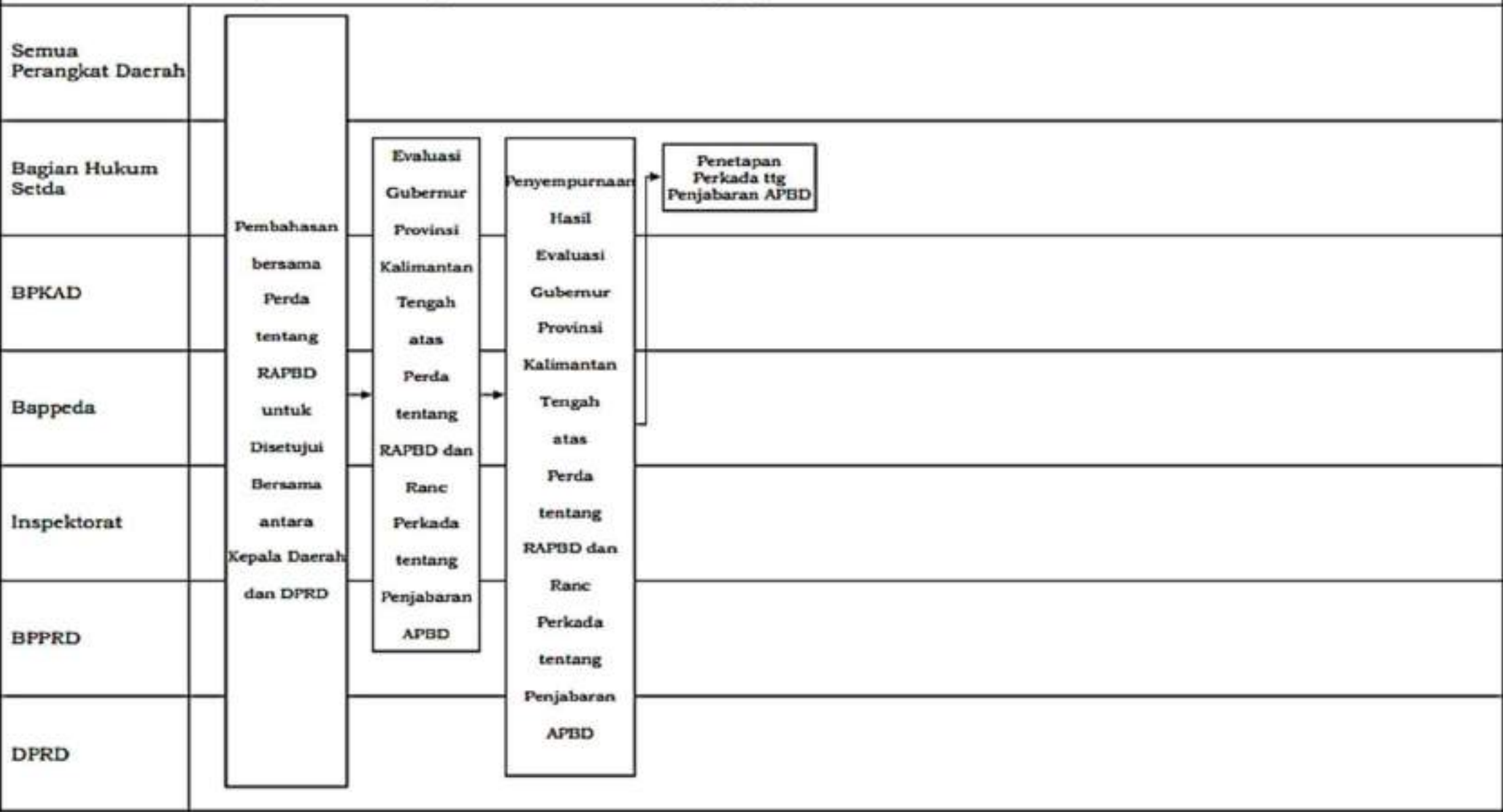


KPS.16.07.CFM.04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD



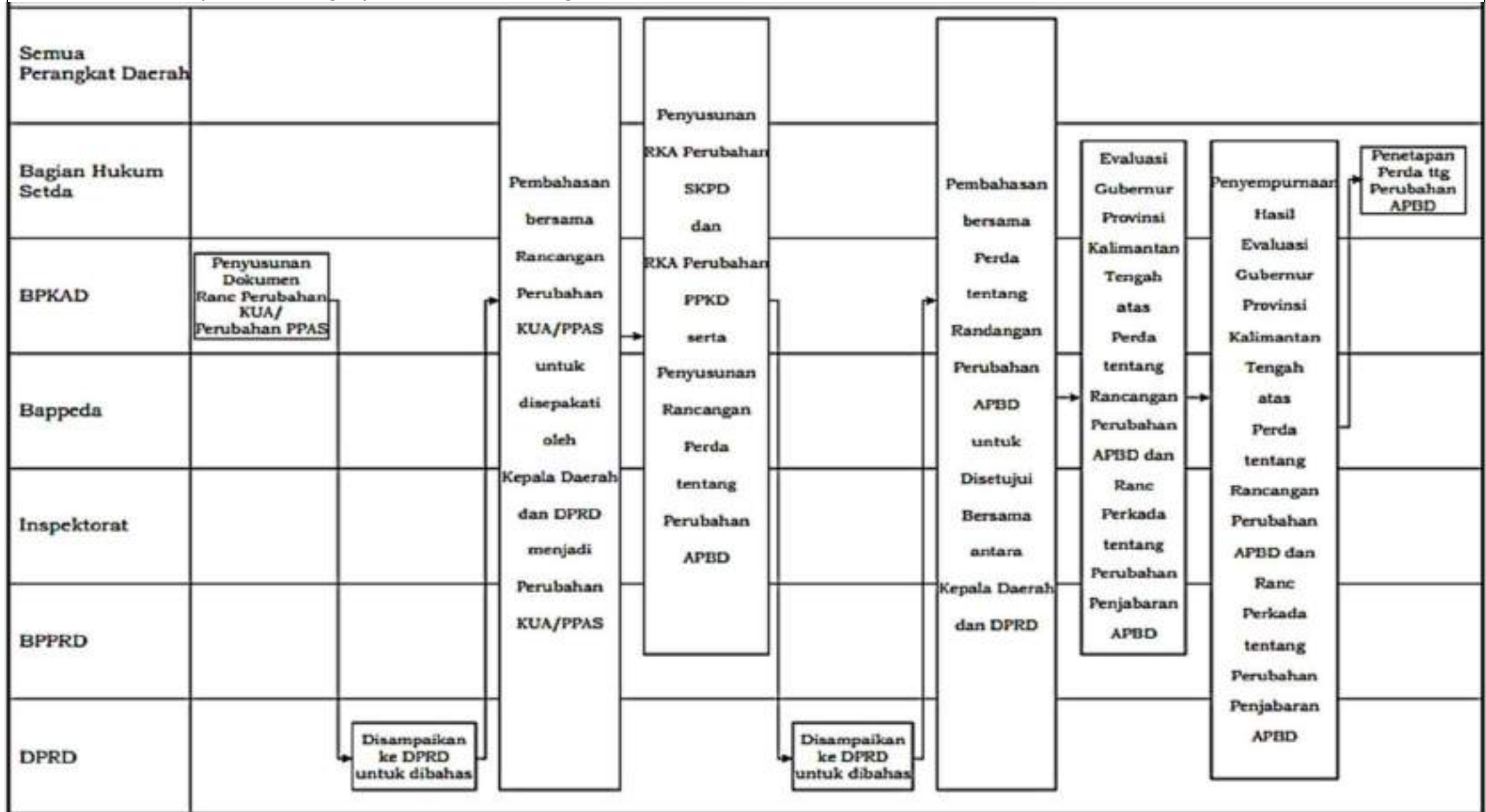
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD



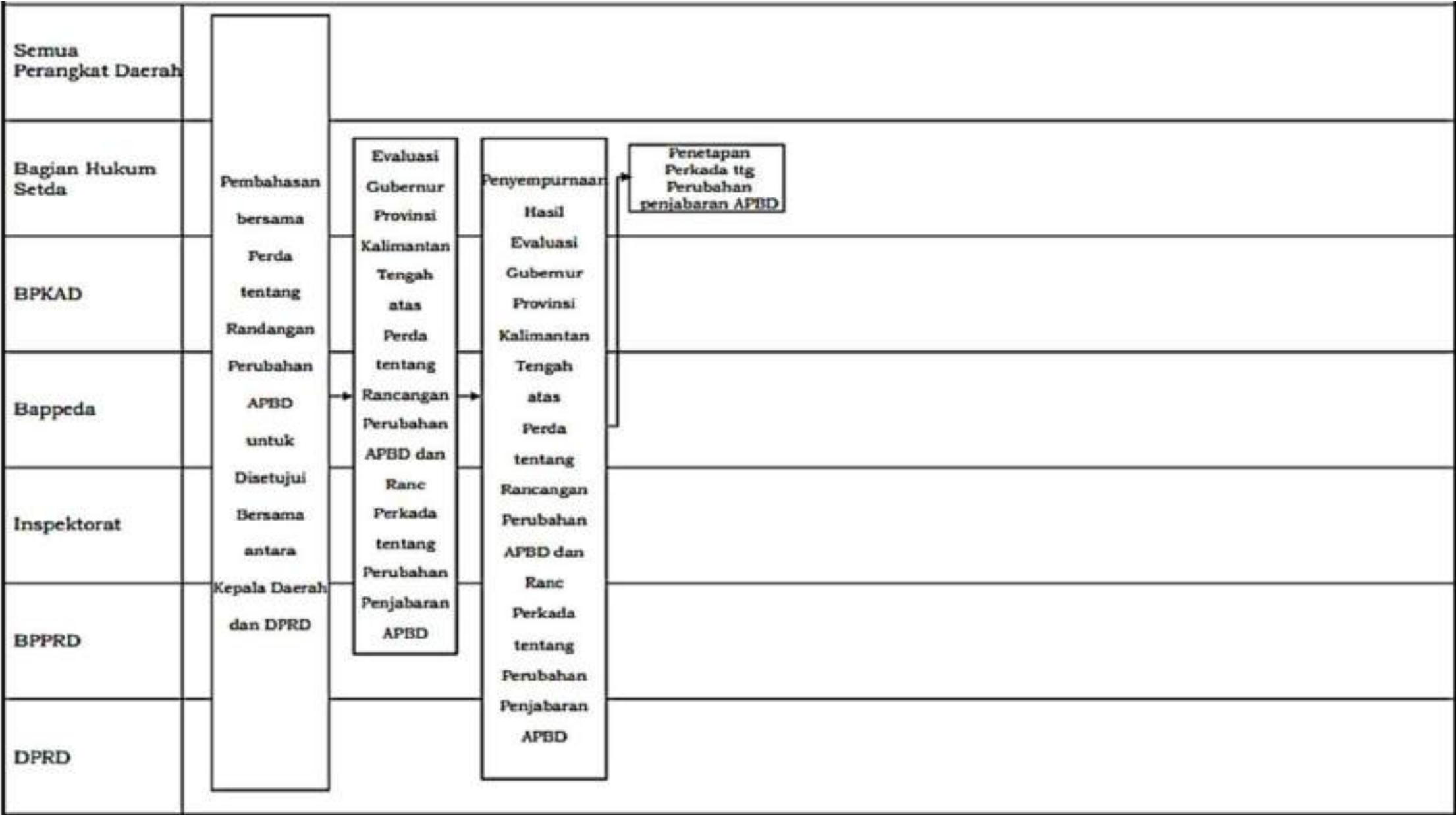
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.16.07.CFM.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

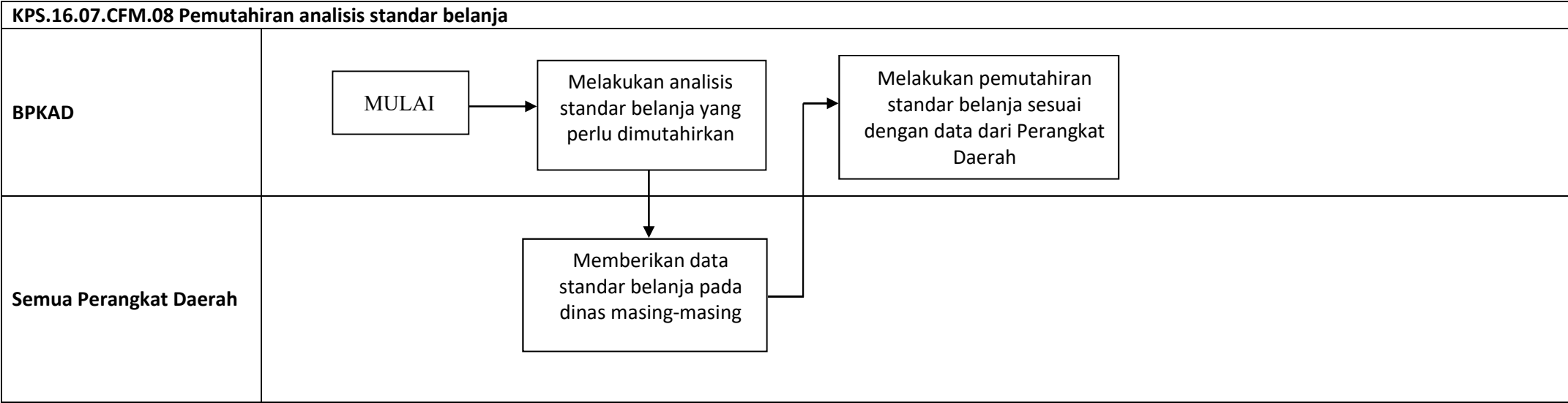


PETA LINTAS FUNGSI

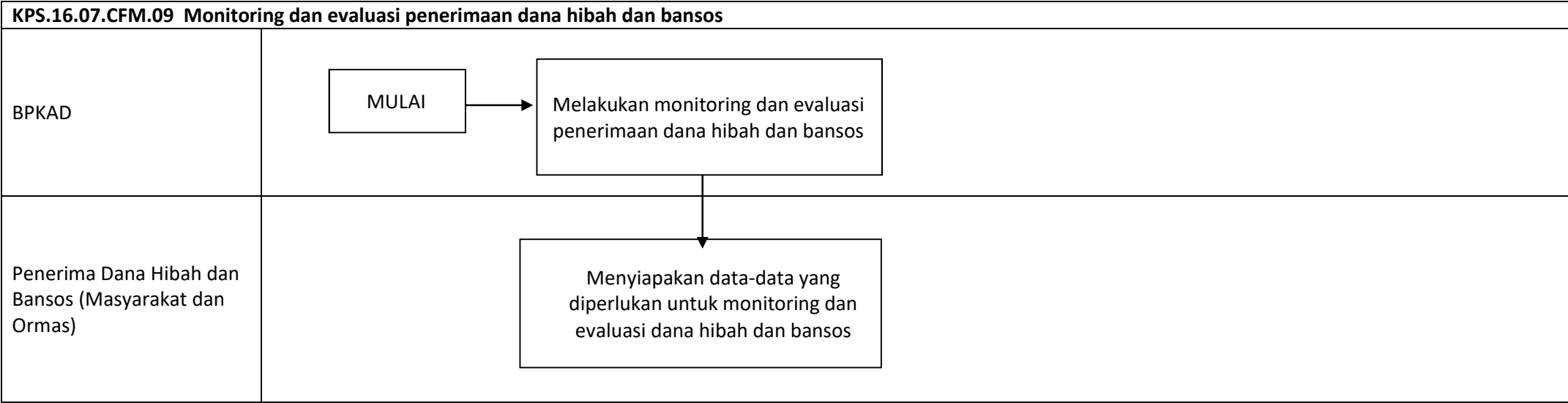
KPS.16.07.CFM.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD



PETA LINTAS FUNGSI



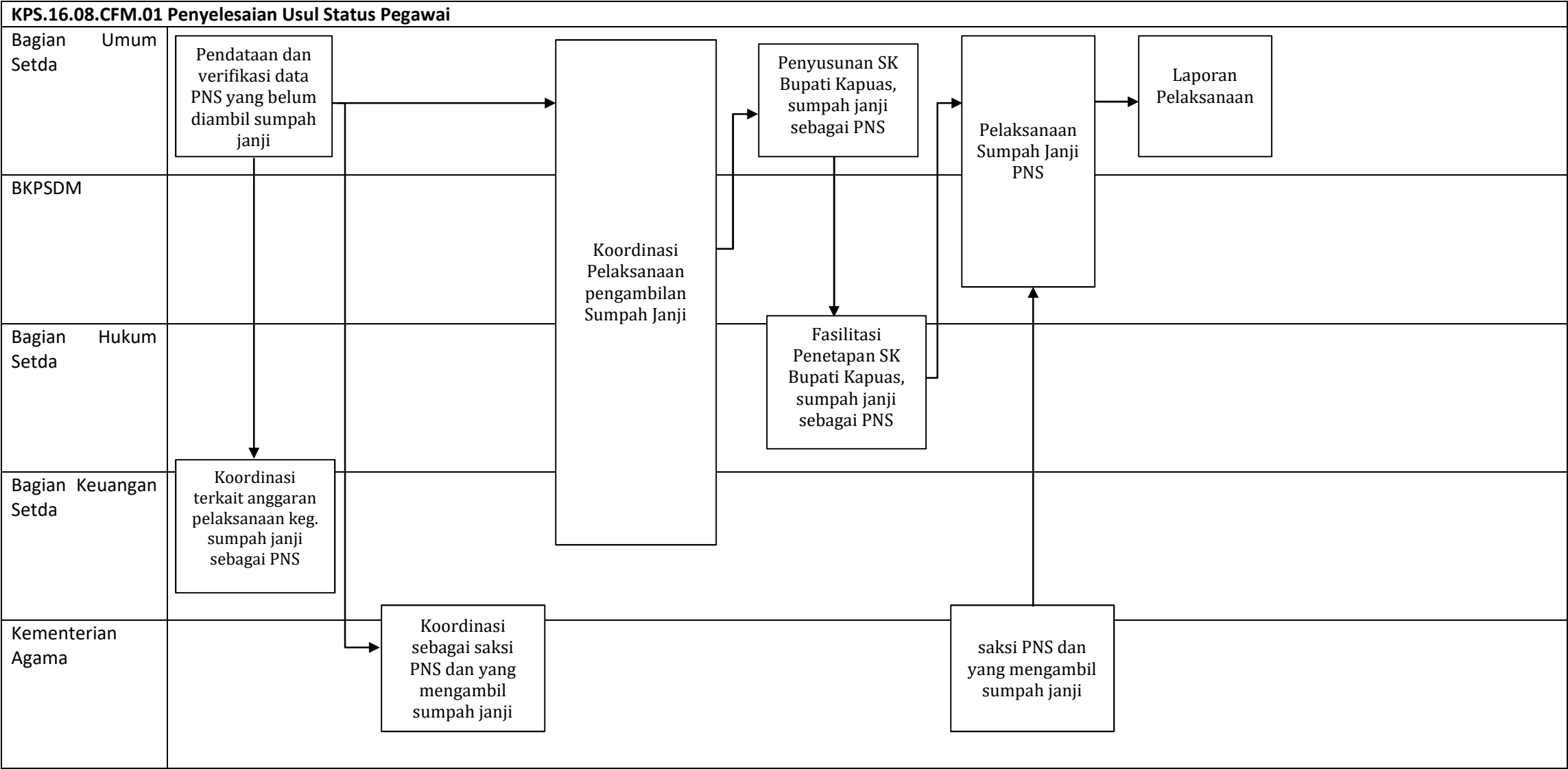
PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.16.07 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah				
KPS.16.07.CFM.01 Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	KPS.16.07.CFM.02 Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Perubahannya	KPS.16.07.CFM.03 Pemeliharaan jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	KPS.16.07.CFM.04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	KPS.16.07.CFM.05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1. BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah	1. BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah	1. BPKAD 2. BPKP Perwakilan Kalteng	1. Semua Perangkat Daerah 2. Bagian Hukum Setda 3. BPKAD 4. BAPPEDA 5. Inspektorat 6. BPPRD 7. DPRD	1. Semua Perangkat Daerah 2. Bagian Hukum Setda 3. BPKAD 4. BAPPEDA 5. Inspektorat 6. BPPRD 7. DPRD
KPS.16.07.CFM.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	KPS.16.07.CFM.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	KPS.16.07.CFM.08 Pemutahiran analisis standar belanja	KPS.16.07.CFM.09 Monitoring dan evaluasi penerimaan dana hibah dan bansos	
1. Semua Perangkat Daerah 2. Bagian Hukum Setda 3. BPKAD 4. BAPPEDA 5. Inspektorat 6. BPPRD 7. DPRD	1. Semua Perangkat Daerah 2. Bagian Hukum Setda 3. BPKAD 4. BAPPEDA 5. Inspektorat 6. BPPRD 7. DPRD	1. BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah	1. BPKAD 2. Penerima Dana Hibah dan Bansos	

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

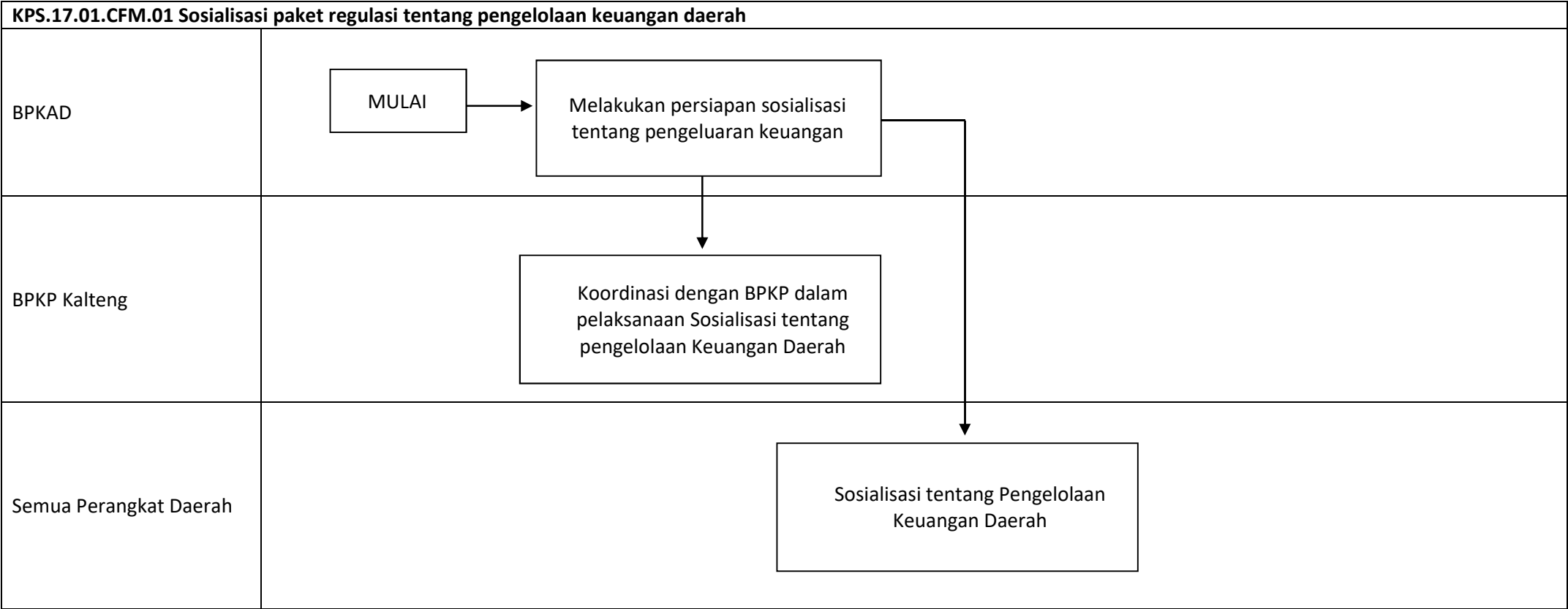
KPS.16.08

Pembinaan dan Pengembangan aparatur

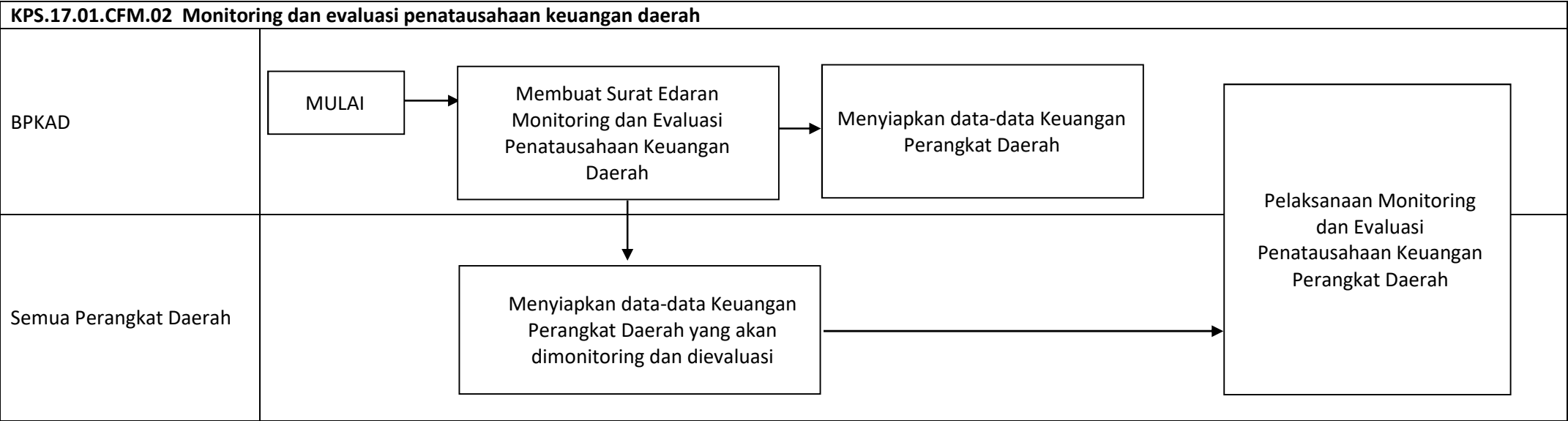
KPS.16.08.CFM.01 Penyelesaian Usul Status Pegawai
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bagian Umum Setda2. BKPSDM3. Bagian Hukum Setda4. Bagian Keuangan Setda5. Kementerian Agama |
|--|

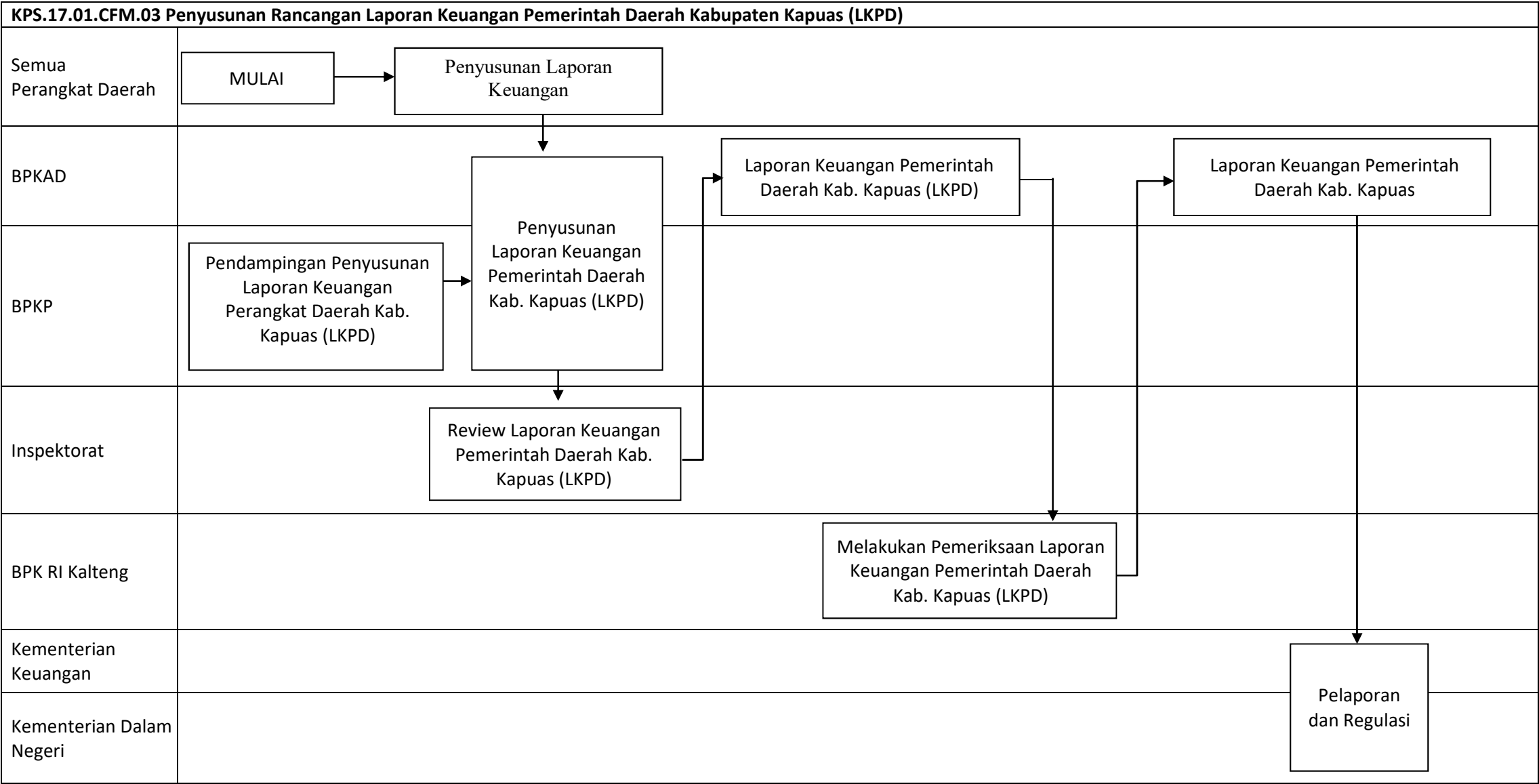
PETA LINTAS FUNGSI



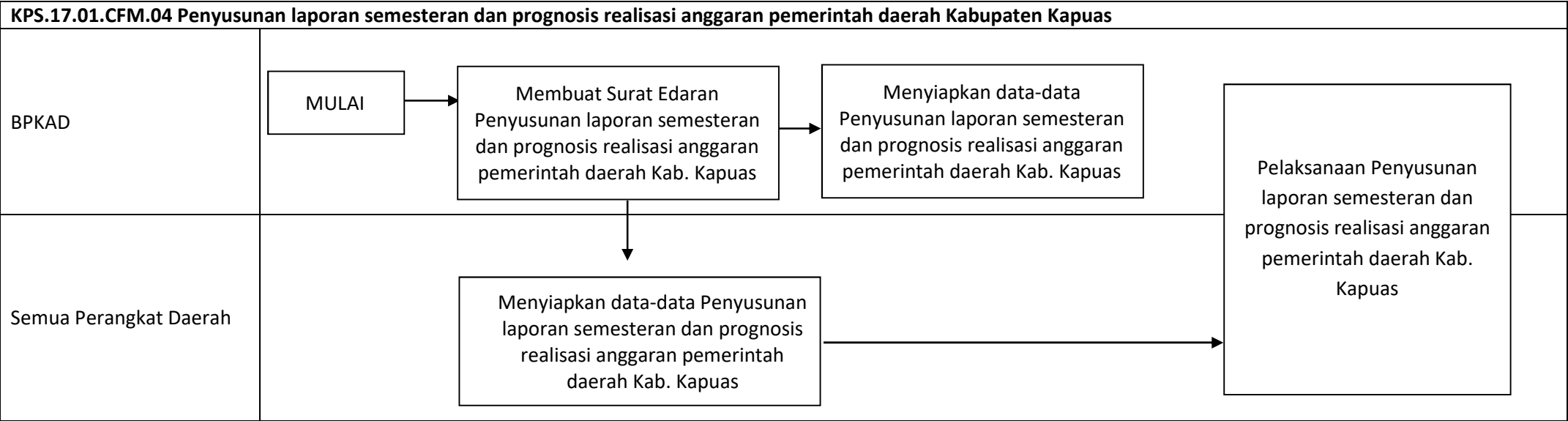
PETA LINTAS FUNGSI



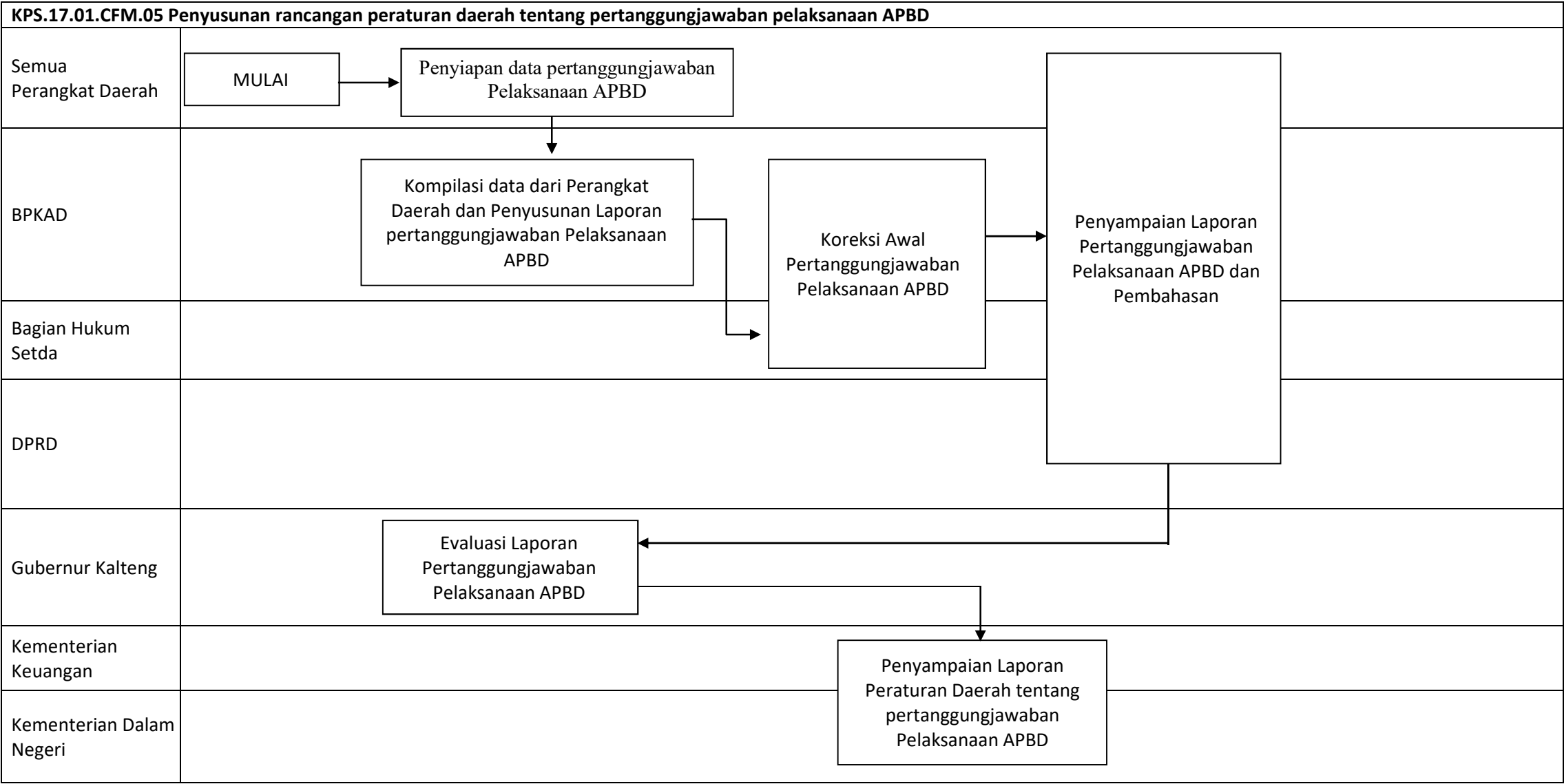
PETA LINTAS FUNGSI



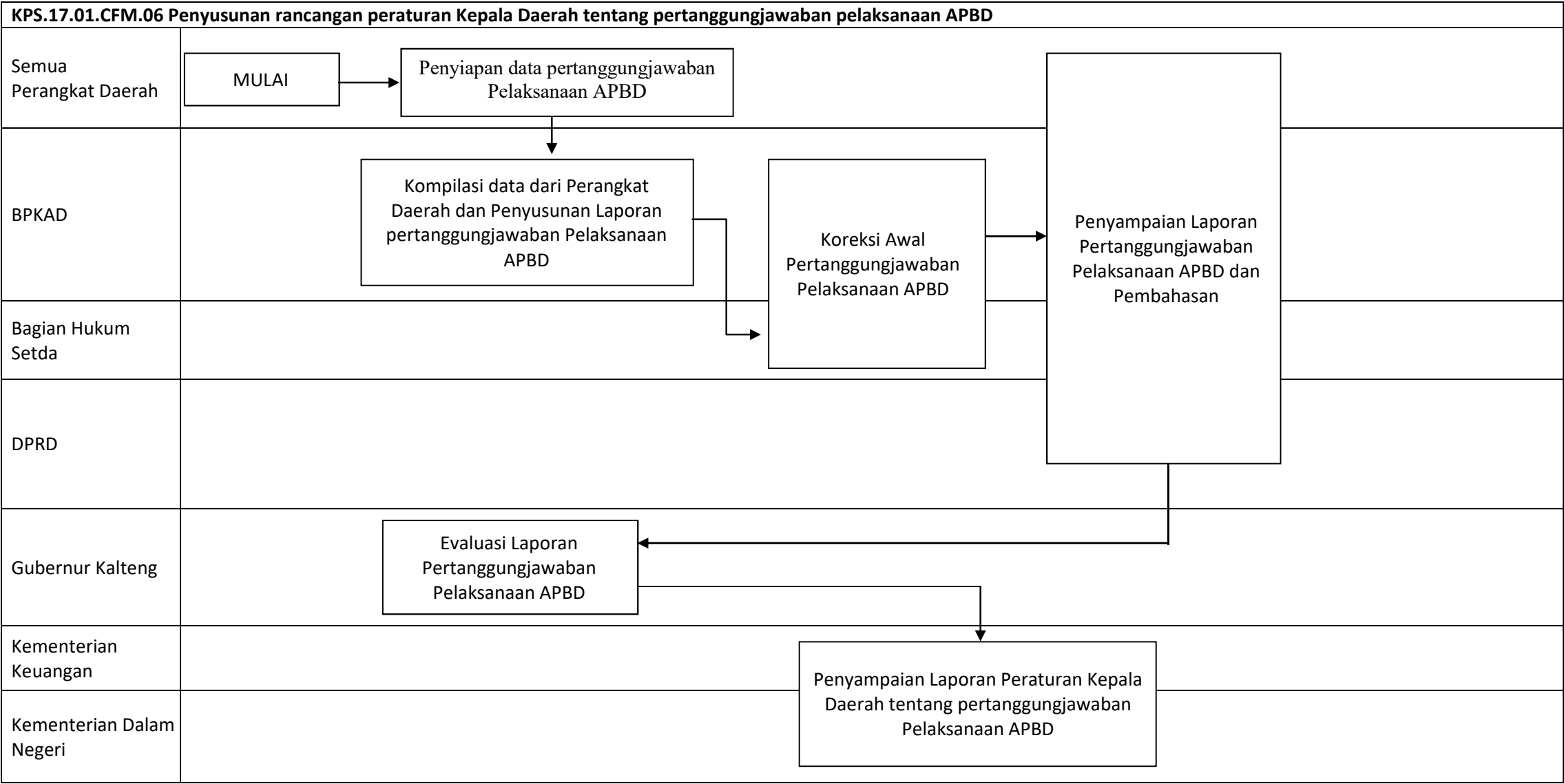
PETA LINTAS FUNGSI



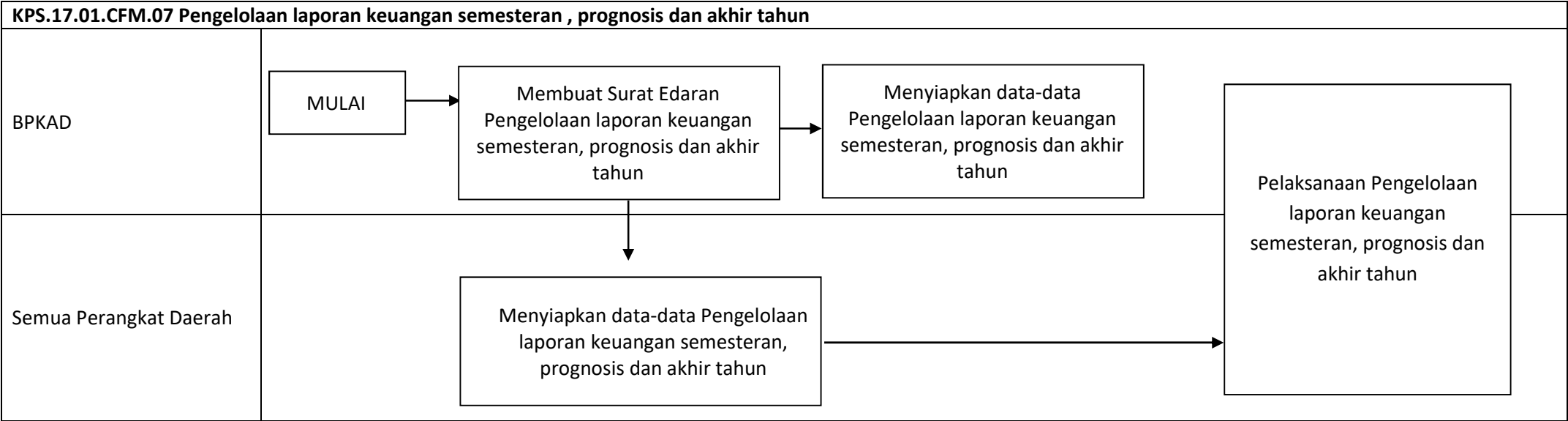
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



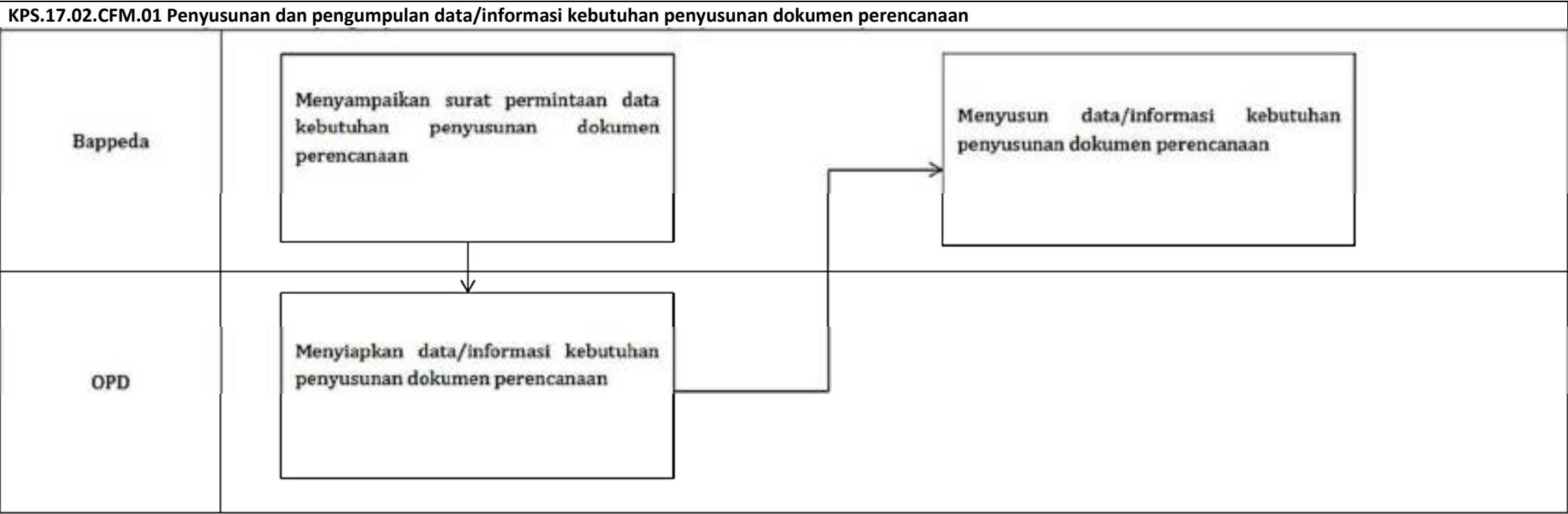
PETA RELASI

KPS.17.01

Peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah

KPS.17.01.CFM.01 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	KPS.17.01.CFM.02 Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah	KPS.17.01.CFM.03 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)	KPS.17.01.CFM.04 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kapuas	KPS.17.01.CFM.05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. BPKAD 2. BPKP Kalteng 3. Semua Perangkat Daerah	1. BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah	1. Semua Perangkat Daerah 2. BPKAD 3. BPKP 4. Inspektorat 5. BPK RI Kalteng 6. Kementerian Keuangan 7. Kementerian Dalam Negeri	1. BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah	1. Semua Perangkat Daerah 2. BPKAD 3. Bagian Hukum Setda 4. DPRD 5. Gubernur Kalteng 6. Kementerian Keuangan 7. Kementerian Dalam Negeri
KPS.17.01.CFM.06 Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	KPS.17.01.CFM.07 Pengelolaan laporan keuangan semesteran , prognosis dan akhir tahun			
1. Semua Perangkat Daerah 2. BPKAD 3. Bagian Hukum Setda 4. DPRD 5. Gubernur Kalteng 6. Kementerian Keuangan 7. Kementerian Dalam Negeri	1. BPKAD 2. Semua Perangkat Daerah			

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.17.02

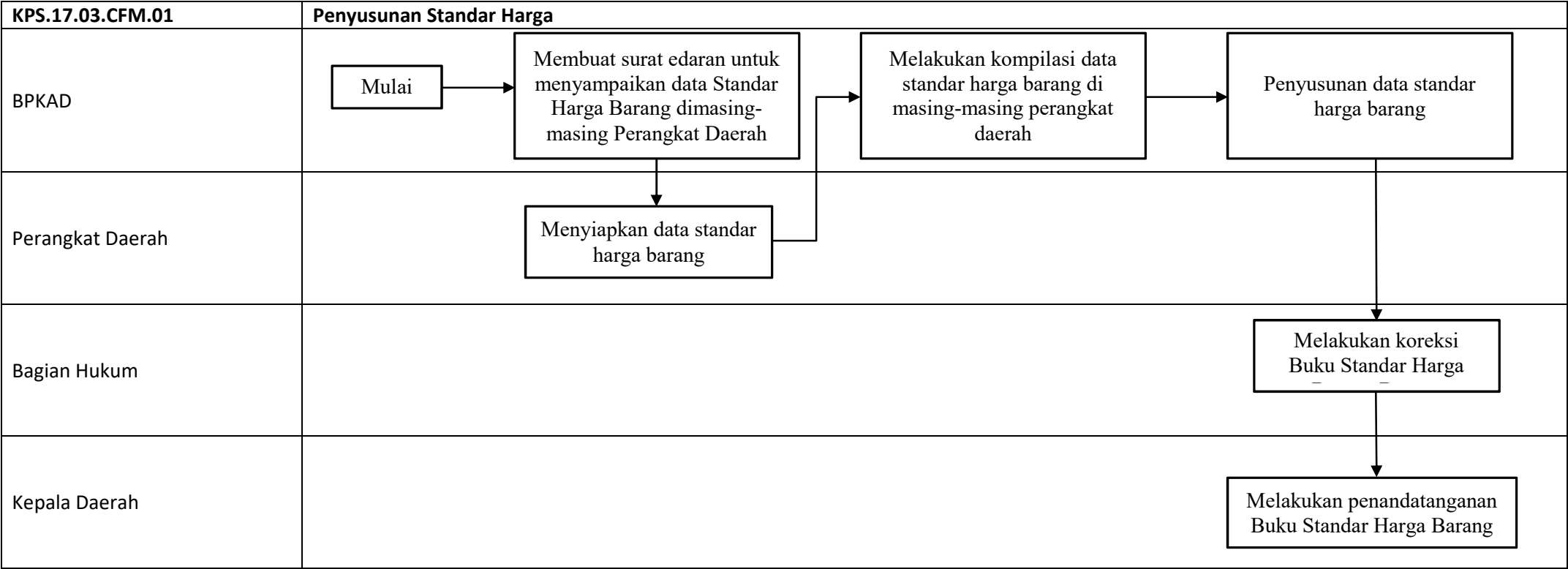
Pembangunan Data/Informasi

KPS.17.02.CFM.01

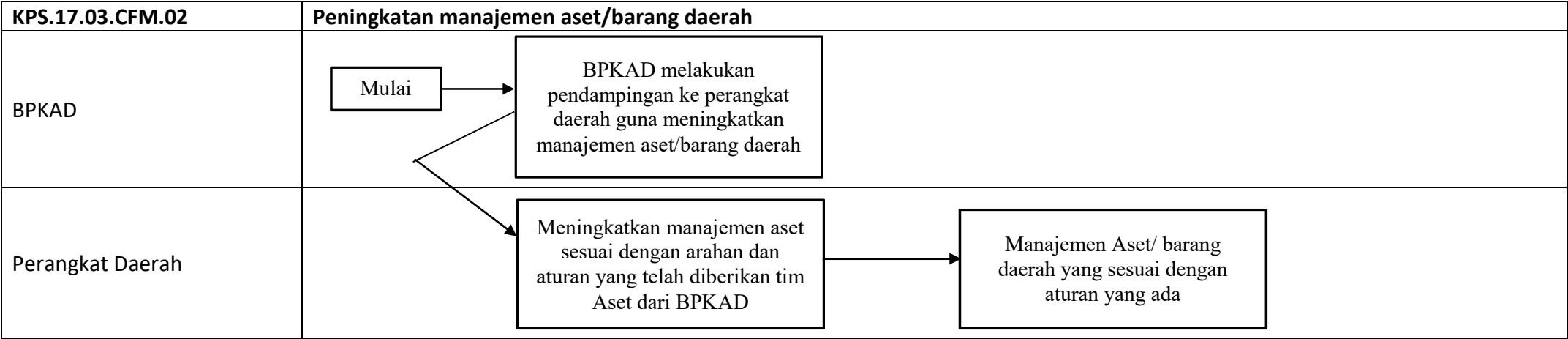
Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan

1. Bappeda
2. OPD (Organisasi
Perangkat Daerah)

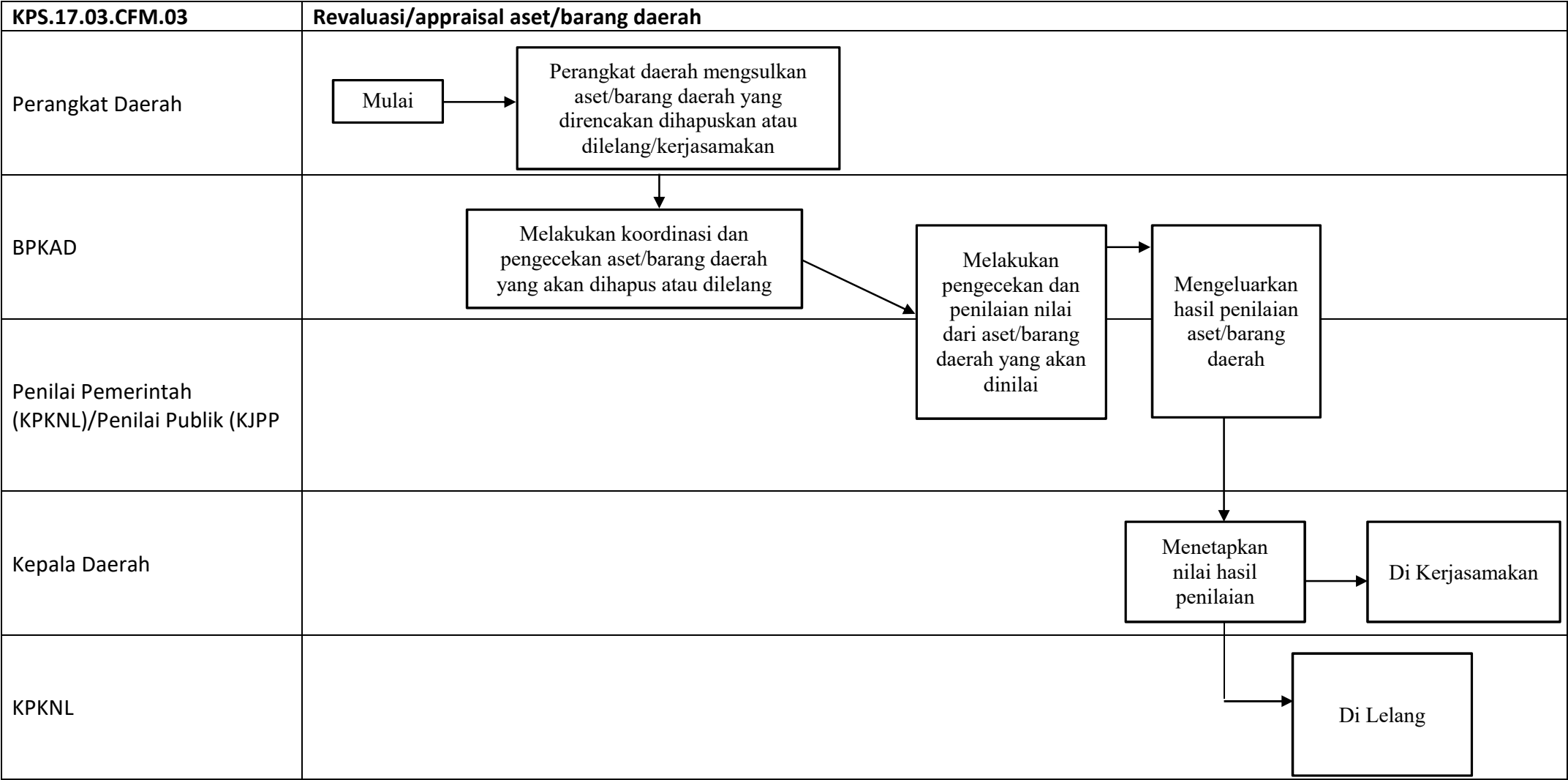
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



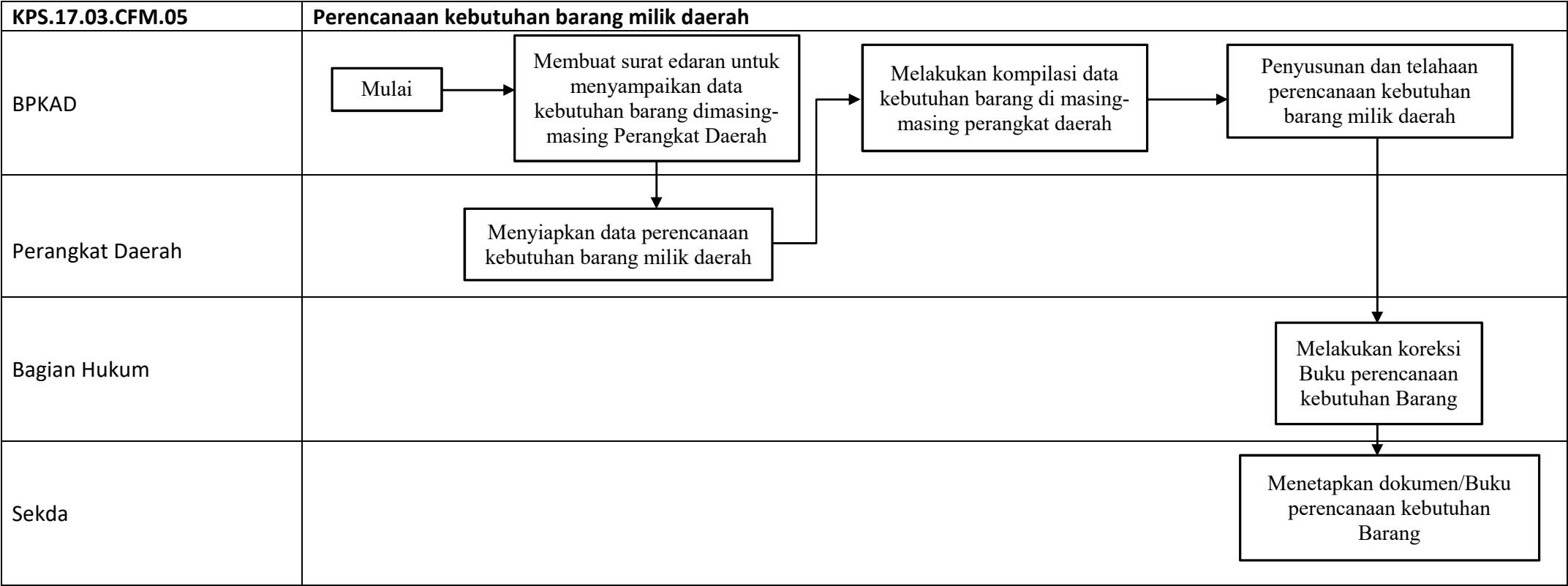
PETA LINTAS FUNGSI



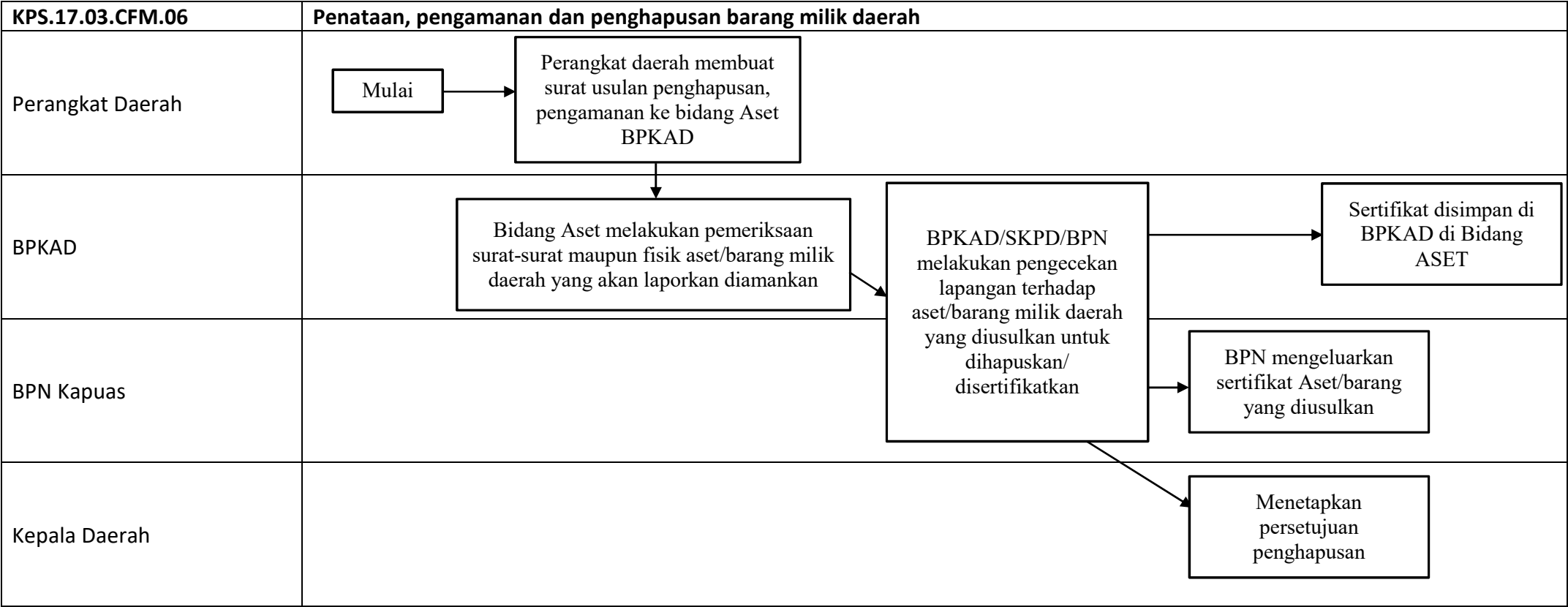
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.04	Penyusunan sistem informasi barang milik daerah	
Perangkat Daerah	Mulai → Melakukan penginputan data aset/barang perangkat daerah ke sistem aplikasi barang	
BPKAD	↓ Melakukan koreksi/pengecekan hasil inputan data aset/barang perangkat daerah ke sistem aplikasi barang	

PETA LINTAS FUNGSI



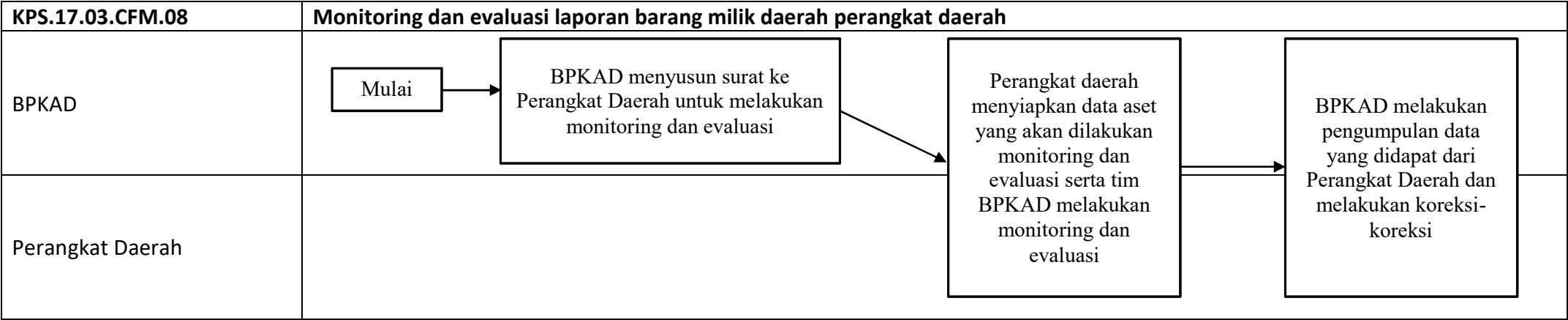
PETA LINTAS FUNGSI



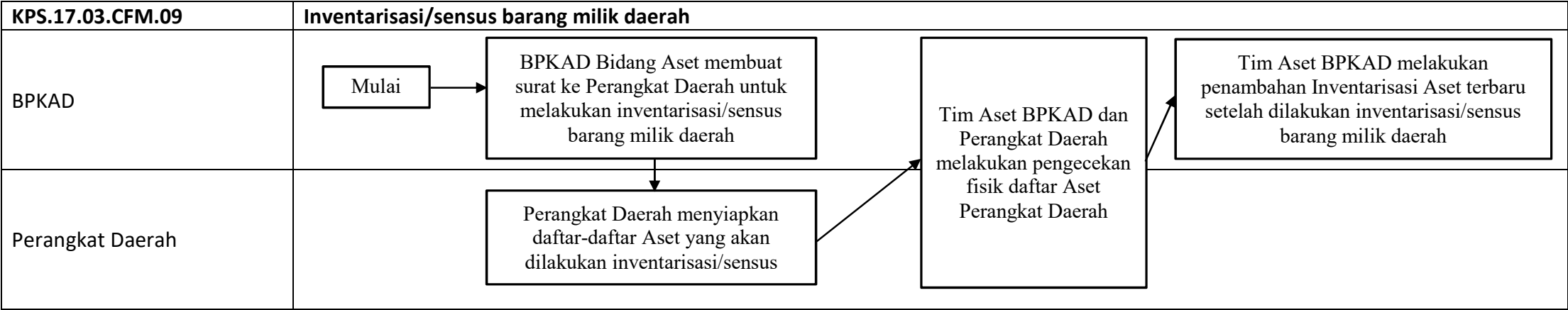
PETA LINTAS FUNGSI

KPS.17.03.CFM.07	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
BPKAD	Mulai BPKAD Bidang Aset menginventarisasi barang milik daerah yang akan ditata, dimanfaatkan di perangkat daerah BPKAD Bidang Aset dan Perangkat Daerah melakukan pengecekan barang milik daerah yang akan ditata, dimanfaatkan penggunaan guna menambah PAD		
Perangkat Daerah			

PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



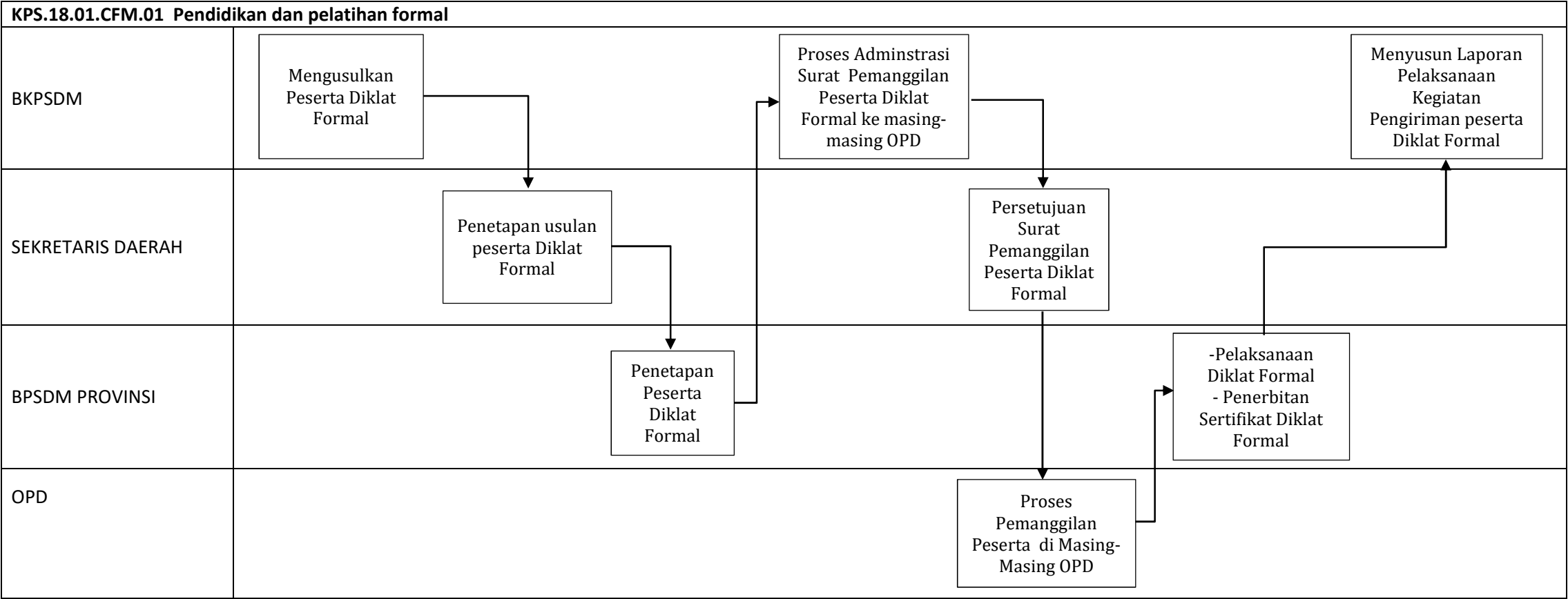
PETA RELASI

KPS.17.03

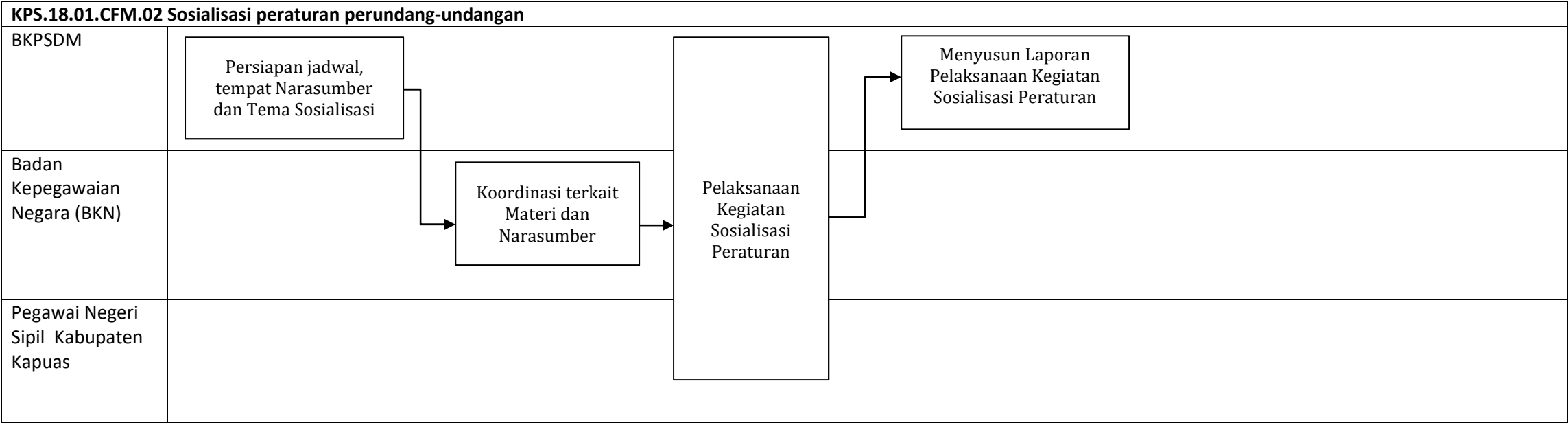
Pengelolaan aset pemerintah daerah

KPS.17.03.CFM.01 Penyusunan standar barang	KPS.17.03.CFM.02 Peningkatan manajemen aset/barang daerah	KPS.17.03.CFM.03 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	KPS.17.03.CFM.04 Penyusunan sistem informasi barang daerah	KPS.17.03.CFM.05 Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
1. BPKAD 2. Perangkat Daerah 3. Bagian Hukum Setda 4. Kepala Daerah	1. BPKAD 2. Perangkat Daerah	1. Perangkat Daerah 2. BPKAD 3. Penilai Pemerintah (KPKNL)/Penilai Publik (KJPP) 4. Kepala Daerah 5. KPKNL	1. Perangkat Daerah 2. BPKAD	1. BPKAD 2. Perangkat Daerah 3. Bagian Hukum Setda 4. Sekretaris Daerah
KPS.17.03.CFM.06 Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	KPS.17.03.CFM.07 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	KPS.17.03.CFM.08 Monitoring dan evaluasi laporan barang milik daerah perangkat daerah	KPS.17.03.CFM.09 nventarisasi/sensus barang milik daerah	
1. Perangkat Daerah 2. BPKAD 3. BPN Kapuas 4. Kepala Daerah	1. BPKAD 2. Perangkat Daerah	1. BPKAD 2. Perangkat Daerah	1. BPKAD 2. Perangkat Daerah	

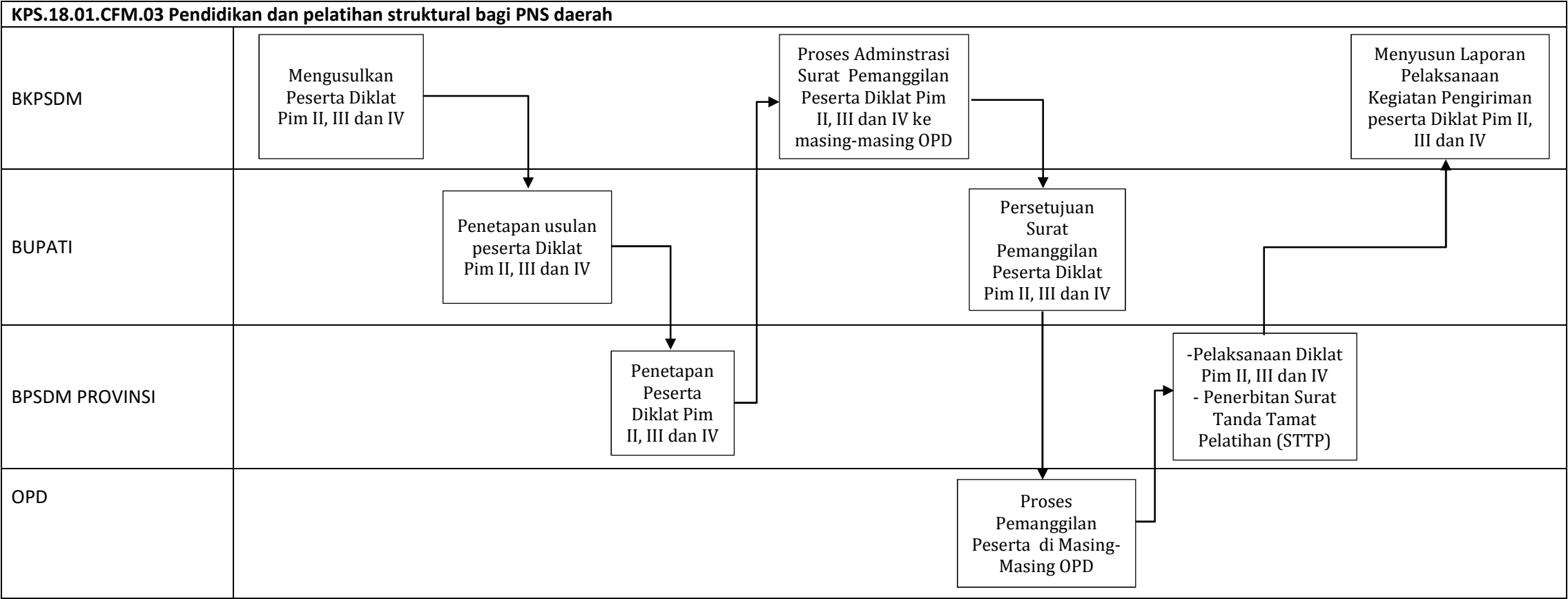
PETA LINTAS FUNGSI



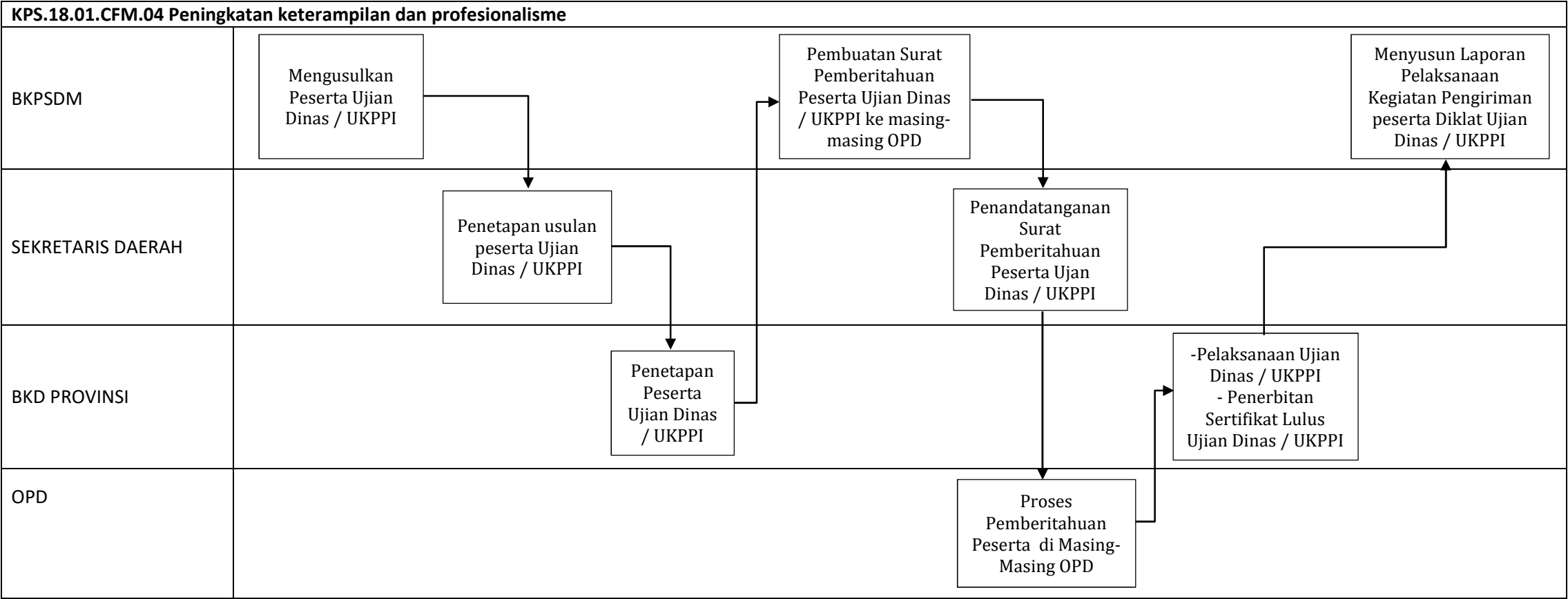
PETA LINTAS FUNGSI



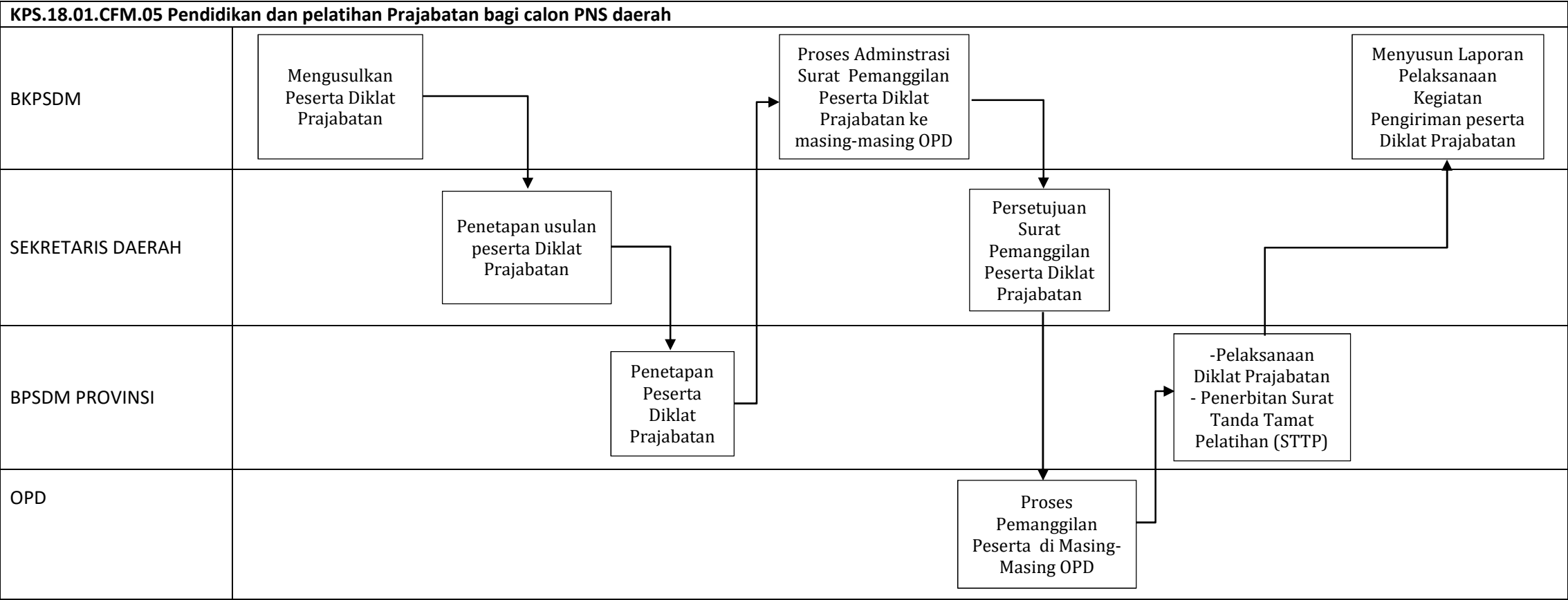
PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI



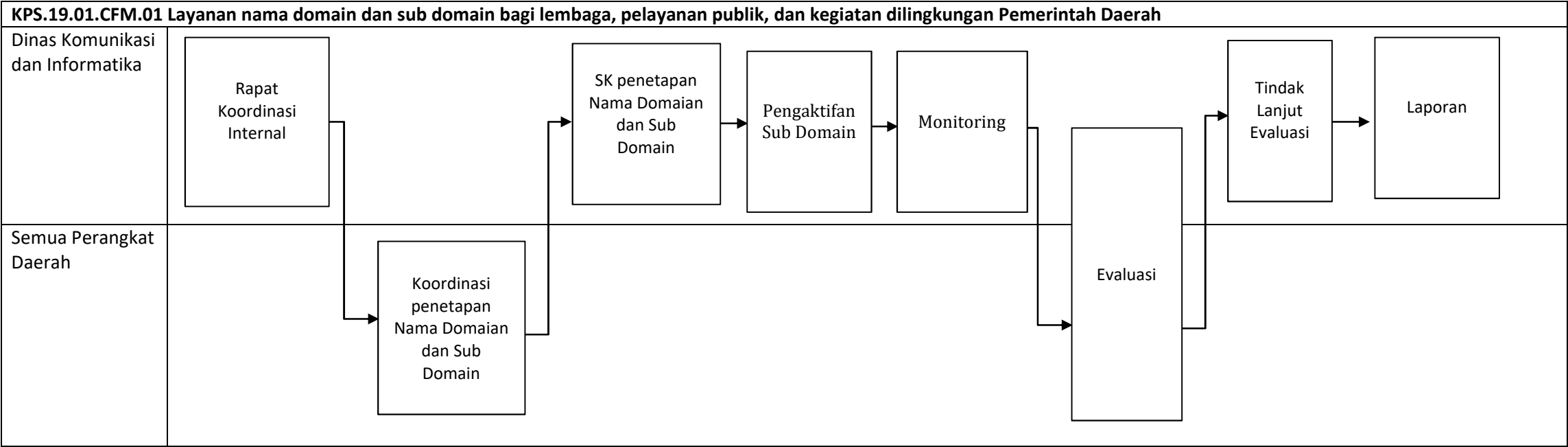
PETA RELASI

KPS.18.01

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

KPS.18.01.CFM.01 Pendidikan dan pelatihan formal	KPS.18.01.CFM.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	KPS.18.01.CFM.03 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	KPS.18.01.CFM.04 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	KPS.18.01.CFM.05 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS daerah
1. BKPSDM 2. Sekretaris Daerah 3. BPSDM Provinsi 4. OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	1. BKPSDM 2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 3. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	1. BKPSDM 2. Bupati 3. BPSDM Provinsi 4. OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	1. BKPSDM 2. Sekretaris Daerah 3. BKD Provinsi 4. OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	1. BKPSDM 2. Sekretaris Daerah 3. BPSDM Provinsi 4. OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.19.01

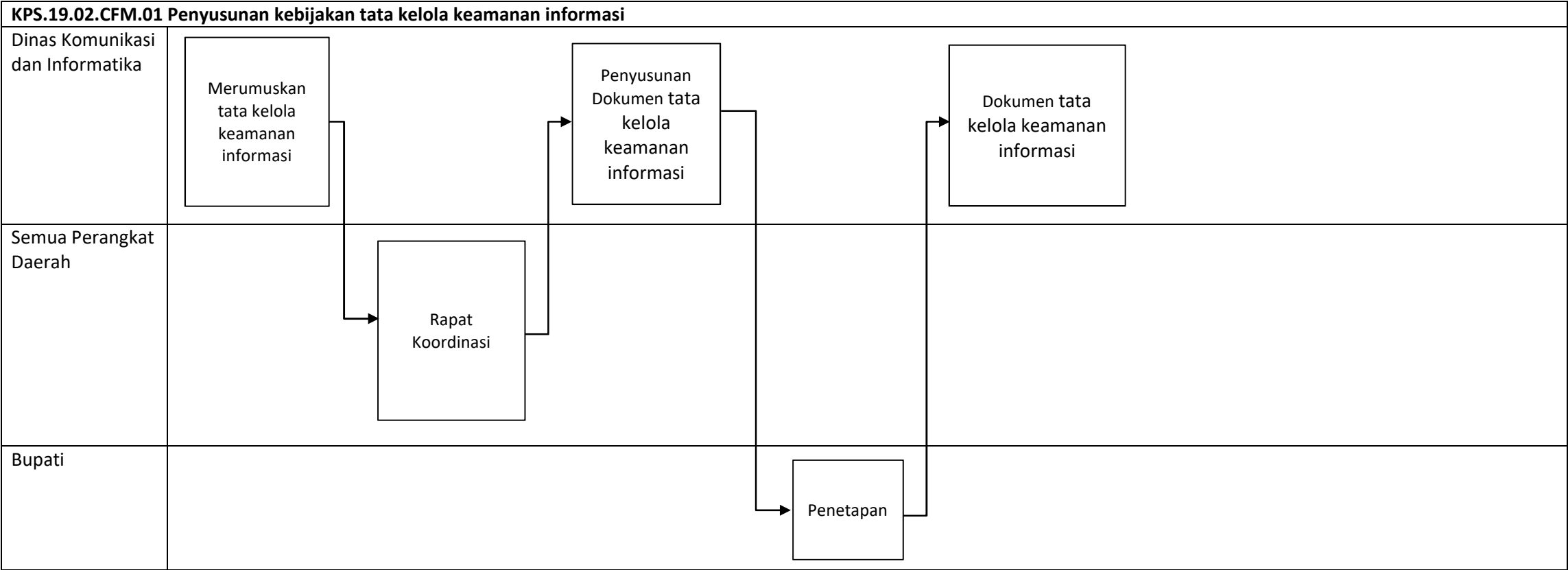
Pengelolaan Aplikasi Informatika

KPS.19.01.CFM.01

Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Semua Perangkat Daerah

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.19.02

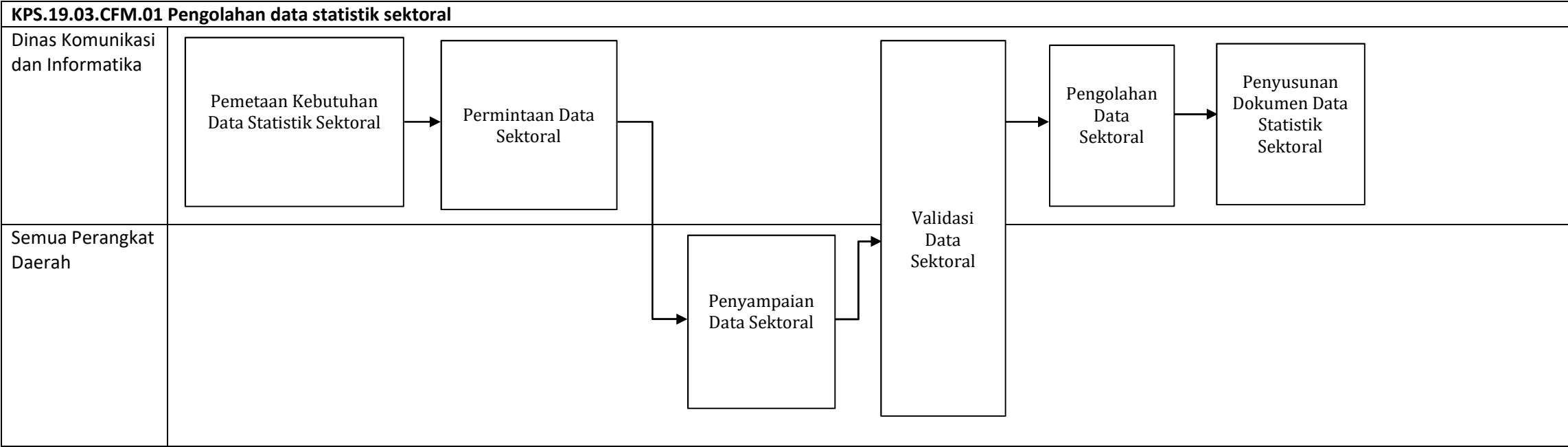
Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Daerah

KPS.19.02.CFM.01

**Penyusunan kebijakan tata
kelola keamanan informasi**

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Semua Perangkat Daerah
3. Bupati

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

KPS.19.03
Penyelenggaraan Statistik Sektoral

KPS.19.03.CFM.01
Pengolahan data statistik
sektoral

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Semua Perangkat Daerah

 **BUPATI KAPUAS,**

BEN BRAHIM S. BAHAT